PENERBIT INDONESIA IMAJI

Editor :
Mir'atun Nur Arifah
Moh. Mizan Habibi

Cover by :
Langgeng Nur Santoso

Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam

Studi Pemikiran, Konsep, dan Pengalaman Baik

Ahmad Zubaidi • Burhan Nudin • Edi Safitri • Junanah
Kurniawan Dwi Saputra • Mir'atun Nur Arifah
Moh. Mizan Habibi • M. Joko Susilo • M. Nurul Ikhsan Saleh
Nanang Nuryanta • Siska Sulistyorini • Siti Afifah Adawiyah
Sri Haningsih

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

IMAJINASI DAN REFLEKSI KRITIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Studi Pemikiran, Konsep, & Pengalaman Baik

Penulis:

Ahmad Zubaidi
Burhan Nudin
Edi Safitri
Junanah
Kurniawan Dwi Saputra
Mir'atun Nur Arifah
Moh. Mizan Habibi
Mohamad Joko Susilo
M Nurul Ikhsan Saleh
Nanang Nuryanta
Siska Sulistyorini
Siti Afifah Adawiyah
Sri Haningsih

Editor:

Mir'atun Nur Arifah
Moh. Mizan Habibi

Penerbit Indonesia Imaji
2022

IMAJINASI DAN REFLEKSI KRITIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Penulis:

Ahmad Zubaidi
Burhan Nudin
Edi Safitri
Junanah
Kurniawan Dwi Saputra
Mir'atun Nur Arifah
Moh. Mizan Habibi
Mohamad Joko Susilo
M Nurul Ikhsan Saleh
Nanang Nuryanta
Siska Sulistyorini
Siti Afifah Adawiyah
Sri Haningsih

Editor:
Mir'atun Nur Arifah
Moh. Mizan Habibi

Cover by:
Langgeng Nur Santoso

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Indonesia Imaji

Alamat:
CV INDONESIA IMAJI
Jalan Kedunglurah-Ngadirejo,
Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Trenggalek (66371)

Email: bukuimaji@gmail.com
Twitter dan Instagram: @Indonesiaimaji
Website: www.indonesiaimaji.com
Telp: 0859-4297-9521

Cetakan pertama, September 2022.
ISBN: 978-623-88022-3-4
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR EDITOR

Buah karya yang sedang dinikmati bersama ini merupakan publikasi kedua secara kolektif para pemikir, peneliti, dan pengajar pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Jika sebelumnya, bacaan tentang konstruksi pemikiran yang terangkai dalam tema "Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan dan Mondialitas; Peran dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi" disajikan untuk merespon isu-isu aktual (khususnya, pendidikan Islam) dengan menempatkan Islam dan keindonesiaan sebagai landasan nilai, dan mondialitas sebagai basis untuk menjulangkan inovasi dan melebatkan manfaat. Maka, kumpulan gagasan yang kedua ini lebih condong mendalami ulang dan merekonstruksi pemikiran, konsep, dan pengalaman baik untuk proses keberlanjutan praktik pendidikan Islam yang dihadapkan pada isu-isu kontemporer.

Pendidikan Islam sudah semestinya adaptif dan responsif terhadap perkembangan wacana dan perubahan cara hidup masa kini. Karena hakikat pendidikan adalah media transformasi individu maupun masyarakat secara kolektif. Pengelolaan pendidikan Islam yang berhasil keluar dari *status quo* akan berdampak pada penguasan kompetensi pembelajarnya.

Saat ini, wacana yang masif dibincangkan dan diterapkan dalam praktik pendidikan Islam kecenderungan bermuara pada pengembangan perspektif dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa isu kemerdekaan belajar dan gegap gempitanya pembelajaran dalam jaringan (daring) menjadi titik tolak progesivitas cara padang. Di sisi lain, manusia, pada umumnya, dan masyarakat pendidikan Islam, pada khususnya, juga dihadapkan pada gaya hidup yang serba dinamis. Oleh karenanya, relevan jika proses refleksi kritis atas pengalaman praktik pendidikan Islam yang sudah lampau dan imajinasi terhadap pengembangannya terus menjadi perhatian.

Buku ini hadir dalam rangka menyusun ikhtiar sederhana dengan mengurai pemikiran, konsep, dan pengalaman baik, yang selanjutnya dikontekstualisasikan untuk pengembangan Pendidikan Islam. Ragam perspektif dielaborasikan sesuai dengan fokus kajian disiplin bidang ilmu masing-masing penulis. Setidaknya, karya ilmiah

ini menjadi wujud eksistensi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia dalam memberikan perhatian yang mendalam atas dialektika dan isu aktual yang berkembang di dalam masyarakat global.

Semoga semua bagian dari buku ini menjadi sumber pengetahuan dan pemantik menbar seluas-luasnya manfaat. Amin.

Tim Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

MODEL PENDIDIKAN CONSCIENTIZATION PAULO FREIRE RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA

Edi Safitri 1

MANAJEMEN STRES, FRUSTASI, KEJENUHAN MAHASISWA SELAMA PEMBELAJARAN DARING

Junanah 25

SONGSONG PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA: MEMBANGUN BRANDING MODERN AND TECHNOEDUPRENEURSHIP SCHOOL

Mohamad Joko Susilo 47

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM TINJAUAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI

Moh. Mizan Habibi 71

TEORI-TEORI IMPLEMENTASI DAN ADOPSINYA DALAM PENDIDIKAN

Siska Sulistyorini 89

MENEGUHKAN PENDIDIKAN ISLAM YANG MODERAT PERSPEKTIF HUMANISTIK RELIGIUS

Sri Haningsih 107

STRATEGI PEMBELAJARAN JARAK JAUH: A SYSTEMATIC REVIEW (Naskah Skripsi Prodi PAI UII Tahun Ajaran 2020/2021 hingga 2021/2022)

Siti Afifah Adawiyah 135

PENTINGNYA MOTIVASI DAN EFEKTIVITAS DALAM BEKERJA

Burhan Nudin **161**

LEARNING EXPERIENCE DESIGN DALAM PEMBELAJARAN PAI

Mir'atun Nur Arifah **187**

MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI ISLAM INDONESIA

M Nurul Ikhsan Saleh **209**

PENDIDIKAN HOLISTIK UNTUK MENANGGULANGI MASALAH KETERASINGAN DALAM PEMBELAJARAN DARING

Kurniawan Dwi Saputra **231**

URGENSI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Nanang Nuryanta **259**

KRITIK NALAR ARAB MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI (Membedah Epistemologi Bangsa Arab)

Ahmad Zubaidi **301**

MODEL PENDIDIKAN CONSCIENTIZATION PAULO FREIRE RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA

Edi Safitri

PENDAHULUAN

Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan yang tidak hanya fenomenal tapi juga sangat kontroversial tidak hanya di negaranya, Brasil, tetapi juga dunia. Melalui pemikiran-pemikiran kritisnya ia menggunggat sistem pendidikan yang telah lama mapan di negaranya yang dinilainya tidak pernah berpihak pada rakyat miskin. Baginya sistem pendidikan di negaranya, justru mengasingkan dan menjadi alat penindasan sekaligus menguntungkan penguasa, sehingga wajib didekontruksi atau bahkan dihapuskan. Freire tidak hanya mengkritik, namun juga menawarkan suatu konsep yang ia sebut dengan sistem pendidikan kritis atau pedagogik pembebasan sebagai anti-thesa dari sistem pendidikan yang selama ini berlangsung.

Pendidikan kritis ini dianggapnya sangat tepat bagi mereka yang tersisih dari segala aspeknya, dan diharapkan mampu memberikan penyadaran juga bertujuan pembebasan peserta didik, terhadap ketertindasan saat proses pencarian pengetahuan. Bagi penganut aliran paradigma kritis, seperti Freire ini, pendidikan dianggap sebagai ladang perjuangan politik. Paradigma kritis selalu menginginginkan perubahan struktur secara mendasar dalam politik, ekomomi dimana pendidikan itu berada. Ini jelas berbeda sekali dengan paradigma pendidikan konservatif yang sekadar bertujuan menjaga kemapanan, atau paradigma pendidikan liberal yang berorentasi

melakukan perubahan moderat. (dalam Mansour Fakih, 2002: xvi).

Kritik keras Freire terhadap sistem pendidikan yang dijalankan di negaranya adalah apa yang ia sebut pendidikan "bergaya bank". Sistem pendidikan demikian dinilainya telah melahirkan penindasan. Pendidikan "gaya bank" sendiri merupakan konsep pendidikan yang memposisikan manusia sebagai makhluk yang disamakan dengan benda dan bisa diatur semaunya. Pendidikan kritis yang ditawarkan sebagai antithesa untuk mengeluarkan masyarakat dari belenggu kebudayaan bisu yang selama ini diciptakan para elit penguasa melalui pendidikan bergaya bank tersebut.

Pendidikan kritis yang digagas Freire dinamakan pendidikan *conscientization* (penyadaran). Apabila ditelisik lebih jauh, gagasannya ini sangat kental dilatari situasi kesenjangan berbagai bidang yang terjadi di negaranya. Situasi tersebut memicu semangatnya menghadirkan panyadaran lewat pendidikan agar masyaraat bisa melihat sumber penyebab ketimpangan itu secara jernih dan kritis. Atau setidaknya mereka mampu mempertanyakan mengapa dalam struktur masyarakat ada sebagian yang berada dalam kemewahan dan kesenangan, namun sebagian lain harus menangis terpinggirkan dan tertindas? Tulisan berikut akan mendiskusikan lebih jauh terntang pendidikan kesadaran yang digagas oleh Freire, dan selanjutnya digunakan untuk melihat relevansinya jika gagasan-gagasan pendidikan Freire ini direlaisaiskan dalam kontek pendidikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Tentang Freire Dan Konteks Yang Melatari Pemikiran Pendidikannya

Freire dilahirkan dalam keluarga yang cukup berada, kelas menengah di Recife, Brasil, 19 September 1921. Recife merupakan pusat salah satu daerah paling miskin dan terbelakang di dunia ketiga (Richard Shaull, 2011: x). Masa kecilnya dilalui dalam situasi penindasan dan terpinggirkan, terutama ketika orang tuanya yang kelas menengah jatuh miskin (tahun 1929). Dalam situasi demikian melahirkan keprihatian dan keberpihakannya terhadap kaum miskin yang tertindas. Ia pun menyadari bahwa dirinya sebagai bagian dari kaum romeng dari bumi (Paulo Freire, 1984: 157) Situasi ketertindasan ini sangat memengaruhi kehidupan dan apa yang ia perjuangankan. Gagasan dan pemikirannya yang kritis dan menggugat tidak bisa dilepaskan dari kemiskian yang dialami dan dia saksikan terhadap masyarakat Brazilia saat itu.

Mengenyam pendidikan jenjang Universitas tahun 1943, ia mengambil jurusan hukum. ia juga mendalami filsafat dan psikologi bahasa. Setamat dari studi hukum, ia tidak berpraktik dalam bidang yang digelutinya tersebut seperti umumnya berlaku bagi mereka yang menerima gelar tertentu. Sebaliknya, memilih profesi sebagai seorang guru di sekolah menengah, mengajar bahasa Portugis. Gelar doktor diraih tahun 1959 selanjutnya diangkat menjadi professor.

Diangkat menjadi Direktur Pertama dari Departemen Perluasan Kebudayaan Universitas Recife Tahun 1961-1964. Saat yang sama (tahun 1964)

terjadi gejolak politik yang mengakibatkan kudeta di Brasil. Rezim yang berkuasa saat itu menganggap Freire adalah tokoh yang berpengaruh dan berbahaya karenanya ia pernah ditahan tujuh puluh hari sebelum akhirnya pemerintah mengusirnya meninggalkan negaranya. Freire menjalani masa pembuangan di Bolivia selama 15 tahun, konsekuensi dari pemikiran dan kiprahnya yang revolusiner. Dari Boivia ia hijrah ke Chilli. Di Chilli ia mendapat tempat dan diberi kesempatan bekerja untuk organisasi internasional *Chistian Democratic Agrarian Reform Movement*. Bekerja di lembaga tersebut, kurang lebih lima tahun. Dan ia dianggap berjasa menghantarkan Chili pada prestasi; satu dari lima negara terbaik dunia yang diakui UNESCO sukses membebaskan masyarakat dari buta huruf. Tahun 1969 ia sempat menjadi *visiting professor* di universitas Harvard. Menjadi penasihat khusus bidang pendidikan bagi Dewan Gereja Gunia di Jenewa tahun 1969-1979. Akhir tahun 1960-an inilah ia menulis salah satu bukunya yang paling fenomenal, *Pedagogy of The Oppressed*. Sebuah karya Freire yang menjadi bacaan wajib bagi siapapun yang ingin mendalami tentang teori-teori pendidikan kritis.

Tahun 1979, Freire kembali ke Brasil dan menempati posisi sangat strategis di Universitas Sao Paulo. Tahun 1988 ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paulo, sebuah posisi yang mengandung tanggung jawab mereformasi dua 2/3 dari sekolah negeri yang ada. Tahun 1997 Freire meninggal dalam usia 75 tahun akibat penyakit jantung. Selama hidupnya ia menerima berbagai gelar honoris causa dari berbagai universitas di seluruh dunia. Ia juga menerima berbagai penghargaan di antaranya UNISCO's Peace Prize, tahun 1987, dan

dari Association of Christian Educators of tahun 1985.

2. Corak Pemikiran Freire

Di muka sudah disinggung terkait situasi ketimpangan sosial politik dan ekonomi di Brasil saat itu yang dianggap Freire merupakan sistem yang meminggirkan dan menindas. Kehidupan masyarakat yang serba kontras di atas melahirkan suatu kebudayaan yang disebut Freire dengan kebudayaan "bisu". Dalam kebudayaan bisu masyarakat hanya bisa menerima begitu saja segala perlakuan dari si penindas. Bahasa sebagai prakondisi untuk menguasai realitas hidup telah menjadi kebisuan. Bisunya mereka bukan sebagai sikap sadar atau bentuk protes atas perlakuan yang tidak adil. Itu juga bukan strategi menahan intervensi penguasa dari luar. Tetapi budaya bisu yang terjadi adalah karena bisu dan bukan membisu, tetapi karena memang tidak tahu apa-apa, dan harus berbuat apa. Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka bisu karena ada kekuatan lain di luar diri mereka, yang membuat mereka bisu.

Pada situasi masyarakat demikian, pemikiran Freire lahir. Ia memiliki keinganan kuat membebaskan masyarakat dari jeratan kebudayaan bisu dan penindasan tadi (dalam Danis Collins, 2002: 6-13). Pendidkan yang diimajinasikannya secara sederhana adalah pendidikan yang bisa memantik manusia berfikir mandiri untuk melahirkan gagasan-gagasan yang otentik dan original di tengah masyarakatnya. Dan menurutnya, itu tidak mungkin terjadi, jika masyarakat masih terjebak dalam sistem pendidikan Brazilia yang tidak pernah memberikan ruang terjadinya dialog dan pertukaran gagasan, sebaliknya

pendiktean lewat model pendidikan gaya bank. Selama situasi masyarakat masih terbelenggu sedemikian rupa, maka nalar kritis tidak akan mampu lahir. Nalar kritis menjadi poin penting untuk keluar dari kebudayaan bisu.

Menurut Freire, jika hendak menguasai realitas hidup termasuk menyadari kebisuan itu, maka bahasa harus dikuasai. Menguasai bahasa artinya mempersyaratkan kita memiliki kesadaran kritis dalam mengungkapkan realitas. Pendidikan yang dapat membebaskan dan memberdayakan yang harus dihadirkan adalah sistem pendidikan yang memungkinkan para peserta didik dapat mendengar suaranya yang asli. Pendidikan yang relevan terhadap mereka yang sekian lama terpinggirkan dan dibelenggu kebudayaan bisu, adalah mengajar untuk memampukan mereka mendengarkan suaranya sendiri dan bukan suara dari luar termasuk suara sang pendidik (Cik Himawan dalam kompasiana.com)

Berpijak dari sini, melalui gagasan-gagasan revolusionernya, Freire menolak arus tradisi yang serba verbal saat itu. Hal tersebut tercermin dari kritikannya yang dinyatakan secara tegas terkait sistem pendidikan di Brazilia yang sama sekali tidak memberi ruang terjadinya dialektika gagasan, tidak ada debat tentang tema tema tertentu, melainkan pemberian kuliah satu arah; dari guru kepada peserta didik, tanpa dialog. Guru dan peserta didik tidak membangun kerja sama yang setara; bukan kerja sama dengan peserta didik tapi kerja sama atas peserta didik. Murid dituntut patuh menerima komando sang guru. Karena guru pemilik otoritas pengetahuan. Pada hal, hal yang sangat fundamental dalam pendidikan adalah membekali suatu perangkat yang membuat peserta

didik berfikir otentik dan kritis (Freire, 1984: 34). Selanjutnya ia menawarkan konsep pendidikan yang disebutnya metode "hadap masalah" sebagai cara tepat membangkitkan masyarakat dan membebaskannya dari kebudayaan bisu. Suatu gagasan dan pemikiran pendidikan yang lahir dari refleksi kritisnya terhadap realitas yang terjadi serta pemahamannya yang mendalam tentang manusia.

3. Filosofi Pendidikan Paulo Freire

Dari sudut filosofis, aliran Fenomenologi, Personalisme, Eksistensialisme, dan Marxisme merupakan aliran yang sangat memengaruhi pemikiran Freire. Ia juga dikenal sebagai tokoh utama aliran rekonstrusionisme. Beberapa prinsip utama aliran ini; *Pertama,* disandarkan pada satu asumsi peradaban dunia sedang dalam situasi krisis, maka solusi efektifnya adalah penciptaan suatu tatanan sosial yang menyeluruh, *Kedua,* pendidikan adalah salah satu agen utama melakukan rekonstruksi tatanan sosial oleh sebabnya pendidik rekonstrusionis harus secara aktif mendidik demi perubahan sosial bukan penerus ataupun pelanggeng tradisi / status quo. *Ketiga,* dari aspek metode pengajaran harus berdasarkan metode-metode demokratis yang diorientasikan mengenali dan menjawab berbagai tantangan sosial yang ada. Bukan metode pendidikan yang menempatkan peserta didik pasif sebagai penerima rumus-rumus yang mereka tidak mengerti kaitannya untuk kehidupan peserta didik.

Berdasarkan ketiga prinsip ini, diketahui dalam rekonstruksionisme maka dunia pendidikan seperti sekolah, madrasah dan sejenisnya bukanlah sebagai transmitor (penyampai) kebudayaan yang bersifat

pasif seperti diyakini oleh aliran-aliran pendidikan tradisional yang cenderung menyalahkan orang sedang terpinggirkan dan miskin dan tertindas dengan dalil sebab ada juga orang lain yang bernasib sama, namun bisa meraih kesuksesan berkat kerja keras dan sungguh-sungguh. Jadi pada aliran ini condong menyalahkan subyeknya (dalam Mansour Fakih, 2002: xiii). Tetapi dunia pendidikan yang memosisikan sebagai agen yang menjadi pionir dan aktif melakukan transformasi sosial dan menempatkan peserta didik sebagai agen-agen perubahan sosialnya.

Supaya peserta didik mampu melakukan transformasi dan perubahan sosial, maka dibutuhkan pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir yang otentik. Gagasan ini tercermin jelas dalam tujuan pendidikan yang dirumuskan Freire. Menurutnya yang paling penting dalam pendidikan adalah untuk melahirkan daya kritis peserta didik adalah penyadaran manusia akan realitas sosialnya (konsientisasi) (dalam Denis Collins, 2011: 122).

Untuk merealiasikan hal tersebut, menurut Freire harus diawali dengan melakukan konseptualisasi sebuah proses penyadaran yang mengarah pada pembebasan yang disebutnya sebagai "kemanusiaan yang lebih utuh". Selanjutnya hasil dari proses ini dinamakannya konsientisasi, artinya setiap individu dituntut berdaya menatap sistem sosialnya secara kritis. Sekali lagi bahwa inti dari proses pendidikan bagi Freire adalah lahirnya penyadaran.

Konsekuensinya, pendidikan harus mengandung muatan realistis, materi ajar dirumuskan memiliki keterhubungan dengan fenomena aktual dari realitas sosial masyarakat. Dengan begitu, setelah

menempuh pendidikan, peserta didik sadar akan kebutuhan, tantangan dan problem yang terkait dengan realitas sosial sekitarnya atau bahkan sadar akan realitas sosial dunia (William A. Smith, 2008:3). Gagasan ini yang diklaim sebagai antithesa dari sistem pendidikan yang selama ini berlangsung di negaranya; sistem pendidikan yang Freire sebut telah terserabut dari akar sosialnya.

Bagi Freire, tujuan utama pendidikan adalah membuka mata peserta didik agar menyadari realitas ketertidasannya untuk kemudian melakukan transformasi sosial. Kegiatan untuk menyadarkan peserta didik tentang ketertindasannya ia istilahkan dengan konseintasi, yaitu suatu pemahaman mengenai keadaan nyata yang sedang dialami peserta didik (Daniel Sechipani dalam http://repository.seabs.ac.id). Konsietansi ini bertujuan membongkar apa yang ia sebut sebagai "kebudayaan diam". Dan kebudayaan diam, sebagaimana disinggung di muka, merupakan suatu kondisi yang memposisikan masyarakat tunduk dan patuh sedemikian rupa; masyarakat yang tidak hanya tidak memiliki keberanian, tapi lebih parah dari itu tidak menyadari kebisuannya, kondisi ketertidasan yang dialami sebagai hal semestinya diterima.

Dalam konteks pemikiran demikian, Freire memposisikan pendidikan sebagai Tindakan Politik, baik untuk menciptakan status kuo maupun melakukan perubahan sosial. Ketika orang umumnya saat itu termasuk di Indonesia masih menganggap persoalan yang berkenaan dengan pendidikan, bebas dari kepentingan politik, masih dianggap sebagai kegiatan mulia, sakral, karenanya ia bersifat netral dan steril dari pertikaian ideologi. Pernyataan sekaligus

kritikan Freire yang diucapkan awal tahun 70-an mulai menyadarkan masyarakat luas bahwa wajah dunia pendidikan yang selama ini diasumsikan sakral dan mengandung kebajikan tersebut ternyata bisa juga berwajah politis dan penuh dengan beragam kepentingan banyak pihak.

4. Penyadaran Dehumanisasi Freire

Terdapat tiga kesadaran yang menjadi turunan dari paradigma pendidikan Freire yaitu Kesadaran Magis, Kesadara Naif, dan Kesadaran Kritis. Uraian ketiga kelompok kesadaran ini secara detil sebagai berikut:

a. Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*)

Kesadaran magis, pada tahap ini, manusia tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya (Firdaus M. Yunus, 2007:50). Contohnya tentang fenomena kemisikanan yang terjadi. Masyarakat yang masih pada kesadaran magic ini tidak kuasa menghubungkan penyebab kemiskinan yang diderita dengan sistem politik dan kebudayaan. Atau dengan kata lain mereka tidak mampu berpikir bahwa mereka miskin karena dibuat oleh sistem tertentu. Pada tahap kesadaran ini lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supranatural) sebagai penyebab dari ketidakerdayaan. Mereka meyakini bahwa kemiskinan yang diderita adalah karena takdir (fatalistik). Oleh sebabnya mereka memilih menerima dan diam terhadap situasi kemiskinannya.

Pada tahap kesadaran magic ini manusia tidak kuasa mengobyektifikasi fakta dan kehidupan

sehari-hari yang sesungguhnya penuh permasalahan. Mereka yang berada pada kesadaran megic kurang memiliki persepsi struktural. Bagi mereka kenyataan adalah *super realitas* atau sesuatu yang berada di luar kenyataan obyektif (Freire, 2007: 135). Cara menyelesaikan masalahnya pun masih terbelenggu dalam *mitos infreoritas* alamiah; cenderung menggunakan pendekatan mistik untuk mengatasi masalahnya.

Situasi ini di Brasilia saat itu, sengaja diciptakan untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan para penguasa; menindas masyarakat tanpa masyarakat merasa bahwa dirinya sesungguhnya sedang ditindas dan dimiskinkan. Sebuah gambaran manusia yang cenderung pasrah pada kenyataan, mereduksi masa depan sebagai suatu keadaan yang sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Mereka ini orang yang tidak mampu menangkap kausalitas sebenarnya. Dan itu problem terbesarnya.

b. Kesadaran Naif

Pada kesadaran tahap ini mereka lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah yang ada di masyarakat. Kesadaran naif dialami oleh mereka yang melihat penyebab kekacauan dalam kehidupannya, namun mereka belum memiliki kesadaran untuk bangkit dan menggugat dan berusaha memperjuangkan apa yang harusnya mereka miliki. Pada tingkatan kesadaran ini lebih baik dari kesadaran tahap magic. Jika pada tahap kesadaran magic mereka tertindas dan menganggap itu suatu takdir yang harus diterima, dan sama sekali tidak mampu

mengaitkan ketertidasannya dengan faktor lain selain takdir tadi.

Tahap kesadaran Naif ini sudah ada kemampuan mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang promitif dan naif seperti: mengidentifikasi diri dengan elit, kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog. Pada kesadaran Naif, membutuhkan pemantik untuk mereka tahu bagaimana mencari solusi dari situasi yang mereka sedang hadapi. Mereka sudah mampu mengidentifikasi persoalan dan mampu mengaitkan persoalan yang sedang dihadapi dengan faktor lainnya merupakan potensi besar untuk diubah atau diajak berubah.

c. Kesadaran Kritis.

Kesadaran Kritis, merupakan kesadaran tertinggi dalam tingkatan konsientisasi Freire. Pada level kesadaran ini masyarakat sudah mampu melihat persoalan politik dan struktur sebagai sumber masalah atas kemiskinan mereka. Pendekatan struktur menghindari "blaming the victims" dan lebih menganalisis. Untuk selanjutnya secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat (Freire, 2007: xvii-xviii). Dengan kata lain kemiskinan dan ketertidasan yang sedang dihadapi bukanlah suatu takdir, melainkan karena ada struktur atau kepentingan politik yang membuat mereka terpinggirkan dan tertindas.

Kesadaran kritis ini ditandai dengan kemampuan menafsirkan setiap masalah secara tajam dan mendalam, mengganti atau menggeser

penjelasan magic menjadi kausalitas, atau hukum sebab akibat, dalam artian bahwa mereka miskin bukan karena takdir melainkan karena dimiskinkan oleh struktur dan elit penguasa. Selanjutnya mencoba mencari penemuan - penemuan yang dihasilkan seseorang: keterbukaan melakukan revisi, menghindari distorsi ketika memahami masalah, dan menghindari konsep-konsep yang telah diterima sebelumnya. Ketika menganalisa masalah: dengan mengubah untuk menolak tanggungjawab; menolak bersikap pasif sebaliknya aktif menyatakan gagasan-gagasan, mengedepankan dialog daripada polemik, terbuka terhadap gagasan baru secara kritis, bukan asal menerima atau menolak (William A. Smith, 2008:80-81).

5. Kritikan Freire Terhadap Pendidikan Bergaya Bank

Teori pendidikan Freire didasarkan pada keyakinan yang tinggi terhadap manusia. Untuk menjadi pendidik yang baik, yang diperlukan di atas segalanya adalah keyakinan kepada manusia. Oleh sebabnya ia menolak pandangan bahwa manusia itu bagaikan bejana kosong. Baginya setiap individu memiliki pengetahuan dan pendapat yang bernilai. Dia memiliki pandangan yang sangat optimistik tentang manusia betapapun rendahnya kapasitas intelektual dan naifnya manusia tetap diyakini memiliki kapasitas untuk melihat secara kritis dunia mereka lewat dialog dan interaksi dengan manusia lain. (Freire, 1971: 28)

berdasarkan teori pendidikannya tersebut, maka dia menolak pendidikan gaya bank yang dipraktikkan di negaranya. Pendidikan gaya bank mengasumsikan bahwa pengetahuan merupakan sebuah anugrah yang

dihibahkan kepada mereka yang mendaku dirinya berpengetahuan terhadap mereka yang dianggap tidak mengetahui apa-apa. Dalam konteks relasi guru-peserta didik, guru dianggap maha tahu sedangkan peserta didik dianggap sebaliknya, tidak tahu apa-apa dan siap dijejali dengan rumus-rumus oleh sang guru. Tidak mengherankan jika Freire secara tegas menyatakan bahwa pendidikan bergaya bank ini merupakan sistem pendidikan yang menindas, dan sebagai upaya penjinakan. (M. Agus Nuryatno, 2011: 47).

Ironisnya model pendidikan seperti ini yang dipertahankan dan dilestarikan oleh para elit penguasa. Mereka berharap masyarakat tetap pada kesadaran magic, agar tidak menggugat, dan mudah diatur dan bisa diperlakukan apa saja tanpa sedikitpun berani atau bahkan mampu mempertanyakannya. Oleh sebabnya pendidikan kritis untuk masyarakat tertindas tentu saja dianggap membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hierarkis-primordial sehingga hadirnya gagasan Freire ini dianggap sebagai ancaman bagi elit penguasa saat itu. Sebaliknya berusaha melestarikan pendidikan tradisonalis bergaya bank dengan ciri khasnya menggunakan pendekatan *top-down* dan militeristik; memiliki kecenderungan kuat mengindoktrinasi, menghegemoni, mendominasi.

Realitas pendidikan seperti itu yang dialami Freire dan anak-anak seusianya saat itu di negaranya. Peserta didik tidak pernah diposisikan sebagai subyek pendidikan yang dinamis dan memiliki kreasi tetapi sebaliknya dilihat sebagai benda yang seperti bejana sekadar menampung sejumlah rumusan/ dalil pengetahuan. Semakin banyak isi yang dimasukkan

oleh gurunya dalam "bejana" itu maka semakin baiklah gurunya. Karena itu semakin patuh wadah itu semakin baiklah ia. Peserta didik hanya menghafal seluruh yang diceritakan guru tanpa mengerti.

Bagi Freire pendidikan semacam ini harus didekonstruksi secara total jika hendak melihat tradis kritis di masyarakat Brasilia. Kritis untuk menyadari apa yang sedang dihadapinya. Untuk itu pendidikan bagi Freire harus mengandung tiga unsur mendasar (fundamnetal) yaitu guru, peserta didik dan realitas. Hubungan antara unsur pertama dan kedua seperti teman yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran, bukan saling menegasikan. keduanya tidak berfungsi secara *struktural-formal* seperti yang terjadi pada pendidikan bergaya bank yang justru akan memisahkan keduanya.

Argumentasi yang dibangun karena pada hakikatnya manusia adalah mahluk yang berelasi dengan Tuhan, sesama dan alam. Poin intinya di situ. Ketika berelasi dengan alam, manusia tidak Cuma berada di dunia, tetapi juga bersama dengan dunia. Kesadaran ini menyebabkan manusia berelasi secara kritis dengan dunia. Manusia tidak hanya bereaksi secara refleks seperti hewan tetapi dapat memilih, mengkaji, menguji dan mengujinya lagi sebelum melakukan tindakan. Karena manusia dianugrahi akal pikiran. Tuhan pun memberikan anugrah kebebasan, sehingga dalam pendidikan pun dengan sendirinya manusia harus dibebaskan berkembang menjadi suatu pribadi yang lahir dari dirinya sendiri dan bukan darimorang lain.

Berbasis dari ketiga relasi tersebut maka Freire menawarkan gagasan pendidikan alternatif yang disebutnya dengan metode "Hadap Masalah". Ini

sebagai antithesa atas praktik pendidikan yang anti realitas di atas. Pendidikan harus diorientasikan pada proses "hadap-masalah", bukan dengan menjejali peserta didik dengan rumus-rumus yang tidak ada kaitannya dengan hidup peserta didik dan bahkan menumpulkan nalar kritis mereka dengan hafalan-hafalan, seperti yang berlangsung selama ini. Titik tolak penyusunan progam pendidikan hadap masalah didasarkan pada kondisi kontekstual - kekinian, eksistensial dan konkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi masyarakat (Abuddin Nata, 2003: 68). Hanya dengan metode demikian bisa memantik kesadaran dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan nyata. Masyarakat tidak lagi gagap menghadapi realitas yang mereka hadapi. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan pembebasan dari pendidikan dialogis yang memosisikan guru dan peserta didik setara.

Konsep hadap masalah yang ia tawarkan lahir berpijak dari konsepsinya tentang manusia dalam pengertian manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik beranjak dalam pendidikan. Secara filosofis manusia itu tidaklah mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya. Ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia itu sendiri. Realitas demikian itu yang seharusnya diperhadapkan pada peserta didik supaya muncul kesadaran akan realitas itu. Dasar pemikiran yang dibangun bahwa manusia memiliki potensi berkerasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan dari berbagai aspek; budaya, ekonomi dan politik dibutuhkan nalar kritis, dan itu hanya bisa lahir dari metode hadap masalah.

Hadap masalah mengkondisikan dan merangsang kesadaran dan akan tumbuh baik melalui

pergumulan pemikiran atas realitas yang dihadapi dari situ diharapkan memunculkan kesadaran dan prilaku kritis bagi peserta didik. Bagi Freire, puncak dari pendidikan adalah melahirkan pemikiran dan prilaku kritis bagi peserta didik. Itu esensi yang hendak dicapai dalam paradigma pendidikan kritis. Oleh sebabnya kesadaran kritis menurutnya sebagai kesadaran puncak yang di dalamnya mengandung totalitas dari akal budi, perasaan, emosi, keinginan; jasmani, sadar akan dunia dan diri sendiri, menangkap dunia arah tujuan diri. Itulah yang hendak diraih dari konsep metode hadap masalah dalam pendidikan.

6. Relevansi Pemikiran Pendidikan Freire Dalam Konteks Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, dunia pendidikan di Indonesia masih mengalami problem dari berbagai aspek dan levelnya. Demikian kompleksnya, sehingga mendiskusikannya seperti kehilangan pijakan, ruwet, blunder layaknya mengurai benang kusut. Kondisi demikian masih diperparah oleh upaya perbaikan selama ini belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan tambal sulam dan seadanya. Dengan kata lain belum ada political will atau kehendak politik untuk memperbaiki dunia pendidikan agar keluar dari carut marut dari berbagai aspeknya.

Pernyataan ini bukanlah tanpa dasar argumentasi yang kuat. Lihat saja setiap pergantian menteri selalu saja berganti kebijakan. Dan itu dianggap hal yang lazim terjadi bahkan hingga kini. Dan anehnya, kebijakan menteri selanjutnya tidak pernah berkesinambungan dengan pendahulunya. Pergantian kebijakan tanpa dilandasi oleh evaluasi menyeluruh atas kebijakan yang lama. Selalu dimulai

dari nol, terus begitu. Kebijakan bongkar pasang sistem pendidikan ini yang membuat kita tidak pernah pergi ke mana-mana, hanya berputar gak jelas di situ situ saja; perdebatan tidak pernah fokus pada aspek-aspek yang bersifat padagmatik dan mendasar dalam dunia pendidikan.

Sebelum membahas relevansinya dalam kontek Indonesia, perlu digaris bawahi bahwa seperti dikatakan Allen J Moore bahwa pendidikan yang membebaskan yang digagas Freire dalam konteks Amerika Latin yang sedang kita kaji Panjang lebar dalam tulisan ini, memiliki konteksnya sendiri. Oleh sebabnya tidak bisa diterapkan secara serampangan, dan diterima apa adanya dalam konteks yang berbeda. Indonesia juga memiliki konteksnya sendiri. Situasi dan permasalahannya yang tidak sama. Oleh sebabnya penyelesaiannyapun tentu berbeda. Peringatan Moore ini penting sebagai pembatas kendali kita agar tidak bertindak naif, menggenaralisasi secara asal terhadap konteks persoalan yang sesungguhnya jauh berbeda. Ringkasnya, tidak semua penyakit bisa diobati dengan obat yang sama.

Bahwa Amerika latin khususnya Brasilia dan Indonesia berbeda, tentu hal ini tidak bisa kita bantah. Tetapi dalam banyak hal sesungguhnya juga terdapat irisan-irisan yang relatif sama. Hal yang paling releven misalkan jika dikaitkan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah bahwa kedua negara tersebut sama-sama menghadapi kenyataan yang cenderung sama; kurangnya pengalaman dalam berdemokrasi termasuk lemahnya berdemokrasi di dunia pendidikan; baik pada level institusi sekolah maupun di Perguruan Tinggi. Situasi ini sama sama terjadi di kedua negara tersebut. Ini tentunya titik persamaan yang bisa

dikembangkan dalam membedah kondisi Pendidikan di Indonesia dengan menggunakan kacamata pendidikan Freire.

Kembali pada pernyataan Freire di atas bahwa munculnya persoalan dalam dunia pendidikan di Brasilia karena adanya hubungan yang saling terkait antara kurangnya tradisi berdemokrasi di Brasilia dengan lahirnya budaya naif dalam masyarakat. Teori yang ia bangun makin sedikit pengalaman demokrasi yang dijalankan melalui partisipasi kongkrit dalam realitas dan melalui kesadaran kritis tentangnya, maka naif suatu kelompok menangkap dan menghadapi problem dan semakin mendangkal mereka membicarakan problem-problem itu (Syafii Maarif, 1997: 23). Teori ini pun berlaku dalam konteks Indonesia. Di Indonesia pun demokrasi yang sedang dijalankan masih cenderung pada demokrasi prosedural, dan itu berdampak sekaligus juga terjadi dalam dunia pendidikan nasionalnya.

Pendidikan yang diimajinasikan Freire adalah pendidikan yang mampu memantik peserta didik berpikir kritis, mandiri dalam rangka melahirkan gagasan-gagasan yang otentik dan original. Jika dikaitkan dengan pendidikan di Indoensia; bukankah problem yang dihadapi dunia pendidikan kita justru terletak pada hal yang sama; indoktrinasi, pendiktean ide, satu arah, dan tidak menciptakan peserta didik berpikir kritis yang itu berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sampai hari ini.

Persamaan lainnya misalkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Indonesia sebagai bangsa dikenal memiliki banyak suku yang dalam relasi sosialnya bercorak hierarkis dan fiodalistik. Misalkan untuk sebutan gelar saja, sudah menunjukkan hirarki dan

setrata sosial tertentu, baik itu pada tradisi sosial keagamaan ataupun budaya. Meskipun strata tersebut saat ini tidak begitu tampak, namun saat ini Indonesia menghadapi problem yang sama yaitu fiodalisme, tetapi dalam konteks yang berbeda, yaitu starta ekonomi dalam feodalisme modern. Bedanya pengendali dalam feodalisme modern adalah kelompok konglomerat yang secar riil menguasai ekonomi Indonesia lebih dari setengah kekayaan yang ada. Bahkan kelompok ini mampu mengakumulasi kekayaan kurang lebih 80% kekayaan Indonesia.

Jika pada era kolonial Belanda terdjadi elitisime pendidikan yang ditandai dengan adanya dualism pendidikan, yaitu jalur untuk anak-anak belanda dan jalur pendidikan untuk anak anak Bumi Putra. Suatu sistem pendidikan yang diskriminatif yang memenang didisain menyesuaikan situasi masyarakat saat itu yaitu suatu kenyataan adanya masyarakat elit dalam hal ini direpresentasikan oleh masyarakat kolonial, dan masyarakat luas yang sering disebut Bumi Putra (H.A.R. Tilaar, 1995: 47). Meskipun feodalisme pendidikan demikian sudah lenyap, namun secara subtansi tetap terjadi. Kelompok konglomerat ini yang menjadi fiodal baru yang berkuasa atas kaum miskin. Meskipun tidak ada larangan orang miskin dilarang sekolah, namun realitas biaya pendidikan di Indonesia yang mahal sehingga dalam praktiknya hanya mereka yang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Orang miskin tidak mampu mengakses pendidikan karena memang tidak memiliki biaya menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi yang demikian mahalnya. Akibatnya mereka yang mampu mengakses pendidikan yang akan memiliki peluang lebih besar ketimbang yang tidak memiliki pendidikan, dan pada tahap selanjutnya mereka ini

anak-anak orang kaya tadi juga yang akan menjadi pewaris tahta penindasan orang tuanya.

Sedangkan yang miskin bernasib terpinggirkan dan lambat laun ditindas. Ini sudah menjadi hukum liberalisme dan fiodalisme. Andaipun ada kebetulan kelompok rakyat kecil yang mampu mengakses pendidikan tinggi, ia akan berubah menjadi pemegang kendali feodalisme baru itu, baik dalam rangka balas dendam maupun dalam penidasan terhadap sesamanya kaum tertindas. (Chik Hikmawan, dalam kompasiana.com) dan terus demikian.

KESIMPULAN

Pendidikan pada akhirnya seperti yang dianut aliran konservatif; sebagai alat, melestarikan tradisi feodalisme bukan alat mentransformasikan perubahan sosial. Meminjam istilah dari kritikan Freire, pendidikan yang berupaya membebaskan kaum tertindas menjadi penindas baru. Pembebasan kaum tertindas bagi Freire tidak bertujuan supaya ia bangkit menjadi penindas baru tetapi supaya ia yang sudah terbebaskan ini mampu pula membebaskan para penindas dari kepenindasannya.

Relevansi lainnya misalkan dalam konteks pendidikan tampak pada level proses belajar-mengajar yang selama ini berlangsung dan diterapkan dalam kelas khususnya. Meskipun saat ini memang metode pembelajaran sudah menekankan dialogis dan terus diupayakan dialogis. Tetapi dari aspek konten materi yang disampaikan masih sangat melangit; pendidikan yang terserabut dari akar masyarakatnya. Materi ajar yang diberikan sama sekali tidak berbasis kebutuhan peserta didik. Materi yang diberikan seolah datang dari langit, berlaku umum bagi peserta didik dari semua latar belakangnya. Peserta didik diwajibkan menghafal dalil dan

rumus - rumus tersebut tanpa mengetahui untuk apa materi tersebut dan dalam konteks bagaimana materi itu diberikan.dan apakah bisa berkontribusi terhadap kehidupan peserta didik kelak?

Selain itu relasi guru dan peserta didik -meskipun sudah ditekankan dealogis- namun pada kenyataannya masih saja dibangun atas relasi hirarki; mengajar dan diajar. Peserta didik dalam posisi tidak tahu dan guru yang maha tahu segalanya. Banyak guru belum siap dengan metode dealogis, Bukankah itu semua sama dengan situasi dunia pendidikan di Brasilia saat itu? Yang disebut Friere sebagai pendidikan bergaya bank.

Oleh sebabnya gagasan-gagasan Freire yang notabenenya lahir dari hasil pergumulan intelektualnya di Brasilia, namun sesungguhnya sangat relevan jika digunakan sebagai alat untuk menganalisa persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia. Yang membedakannya hanyalah pada konteks negara, geografis dan sosial budaya, namun dampak yang dilahirkan dari sistem fiodalisme antara kedua negara tersebut adalah sama. Maka gagasan-gagasan pendidikan Freire ini menurut penulis penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya mereformasi dunia pendidikan nasional kita. Setidaknya gagasan Freire bisa sebagai pisau analisis untuk memecahkan problem esensial pendidikan kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Smith, William. 2008. *Concientizacau Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, Pengantar ST. Sunardi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Collins, Danis. 2002. *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*, Penerjemah: Henry Heyneardhi dan

Anastasia. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Komunitas APIRU Yogyakarta,

F. O'Neil, William. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Terj. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Freire, Paolo. 2011. *Pendidikan Kaum Tertindas.* Jakarta, LP3ES

Freire, Paulo. 1977. *Pedagogy of the Oppressed*. New York, Herder and Herder.

Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Penerjemah: Alois A. Nugroho, Jakarta: PT Gramedia.

Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, *terj.* Alois A. Nugroho. Jakarta, Gramedia

Freire, Paulo. 2007.*Politik Pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan, dan Pembebasan,* terj. Agung Prihantoro dan Fuad Ari Fudiartanto, cet. VI. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Himawan, Cik. *Pendidikan yang Membebaskan Menurut Paulo Freire,* dalam https://www.kompasiana.com. Di akses pada April 2021

Nata, Abuddin. H. 2003. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam,* cet.III .Jakarta, Rajawali Press,

Nuryatno, M Agus. 2011. *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengethauan Politik dan Kekuasaan.* Yogyakarta,

Sechipani, Daniel "Liberation Theology and Religious Education", dalam Wahyu Pramudya, *Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method dan Pendidikan Kristen di Indonesia. Dalam http://repository.seabs.ac.id.*

Tilaar, H.A.R.1995.*50 Tahun Pembangunan Pendidikan nasional 1945-1995*. Jakarta, PT Grasindo

MANAJEMEN STRES, FRUSTASI, KEJENUHAN MAHASISWA SELAMA PEMBELAJARAN DARING

Junanah

PENDAHULUAN

Fenomena Pandemi covid 19 yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun memberikan pola tatanan baru dalam setiap lini kehidupan di masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat hingga daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan sistuasi dan kondisi yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini(Kemendikbud RI 2020, 2021; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Kebijakan pembelajaran dengan model daring merupakan kebijakan yang dinilai paling pas untuk bisa menghindari dan meminimalkan penyebaran virus covid-19, karena pembelajaran daring bisa menghindarkan dari kontak langsung dan kerumuman. Dimana kontak langsung dan kerumuman disinyalir menjadi salah satu media mudah tertularnya virus dari orang satu ke orang yang lain.

Pembelajaran daring dianggap sebagai solusi yang pas, sehingga dinas pendidikan di bawah Kemendikbudristek juga dibawah kemenag pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara online tersebut (Kemendikbud RI 2020, 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020). Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh

penyelenggara pendidikan, maka menuntut semua elemen pendidikan di masyarakat untuk bisa beradaptasi dan segera mungkin mengkondisikan proses kegiatan belajar mengajarnya dengan menggunakan moda daring yang difasilitasi dengan teknologi. Semua sumber daya dipaksa untuk berdekatan dan bisa menggunakan teknologi sebagai jembatan media dalam kegiatan belajar mengajar. Para guru, karyawan, peserta didik, bahkan orang tua dipaksa harus bisa menggunakan dan mengoperasikan teknologi dengan fitur-fitur yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran(Iftitah and Anawaty, 2020; Lilawati, 2021; Makhin, 2021; Yulianingsih et al., 2021). Hal ini memberikan dampak positif sehingga semua orang mau belajar dan mengadakan teknologi yang mendukung terjadinya proses pembelajaran secara daring.

Seiring dengan perjalanan waktu sudah selama dua tahun lebih sejak tahun 2019 sampai sekarang semua bisa merasakan dampak yang ditimbulkan dari proses pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang awalnya dianggap sebagai solusi yang tepat justru setelah berjalan dua tahun mulai bermunculan masalah baru yang dirasakan oleh peserta didik khususnya(Andiarna and Kusumawati, 2020; Fauziyyah, Awinda, and Besral, 2021; Lubis, Ramadhani, and Rasyid 2021; Pebriani, Syafei, and Mardiah, 2021; Riazul and Harri, 2021; Utami et al., 2021). Tingkat kebosanan dan stres peserta didik semakin tinggi dan menimbulkan kerinduan untuk kembali ke sekolah bertemu dengan guru dan melaksanakan pembelajaran secara langsung dengan tatap muka, rindu bertemu teman-teman, bermain, berdiskusi, bekerja kelompok, dan lain sebagainya (Fahruni and Wiryosutomo, 2021). Dikalangan orang tua peserta didik juga semakin mengalami tingkat stres yang tinggi dengan beban pembelian pulsa, paketan untuk internet dan konsumsi putra putrinya yang tinggal dirumah semakin melilit dan memberatkan ekonomi orang

tua (Hidayati, Pinilih, and Amin, 2021; Listyanti and Wahyuningsih, 2020; Nurchayati et al., 2021; Rahman, 2015). Para guru pun juga semakin merasakan berat dalam bekerja karena harus dua kali bekerja untuk menyiapkan pembelajaran dengan moda daring bahkan setelahnyapun juga masih menyisakan pekerjaan yang semakin menyita waktu keluarga (Fathonah and Renhoran, 2021; Indra et al., 2021; Muslim, 2020; Renny, 2020).

Dampak yang ditimbulkan tersebut jika ditelaah lebih jauh tentang efektivitas pembelajaran daring ternyata banyak penelitian yang mengatakan kurang efektif bahkan memunculkan kasus baru yang namanya *lost learning* dan *lost generation* dalam dunia pendidikan(Agustiyanti, 2021; Andriani et al., 2021; Budi et al., 2021; Donnelly and Patrinos, 2021; Rossa and Efendi, 2021; Sovayunanto, 2022). Untuk itulah, dalam memasuki tahun ke tiga pandemi tepatnya di tahun 2022 ini perlu dicarikan alternatif solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak negatif pembelajaran daring tersebut. Tingkat stres yang tinggi dari para peserta didik, pendidik maupun orang tua perlu di manajemen dengan baik agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang lebih parah. Kebosanan dan kejenuhan peserta didik selama pembelajaran daring harus segera diatasi dengan diberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan interaktif secara maksimal agar para peserta didik muncul kemandirian dan kedewasaan dalam proses belajar mengajar. Kajian ini mencoba menguraikan dampak pembelajaran daring, faktor-faktor penyebab, dan manajemen dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan selama pembelajaran daring di masa pandemic covid-19.

Berikut diuraikan beberapa hasil penelitian tentang dampak pembelajaran daring selama masa pandemic covid-19. Secara garis besar dampak tersebut dibedakan

menjadi 3, yaitu stress, frustasi, dan kejenuhan belajar peserta didik.

PEMBAHASAN

1. Stress dan Frustasi

Stress merupakan sebuah tanggapan seseorang, dengan ancaman terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan menganggu dan mengakibatkan dirinya terancam, ancaman tersebut dapat berupa finansial, emosional, mental dan sosial (Putri and Yuline, 2021).Adapun frustrasi merupakan kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, bisa terjadi karena kecewa sebab terlalu berambisi, keinginannya terhalang dan mengalami kegagalan (Grhasia.jogjaprov.go.id, 2020; Muslim, 2020). Frustasi, kesal, cemas, iri, takut, sedih merupakan awal penyebab stress. Stress akademik adalah tekanan yang dialami oleh peserta didik yang dapat berupa gangguan fisik, mental atau emosional dalam proses edukasi(Muslim, 2020). Tekanan ini dapat muncul ketika terjadi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dengan kenyataan (sumber daya pikiran) yang dimiliki peserta didik. Stress akademik merupakan respons yang muncul setelah terjadi banyak tekanan dan tuntutan, baik berupa tugas yang menumpuk, amanah orang tua yang dirasa memberatkan, persaingan akademik yang ketat, tugas akhir yang tak kunjung usai, dan beban berat lainnya(Fitriasari et al., 2020; Lubis et al., 2021; Muslim, 2020; Riazul and Harri, 2021).

Beberapa hal yang dapat memicu munculnya stress antara lain:1) *tension* atau tekanan mental, 2) frustasi, terlalu berambisi kemudian kecewa berat, 3) konflik, adanya ketegangan dan kecemasan yang

disebabkan oleh sulit menentukan pilihan, dan 4) krisis, kejadian mendadak dan upaya untuk mengatasinya di luar batas kemampuan (Grhasia.jogjaprov.go.id, 2020). Selama pembelajaran daring, beragam persoalan bermunculan mulai dari kendala karena jaringan internet, kendala perangkat yang kurang mendukung, kendala dalam berinteraksi, dan lain-lain. Kendala yang dialami oleh mahasiswa dapat diuraikan sebagaimana penelitian berikut.

Pembelajaran daring selama masa Pandemi Covid 19 memicu beberapa mahasiswa mengalami stres, sebagaimana hasil penelitian yang diungkap oleh Pebriani, Syafei, and Mardiah (2021) pembelajaran daring selama pandemi covid-19 pada mahasiswa keperawatan STIK Siti Khadijah Palembang menyebabkan munculnya stress pada mahasiswa. Stres yang dirasakan tersebut terkait dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring seperti proses pembelajaran daring yang membosankan, absen perkuliahan karena kuota internet limit, tidak dapat ketidaktersediaan alat laboratorium tidak memadai sehingga mahasiswa kesulitan mengaplikasikan pembelajaran praktek, sulit berkonsentrasi dalam memahami materi pembelajaran, tugas perkuliahan yang menumpuk, dan kurangnya pemahaman dalam menggunakan media elektronik.

Stres yang dialami ditingkat mahasiswa selama pandemi covid-19 dipopulerkan dengan istilah stes akademik yang dipicu karena lamanya pembelajaran daring sehingga beban mahasiswa bercabang-cabang. Hal ini diungkap dalam kajian penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2021), mahasiswa psikologi Universitas Mulawarman mengalami stress akademik

selama melakukan kuliah daring saat pandemi. Sebanyak 31.8% mahasiswa mengalami stres akademik yang tinggi, 52.9% mahasiswa mengalami stres sedang, dan 15.3% mahasiswa dengan stres akademik rendah. Berdasarkan hasil penelitian Fauziyyah, Awinda, and Besral (2021), angka stres pada mahasiswa di Indonesia selama perkuliahan jarak jauh rata-rata sebesar 55,1%, sedangkan pada mahasiswa di luar Indonesia sebesar 66,3%. Angka kecemasan mahasiswa di Indonesia selama perkuliahan jarak jauh rata-rata sebesar 40%, sedangkan pada mahasiswa di luar Indonesia sebesar 57,2%.

Fenomena munculnya stres akademik dipicu karena adanya rasa ketakutan dari para mahasiswa akan kegagalan prestasi akademiknya karena merasa perkuliahan yang dilakukan tidak maksimal selama mengikuti pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian Andiarna and Kusumawati (2020) pembelajaran daring menyebabkan stres akademik mahasiswa. Mahasiswa mengalami rasa ketakutan akan kemajuan akademiknya serta takut gagal dalam mencapai target yang diharapkan. Mahasiswa juga tertekan sebab harus mampu belajar mandiri, harus berkonsentrasi tinggi dalam memperhatikan penjelasan dosen selama perkuliahan sementara signal terkadang tidak stabil dan menghilang sehingga terlempar dari zoom meeting. Alhasil mahasiswa yang kurang menguasai teknologi akan mudah panik, terlebih di awal-awal pembelajaran dengan zoom meeting. Belum lagi beban tugas yang menumpuk dan dikejar deadline. Tak hanya itu, mahasiswa juga tertekan karena amanah orang tua juga merasa kasihan dengan orang tuanya sebab terjadi pembengkakan biaya untuk membeli kuota internet.

Fitriasari et al. (2020) menjelaskan bahwa mahasiswa tidak disiapkan sebelumnya untuk model pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan moda daring, sehingga sebanyak 75,8% mahasiswa di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mengalami stress sedang. Penyebab stress tersebut antara lain mahasiswa harus belajar mandiri tanpa adanya interaksi social dengan mahasiswa lain yang kebiasaan ini berkebalikan dari sebelum pandemi. Selain itu, mahasiswa kesulitan untuk berkoordinasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Terlebih kurikulum profesi keperawatan memerlukan banyak praktek di samping teori. Mahasiswa kesulitan memahami materi berupa praktek saat pembelajaran dilakukan secara daring.

Disamping tidak disiapkan sebelumnya, dengan teknik pembelajaran daring justru menimbulkan beban penumpukan tugas bagi mahasiswa karena hampir setiap dosen setelah pembelajaran daring memberikan kegiatan asinkronus untuk dilakukan setelah kegiatan sinkronus dalam sehari mahasiswa bisa menerima penugasan secara mandiri ataupun berkelompok 3-4 matakuliah dan hal ini menjadikan stres akademik semakin menyesakkan mahasiswa. Sebagaimana yang sudah diungkap dalam hasil penelitian Noviyanti (2021), lebih dari 50% mahasiswa kedokteran di tahun pertama mengalami stress. Penyebab stress tersebut seperti: mahasiswa kebingungan menghadapi metode daring dan terjadi penumpukan tugas, karana manajemen waktu mereka kurang diperhatikan alhasil timbul kecemasan dan stress.Berdasarkan hasil penelitian Pinem and Rosita (2021) menunjukkan bahwa mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi mengalami stress selama

pembelajaran daring dengan level sedang.Untuk mengatasinya mahasiswa melakukan coping stress adaptif.Tak hanya di perguruan tinggi, pembelajaran daring juga menyebabkan stress pada anak sekolah. Sebagaimana hasil penelitian menurut Jatira and Neviyarni (2021) bahwa pembelajaran daring dimasa pandemi Covid 19 menyebabkan peserta didik mengalami stress, jenuh, bosan dan malas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas tersebut penyebab persoalan pembelajaran daring dapat dikelompokkan sebagai berikut: ketidaksiapan mahasiswa karena tidak ada penyiapan diawal, kendala dalam hal pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal sehingga terkesan monoton dan membosankan; kendala dalam hal fasilitas pendukung pembelajaran yang kurang memadai seperti quota internet limit, peralatan yang kurang mendukung; kendala dari segi finansial seperti terjadi pembengkakan biaya untuk beli quota internet; dan kendala yang bersifat internal individu seperti merasa terbebani dengan amanah orang tua, terbebani dengan tugas-tugas, terbebani karena kurang menguasai teknologi, terbebani karena harus serba mandiri, tidak terbiasanya bekerja secara cepat dengan beban ganda, mindset mahasiswa yang belum dewasa dalam mensikapi setiap perubahan keadaan yang terjasi sehingga semuanya dianggap sebagai beban dan selalu merasa terbebani karena kemampuan yang tidak sesuai target.

2. Kejenuhan belajar

Kejenuhan belajar daring selama pandemi covid-19 ini nampaknya dialami setiap mahasiswa seperti kelelahan psikis maupun fisik sehingga

memunculkan sikap malas untuk mengerjakan sesuatu menjadikan mahasiswa semakin terkesan manja dan tidak tahan banting dalam mensikapi perubahan kehidupannya. Hal ini senada dengan hasil penelitian Pawicara and Conilie (2020) kejenuhan belajar terjadi pada mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember. Indikator kelelahan yang diuji merujuk pada skala Burnout menurut Schaufeli dan Enzmann (1998: 21-22) yang meliputi aspek kelelahan emosi, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan kehilangan motivasi. Kelelahan emosi ditunjukkan dengan indikator: timbulnya perasaan depresi, sedih, tidakberdayaan mengendalikan emosi, ketakutan, dan kecemasan. Kelelahan fisik ditunjukkan dengan indikator: pusing, sakit kepala, mual, diare, sendi-sendi otat yang kaku, sakit leher, insomnia, berkurangnya nafsu makan, sesak nafas, menstruasi yang tidak teratur akibat stres, berat badan menurun, tubuh lesu dan lemah, anemia, hipertensi, dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Kelelahan kognitif ditunjukkan dengan indikator: ketidakberdayaan, kehilangan semangat, kehilangan makna hidup, kehilangan minat untuk belajar, kehilangan minat untuk mengikuti pembelajaran, dan kesulitan berkonsentrasi. Kehilangan motivasi ditunjukan dengan indikator: semangat belajar melemah, kehilangan minat belajar, dan perasaan mudah menyerah. Sejatinya mereka menyukai pembelajaran daring, namun pelaksanaannya cenderung monoton dan membosankan akibatnya timbul kejenuhan dan kemalasan. Apalagi diikuti tugas-tugas yang menumpuk. Pada mata kuliah yang membutuhkan penjelasan lebih perlu didukung media pembelajaran yang memadai.

Kejenuhan belajar bisa muncul karena kurang variasinya metode atau model pembelajaran yang

digunakan sehingga menyebabkan mahasiswa mudah mengantuk, tidak memperhatikan, mencari kesibukan sendiri selama diberi pembelajaran dan bahkan menjadi troubel maker dalam kelas. Perilaku-perilaku yang ditimbulkan mahasisw tersebut sebenarnya hanya untuk mengalihkan kejenuhan belajarnya, sehingga dia merasakan betah sampai menunggu batas waktu selesainya kuliah. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dalam pencapaian pemahaman dan prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, dosen sangat diharapkan memiliki sense of belonging terhadap setiap perilaku yang dimunculkan oleh para mahasiswanya sehingga bisa dengan cepat diatasi persoalan kejenuhan belajarnya. Beberapa cara yang bisa diterapkan para dosen adalah dengan melibatkan mahasiswa berinteraksi dalam kegiatan perkuliahan yang dilakukannya, misal dibangun dengan fokus group discussion, tanya jawab, dibuat project class, presentasi dua arah, dan lain sebagaimnya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Stress, Frustasi, dan Kejenuhan Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring

Secara garis besar faktor-faktor penyebab stress, frustasi, dan kejenuhan mahasiswa selama pembelajaran daring dapat dikelompokkan menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sumber stress yang berasal dari dalam diri individu, misalnya sakit, usia, jenis kelamin, serta kematangan diri. Faktor internal biasanya dipicu dari kelelahan psikis dan juga fisik dari mahasiswa sehingga akan menganggu sistem syarat dalam tubuhnya dan menyebabkan mahasiswa mudah mengantuk, lelah, tidak fokus, hilangnya konsentrasi, dan memicu

perilaku-perilaku yang terkadang diluar kendali atau bergerak diluar kesadarannya.

Faktor eksternal merupakan sumber stress yang berasal dari faktor luar diri individu termasuk lingkungan, misalnya faktor sosial adanya konflik/perselisihan, faktor keluarga, faktor ekonomi, serta faktor lingkungan seperti suasana tidak kondusif, cuaca ekstrim, serta bencana. Berdasarkan hasil penelitian Nurchayati et al. (2021), mahasiswa di sebuah program studi di salah satu perguruan tinggi di Surabaya saat pembelajaran daring di masa pandemi mengalami hal-hal berikut: paparan materi kuliah yang tidak memadai, sukarnya interaksi dengan dosen dan sesama mahasiswa, sukarnya akses ke bahan pembelajaran, buruknya koneksi internet, distraksi lingkungan, dan berubah-ubahnya jadwal kuliah. Akibatnya, pengalaman belajar mahasiswa tidak optimal sehingga mereka mengalami problem psikis.

Menurut Argaheni (2020), pembelajaran daring yang dilakukan masih membingungkan mahasiswa; mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan kurang produktif, terjadinya penumpukan informasi/konsep pada mahasiswa; mahasiswa mengalami stress; walau begitu terjadi peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Menurut Riazul and Harri (2021) faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran daring mahasiswa seperti kurang efektifnya dosen saat penyampaian materi, lingkungan rumah tidak kondusif untuk melakukan proses pembelajaran karena berisik.

Faktor-faktor penyebab munculnya stres, frustasi dan kejenuhan belajar mahasiswa jika dibiarkan terus menerus akan memungkinkan munculnya prestasi mahasiswa dan otomatis akan

semakin lama proses perkuliahan mahasiswa tersebut. Oleh karena perlu ada alternatif solusi untuk mengelolanya dengan baik dan menjadikan fenomena yang terjadi justru menjadi suatu tantangan untuk berkreasi dan berinovasi bagi pada dosen untuk menemukan metode atau model pembelajaran yang menyenangkan dan mengembirakan sehingga mahasiswa merasakan nyaman, aman selama proses perkuliahan berlangsung dan bisa memahami materi yang ditransferkan pada saat itu.

4. Manajemen Stress, Frustasi, dan Kejenuhan Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19

Manajemen stress merupakan upaya mengelola yang diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stress, kemudian diikuti dengan memilih strategi problem solutif yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu dapat juga melakukan aktivitas menyenangkan serta berlatih untuk melakukan teknik relaksasi (Grhasia.jogjaprov.go.id, 2020). Dalam mengelola stress dapat dilakukan dengan beraktivitas yang menyenangkan (healing); menyalurkan hobi, seperti beternak, berkebun, memasak, dll; tetap bersosialisasi meskipun secara virtual; dan apabila stress atau kecemasan terasa berat dan mengganggu, tidak segan untuk bercerita keorang yang dipercaya atau mencari pertolongan professional (Fauziyyah et al., 2021).

Menurut Muslim (2020) manajemen stress di masa pandemi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengenali faktor penyebab stress (stressor). Terdapat 8 strategi mengatasi stress (*coping stress*) yang biasanya dikenal dalam ilmu psikologi, antara lain: konfrontasi, mencari dukungan sosial, merencanakan pemecahan masalah dikaitkan dengan problem-*focused coping*,

kontrol diri, membuat jarak, penilaian kembali secara positif, menerima tanggung jawab, dan lari atau penghindaran. Adapun strategi *coping stress* yang paling efektif adalah strategi yang sesuai dengan situasi.

Berdasarkan hasil penelitian Nurchayati et al. (2021), mahasiswa berusaha beradaptasi pada sistem perkuliahan online dengan menempuh beragam strategi *coping* yaitu *coping* yang berpusat pada problem (*problem-focused coping*), *coping* yang bertumpu pada emosi(*emotion-focused coping*) dan coping yang berbasis interpretasi (*appraisal- focused coping*). Tindakan yang dilakukan mahasiswa antara lain seperti mencari jaringan internet yang mendukung pembelajaran, memperbaiki manajemen waktu, mencari kekurangan materi dan alat penunjang kuliah, bernegosiasi dengan dosen tentang jadwal perkuliahan, positive thinking, self-talk dan motivasi diri, rekreasi dan relaksasi, *religious coping*, memperbanyak rasa syukur, berbagi cerita, memodifikasi lingkungan yang mendukung atmosfer pembelajaran, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan minat dan rasa keingintahuan.

Berdasarkan hasil penelitian Hanifah et al. (2020) 61,9% mahasiswa Psikologi Angkatan 2019 Universitas Andalas saat kuliah daring melakukan strategi coping stress dalam bentuk *emotional focused coping*, yaitu mahasiswa mencoba untuk mengatasi stress yang dialami dengan cara menarik diri dari masalah masalah yang timbul saat perkuliahan daring. Adpaun sebagian besar laki-laki lebih menggunakan *problem solving focused coping* untuk menatasi masalahnya, yakni menghilangkan atau megubah stressor tersebut melalui tindakan. Sebanyak 82,1% mahasiswa merasakan dampak baik setelah melakukan strategi coping stress.

Secara umum, pada tingkatan usia yang semakin tinggi, tingkat stress akademik cenderung semakin rendah, sebab individu mampu mengelola stresnya dengan baik dan tidak berlebihan.Usia seseorang berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam menghadapi berbagai macam stressor, tentunya pengalaman tersebut berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam memanfaatkan sumber dukungan dan keterampilan dalam mekanisme koping (mengatasi stress). Jadi, mestinya semakin bertambah usia semakin baik kemampuan seseorang dalam mengelola stress.

Antara mahasiswa yang satu dengan yang lain tentu memiliki pengalaman yang berbeda dan dipersepsikan berbeda pula walaupun dengan stressor yang sama. Oleh sebab itu, tingkat stress yang dialami oleh setiap mahasiswa bergantung dengan pengalaman stress akademik setiap individu tersebut. Tak hanya itu, jenis kelamin juga menentukan tingkat stress. Menurut hasil penelitian Fitriasari et al. (2020), mahasiswi perempuan mengalami stress lebih tinggi dibanding mahasiswa laki-laki. Secara biologis, pada perempuan sistem HPA (Hypothalamic Pituitary Adrenal) Axisakan mensekresikan ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) lebih banyak dari laki-laki yang mengakibatkan kortisol lebih mudah untuk dihasilkan yang berdampak pada timbulnya stress. Tidak hanya itu, pengaruh hormonal bagi wanita yang sedang terkena menstruasi juga menyebabkan emosi yang tidak stabil, sensitif, mudah marah, serta lebih mudah mengalami stress.

Pengelolaan stress, frustasi, dan kejenuhan belajar sebenarnya berpulang pada pribadi masing-masing untuk mengatur mindset dalam diri masing-masing untuk senantiasa mengedepankan berpikir

positif dalam memandang apapun yang terjadi. Berpikir positif adalah sikap mental dari dalam diri sendiri seseorang untuk menghadapi kondisi yang dialami sebagai akibat logis dari perbuatannya sendiri. Ketika karma buruk sedang berbuah, hendaknya ia tidak hanya menerima secara pasrah akibat karma buruk itu; tetapi hendaknya melakukan kebajikan dalam hidupnya dengan penuh kesadaran dan kesungguhan.

Berpikir positif adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Berpikir positif merupakan proses pikiran yang dapat melihat segala sesuatu apa adanya, yaitu : timbul, bertahan dan tenggelam. Jika seseorang dapat melihat segala sesuatu sebagai suatu proses, maka itu adalah proses yang sangat wajar dari segala sesuatu. Jika kita dapat melihat dan memahami segala sesuatu sebagai sesuatu yang wajar mengalami perubahan, maka kita akan melihat kesunyataan. Seseorang yang memiliki pola pikir bahwa perubahan adalah proses yang wajar dan alami dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka tidak akan timbul kekecewaan dalam dirinya terhadap kondisi apapun yang dihadapi.

Pikiran positif yang dilandasi dengan pengertian kebenaran universal yang akan membentengi diri kita dari berbagai hal yang dapat membuat pikiran kita tidak dapat melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Jika pikiran kita dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya sebagai suatu proses maka pikiran kita akan dapat menanggapi berbagai kejadian dan peristiwa dengan cara yang lebih bijaksana. Orang yang berpikir negatif akan membuat dirinya menjadi negatif, sebaliknya dengan berpikir positif ia akan menjadi seperti apa yang dipikirkannya. Untuk itu seseorang yang memiliki cara berpikir negatif

hendaknya dapat mengubah cara berpikirnya. Karena dengan dapat berpikir positif dalam menghadapi segala sesuatu, ia akan selalu berbahagia pada kondisi apapun yang dialaminya. Insyaalloh jika kita merubah mindset diri dengan senantiasa berpikir positif maka setiap persoalan akan bisa diselesaikan dengan baik dan termanajemen dengan bagus. Dengan berpikir positif maka sesungguhnya kita sudah memberikan energi positif bagi tubuh kita yang potensinya bisa mencapai 50 persen kekuatan untuk bisa memenangkan sesuau termasuk didalamnya mengatasi stress, frustasi, dan kejenuhan dalam belajar. Dengan berpikir positif maka hati menjadi tenang, pikiran juga semakin jernih untuk bisa mensikapi apapun yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kajian dapat diketahui bahwa faktor penyebab persoalan pembelajaran daring dapat dikelompokkan sebagai berikut: kendala dalam hal pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal sehingga terkesan monoton dan membosankan; kendala dalam hal fasilitas pendukung pembelajaran yang kurang memadai seperti quota internet limit, peralatan yang kurang mendukung; kendala dari segi finansial seperti terjadi pembengkakan biaya untuk beli quota internet; dan kendala yang bersifat internal individu seperti merasa terbebani dengan amanah orang tua, terbebani dengan tugas-tugas, terbebani karena kurang menguasai teknologi, terbebani karena harus serba mandiri, terbebani karena kemampuan yang tidak sesuai target, dan lain-lain. Adapun manajemen stress dapat diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stress, kemudian diikuti dengan memilih strategi problem solving yang

efektif dan tepat sasaran. Selain itu dapat juga melakukan aktivitas menyenangkan (healing), menyalurkan hobi, berlatih untuk melakukan teknik relaksasi, tetap bersosialisasi meskipun secara virtual; dan apabila stress atau kecemasan terasa berat dan mengganggu, tidak segan untuk bercerita keorang yang dipercaya atau mencari pertolongan professional.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiyanti. 2021. "Banyak Sekolah Belum PTM, Nadiem Khawatirkan Learning Loss Pada Siswa." *Katadata.Co.Id*, January 29.

Andiarna, Funsu, and Estri Kusumawati. 2020. "Effects of Online Learning on Student Academic Stress during the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Psikologi* 16(2):139–50.

Andriani, Wiwin, M. Subandowo, Hari Karyono, and Wawan Gunawan. 2021. "Learning Loss Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Corona." Pp. 484–501 in *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Apriliana, Dena Noor. 2021. "Strategi Koping Dan Stres Akademik Mahasiswa Dalam Melaksanakan Kuliah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9(1):89–96.

Argaheni, Niken Bayu. 2020. "Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia." *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* 8(2):99.

Budi, S., I. S. Utami, R. N. Jannah, N. L. Wulandari, N. A. Ani, and W. Saputri. 2021. "Deteksi Potensi Learning Loss Pada Siswa Berkebutuhan Khusus Selama

Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Inklusif." *Jurnal Basicedu* 5(5):3607–13.

Donnelly, Robin, and Harry Anthony Patrinos. 2021. "Learning Loss during Covid-19: An Early Systematic Review." *Prospects (Paris)* 10:1–9.

Fahruni, Findivia Egga, and Hadi Warsito Wiryosutomo. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Malas Belajar Daring Saat Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Menganti Gresik." *Jurnal BK UNESA* 12(2):22–36.

Fathonah, Siti, and Cahya Ramadhani Renhoran. 2021. "Gambaran Tingkat Stress Guru Madrasah Aiyah Di Jakarta Selatan Selama Masa Pandemi." *Jurnal Pendidikan Islam* 12(1):57–71.

Fauziyyah, Rifa, Rinka Citra Awinda, and Besral Besral. 2021. "Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Tingkat Stres Dan Kecemasan Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan* 1(2):113.

Fitriasari, Andikawati, Yurike Septianingrum, Syiddatul Budury, and Khamida Khamida. 2020. "Stres Pembelajaran Online Berhubungan Dengan Strategi Koping Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Keperawatan* 12(4):985–92.

Grhasia.jogjaprov.go.id. 2020. "Manajemen Stress." *Grhasia.Jogjaprov.Go.Id*. Retrieved March 16, 2022 (https://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/371/manajemen-stress.html).

Hanifah, Nezha, Hany Lutfia, Ulfah Ramadhia, and Rozi Sastra Purna. 2020. "Strategi Coping Stress Saat Kuliah Daring Pada Mahasiswa Psikologi Angkatan 2019 Universitas Andalas." *Jurnal Psikologi Tabularasa*

15(1):29–43.

Hidayati, Lailatul Nur, Sambodo Sriadi Pinilih, and Muhammad Khoirul Amin. 2021. "Gambaran Tingkat Stres Ibu Mendampingi Anak Study from Home (SFH) Di Masa Pandemi Covid-19." Pp. 1–6 in *Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Iftitah, Selfi Lailiyatul, and Mardiyana Faridhatul Anawaty. 2020. "Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Di Rumah Selama Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 4(2):71–81.

Indra, Rafael, Gracia Christifera Lian, Jovanna Abigail, Immanuel Putri, Luisa Valencia, Elysia Sifra, Ully Santoso, and Immanuel Yosua. 2021. "Gambaran Stres Kerja Dan Koping Guru SMA Saat Pembelajaran Daring Selama Pandemi Description Work Stressor and Coping Strategies for High School Teacher during Online Learning in Pandemic Situations." *Mind Set Edisi Khusus TIN* 1(1):63–86.

Jatira, Yadi, and S. Neviyarni. 2021. "Fenomena Stress Dan Pembiasaan Belajar Daring Dimasa Pandemi Covid-19." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(1):35–43.

Kemendikbud RI. 2020. *Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36962/MPK.A/HK/2020*. Jakarta.

Kemendikbud RI. 2021. *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta.

Lilawati, Agustin. 2021. "Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Pada

Masa Pandemi." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5(1):549–58.

Listyanti, Heni, and Ristia Wahyuningsih. 2020. "Manajemen Stres Orangtua Selama Mendampngi Pembelajaran Daring." *Kajian Keislaman Multi-Perspektif IAIN : Surakarta* 1(1):23–48.

Lubis, Hairani, Ayunda Ramadhani, and Miranti Rasyid. 2021. "Stres Akademik Mahasiswa Dalam Melaksanakan Kuliah Daring Selama Masa Pandemi Covid 19." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 10(1):31–39.

Makhin, M. 2021. "Hybrid Learning: Model Pembelajaran Pada Masa Pandemi Di Sd Negeri Bungurasih Waru Sidoarjo." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 3(2):95–103.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020*. Jakarta.

Muslim, Moh. 2020. "Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19." *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis* 23(2):192–201.

Noviyanti, Dwi Wulan. 2021. "Strategi Coping Stress Pada Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Medika Hutama* 3(1):1679–85.

Nurchayati, Muhammad Syafiq, Riza Noviana Khoirunisa, and Ira Darmawanti. 2021. "Students' Strategies for Coping with the Emergency Transition to Online Learning under the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Psikologi Terapan* 11(3):247–66.

Pawicara, Ruci, and Maharani Conilie. 2020. "Analisis Pembelajaran Daring Terhadap Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember Di Tengah

Pandemi Covid-19." *ALVEOLI: Jurnal Pendidikan Biologi* 1(1):29–38.

Pebriani, Sintiya Halisya, Abdul Syafei, and Mardiah Mardiah. 2021. "Stress Level of Nursing Students Due to Online Learning during the Covid-19 Pandemic." *Media Keperawatan Indonesia* 4(4):285.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Surat Edaran Nomor 4 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta.

Pinem, Terendienta, and Kusnulia Rosita. 2021. "Gambaran Tingkat Stres Dan Coping Stress Mahasiswa Dengan Pembelajaran Daring 2020." *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1(3):60–68.

Putri, Amallia, and Yuline Yuline. 2021. "Stress Akademik Dan Coping Mahasiswa Menghadapi Pembelajaran Online Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 7(2):55–61.

Rahman, M. Fathur. 2015. "Pengaruh Dukungan Orang Tua Dan Fasilitas Belajar Di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Melalui Motivasi Belajar Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Ungaran." in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan EKonomi dan Bisnis*. Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Renny, Clauradita Angga. 2020. "Management Stress Kerja Guru Sd Terhadap Beban Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19." *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling* 3(3):219–26.

Riazul, Jannah, and Santoso Harri. 2021. "Tingkat Stres Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Dan Pengabdian*

Masyarakat 1(1):130–46.

Rossa, Vania, and Dini Afrianti Efendi. 2021. "Hasil Survei: Satu Tahun Pandemi, Siswa Alami Learning Loss Yang Setara Dengan 6 Bulan." *Suara.Com*, January 29.

Sovayunanto, Riski. 2022. "Learning Loss Dan Faktor-Faktor Penyebab Di Sekolah Menengah Pertama (SMP)." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 8(1):12–17.

Utami, Rahayu Hardianti, Elrisfa Magistarina, Mario Pratama, and Andhita Nurul Khasanah. 2021. "Between Boredom and Frustration: Predictor of Compulsive Internet Use." *Jurnal Neo Konseling* 3(4):13–18.

Yulianingsih, Wiwin, Suhanadji, Rivo Nugroho, and Mustakim. 2021. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Anak Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5(2):1138–50.

SONGSONG PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA: MEMBANGUN BRANDING MODERN AND TECHNOEDUPRENEURSHIP SCHOOL

Mohamad Joko Susilo

PENDAHULUAN

Di masa pandemi covid-19 yang tak kunjung usai, menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran. Saat masa pandemi 2020-2021 tersebut Kemendikbudristek memberlakukan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan (Aditya, 2022). Meskipun demikian, rupanya belum mampu memperbaiki kualitas pembelajaran. Terlebih mengetahui hasil riset dari World Bank, UNICEF juga Kemendikbud Ristek bahwa telah terjadi kemunduran belajar (*learning loss*) yang menimpa anak Bangsa (Budi et al., 2021; Donnelly and Patrinos, 2021; Engzell, Frey, and Verhagen 2021; Pratiwi, 2021; Rossa dan Efendi, 2021). Hal itu mengetuk hati para penyelenggara pendidikan untuk segera beradaptasi dan berbenah memulihkan kualitas pendidikan Bangsa ini. Dari dasar itulah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum baru yang kemudian diberi nama Kurikulum Merdeka. Peluncuran kurikulum merdeka tepatnya tertanggal 11 Januari 2022 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2022 (Kemendikbud Ristek RI, 2022).

Dalam historisnya, di masa pandemi 2021-2022 ini Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan

Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK). Implementasi Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK tahun 2021 untuk pertama kali dirasa menjadi angin segar sebagai bentuk solusi perbaikan dan pemulihan pembelajaran. Oleh sebab itu, di tahun 2022-2024 ini Kemendikbud Ristek mengeluarkan kebijakan bagi sekolah yang sudah siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dipersilakan untuk menerapkan, namun bagi sekolah yang belum siap dapat menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Darurat (kemendikbud.go.id, 2022).

Kurikulum Merdeka sebelumnya telah diuji cobakan di 2.500 sekolah penggerak dan membuahkan hasil. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang mendukung program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan 2024. Nantinya, kurikulum merdeka ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP dan SMA bagi sekolah yang telah siap, jadi proses implementasi Kurikulum Merdeka ini tidak secara massif dan serentak melainkan memberikan keleluasaan bagi setiap penyelenggara satuan pendidikan (Aditya, 2022; Caesaria, 2022; kemendikbud.go.id, 2022).

Di jenjang Perguruan tinggi, kurikulum ini berusaha memberikan hak seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Mahasiswa diberi kelonggaran untuk belajar lintas program studi dalam program MBKM. Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan, menjadi peneliti, mengikuti proyek kemanusiaan, mengikuti kegiatan wirausaha, studi/Proyek Independen, serta kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (Aditya,

2022; kemendikbud.go.id, 2022; Penulis Sekolah Penggerak, 2021).

PEMBAHASAN

1. Menyongsong Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Kemendikbud Riset dalam rangka merespon dampak pandemi covid-19. Kurikulum Merdeka bersifat lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama kurikulum merdeka antara lain: pembelajarannya berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila; berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi; bersifat fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal (Caesaria, 2022; Kemendikbud.go.id, 2022).

Kurikulum Merdeka memberikan porsi yang besar dalam proses pembelajaran. Nilai yang diberikan kepada siswa lebih banyak memperhatikan proses siswa dalam menjalankan pembelajaran melalui asesmen diagnostik dan formatif. Konsep ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang bermakna menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan serta menggapai kebahagiaan setinggi-

tingginya. Ini bermakna pendidikan dijalankan sesuai keinginan dan potensi yang dimiliki siswa. Karena terjalin kecocokan, maka mereka merasa senang dalam belajar sehingga menghasilkan kebahagiaan (Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, 2022).

Dalam Kurikulum Merdeka dengan memberikan pembelajaran Project Based Learning memberikan ruang kepada guru dan peserta didik untuk melihat masalah dalam keseharian dan mencoba menemukan solusi dari masalah tersebut. Sekolah harus memberikan inovasi baru dalam segi fasilitas pembelajaran, kegiatan, ektrakurikuler, kegiatan pembelajaran bekerja sama dengan lingkungan/ perusahaan, guru harus berinovasi dalam pembelajaran, untuk menumbuhkan inovasi dari peserta didik. Dengan lingkungan seperti ini maka pembelajaran menjadi sesuatu yang dirindukan oleh siswa (Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, 2022). Di dalam kurikulum merdeka ini menghadirkan empat pokok kebijakan terkait dengan paradigma metode belajar dan mengajar yang lama diubah menjadi lebih progresif ke arah kemajuan. Selain itu, adanya penghapusan ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional. Di kurikulum merdeka terjadi penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Mekanisme penerimaan peserta didik baru juga berubah menjadi lebih fleksibel (Aditya, 2022).

Kemendikburistek dalam implementasi kurikulum merdeka memberikan beberapa alternatif strategi. *Pertama*, adopsi Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap. *Kedua*, Kemendikburistek menyediakan Asesmen & Perangkat Ajar (*High Tech*) seperti buku teks, modul ajar, contoh projek, dan

contoh kurikulum dalam bentuk digital yang dapat diakses dan digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. *Ketiga*, Kemendikburistek menyediakan Pelatihan Mandiri & Sumber Belajar Guru (*High Tech*) yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast, atau ebook. *Keempat*, Kemendikburistek menyediakan Narasumber Kurikulum Merdeka (*High Touch*) dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. *Kelima*, Kemendikburistek memfasilitasi Pengembangan Komunitas Belajar (*High Touch*) yang dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun diinisiasi Pengawas Sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi kurikulum merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan (Caesaria, 2022; Kemendikbud.go.id, 2022).

2. Membranding Sekolah/Madrasah

Sebagaimana uraian tentang Kurikulum Merdeka dapat diketahui bahwa pemerintah saat ini telah memberikan kewenangan secara luas kepada satuan pendidikan untuk mengelola lembaga pendidikannya masing-masing. Menyambut kebijakan tersebut setiap satuan pendidikan berhak untuk mengelola sekolah/madrasahnya sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing. Walaupun tidak dipungkiri kebijakan semacam ini dapat membuka pintu persaingan antarlembaga pendidikan untuk bersaing kuat memperebutkan animo masyarakat dengan meningkatkan citra sekolah/madrasah. Citra sekolah/madrasah ini yang kemudian dikenal dengan branding sekolah. Branding sekolah bentuknya bermacam-macam, dapat berupa

pencitraan yang terkait lingkungan fisik sekolah, pelayanan sekolah, proses pembelajaran, budaya positif warga sekolah, transparansi program dan anggaran, prestasi akademik dan non akademik sekolah, serta pencitraan yang terkait dengan kualitas alumni (Sholikhah, 2021). Peningkatan citra sekolah ini penting dilakukan guna mempertahankan eksistensi keberlangsungan satuan pendidikan terlebih di era milenial revolusi industry 4.0 dan society 5.0 ini.

Istilah *brand* (merek) tidak lepas dari sebuah produk, yang dapat berupa barang maupun jasa. Adapun image merupakan persepsi atau kesan terhadap suatu obyek. *Brand image* merupakan strategi pemasaran yaitu berupa persepsi pelanggan tentang sebuah merek, yang tercermin dari asosiasi merek yang diadakan di memori pelanggan. *Brand image* pendidikan merupakan hasil persepsi oleh masyarakat tentang seluruh atribut yang melekat pada lembaga pendidikan (Karsono, Purwanto, and Bin Salman, 2021; Purnamasari, Setyadji, and Ashfahani, 2020; Swasty, 2016). Branding sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat seragam sekolah yang unik, membangun dan menonjolkan penciri positif dari satuan pendidikan, menonjolkan prestasi yang telah diraih satuan pendidikan, meningkatkan publikasi dan dokumentasi pemasaran yang menarik dan dalam jangkauan luas melalui pemanfaatan teknologi informasi, membuat slogan yang unik dan bermakna, serta menciptakan learning outcome (alumni) yang bernilaiguna di masyarakat. Brand image bagi madrasah maupun sekolah-sekolah islam dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai agama, misalnya sekolah tahfidz, sekolah al-

qur'an, sekolah alam, dan lain-lain yang cenderung lebih menarik siswa maupun masyarakat luas.

Brand image sering kali digunakan satuan pendidikan sebagai upaya memasarkan pendidikannya terlebih bagi lembaga pendidikan yang kurang mampu bersaing (Dwiyama, 2019). Sebagaimana hasil penelitian oleh Purnamasari et al. (2020) bahwa penurunan jumlah siswa dan brand image Sekolah Aluna dapat diperbaiki dengan cara memperbaharui strategi promosi yang berupa brosur, spanduk, website, media sosial; meningkatkan pendekatan hubungan masyarakat (*public relations*); serta melakukan pelatihan sumber daya manusia. Demikian halnya hasil penelitian Karsono et al. (2021) yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan MTs Negeri 1 Purbalingga dalam membranding sekolahnya dengan cara meningkatkan kualitas baik dari segi prestasi maupun non akademik (*character building*). Strategi branding MTs Negeri 2 Purbalingga lebih menekankan pada upaya menarik minat dari segi kinerja dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun MTs Negeri 3 Purbalingga lebih memilih strategi branding dengan dengan pencapaian prestasi akademik dan non akademik yang baik serta pelayanan kinerja baik bagi guru maupun pegawai. Hasil penelitian Khoiruddin (2016) juga menunjukkan bahwa 1) upaya yang dilakukan MI Masholihul Huda untuk membangun brand image dengan cara penyampaian visi dan misi yang jelas dan menciptakan citra positif madrasah dengan mendorong guru-guru untuk meningkatkan professionalismenya, mencip-takan lingkungan yang kondusif, pembelajaran yang ramah siswa, membangun manajemen yang kuat, menciptakan kurikulum yang luas tapi seimbang, penilaian dan

pelaporan prestasi siswa yang bermakna, serta pelibatan orang tua dan masyarakat.

Walaupun demikian, bagi sebagian sekolah membangun brand image ini dianggap sebagai suatu hal yang sulit (Dwiyama, 2019), sebab satuan pendidikan harus memiliki sesuatu yang dapat ditonjolkan atau diunggulkan. Di samping itu, nilai kebermanfaatan dan kualitas juga mesti ditonjolkan, pelayanan prima, serta output yang dihasilkan. Sejauh ini, sering kali sekolah negeri dijumpai 'kurang' dalam berinovasi dan merasa sudah cukup dengan yang ada. Sementara sekolah swasta lebih leluasa terhadap pengelolaan sekolahnya dan secara fleksibel dapat membangun citra sekolahnya lebih mudah. Seharusnya tidak demikian, melainkan setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya supaya eksistensinya terjaga dan mendapatkan porsi di hati masyarakat.

Sejauh ini, branding-branding sekolah yang telah bermunculan di lapangan seperti sekolah siaga bencana (Baidhawy, 2015; Suaramuhammadiyah.id, 2016), sekolah muhammadiyah plus (Ratnawati, 2016; Rukmana, 2016), sekolah mandiri (Wahab, 2012; Yuliana, B., and Ratri, 2010), sekolah adiwiyata (Department of Housing, 2018; Nada, Fajarningsih, and Astirin, 2021; Rachman et al., 2017; Riki and Sumarnie, 2021; Silaban and Yuliani, 2017; Toharoh, Suyoto, and Khaq, 2021; Zaini and Syafaruddin, 2020), boarding school (Anggara, 2014; Muhammadiyah Boarding School, 2018; Musyarofah 2016; Retnasari and Suharno, 2018; Susiyani and Subiyantoro, 2017), sekolah alam (Hamadani, 2015; Ramadan, 2019; sekolahalamindonesia.sch.id, 2022),

sekolah tahfidz (Arifin and Setiawati, 2021; Rosita and Yacob, 2019), sekolah ramah anak (Artadianti and Subowo, 2017; Indraswati et al., 2020) dan lain-lain.

3. Analisis Peluang dan Strategi Membranding Madrasah

Agar sekolah-sekolah yang bernuansa Islami (madrasah) tetap mempertahankan eksistensi keberlangsungan hidupnya dan mampu merespon kebutuhan masyarakat di setiap lini kehidupan, maka sudah selayaknya setiap satuan pendidikan madrasah harus memiliki strategi peningkatan kualitas. Menurut M. Joko Susilo (2017) strategi meningkatkan kualitas sekolah dapat dilakukan dengan cara: 1) mengubah arah kebijakan berkemajuan, 2) membangun leadership yang tangguh, 3) menciptakan budaya yang berkesejahteraan, dan 4) mempererat jejaring sekolah. Strategi peningkatan kualitas ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menganalisis situasi, kondisi serta potensi setiap satuan pendidikan atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT akan dapat diidentifikasi setiap kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan tantangan (T) satuan pendidikan.

Sebagaimana hasil penelitian Maamarah (2016), setelah melakukan analisis SWOT diketahui bahwa akar penyebab rendahnya kualitas SDN 02 dan 04 Ungaran terletak pada rendahnya kemampuan siswa, kurangnya guru dalam memotivasi belajar siswa, rendahnya kemauan guru untuk mengupdrage keterampilan mengajar, sebagian besar guru sudah lanjut usia dan gagap teknologi, guru yang tidak merencanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, kepala sekolah belum pernah mengikuti pelatihan

manajerial, ukuran ruang kelas tidak standar dan perpustakaan juga tidak memadai. Alhasil citra SDN Ungaran 02 dan 04 kurang baik sebab supervisi akademik dan kompetensi ekstrakurikuler rendah. Setelah diketahui akar masalah selanjutnya satuan pendidikan dapat memberikan solusinya secara tepat sasaran. Berikut ini disajikan tabel analisis swot salam persiapan membranding masradah.

Tabel 1. Analisis SWOT dalam persiapan membranding madrasah

Strength (kekuatan)	**Weakness (kelemahan)**	**Opportunities (peluang)**	**Threats (tantangan)**
Keilmuan yang senantiasa bertambah dan terupgrade	Sistem pendidikan di madrasah masih dalam proses pencarian bentuk yang ideal	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk berkembang dan berkompetisi	Perkembangan IPTEK yang semakin canggih
Kedudukan agama yang semakin kokoh dalam membentengi moral dan intelektual Bangsa	Keterbatasan anggaran pembiayaan dan kurangnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (GTK)	Animo masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bernuansa islam (madrasah)	Hambatan birokrasi dalam pengembangan madrasah
Generasi penerus (SDM) yang senantiasa lebih melek teknologi	Keterbatasan sumber daya insani yang handal dan profesional	Animo masyarakat yang tinggi untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan madrasah	Tuntutan kurikulum yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman
Hubungan harmonis	Kurangnya manajemen	Adanya dukungan dana	Perlu optimalisasi

antara madrasah dengan masyarakat dan lembaga institusi lain	pengelolaan madrasah yang mampu mendongkrak Badan Usaha Milik Sekolah/ Badan Usaha Madrasah (BUMS/BUM)	dari pemerintah seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan donatur	kemitraan dan jalinan kerjasama madrasah
Semangat juang GTK tinggi walaupun kesejahteraan mereka rendah	Biaya pendidikan tinggi terlebih bagi lembaga swasta dan persaingan antarsatuan pendidikan meningkat sehingga jika kalah persaingan dapat menyebabkan tutupnya sekolah/madrasah	Jalinan kerjasama antara madrasah dengan alumni dapat membantu mempertahankan kualitas dan keberlangsungan madrasah	Ekonomi masyarakat lebih ke arah menengah ke bawah yang dapat mempengaruhi stabilitas sekolah

Mengacu pada analisis SWOT pada madrasah dan melihat peluang untuk menerapkan Kurikulum Merdeka memberikan ruang kebebasan untuk membranding sekolah/madrasah dengan lebih tepat sesuai dengan potensi dan karakteristik dari satuan pendidikan. Salah satu gagasan untuk mengisi ruang dalam membranding sekolah/madrasah adalah dengan mengembangkan sekolah/madrasah menjadi MTS (*Modern and Technoedupreneurship School*). Model MTS merupakan model sekolah zaman sekarang (*modern*), dengan berbasis pada teknologi (*information technology and communication*) dalam kegiatan pembelajarannya serta mengedepankan pendidikan dan jiwa berwirausaha (*enterpreneur*) (Susilo, 2018). Konstruk teori model MTS memiliki indikator-indikator yang meliputi: kepemimpinan, budaya, daya

dukung sekolah, dan jejaring kerjasama sebagaimana Gambar 1 berikut.

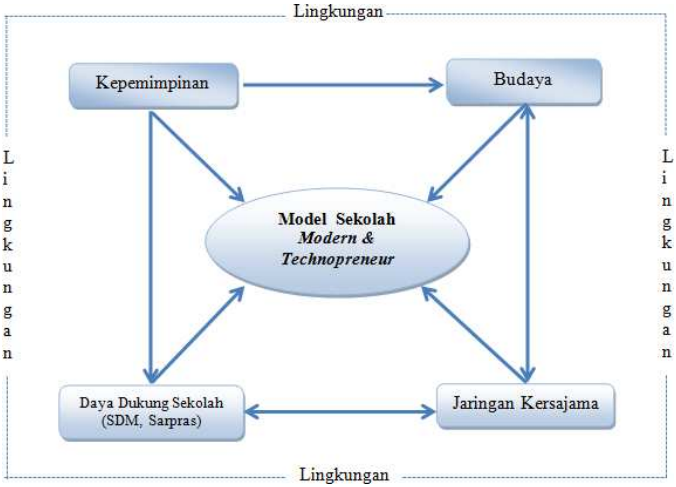

Gambar 1. Model Branding MTS (*Modern and Technoedupreneurship School)* (Susilo, 2018)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa MTS terbentuk atas dasar dukungan dari berbagai komponen antara lain: kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, daya dukung sekolah, dan jejaring kerjasama sekolah dengan lembaga lain. Konstruk pengembangan MTS tersebut bermakna bahwa sekolah/madrasah telah menerapkan SNP (Standar Nasional Pendidikan) namun juga memiliki nilai plus sebagai keunggulannya (X), sehingga dapat diformulasikan menjadi, MTS = SNP + X. Dari formula tersebut berarti bahwa sekolah/madrasah telah menerapkan standar nasional pendidikan sebagai standar minimal wajib dan memiliki nilai plus (X)

sebagai keunggulan yang dibangun oleh tiap-tiap sekolah/madrasah (Susilo, 2018).

Modern and Technoedupreneurship School (MTS) digagas dalam rangka untuk menjawab tantangan lingkungan global sebagai tuntutan kemajuan. MTS dikembangkan dari pemikiran secara makro bahwa sekolah/madrasah dimaknai sebagai sekolah unggul yang mandiri dan mengimplementasikan manajemen otonomi. Dasar inilah yang menjadi pijakan untuk mengetahui model yang sesuai dalam suatu sekolah/madrasah. Pengembangan model MTS ini didasari dari khasanah bahwa sekolah/madrasah memiliki potensi untuk berinovasi, seperti siswa yang melek teknologi, mandiri, serta memiliki jiwa-jiwa interpreneurship dan pandangan yang luas. Oleh sebab itu, sekolah berusaha mewadahi potensi dan motivasi siswa tersebut untuk disalurkan pada bidang yang tepat. Harapannya, akan terlahir siswa-siswa yang menjadi cita-cita keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tak hanya mandiri dalam spiritual, intelligence dan skill, MTS ini berupaya untuk menjadi penghasil income generating sekolah/madrasah. Income generating sekolah berguna untuk meningkatkan pendapatan komersial sekolah dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya insani civitas akademika sekolah/madrasah (Junanah and Susilo 2021). Income generating ini sering kali dikenal sebagai Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) atau Badan usaha Madrasah (BUM). Saat ini telah banyak sekolah-sekolah maupun madrasah yang memiliki BUMS/BUM, seperti pengadaan armada antar jemput siswa dan usaha kareting MI Muhammadiyah Karanganyar yang keuntungannya digunakan untuk kesejateraan guru

dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Supriyadi, 2018); pengadaan armada antar jemput siswa, pengelolaan kantin dan koperasi oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta yang telah berhasil dan keuntungannya digunakan untuk memberi gaji tambahan ke-14 bagi guru dan karyawan (Suara Muhammadiyah 2019); dan juga BUM MTs Tambelan (Badan Usaha Mekar Bersinar) yang menjual produk olahan dalam bentuk kudapan berupa makaroni dan keripik pisang yang kemudian dititipkan di kedai kopi dan warung-warung sebagai upaya membantu pemasukan kas dan sebagai sarana berdakwah melalui berjualan (Kemenag Bintan, 2021; keprikemenag.go.id, 2021).

MTS juga dapat dimaknai sebagai brand image yang menjadi penciri suatu sekolah/madrasah. Adanya brand image ini sering kali dipakai sebagai ajang promosi untuk meningkatkan citra sekolah dan juga meningkatkan animo masyarakat terhadap sekolah/madrasah tersebut. Meskipun demikian, untuk membangunnya bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan satuan pendidikan harus mampu mengenali potensi dan keunggulan yang dimiliki yang mestinya keunggulan tersebut tidak dimiliki sekolah lain. Tak hanya itu, pertimbangan perkembangan zaman, IPTEK, kurikulum, tuntutan kebutuhan masyarakat juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam menggagas branding satuan pendidikan. Sebagai konsekuensinya, sekolah/madrasah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanannya sehingga apa yang telah dipromosikan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan.

Gagasan mengembangkan MTS merupakan ejawantah dari sekolah/madrasah yang akan berkualitas apabila mampu menerapkan proses pendidikan yang banyak didukung oleh seluruh komponen-komponen sekolah. Sebagaimana menurut (Heneveld, 1994; Susilo, 2018) sekolah yang berkualitas memiliki 5 faktor pendukung, yaitu: 1) *Supporting Inputs*, terdiri dari: dukungan orang tua dan masyarakat, efektivitas sistem pendidikan, bahan ajar yang memadai, pengembangan kemampuan guru yang sesuai, jumlah buku yang cukup, dan fasilitas yang memadai; 2) *Enable Condition*, terdiri dari: kepemimpinan yang efektif, kemampuan tenaga pengajar, feksibilitas dan kemandirian, dan waktu belajar yang maksimal di sekolah; 3) *School Climate*, mencakup: harapan siswa yang tinggi, sikap positif guru, disiplin dan tertib, kurikulum yang terorganisir, dan insentif dan penghargaan; 4) *Teaching Learning Process* meliputi: waktu KBM berkualitas, metode pembelajaran bervariasi, pekerjaan rumah rutin diberikan, dan penilaian rutin dan umpan balik siswa; dan 5) *Student outcomes*, meliputi: partisipasi, prestasi akademik, ketrampilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi.

Hal yang harus diketahui bahwa branding bagi sekolah/madrasah bukanlah sekedar untuk 'menjual nama', melainkan untuk menampilkan identitas dan jati diri sekolah/madrasah. Branding madrasah dengan karakter yang kuat akan mendapatkan tempat di hati masyarakat (Karsono et al., 2021). Oleh sebab itu, satuan pendidikan madrasah perlu menampilkan kesan mendalam kepada siswa yang merupakan 'tangan panjang' masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sering kali yang terjadi di masyarakat orang tua akan menyekolahkan putra putrinya

mengikuti saudara maupun tetangga yang sebelumnya telah berhasil sekolah disana. Selain itu, adanya peran dari subyek penyebar citra sekolah (*world of mouth*) yang kebetulan dia dipercaya dan diterima baik di masyarakat. Melalui pendekatan marketing 'dari mulut ke mulut' maupun *world of mouth* seperti ini maka akan mempermudah penerimaan sekolah di benak masyarakat. Setelah eksistensinya diterima, maka langkah selanjutnya yakni mempertahankan eksistensi tersebut dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan prima dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kesempatan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka memberikan kebebasan yang sangat luas untuk mengembangkan branding sekolah/madrasah yang sesuai dengan potensi dan karakteristik dari satuan pendidikan. Gagasan mengembangkan branding sekolah/madrasah dengan MTS (*Modern and Technoedupreneurship School*) adalah salah satu upaya untuk membranding sekolah/madrasah untuk mencetak lulusan-lulusan yang mandiri dengan memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang kuat dan memiliki ketrampilan enterpreneur yang handal. Tak hanya mandiri dalam spiritual, intelligence dan skill, MTS ini berupaya untuk menjadi penghasil income generating sekolah/madrasah yang berguna untuk meningkatkan pendapatan komersial sekolah dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya insani civitas akademika sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Rifan. 2022. "Mengenal Apa Itu Kurikulum Merdeka: Ini Esensi Dan Implementasi Di Sekolah Dan Kampus." *Suara.Com*, March 18.

Anggara, Ridwan Vendi. 2014. "Implementasi Pendidikan Akhlak Sistem Boarding School Dan Fullday School Di Smp It Abu Bakar Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Kalijaga.

Arifin, Bustanil, and Setiawati Setiawati. 2021. "Gambaran Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(2):4886–94.

Artadianti, Kiki, and Ari Subowo. 2017. "Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Percontohan Di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA)." *Journal of Public Policy and Management Review* 6(3):128–44.

Baidhawy, Zakiyuddin. 2015. "The Role of Faith-Based Organization in Coping with Disaster Management and Mitigation Muhammadiyah's Experience." *Journal of Indonesian Islam* 9(2):167–94.

Budi, S., I. S. Utami, R. N. Jannah, N. L. Wulandari, N. A. Ani, and W. Saputri. 2021. "Deteksi Potensi Learning Loss Pada Siswa Berkebutuhan Khusus Selama Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Inklusif." *Jurnal Basicedu* 5(5):3607–13.

Caesaria, Sandra Desi. 2022. "Apa Itu Kurikulum Merdeka? Begini Penjelasan Lengkapnya." *Kompas.Com*, March 18.

Department of Housing, Settlements and the Environment. 2018. *Profile of Adiwiyata School in North*

Kayong Regency in 2017 (in Indonesia). Kayong Utara.

Donnelly, Robin, and Harry Anthony Patrinos. 2021. "Learning Loss during Covid-19: An Early Systematic Review." *Prospects (Paris)* 10:1–9.

Dwiyama, Fajri. 2019. "Brand Image: Upaya Memasarkan Pendidikan Bagi Lembaga Yang Kurang Mampu Bersaing." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(2):880–91.

Engzell, Per, Arun Frey, and Mark D. Verhagen. 2021. "Learning Loss Due to School Closures during the COVID-19 Pandemic." *PNAS* 118(17):1–7.

Hamadani, Ahmad. 2015. "Sekolah Alam: Alternatif Pendidikan Ramah Anak." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 11(1):86–95.

Heneveld, W. 1994. *Planning and Monitoring the Quality of Primary Education in Sub-Saharan Africa*. Washington, DC: AFTHR Technical Note No. 14.

Indraswati, Dyah, Arif Widodo, Aisa Nikmah Rahmatih, Mohammad Archi Maulyda, and Aisa Nikmah Rahmatih. 2020. "Implementasi Sekolah Ramah Anak Dan Keluarga Di SDN 2 Hegarsari, SDN Kaligintung, Dan SDN 1 Sangkawana." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan* 7(1):51–62.

Junanah, and M. Joko Susilo. 2021. "Kunci Sukses Menumbuhkembangkan Kemandirian Madrasah Melalui Enterpreneur." Pp. 225–48 in *Menegosiasikan islam, keindonesiaan dan mondalitas: Peran dan tantangan pendidikan islam di era diserupsi*, edited by S. Abdi, M. N. I. Saleh, and K. D. Saputra. Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY.

Karsono, Karsono, Purwanto Purwanto, and Abdul Matin Bin Salman. 2021. "Strategi Branding Dalam

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):869–80.

Kemenag Bintan. 2021. "Badan Usaha MTs Tambelan Jual Produk Kudapan." *Kemenag Bintan*. Retrieved March 20, 2022 (https://kepri.kemenag.go.id/page/det/badan-usaha-mts-tambelan-jual-produk-kudapan-).

kemendikbud.go.id. 2022. "Implementasi Kurikulum Merdeka." *Kemendikbud.Go.Id*. Retrieved March 18, 2022 (https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/).

Kemendikbud.go.id. 2022. "Kurikulum Merdeka." *Kemendikbud.Go.Id*. Retrieved (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/).

Kemendikbud Ristek RI. 2022. *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022*. Vol. 0. Jakarta.

keprikemenag.go.id. 2021. "Bantu Perekonomian Madrasah, MTs Tambelan Inisiasi Bentuk Badan Usaha Mekar Bersinar." *Keprikemenag.Go.Id*. Retrieved March 20, 2022 (https://kepri.kemenag.go.id/page/det/bantu-perekonomian-madrasah-mts-tambelan-inisiasi-bentuk-badan-usaha-mekar-bersinar).

Khoiruddin, Nurul. 2016. "Upaya Membangun Brand Image Dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah (Studi Kasus Di MI Masholihul Huda Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015)." STAIN Kudus.

Ki Dr. Saur Panjaitan XIII. 2022. "Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Pendidikan Yang Memerdekakan." *Tempo.Co*, March 18.

Maamarah, Siti. 2016. "Strategi Peningkatan Mutu Dan Citra (Image) Sekolah Dasar Negeri Di Ungaran, Semarang." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 3(1):115–30.

Muhammadiyah Boarding School. 2018. "Sejarah PPM MBS." – *Muhammadiyahboarding.Sch.Id*. Retrieved April 25, 2018 (https://muhammadiyahboarding.sch.id/sejarah/).

Musyarofah. 2016. "Internalisasi Pesan Mutikultural Pada Organisasi Pesantren Putri Stain Jember." *Inject: Interdiciplinary Journal of Communication* 1(2):181–202.

Nada, Hana Naqiyya, Rhina Uchyani Fajarningsih, and Okid Parama Astirin. 2021. "Adiwiyata (Green School) Program Optimization Strategy in Malang Regency to Realize Environmentally Friendly School Citizens." *IJORER : International Journal of Recent Educational Research* 2(2):121–37.

Penulis Sekolah Penggerak. 2021. "Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Program Sekolah Penggerak." *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*. Retrieved December 11, 2021 (https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/2021/02/08/kemendikbud-luncurkan-merdeka-belajar-program-sekolah-penggerak/).

Pratiwi, Wahyu Dewi. 2021. "Dinamika Learning Loss: Guru Dan Orang Tua." *Jurnal Edukasi Nonformal* 2(1):147–53.

Purnamasari, Yuli, Veronika Setyadji, and Shulhuly

Ashfahani. 2020. "Strategi Pemasaran Dalam Membangun Brand Image Pada Sekolah Aluna Montessori Jakarta." *JIKOM: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 12(01):34–42.

Rachman, Indriyani, Samsul Muarif, Edy Santuso, Ida Rahayu, Karlina Puspa Dahlia, Slamet Raharjo, and Toru Matsumoto. 2017. "The Success of the School in Obtaining the Adiwiyata Degree Can Increase Students' Awareness of Environmental Friendliness in Saving Energy (Study Case: SMA Negeri 8 Serang Banten)." *PEDAGOGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15(1):548.

Ramadan, Willy. 2019. "Sekolah Alam Di Kalsel; Latar Belakang, Ekspektasi Dan Persepsi." 12(1):40–51.

Ratnawati, Dian. 2016. "Momen Idul Adha Sekolah Muhammadiyah plus, Cetak Mubaligh Hafiz, Alim Dan Mandiri." *Hangtuahnews.Co.Id*. Retrieved April 5, 2018 (https://hangtuahnews.co.id/momen-idul-adha-sekolah-muhammadiyah-plus-cetak-mubaligh-hafiz-alim-dan-mandiri/).

Retnasari, Lisa, and Suharno. 2018. "Strategi Smp Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta Dalam Pembiasaan Karakter Kewarganegaraan Pada Peserta Didik." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6(1):52–62.

Riki, Muhammad, and Sumarnie. 2021. "Manajemen Program Adiwiyata Di Smp Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur." *Equity in Education Journal (EEJ)* 3(1):47–53.

Rosita, Sry, and Syahmardi Yacob. 2019. "Pelaksanaan Kegiatan Tahfizh Dan Khatam Alquran Siswa Siswi SDN 47 Kota Jambi." *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* 1(2):86–91.

Rossa, Vania, and Dini Afrianti Efendi. 2021. "Hasil Survei: Satu Tahun Pandemi, Siswa Alami Learning Loss Yang Setara Dengan 6 Bulan." *Suara.Com*, January 29.

Rukmana, Yulis. 2016. "Momen Idul Adha Sekolah Muhammadiyah plus, Cetak Mubaligh Hafiz, Alim Dan Mandiri [Strategies to Build a Brand Image in Increasing the Competitiveness of Educational Institutions: A Multi-Case Study at SMA N 3 Malang and SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sekolahalamindonesia.sch.id. 2022. "Sekolah Alam Indonesia." *Sekolahalamindonesia.Sch.Id*. Retrieved March 20, 2022 (https://sekolahalamindonesia.sch.id/).

Sholikhah, Maratush. 2021. "Pencitraan Publik Bagi Sekolah." *INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2):74–87.

Silaban, Susi J., and Febri Yuliani. 2017. "Adiwiyata Program Implementation (Study at SMP Negeri 20 Pekanbaru) (in Indonesia)." *Jom FISIP* 4(2):1–5.

Suara Muhammadiyah. 2019. "Pengelolaan BUMS SD Muh 1 Ketelan Jadi Rujukan." *Suara Muhammadiyah*, March 20.

Suaramuhammadiyah.id. 2016. "MDMC Kukuhkan Smp Muhammadiyah 1 Prambanan Sebagai Sekolah Siaga Bencana Mandiri." *Suara Muhammadiyah*. Retrieved April 5, 2018 (http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/18/mdmc-kukuhkan-smp-muhammadiyah-1-prambanan-sebagai-sekolah-siaga-bencana-

mandiri/).

Supriyadi. 2018. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Madrasah Di Mi Muhammadiyah Karanganyar." Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susilo, M. Joko. 2017. "Strategi Membangun Sekolah Yang Berkemandirian." Pp. 569–76 in *Second Progressive and Fun Education Seminar*. Lombok: Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi.

Susilo, Mohamad Joko. 2018. "Pengembangan Model Sekolah Premium Muhammadiyah (SPM) Di Kota Yogyakarta." Pp. 531–38 in *Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek) Ke-3*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susiyani, Andri Septilinda, and Subiyantoro. 2017. "Manajemen Boarding School Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam Di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Madrasah* 2(2):327–47.

Swasty, Wirania. 2016. *Branding Memahami Dan Merancang Strategi Merek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Toharoh, Latoifit, Suyoto, and Muflikhul Khaq. 2021. "Descriptive Analysis of the Implementation of the Adiwiyata Program at SDN Brenggong (in Indonesia)." *Jurnal Kualita Pendidikan* 2(1):43–49.

Wahab, Rochmat. 2012. *Strategi Pengembangan SMAN 4 Yogyakarta Menuju Sekolah Kategori Mandiri*. Yogyakarta.

Yuliana, Lia, Meilina B., and S. Y. Ratri. 2010. *Evaluasi Kesiapan Implementasi Sekolah Kategori Mandiri SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul*. Yogyakarta.

Zaini, Muhammad Fuad, and Syafaruddin Syafaruddin.

2020. "The Leadership Behavior of Madrasah Principals in Improving the Quality of Education in MAN 3 Medan." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 5(2):95–106.

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM TINJAUAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI

Moh. Mizan Habibi

PENDAHULUAN

Proses pendidikan pada akhirnya akan bermuara pada penyiapan bekal peserta didiknya untuk hidup menjadi bagian dari masyarakat global. Pola hidup yang terus berkembang menuntut penyelenggaraan pendidikan responsif dan adaptif. Stagnasi hanya akan menjauhkan lulusan lembaga pendidikan dari kompetensi dan nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat kultur dan industri. Pergerakan penyelenggaraan pendidikan, khususnya jenjang perguruan tinggi, harus terbuka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa depan. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan menjaga relevansi dengan perkembangan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang lahir dan menjadi isu utama pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama (MBKM) yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar

program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal pasal 50 ayat 6 menyatakan bahwa perguruan tinggi mempunyai ruang otonomi untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan. Penyesuain penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari manifestasi otonomi perguruan tinggi untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan dalam setiap waktu. Dan tidak hanya mampu berpendidikan tinggi, akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Satuan pendidikan yang paling berpengaruh dalam perubahan adalah perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan harus senantiasa responsif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perubahan sosial budaya masyarakat juga memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi perguruan tinggi.

Salah satu respon yang bida dikembangkan oleh perguruan tinggi adalah dalam bentuk penyesuaian kurikulum. Kurikulum didesain untuk menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan oleh perguruan tinggi. Lulusan yang dihasilkan seharusnya memiliki kualitas pribadi yang mumpuni, mampu bersaing secara sehat, dan siap menebar manfaat di tengah masyarakat.

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di

Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Melalui kebijakan MBKM pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.

Sebagai bagian dari kebijakan pendidikan, kebijakan MBKM harus dipahami dengan baik oleh para stakeholder. Baik stakeholder internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap kebijakan akan menjadi pintu masuk untuk melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Proses pemahaman yang baik salah satunya bisa dilakukan dengan melihat kebijakan MBKM secara utuh dari sisi ontologi, epistimologi, dan aksiologinya. Melihat dari sisi ontologinya berarti mendalami apa sebenarnya hakikat dan 'warna khas' kebijakan MBKM yang membedakan dengan pendekatan kurikulum sebelumnya. Menelisik dari sisi epistimologinya dilakukan

dalam rangka menganalisa proses konstruksi kebijakannya, baik dalam konteks sumber, landasan, prinsip, cara berfikir, dan alur yang digunakan. Sedangkan, sisi aksiologi akan memberikan jawaban nilai dan manfaat apa yang akan diperoleh pasca implementasi kebijakan MBKM.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Kurikulum MBKM

Kebijakan *Kampus Merdeka- Merdeka Belajar* ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi.

a. Empat Pokok kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar:

   Secara umum, kebijakan yang tertuang dalam kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar terdiri dari empat kebijakan strategis. *Pertama,* terkait perluang untuk membuka program studi baru guna merespon perkembangan isu. *Kedua,* sistem akreditasi yang efisien dan efektif guna memastikan kedudukan akreditasi sebagai sistem penjamin mutu. *Ketiga,* kemudahan menjadi Badan Hukum, dan *keempat,* secara spesifik pada konteks pengembangan kurikulum dengan memberikan kesempatan untuk belajar di luar

program studi selama tiga semester.

1) Kemudahan pembukaan program studi baru

   Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi Swasta diberi otonomi untuk membuka Prodi baru. jika Perguruan Tinggi tersebut akreditasinya A atau B serta memiliki Kerjasama dengan perusahaan atau organisasi nirlaba atau universitas ternama. Prodi baru yang dibuka bukan bidang Kesehatan dan Pendidikan.

2) Sistem akreditasi

   Sistem akreditasi tetap berlaku 5 tahun dan akan di perbaharui secara otomatis. Prodi dengan akreditasi C dapat mengajukan kenaikan akreditasi secara sukarela kapan pun. Peninjauan kembali akreditasi jika ada laporan dari masyarakat dengan bukti konkret dan terjadi penurunan jumlah pendaftar dan lulusan secara drastis.

3) Perguruan Tinggi berbadan Hukum

   Ada kemudahan bagi PTN (BLU) dan Satker untuk menjadi Badan Hukum tanpa adanya batasan minimal akreditasi. Pengajuan PTN menjadi Badan Hukum menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing PTN.

4) Hak belajar mahasiswa 60 SKS di luar program studi

   a) Hak Belajar 60 SKS di luar Program Studi

      Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: a) Dapat mengambil SKS di luar

perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

b) Program-program kerjasama yang telah dilaksanakan hendaknya dikembangkan dan hendaknya disusun dan disepakati antara perguruan tinggi dan mitra.

b. Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka-Merdeka Belajar

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi depalan aktivitas pilihan. Ke delapan aktivitas pilihan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bisa melakukan *direct learning* yang dihadapkan pada realitas dan objek kajian.

Gambar 1. Aktivitas Pilihan Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar

1) Pertukaran mahasiswa

   Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa bentuk pertukaran mahasiswa:

   a) Pertukaran mahasiswa antar prodi di perguruan tinggi yang sama
   b) Pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda
   c) Pertukaran mahasiswa antar prodi di perguruan tinggi yang berbeda

2) Magang / Praktik kerja

   Program magang satu sampai dua semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja *(experiential learning)*. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama).

3) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan

   Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan mahasiswa yang minat dalam bidang Pendidikan untuk mengajarkan ilmunya serta memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan Pendidikan.

4) Penelitian/Riset

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar dapat membangun cara berpikir kritis. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

5) Proyek kemanusiaan

Program ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selain itu, proyek kemanusiaan ini juga bertujuan untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial dan dapat ikut memecahkan permasalahan di masyarakat sesuai dengan minat dan keahliannya.

6) Kegiatan wirausaha

Tujuan program kegiatan wirausaha yaitu untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing serta mengurangi permasalahan pengangguran intelektual di kalangan sarjana.

7) Studi / Proyek Independent

Tujuan program studi/proyek independen yaitu untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Program ini juga dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan prestasinya dalam ajang

nasional maupun internasional melalui program ini.

8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata tematik (KKNT)

Program ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata hidup bersama masyarakat di luar kampus. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama lintas disiplin dan *leadership* dalam membangun masyarakat pedesaan.

Berdasarkan tujuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Konsep MBKM diarahkan untuk menyiapkan lulusan siap bekerja, kreatif, dan dapat menebar manfaat bagi sesama. Berdasarkan contoh pelaksanaan pembelajaran berbasis kebijakan MBKM di atas dapat digambarkan bahwa salah satu subtansi dari kebijakan MBKM memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperluas perspektif dan mengembangkan pengalaman belajar. Melalui perpaduan perspektif lintas bidang ilmu dan ragam pengalaman belajar diharapkan mahasiswa akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat, industri kreatif, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang relevan dengan kondisi pasca belajar di perguruan tinggi.

2. Kurikulum MBKM dalam Tinjauan Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi

Sebagaimana uraian di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak dapat terlepas dari perubahan lingkungan yang terus terjadi. Perubahan tersebut

mewujud dalam berbagai aspek seperti perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan regulasi pendidikan tinggi. Semuanya mengharuskan perguruan tinggi untuk meresponnya dengan serius dalam rangka menjaga relevansi eksistensinya.

Salah satu respon tersebut adalah dalam bentuk penyesuaian kurikulum. Kurikulum didesain untuk menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan oleh perguruan tinggi. Lulusan yang dihasilkan seharusnya memiliki kualitas pribadi yang mumpuni, mampu bersaing secara sehat, dan siap menebar manfaat di tengah masyarakat. Kurikulum berbasis MBKM lahir atas respon terhadap kebutuhan masyarakat yang dituntut untuk selalu siap beradaptasi dengan perkembangan peradaban. Pendidikan harus berjalan dinamis, serta tidak mudah terjebak dalam kemapanan.

Kurikulum dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai rencana pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik di bawah rancangan penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan (Sutrisno, 2008:6). Kurikulum MBKM secara historis disusun berdasarkan faktor-faktor tertentu. Maka penting untuk melaksanakan upaya pemberian pengalaman belajar yang lebih luas kepada para pelajar. Untuk menganalisanya, produk kebijakan kurikulum MKM dapat dikaji dari sisi ontologi, epistimologi, dan aksiologinya.

Dalam kajian filsafat, 1) ontologi dikenal sebagai ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 1998:69). Dalam konteks pengembangan kurikulum MBKM artinya apa hakikat

dan keunikan yang menjadi subtansi dari kebijakan kurikulum tersebut. 2) Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar (Jujun S. Suriasumantri,1990:105). Dari sisi epistimologi, kurikulum MBKM hendak dilihat bagaiamana proses konsturksi kurikulum di lakukan. Sumber, landasan, dan metode seperti apa yang dipilih untuk merumuskan kebijakan kurikulum MBKM. 3) Sedangkan aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan (Louis Kattsoff, 1992: 327). Maka dalam pembahasan kurikulum MBKM selanjutnya apa nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya, terlebih pasca kebijakan tersebut diimplementasikan.

Hakikat kurikulum MBKM berorietansi pada pengembangan proses dan cara belajar, serta perluasan sumber dan media belajar. Pemberian kesempatan untuk belajar di luar kelas adalah bentuk kemerdekaan bagi para peserta didik untuk memperluas sumber, media, dan objek belajar (Moh. Mizan Habibi, 2021). Hal tersebut sejalan dengan tinjauan kajian ontologi yang mengandung hakikat kurikulum MBKM adalah desain kurikulum yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Harapannya kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Pembelajaran tidak hanya dihadapkan pada ruang hampa yang penuh dengan teori-teori abstrak. Pembelajaran harus mampu menghadirkan realitas yang penuh dengan problem dan inovasi-inovasi baru.

Pada sisi epistimologi**,** kebijakan kurikulum MBKM telah diawali dengan kajian-kajian mendalam. Indikasi tersebut terlihat dari upaya penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Di sisi lain, kebijakan tersebut lahir untuk merespon permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi terkait pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi (Aris Junaidi, 2020). Dalam pengembangannanya kurikulum MBKM juga dilandasakan pada beberapa regulasi beikut ini:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Rujukan-rujukan di atas menggambarkan bahwa perumusan kebijakan kurikulum MBKM dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan di segala sektor. Amanah untuk membangun desa, daerah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat menjadi titik penting pengembangan rumusan-rumusan yang mejadi subtansi kurikulum. Hal tersebut termanifestasikan pada pilihan-pilihan pengalaman pembelajaran yang ditawarkan banyak menggunakan model pembelajaran kontekstual, berbasis lapangan, dan berorientasi pada pengembangan produk. Nampaknya, pengalaman-pengalaman seperti itulah yang dibutuhkan dalam merespon perubahan.

Kurikulum yang bersifat dinamis diperlukan untuk responsif terhadap perubahan. Termasuk dari sisi operasional, kewajiban yang dibebankan kepada perguruan tinggi untuk menyediakan waktu 60 SKS atau setara dengan tiga semester belajar di luar program studi merupakan pengembangan fundamental, yang nampaknya untuk lebih memperkuat hardskill dan softskill mahasiswa guna menghadapi kebutuhan yang kompetitif dan kompleks. Termasuk penekanan pada pembelajaran berbasis *outcomebased education* (OBE) yang juga

menjadi *ruh* kurikulum MBKM merupakan indikasi bahwa rumusan capaian pembelajaran harus dipastikan memenuhi kebutuhan kehidupan. Unsur konten, proses *delivery*, penggunaan media, dan proses asesmen harus menyesuiakan capaian pembelajaran. Sehingga sisi *alignment* antar komponen akan terjaga.

Kebijakan kurikulum MBKM dari kajian aksiologi menawarkan beragam kebermanfaatan. Pembelajaran berbasis *outcome* dan model *direct learning* setidaknya memperlebar dan memperbanyak ruang bagi para mahasiswa untuk menggali ide, gagasan, keterampilan, dan referensi berperilaku. Beberapa di antaranya adalah: 1) pengembangan *critical thinking* mahasiswa melalui proses riset dan aktivitas lain yang membekali daya analisis dan nalar berfikir kritis, 2) pengembangan daya imajinasi kreatif melalui studi independen dan kewirausahaan untuk menghasilkan sebuah karya, 3) pengembangan kesadaran multi-perspektif melalui aktivitas magang, tukar pelajar dan KKN tematik, 4) pengembangan sikap saleh sosial melalui aktivitas pengabdian dan KKN tematik. Tentu saja banyak nilai dan kebermanfaat yang lainnya.

Kurikulum Pendidikan Islam sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan harus dirancang dengan mainstream multi-frame. Tujuannya adalah penciptaan suasana akademik dan out-put pendidikan yang kaya dan wacana yang multi-perspektif (Moh. Mizan Habibi, 2017). Oleh karena, bagi Pendidikan Islam, kebijakan kurikulum MBKM memberikan peluang untuk membuka pembatas-pembatas ilmu pengetahuan. Secara praksis, integrasi ilmu tidak berhenti pada wilayah teoritis, namun akan mudah dipraktikkan dengan perluang yang lebih luas. Mahasiswa dari kelompok *islamic studies* akan

dihadapkan pada realitas yang sangat kompleks, yang akhirnya memberikan kesadaran bahwa kolaborasi bidang ilmu sangat penting untuk meresponnya. Terlebih pada persoalan multi-intepretatif yang seringkali melahirkan kegaduhan antar umat akan menjadi bekal pengetahuan nyata yang harus dihadapi, didalami, dianalisis, dikaji oleh mahasiswa. Dengan bekal *direct learnig* pada objek materiil pembelajaran, diharapkan mampu membangun kesadaran dan kecakapan bernuansa multi-perspektif dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

KESIMPULAN

Perguruan Tinggi, terutama perguruan tinggi Islam harus selalu siap untuk menyesuaikan diri/ adaptif untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi fakta hidup yang selalu berkembang. Kurikulum yang bersifat adaptif dan responsif unruk menjawab berbagai macam permasalahan dan tuntutan terhadap kulalitas lulusan mutlak diperlukan mengingat mahasiswa adalah agen perubahan (*agent of change)*. Setidaknya melalui tinjauan ontologi, epistimologi, dan aksiologi desain kebijakan kurikulum MBKM telah relavan dengan perkembangan. Oleh karena itu, untuk bisa merealisasikan perubahan -perubahan perlu adanya komitmen bersama untuk merubah *mindset* dari berbagai pihak mulai dari pimpinan perguruan tinggi, lembaga mitra, pelaku akademisi dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aris Junaidi, dkk. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020

Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990

Louis Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992

Moh. Mizan Habibi, *Islamic Education Curriculum Framework Development Based On Multicultural Values,* Proceedings of 99th The IIER International Conference, Mecca, Saudi Arabia, 2017, ISBN: 978-93-86291-88-2

Moh. Mizan Habibi, *Studi Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Pengembangan Metode Pembelajaran Bidang Ilmu PAI Di Madrasah,* Prosiding Webinar Nasional Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021, ISBN: 978-979-8548-18-5

Nuryani Siregar, *"Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri,"* Fitrah: Journal of Islamic Education 1, Nomor 1, 2020

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Syukri Azwar Lubis, *Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan*, AL-IKHTIBAR (Jurnal Ilmu Pendidikan) Vol. 5 No.2, 2018.

Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan,* Yogyakarta: Kota Kembang, 2008

TEORI-TEORI IMPLEMENTASI DAN ADOPSINYA DALAM PENDIDIKAN

Siska Sulistyorini

PENDAHULUAN

Salah satu tema dalam pendidikan adalah tentang penerapan teori dalam tindakan di lapangan yang biasa di sebut dengan istilah "Implementasi". Secara umum, implementasi mempunyai arti melaksanakan memiliki arti yang luas dan umum. Namun jika di Tarik dalam hal keilmuan akademik. Maka implementasi dari sebuah konsep teori memiliki kerangka teori yang spesifik.

Berdasarkan hasil observasi penulis, banyak sekali civitas akademika-misalnya mahasiswa menjabarkan implementasi tanpa menggunakan konsep teori yang ada. Sehingga isi atau hasil penelitian mereka menjadi relative sama atau tidak memiliki konsep deskrisi yang jelas. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan kajian secara spesifik mengenai teori-teori implementasi yang tentu di dalamnya memiliki perbedaan baik dari segi bagaimana menjabarkan sebuah data di lapangan, melakukan sortir data maupun saat melakukan analisis dari hasil yang telah di dapatkan di lapangan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori-teori implementasi secara detail. Teori-teori ini berasal dari ilmu kebijakan yang kemudian ditarik dan di adopsi dalam implementasi dalam terminologi pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologi, implementasi merupakan pelaksanaan (KBBI Online, Dinas Pendidikan Nasioan, 2009, 246). Sedangkan secara terminologi implementasi merupakan kegiatan, tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. (Mulyadi, 2015, 12). Gordon (Dalam Mulaydi, 2105, 55) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat berwenang untuk mencapai tujuan suatu program.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para impelementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah "membangun hubungan" dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Afiful Ikhwan (2016, 130) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur yang hendaknya di pertimbangkan untuk diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kegiatan yang mengandung unsur antara lain :

a. sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya
b. adanya proses
c. hasil yang ingin di capai
d. menyangkut masa depan dalam waktu tertentu

2. Implementasi Menurut Para Ahli

a. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Van Meter and Van Horn (1975), mendefenisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompokkelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam 16 model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefenisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang direalisasikan. Adapun variabel-variabel yang

membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah:

1) Standard an tujuan (*standards and objectives*)
2) Sumber daya (keuangan dan *resources*)
3) Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*)
4) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*)
5) Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*)
6) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (*economic, sosial and political conditions*)

Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Model implementasi yang dikemukakan Van Meter and Van Horn dapat dilihat pada gambar berikut

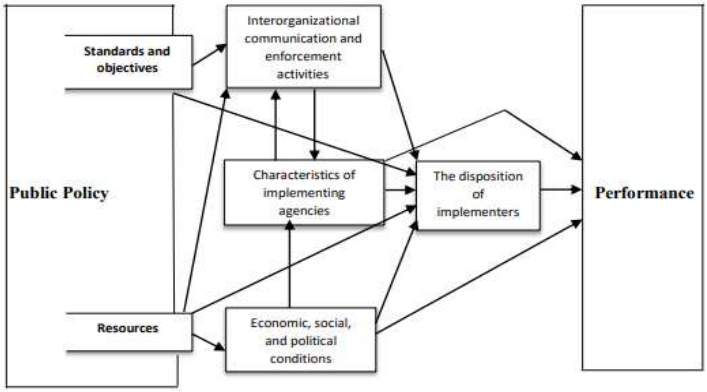

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakam Van Meter dan Van Horn

b. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian (1979)

Mazmanian dan Sabatier (1979) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sabab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis top-down dan bottom-up menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal. Enam syarat dimaksudkan adalah:

1) Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.
2) Teori kausal yang memadai, dan dapat memastikan untuk kebijakan itu mengandung suatu teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3) Struktur implementasi yang di susun secara legal supaya membantu pihakpihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
4) Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang mengunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5) Dukungan dari kelompok kepentingan dan "penguasa" di legislative dan eksekutif.

6) Perubahan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak dapat meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Sabatier (1986), memodifikasi model mereka pada tahun (1973), berdasarkan riset di Eropa dan Amerika. Mereka mengembangkan kerangka implementasi kebijakan, mengidentifikasi tiga variabel bebas (independen variabel) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1) Mudah atau sulitnya mengendalikan masalah yang di hadapi, meliputi indikator:

   a) Keragaman prilaku kelompok sasaran,
   b) Kesukaran teknis
   c) Ruang lingkup perubahan prilaku yang diinginkan.
   d) presentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk,

2) Kemampuan dalam kebijakan untuk mensistematiskan proses dalam implementasinya, dengan indikator:

   a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
   b) Keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana
   c) Aturan keputusan dari badan pelaksana
   d) Ketepatan alokasi sumber daya
   e) Rekruitmen pejabat pelaksana
   f) Akses pihak luar secara formal.

3) Pengaruh langsung variabel politik/ kepentigan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan, meliputi indikator:

a) Dukungan politik
b) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
c) Dukungan dari pejabat atasan
d) Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok
e) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana

Suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari:

1) Pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunya kebijakan pelaksana
2) Hasil yang nyata.
3) penerimaan atas hasil nyata
4) kepatuhan terhadap objek
5) Tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011, 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

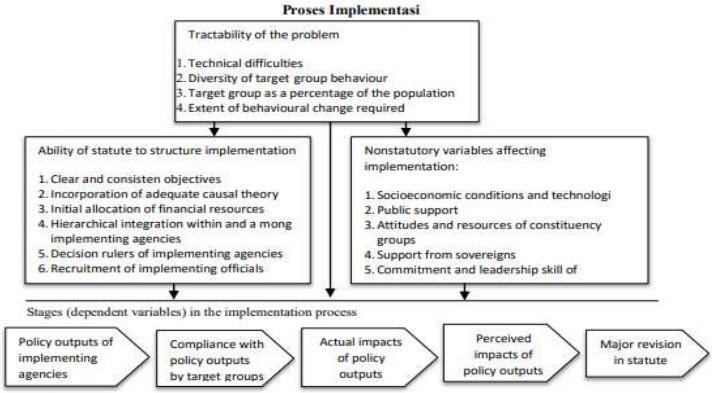

Gambar 2. Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)

c. Teori Model Politik Administrasi dari Grindle (1980)

Grindle (1980) berpendapat bahwa tugas implementasi adalah menentukan mata rantai yang menentukan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam terminology Grindle, kebijakan diartikan syang bermanfaat untuk mencaapi tujuan yang dieksplorasi dalam bentuk kebijakan tersebut.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994, 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3) Derajat perubahan yang diinginkan
4) Kedudukan pembuat kebijakan
5) (Siapa) pelaksana program
6) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2) Karakteristik lembaga dan penguasa
3) Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model implementasi Grinndle mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu: muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat didalam model adalah outcomes kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek dilaksanakan sesuai rencanaberasumsi bahwa tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pmerintahan.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Kebijakan adalah pernyataan arah, tujuan, sarana yang bersifat lyas dan umum. Proses implementasi hanya dapat dimulai apabila arah kebijakan umum dan tujuan sudah dinyatakan secara spesifik, program tindakan sudah didesain, dan dana telah dialokasikan untuk pelaksanaannya.

d. Teori Implementasi Edward III

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008, 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: 1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. 3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang

disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Analisis Kualitas Implementasi

Empat indikator utama kualitas implementasi adalah dosis, ketepatan, kualitas penyampaian (Domitrovich et al., 2008) dan penerimaan (Albers & Pattuwage, 2017). Sintesis literatur terbaru tentang implementasi dalam pendidikan menyoroti bagaimana indikator-indikator ini dapat didefinisikan. Laporan tersebut mencakup beberapa uji coba terkontrol secara acak dan mendokumentasikan bagaimana dosis (partisipasi dalam kegiatan tertentu), kesetiaan (dukungan berkelanjutan), kualitas pelaksanaan (dukungan dari kepala sekolah) dan penerimaan (partisipasi guru dan sikap terhadap kegiatan itu) mempengaruhi akademik dan perilaku siswa. hasil, dan sikap dan praktik guru. Jika di aplikasikan dalam praktik. Maka model analisis kualitas suatu implementasi dapat dilihat di table di bawah ini:

Model				
Elemen Implementasi	***Dosage*** **(Dosis)**	***Fidelity*** **(ketepatan)**	***Quality of Implementation*** **(Kualitas Implementasi)**	***Acceptability*** **(Penerimaan)**
Definition (Pengertian)	Unit-unit dan pendekatan dan sistem support	Derajat sejauh mana pendekatan dan sistem pendukung dilakukan sesuai rencana	Kualitas penyampaian diukur dari engagement (keterikatan) dan respon dari para pendidik	Sejauh mana intervensi pengguna menerima relevansi dan pentingnya
Examples in Education Contoh dalam Pendidikan	Jumlah partisipasi guru dalam training	Pelatihan satu hari dengan pelatihan jarak jauh yang berkelanjutan	Dukungan kepala sekolah untuk pendekatan dan kualitas dukungan untuk para guru	Partisipasi dan perilaku guru terhadap perlatihan

Approach Pendekatan	Pembinaan literasi dengan konten program pembinaan terfokus (Matsumura et.al 2010)	Model piramida: pendekatan kelas besar untuk pengembangan sosial emosional dan mengatasi perilaku yang menantang (Artmant Meeker, at al: 2014)	Mempromosikan strategi pemikiran alternative (PATHS) -kurikulum pencegahan kenakalan peserta didik (Kam et.al, 2003)	Pembinaan literasi dengan program pembinaan yang berfokus pada konten. (Matsumura et.al 2010)
Outcome dalam *focus* implementasinya	Guru meningkat secara signifikan dalam partisipasi dalam pembinaan	Dampak signifikan pada kualitas interaksi kelas (p = o.o5) dengan pembinaan jarak jauh yang berkelanjutan	Siswa menunjukkan penurunan yang signifikan lebih besar dalam agresi dan disregulasi perilaku dan peningkatan yang signifikan dalam kompetensi emosional. (p<.05 dan p>.001).	

Tabel. 1. Model Analisis Kualitas Implementasi Pendidikan. (Di adaptasi Afiful Ikhwan, Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist), EDUKASI, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 04, No. 01, 2016, 130)

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdapat 4 model inti dari teori implementasi yang berbeda. Yakni teori Van meter Van Horn, Sabaier dan mazmanian, Edward III dan Grindel. Masing masing memiliki pola ekplorasi yang berbeda dan pola analisis yang berbeda. Analisis kualitas Impementasi memiliki bermacam macam bentuk pada akhirnya di buat pola implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Afiful Ikhwan. 2016. *Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist),* EDUKASI, Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 04, Nomor 01.

Albers, B., & Pattuwage, L. 2017. *Implementation in Education: Findings from a Scoping Review*. Melbourne: Evidence for Learning. Retrieved from http://www.evidenceforlearning.org.au/evidence-informed-educators/implementation-in-education

Artman-Meeker, K., Hemmeter, M. L., & Snyder, P. 2014. *Effects of Distance Coaching on Teachers' Use of Pyramid Model Practices: A Pilot Study*. Infants & Young Children, Vvolume 27. Nomor. 4

Australian Institute for Teaching and School Leadership. 2014. Feedback. Retrieved from https://www.aitsl.edu.au/feedback/

Australian Institute for Teaching and School Leadership. 2017. *Professional Learning Communities*. Retrieved from https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/feedback/documents/aitsl-feedback-professional-learning-communities-strategy.pdf?sfvrsn=6

Barber, M., Kihn, P., & Moffit, A. 2011. *Deliverology: From idea to implementation*. McKinsey on Government

Carnegie Foundation. 2017. *Using Improvement Science to Accelerate Learning and Address Problems of Practice*. Retrieved

from https://www.carnegiefoundation.org/our-ideas/

Clarke, A. M., Bunting, B., & Barry, M. M. 2014. *Evaluating the implementation of a school-based emotional well-being programme: a cluster randomized controlled trial of Zippy's Friends for children in disadvantaged primary schools*. Health Education Research. Volume 29. Nomor 5.

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Bandung: Mizan.

Domitrovich, C. E., Bradshaw, C. P., Poduska, J. M., Hoagwood, K., Buckley, J. A., Olin, S., . . . Ialongo, N. S. 2008. *Maximizing the implementation quality of evidence-based preventive interventions in schools: A conceptual framework*. Advances in School Mental Health Promotion, Volume 1. Nomor 3

Education Endowment Foundation. 2017. *Evidence for Learning Teaching & Learning Toolkit: Education Endownment Foundation*. Retrieved from http://evidenceforlearning.org.au/the-toolkit/

Evidence for Learning. 2017. *Impact Evaluation Cycle*. Retrieved from http://evidenceforlearning.org.au/evidence-informed-educators/impact-evaluation-cycle/

Gray, H. L., Contento, I. R., & Koch, P. A. 2015. *Linking Implementation Process To Intervention Outcomes In A Middle School Obesity Prevention Curriculum,'Choice, Control and Change*'. Health Education Research. Volume 30. Nomor 2

Hattie, J. 2017. *Time For A Reboot: Shifting Away From Distractions To Improve Australia's Schools. In T. Bentley & G. C. Savage (Eds.), E*ducating Australia: Challenges For The Decade Ahead. Carlton: Melbourne Univ. Publishing.

Jensen, B., Sonnermann, J., Roberts-Hull, K., & Hunter, A. 2016. *Beyond PD: Teacher Professional Learning in High-Performing Systems, Australian Edition*. Retrieved from Washington, DC

Kam, C.-M., Greenberg, M. T., & Walls, C. T. 2003. *Examining The Role Of Implementation Quality In School-Based Prevention Using The PATHS Curriculum*. *Prevention Science*. Volume 4. Nomor 1

Matsumura, L. C., Garnier, H. E., & Resnick, L. B. 2010. *Implementing Literacy Coaching The Role of School Social Resources.* Educational Evaluation and Policy Analysis. Volume 32. Nomor 2

Mitchell, P. F. 2011. *Evidence-Based Practice In Real-World Services For Young People With Complex Needs: New Opportunities Suggested By Recent Implementation Science*. Children and Youth Services Review. Volume 33. Nomor 2

Sarama, J., Clements, D. H., Starkey, P., Klein, A., & Wakeley, A. 2008. *Scaling Up The Implementation Of A Pre-Kindergarten Mathematics Curriculum: Teaching For Understanding With Trajectories And Technologies*. Journal of Research on Educational Effectiveness. Volume 1. Nomor 2

Wandersman, A., Imm, P., Chinman, M., & Kaftarian, S. 2000. *Getting To Outcomes: A Results-Based*

Approach To Accountability. Evaluation And Program Planning, Volume 23. Nomor 3

MENEGUHKAN PENDIDIKAN ISLAM YANG MODERAT PERSPEKTIF HUMANISTIK RELIGIUS

Sri Haningsih

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya untuk membantu subjek didik berkembang menjadi manusia yang potensial secara intelektual melalui proses *transfer of knowledge* dan potensial secara emosional spiritual melalui proses *transfer of values* yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya mampu memperhatikan semua aspek perkembangan subjek didik sebagai manusia seutuhnya, tidak direduksi menjadi pemenuhan kebutuhan praktis sesaat (Widodo, 2018, 110).

Proses pendidikan yang dirumuskan para pakar dan pemerhati pendidikan adalah menghasilkan manusia pembelajar yang anggun dari sisi moral dan unggul dari sisi intelektual. Hasil dari proses pendidikan bukan hanya cerdas secara rasional, melainkan juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, salah satu agenda penting dalam proses pendidikan di sekolah di Lembaga pendidikan manapun adalah pengembangan *sense of humanity* dan *sense of respect* melalui penanaman nilai dan sikap saling menghargai, peduli pada orang lain, dan penghormatan terhadap perbedaan. Untuk merealisasikan konsep pengembangan *sense of humanity* dan *sense of respect* diperlukan peneguhan pendidikan islam yang moderat perspektif humanistik dan religius.

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil

alamin, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia (Baharun, 2016, 55–69). Pendidikan dan pembelajaran menjadi perhatian serius seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, maka pendidikan dan pembelajaran harus diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* (Fathurrohman, 2015, 27).

Belajar merupakan suatu proses kompleks yang terjadi pada seseorang sepanjang hidupnya. Terjadinya suatu proses belajar karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karenanya, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu indikator capaian bahwa seseorang itu telah belajar ditengarai adanya suatu perubahan tingkah laku yang mungkin disebabkan terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya (Arsyad, 2016, 1). Sedangkan pengalaman dalam proses belajar sebagai bentuk interaksi antara individu dengan lingkungan (Trianto, 2009, 9).

Proses pendidikan di sekolah selama ini lebih cenderung "didominasi" intelektualitas (*kognitif oriented*), sehingga "hanya" menghasilkan *output* pendidikan yang cerdas intelektual, lemah pada aspek emosional bahkan aspek spiritualnya. Apabila faktor ini tidak dikondisikan disepakai oleh pemerhati pendidikan di manapun akan berakibat pada kemandegan pengembangan teori humanis religius. Yaitu teori yang sesuai dengan firman Allah Swt dalam salah satu firmanNya QS. Arra'd [13]:11. Apalagi jika sampai membiarkan pengembangan aspek afektif seperti akhlak, moral, etika, dan budi pekerti menjadi terpinggirkan bisa berakibat pada tidak tercapai ruh

Pendidikan Islam yaitu mencetak lulusan yang berakhlak mulia.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya dehumanisasi pada hampir setiap jenjang pendidikan. Misalnya kekerasan yang dilakukan guru di sekolah berdampak pada hilangnya motivasi belajar dan kesulitan dalam memahami pelajaran, sehingga umumnya prestasi belajar siswa juga rendah. Kekerasan guru terhadap siswa juga menyebabkan siswa benci dan takut kepada guru. Adanya perilaku benci dan takut kepada guru, tidak saling menghargai satu dengan lainnya, dan berbagai bentuk tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh guru kepada siswa maupun antarsiswa merupakan indikasi rendahnya *respect education* yang ada di sekolah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada guru yang kurang memiliki sikap sosial seperti kurang peduli, kurang empati, tidak santun, dan kurang respek terhadap perkembangan dan keunikan peserta didik sehingga belum mampu menjadikan dirinya sebagai *role model* (model teladan) bagi siswanya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembelajaran yang humanistik, yaitu pembelajaran yang menyadari bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi yang otomatis melainkan membutuhkan keterlibatan mental dan berusaha mengubah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna dengan memadukan potensi fisik dan psikis siswa. Beberapa keterampilan humanistik yang mendasar adalah "*respect*" atau respek yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik dalam aktivitas pembelajarannya.

Respect education tidak hanya diperuntukkan bagi siswa melainkan juga bagi guru, sehingga menanamkan nilai-nilai *respect* dalam pendidikan di sekolah menjadi sangat penting, bahkan sangat tepat jika dimulai sejak dini. Artinya, sejak dini ditanamkan kepada siswa nilai dan sikap

saling menghargai *(respect),* peduli sesama, dan menghormati perbedaan sehingga kelak diyakini bahwa pendidikan akan memberi kontribusi yang nyata dan bermakna dalam kehidupan sosialnya.

Mengembangkan *respect education* di sekolah, lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan perlu menerapkan konsep pendidikan moderat pendekatan humanis religius. Bilamana pendidikan benar-benar ingin memanusiakan manusia secara manusiawi, maka ada dua dimensi manusia yang harus menjadi pegangan dalam pendidikan, yaitu dimensi humanis dan religius. Dimensi humanis akan mengarah pada pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, sedang dimensi religius akan membawa ke pendidikan yang berpihak pada religiusitas manusia. Oleh karena itu, melalui pendidikan humanis religius, tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat melakukan *respect education* secara konkret melalui proses pembelajaran di kelas maupun kegiatan persekolahan.

PEMBAHASAN

Untuk mempertegas pengertian tentang topik meneguhkan pendidikan islam yang moderat perspektif *humanistik religius* sekaligus menyederhanakan definisi operasional pembahasan dalam penulisan ini terlebih dahulu dirumuskan istilah kunci yang digunakan dalam topik pembahasan ini. beberapa sub bab pembahasan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Pendidikan merupakan lembaga yang dengan sengaja diselenggarakan untuk mewariskan dan

mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan keahlian oleh generasi yang lebih tua kepada kepada generasi berikutnya. Melalui pendidikan sebagian besar berusaha memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Terjadi hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat sosial kehidupannya. Jika pendidikan seseorang maju, tentu maju pula kehidupannya, demikian pula sebaliknya (Sutrisno, 2008, 51).

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, pendidikan menunjang tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa yang bermartabat. Pendidikan yang baik dan berkualitas, akan menghasilkan bangsa yang baik dan berkualitas pula. Begitu juga pendidikan yang buruk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa.

Beberapa pakar pendidikan memberikan definisi pendidikan beragam. Seperti dikutip dalam Arum Sutrisni Putri dalam Kompas com. (Putri, 2020) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terutama Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat baik yang berkenaan dengan religiusitas (spiritualitas) maupun moralitas masyarakat. Pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki

pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir.

Dalam prosesnya, pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Atas dasar itu, setiap pendidikan yang sedang berlangsung untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki peradabannya itu, sudah barang tentu memiliki *paradigma*, yaitu suatu "cara pandang" pendidikan dalam memahami dunia (*world view*). Setiap paradigma mencerminkan "cara pandang" masyarakat di mana pendidikan itu berlangsung (Djohar, 2002, 70). Oleh karena itu, setiap masyarakat, bangsa, maupun negara, masing-masing memiliki paradigma pendidikan sesuai dengan cara pandang masyarakat atau negara bersangkutan terhadap dunianya. Berkenaan dengan paradigma pendidikan itu, maka bangsa Indonesia adalah bangsa atau masyarakat relijius yang diakumulasikan dalam rumusan Pancasila dan UUD'45. Seharusnya, dari paradigma inilah sistem pendidikan Indonesia terumuskan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara pendidikan, masih berdasarkan UU yang sama, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara normatif, Islam tidak mengenal dikhotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Pandangan ini mengacu pada keyakinan Islam yang paling utama adalah tauhid (Rahim, 2001, 27). Islam telah memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk akhlak yang humanis dan religius (Arifin, n.d., 123–141). *Pertama*, Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama dimana proses pembelajaran dan transmisi ilmu sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Inilah latar belakang turun wahyu pertama dengan perintah membaca, menulis, dan mengajar, sebagaimana dalam QS. Al-'Alaq [96] : 1-5[1].

Kedua, seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan adalah ibadah kepada Allah SWT. Agama hendaknya dijadikan sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial, dengan syarat agama tidak dipahami secara kaku, emosional dan dogmatis, tetapi dipahami secara rasional, substantif, humanis, dan transformative (Syaefudin, n.d., 259–276), sebagaimana firman Nya dalam QS. Al-Hajj, [22]: 54.

[1]Perintah ini harus dimaknai seluas-luanya dan sedalam-dalamnya yaitu melakukan observasi, eksplorasi ilmu, eksperimentasi, kajian, studi, analisis, penelitian, riset, penulisan ilmu secara komprehensif

Di Indonesia, pendidikan diharapkan bersifat humanistik-religius di mana pengembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Masyarakat di negara ini menghargai nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan sebagai sumber membangun kehidupan yang harmonis di antara bermacam-macam etnik, kelompok, sosial, agama, dan daerah. Nilai keagamaan dan kebudayaan merupakan nilai inti bagi masyarakat yang dipandang sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang bersatu, bertoleransi, berkeadilan, dan sejahtera. Hal ini menjadikan nilai takwa harus dipahami sebuah inklusifisme dalam kehidupan yang sarat keberagaman seperti di Indonesia sehingga tercipta sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang berdampingan dengan penuh damai.

Nilai keagamaan bukan dipandang sebagai nilai ritual yang sekadar digunakan untuk menjalankan upacara keagamaan dan tradisi, tetapi diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dalam kegiatan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan material, sosial, harga diri, intelektual, dan aktualisasi diri.

2. Pendidikan Humanis

Pendidikan humanis sebagai pemikiran pendidikan telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan dari dua aliran, yaitu progresivisme dan eksistensialisme, tetapi pendidikan humanis memperoleh dukungan dari para ahli psikologi humanistik dan ahli pendidikan kritis (Zaenul Arifin, dalam Knight., 1982, 21). Prinsip-prinsip pendidikan humanis yang diambil dari prinsip progresivisme adalah prinsip pendidikan yang berpusat pada anak (*child centered*) (Zaenul Arifin,

dalam Barnadib, 1996, 29). Peran guru yang tidak otoriter, fokus pada keterlibatan dan aktivitas siswa, dan aspek pendidikan yang demokratis dan kooperatif. Prinsip-prinsip pendidikan ini adalah sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan pada metode pengajaran formal yang kurang memberi kebebasan pada siswa sehingga siswa menjadi tidak kreatif yang sekadar mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh orang dewasa.

Menurut teori progresif, anak sebagai subyek didik mempunyai suatu keinginan alami untuk belajar dan menemukan berbagai hal tentang dunia di sekelilingnya. Ia tidak hanya mempunyai keinginan bawaan lahir (*inborn*), melainkan juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Keinginan dan kebutuhan itu memberi anak ketertarikan tertentu untuk mempelajari berbagai hal yang akan membantunya memecahkan problem-problem dan karena itu memenuhi keinginan-keinginannya (Knight, 2007, 149).

Dengan demikian terminal akhir pada proses pendidikan adalah menjadikannya peserta didik sebagai manusia yang memiliki bekal *ilmu, iman* dan *amal*. Dengan ilmu, akan memudahkan hidup yang akan dilaluinya mampu secara bijak memilih tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. mampu menopang kehidupannya dan tidak bergantung kepada orang lain.

Untuk merealisasikan individu siswa sebagai subyek didik aktif tidak bergantung kepada orang lain, salah satunya adalah dengan mempersiapkan mereka dengan memiliki konsep dan desain pembelajaran

yang menyenangkan dan sekaligus bertujuan. Misalnya keharusan sekolah yang menerapkan *system full day school* (Munir, 2010, 39–40). Jika pembelajaran sekolah kegiatan yang bersifat monoton, tanpa tantangan dan tanpa pola yang menyenangkan, maka akan timbul rasa kebosanan, stress, pusing dan sebagainya.

Akibat lain adalah kemungkinan muncul kesan negative terhadap sekolah bahwa sekolah bukan tempat untuk ekpresi diri sekaligus bukan tempat yang menyenangkan. Pada akhirnya muncul "keterpaksaan" karena bersekolah hanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak kepada orangtuanya.

Sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan Abdul Munir (2010, 40), bahwa beberapa pola yang bisa diterapkan untuk membangkitkan perasaaan senang pada anak dalam belajar sekaligus bertujuan kependidikan adalah:

a. Pembelajaran bersifat kontekstual dan terapan. Para guru mendesain pembelajaran tidak terpaku pada doktrin bahwa belajar duduk, diam, dan di dalam kelas. Sebaliknya mereka melakukan kegiatan pembelajaran dengan mobilitas tinggi, berpindah tempat dan terkadang dengan suasana ramai. Kegiatan belajar bisa dilakukan di alam terbuka, di gazebo dan di semua tempat yang kondusif dan menyenangkan pembelajar.
b. Pembelajaran bersifat individual kolaboratif. Artinya memadukan dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada siswa sebagai subyek didik yang aktif, bukan peserta didik pasif.

c. Penerapan *multiple intelligence* di sekolah. Dengan pola pengajaran *team teaching* di mana setiap pembelajaran ada dua guru yang membersamai proses pembelajaran yang sedang berjalan.

Senada dengan prinsip-prinsip pendidikan humanistik maka para pendidik humanis (Knight., 1982, 148–153) memiliki pandangan tentang pendidikan sebagai berikut:

a. Tujuan pendidikan dan proses pendidikan berasal dari anak (siswa). Oleh karenanya, kurikulum dan tujuan pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan prakarsa anak. Siswa adalah aktif bukan pasif. Anak memiliki keinginan belajar dan akan melakukan aktivitas belajar apabila mereka tidak "difrustasikan" belajarnya oleh orang dewasa atau penguasa yang "memaksakan" keinginannya.

b. Peran guru adalah sebagai penasihat, pembimbing, teman belajar bukan penguasa kelas. Tugas guru ialah membantu siswa belajar sehingga siswa memiliki kemandirian dalam belajar. Guru berperan sebagai pembimbing dan yang melakukan kegiatan mencari dan menemukan pengetahuan bersama siswa, tidak boleh ada pengajaran yang bersifat otoriter, di mana guru sebagai penguasa dan murid menyesuaikan.

c. Sekolah sebagai bentuk kecil dari masyarakat luas. Pendidikan seharusnya tidak sekadar dibatasi sebagai kegiatan di dalam kelas dengan dibatasi empat dinding sehingga terpisah dari masyarakat luas. Karena pendidikan yang bermakna adalah apabila pendidikan itu dapat

dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat.

d. Aktivitas belajar harus berfokus pada pemecahan masalah, bukan sekedar mengajarkan mata pelajaran. Pemecahan masalah adalah bagian dari kegiatan kehidupan. Oleh karenanya, pendidikan harus membangun kemajuan siswa untuk memecahkan masalah. Kegiatan pendidikan bukan sebagai pemberian informasi atau data dari guru kepada siswa, yang terbatas sebagai aktivitas mengumpulkan dan mengingat kembali pengetahuan statis.

e. Iklim sekolah harus demokratis dan kooperatif karena kehidupan di masyarakat selalu hidup bersama orang lain, maka setiap orang harus mampu membangun kooperasi dengan orang lain. Namun, dalam realita pendidikan tradisional sering siswa dilarang untuk berbicara, berpindah tempat, atau kerjasama dengan siswa lain. Iklim demokratis dalam kelas dibutuhkan agar siswa dapat hidup secara demokratis di masyarakat

Pendidikan humanistik bermakna menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang. Konsepsi ajaran humanistik menjelaskan bahwa peserta didik merupakan pelaku yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkunga nnya. Pendidikan humanis sebagai pemikiran pendidikan telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan dari dua aliran, yaitu: progresivisme dan ekstensialisme.

Prinsip pendidikan humanis yang diambil dari prinsip progresivisme adalah pendidikan berpusat pada anak (*student centered*), guru tidak otoriter berfokus pada keterlibatan dan aktivitas siswa dan aspek pendidikan yang demokratis dan kooperatif. Di sisi lain prinsip pendidikan humanis yang mengacu pada pandangan pada eksistensialisme menekankan pada keunikan siswa sebagai individu, setiap siswa dipandang individu yang memiliki keunikan yang berbeda dengan siswa lain. Pendidik humanis yang mengikuti pandangan eksistensialisme akan memberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam diri individu, siswa membangun dirinya menjadi seperti apa yang diinginkan.

3. Teori Pembelajaran Humanistik

Teori pembelajaran humanistik adalah teori yang berorientasi pada aspek kemanusiaan yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia (dalam hal ini peserta didik), dengan harapan peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori ini memandang manusia sebagai subyek yang bebas, merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain.

Tujuan belajar menurut teori humanistik adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambatlaun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Dalam teori belajar ini proses belajar harus berhubungan dengan manusia. Meskipun teori ini sangat mementingkan isi dan proses dari belajarnya, tetapi pada dasarnya teori ini lebih cenderung ke

pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal (Armedyatama, 2021, 13).

Tokoh-tokoh aliran ini adalah Abraham Maslow. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistic, ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hirarki kebutuhan. Menurutnya manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologinya yaitu semakin besar kebutuhan maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu (Armedyatama, 2021).

Teori ini memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik (*Humanistic Education*). Pembelajaran humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam model pembelajaran humanistik (Sarnoto, n.d., hal. 34).

Pembelajaran humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi fitrah dalam hal ini segala potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pembelajaran pun senantiasa berubah. Teori ini cocok dalam pembelajaran demi mendorong pengembangan afeksi, yakni kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik atau perlakuan yang hangat dari orang lain.

Di antara kelebihan teori humanisme adalah sangat cocok untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial, siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri; dan siswa menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang-orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Sedangkan kekurangan adalah kurang cocok menerapkan yang pola pikirnya kurang aktif atau pasif. Siswa berperan sebagai pelaku utama (*student center*) maka keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang.

Pembelajaran humanistik mendukung upaya membangun komunikasi antar individu sama lain dan dengan kelompok. Proses internalisai nilai-nilai pendidikan sebagai wujud pertolongan supaya siswa mampu mengaktualisasikan dirinya relevan dengan tujuan pendidikan. Edukasi yang berhasil pada intinya adalah kecakapan menghadirkan makna antara pendidik dengan pembelajar sehingga dapat mencapai tujuan menjadi manusia yang unggul dan bijaksana. Pendidik memfasilitasi siswa menggali, mengembangkan dan menerapkan kecakapan-kecakapan yang mereka punya supaya mampu memaksimalkan potensinya.

Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistic, ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya.

Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hirarki kebutuhan. Menurutnya manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level, dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologinya yaitu semakin besar kebutuhan maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu.

Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow (1954, 1971) bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah meliputi:

a. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*)
   Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok, yang bersifat mendasar. Seperti kebutuhan biologis di tempat kerja serta kebutuhan untuk menerima gaji, cuti, dana pensiunan, masa-masa libur, tempat kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup suhu ruangan yang baik.

b. Kebutuhan akan Rasa Aman (*Safety Needs*)
   Kebutuhan rasa aman menggambarkan kemauan mendapatkan keamanan akan upah-upah yang ia peroleh dan guna menjauhkan dirinya dari ancaman, kecelakaan, kebangkrutan, sakit serta marabahaya.

c. Kebutuhan untuk Diterima (*Social Needs*)
   Masing-masing individu pada umumnya fokus mengarah pada kemauan mempunyai teman, rasa cinta dan rasa diterima. Sebagai makhluk sosial, seseorang bahagia bila mereka disukai

serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi saat di lingkungan kerja, dengan cara meringankan beban kelompok formal atau kelompok non formal, dan mereka bergotong royong bersama teman setu tim mereka di tempat kerja serta mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan dimana mereka bekerja.

d. Kebutuhan Untuk Dihargai (*Self Esteem Needs*) Kebutuhan yang terkait dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui serta penghargaan dari sesama manusia.

e. Kebutuhan Aktualisasi-Diri (*Self Actualization*) Kebutuhan dalam mengaktualisasikan diri pribadi oleh kelompok mampu dicukupi dengan diberikannya peluang untuk berkembang, tumbuh, berkreasi serta memperoleh pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dan mendapat keberhasilan. Dengan kata lain menurut A Maslow, kebutuhan aktualisasi diri adalah kecenderungan seseorang untuk mengerahkan semua kemampuan atau keinginannya secara terus menerus dalam menjadi pribadi yang lebih baik.

4. Pendidikan Humanis Religius

Secara etimologis humanisme berasal dari bahasa Latin "*Humanitas*" yang artinya pendidikan manusia. Istilah ini kemudian mengalami berbagai bentuk turunan. *Pertama,* kata *humanismus* yang digunakan untuk menunjuk sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada studi karya-karya klasik berbahasa Latin dan Yunani di sekolah

menengah. *Kedua, humanista* yang digunakan untuk menunjuk para profesor humanisme Italia. *Ketiga, humanisties* yang digunakan untuk menunjuk pendidikan *liberal art* yang menggunakan karya-karya penulis Romawi klasik. Sedangkan Secara terminologis, humanisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia (Sarnoto, n.d., 27)" Humanisme dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada manusia atau kebudayaan.

Humanisme pendidikan berarti mendorong pendidikan agar dapat lebih mem- perhatikan aspek potensi yang dimiliki manusia (peserta didik) sebagai makhluk sosial dan religius, *'abdullāh* dan *khalīfatullāh*, serta sebagai individu yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi-potensinya. Humanisme dalam hal ini adalah ranah yang dapat mengembangkan manusia sebagai individu yang dapat mengukur ranah ketuhanan dan penyelesaian problem sosial (Mas'ud, 2002, 135).

Humanisme dalam pendidikan menurut Darmiyati Zuchdi (2008, 2) adalah bentuk pendidikan yang mempertimbangkan konsepsi moralitas. Konsepsi ini meliputi kepatuhan pada hukum moral, konformitas pada aturan-aturan sosial, otonomi rasional dalam hubungan antar pribadi, dan otonomi eksistensial dalam pilihan seseorang. Keempat konsepsi itu sebagai dasar pertimbangan capaian peserta didik dalam membentuk sifat-sifat humanis. Berdasarkan pendapat tersebut, pendidikan yang bersifat humanis adalah mengarahkan peserta didik untuk memiliki pertimbangan konsepsi moral dalam bentuk keempat itu. Jika moral berasal dari aturan-

aturan religi, maka pendidikan itu esensinya mengarah ke humanis religius.

Teori humanisme tidak mengenal konsep manusia sebagai makhluk pasif. Dalam praksisnya, seorang guru yang humanis sangat menghindari adanya tindakan penekanan pada siswa. Seorang peserta didik diterima apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga tidak ada yang merasa tertekan, baik pihak siswa maupun guru, psikis maupun fisiknya. Seorang (pendidik) humanis tidak pernah menginginkan muridnya sebagai "fotokopi" dirinya. Implikasi aliran humanisme dalam pendidikan adalah keniscayaan pengembangan potensi diri peserta didik (Chayati, N. dalam Widodo, 2004).

Pendidikan dengan pendekatan humanistik lebih memperhatikan siswa sebagai individu yang mempunyai kehendak atau kebebasan. Sedangkan pendekatan dehumanistik lebih cenderung memandang siswa sebagai peserta didik yang tidak punya tertekan tidak diberi kebebasan berkreasi. Jelasnya, pendidikan dengan pendekatan humanistik religius harus mengedepankan kebebasan peserta didik dalam mengekspresikan potensi insaniyahnya, yakni intelektual dan spiritual (Widodo, 2004, hal. 114). Oleh karena itu proses pendidikan diharapkan mampu menyentuh dua sisi sekaligus, yakni sisi intelektualitas dan sisi moral-spiritual. Maka dari itu pendekatan pendidikan humanistik religius lebih bersifat membina peserta didik melalui potensi yang dimilikinya, yakni potensi insaniyah yang mencakup intelektual dan spiritual.

Religius berarti bersifat religi (keagamaan) yang berkaitan dengan keagamaan (Nasional, 2003, 944).

Definisi agama digunakan oleh humanis religius secara fungsional. Fungsi agama untuk melayani kebutuhan personal atau kelompok sosial. Namun, persoalan agama sering "terjebak pada aspek formalitas" sehingga sulit menjalankan fungsinya (Mas'ud, 2002, 131).

Humanis religius adalah sebuah konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab *habl minallāh* dan *habl min al-nās* (Mas'ud, 2002, 193). Orientasi religiusitas bermaksud melahirkan insan pendidikan yang dapat melaksanakan relasi vertikal dengan Allah *(habl minallāh)* dalam posisinya sebagai *'abdullāh*, dan juga melahirkan insan pendidikan yang pada gilirannya mampu mengadakan hubungan horisontal dengan sesama manusia *(habl min al-nās),* serta dengan sesama makhluknya secara seimbang. Sebagai *'abdullāh* dia mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, sehingga tidak tercabut dari kebenaran faktualnya bahwa ia bagian dari masyarakat dalam dimensi sosiologisnya. Jadi, peserta didik harus menunjukkan kesalehan sosialnya. Islam tidak mengenal adanya humanisme sekuler, karena dalam Islam tidak ada sekularisme sehingga humanisme dalam Islam adalah humanisme religius. Humanisme dalam Islam tidak bisa lepas dari konsep *habl min al-nās* dan *habl minallāh*. Humanisme religius adalah usaha memposisikan manusia (peserta didik) agar terhormat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan.

Konsep humanis religius yang diimplementasikan dalam praktik pendidikan Islam akan berfokus pada akal sehat atau *common sense,*

individualisme menuju kemandirian dan tanggung jawab, *thirst for knowledge,* pendidikan pluralisme, dan kontekstualisme yang lebih mementingkan fungsi daripada simbol, serta keseimbangan antara *reward* dan *punishment* (Mas'ud, 2002, 193). Keenam prinsip dasar dalam pendidikan humanis religius adalah sebagai berikut:

a. *Common sense* atau akal sehat artinya dengan akal sehatnya manusia dapat memperoleh kepercayaan dari Allah untuk menjadi *khalifah* di bumi ini. Hal inilah yang membedakan akal sehat yang dikembangkan di Barat karena tanpa landasan agama, dalam Islam *al-'ālim* lebih baik dari *al-'ābid,* yang notabene dibedakan dari akal sehatnya.

b. Sasaran utama individualisme menuju kemandirian bukan berarti acuh, tidak butuh, atau tidak menghargai orang lain, melainkan lebih menekankan pada tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah. Pengembangan individu menjadi saleh dan *insan kamil* dengan berbagai keterampilan serta mandiri adalah pendidikan Islam.

c. *Thirst for knowledge* artinya pendidikan Islam harus menghargai ilmu pengetahuan tanpa mendikotomikan antara ilmu agama dan non-agama, karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, dan Islam pula yang mendorong umatnya untuk mengejar ilmu pengetahuan sampai ke negeri Cina.

d. Pendidikan pluralisme artinya pendidikan harus menghargai corak pendidikan yang demokratis, menghargai, dan menghormati orang lain dalam

keragaman. Secara normatif, Islam menghargai dan mendukung pluralisme dan kegiatan-kegiatan *cross culture*, serta saling memahami antar budaya bangsa. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an bahwa Allah menciptakan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar satu sama yang lainnya saling mengenal.

e. Kontekstualisme yang lebih mementingkan fungsi daripada simbol artinya harus ada keseimbangan antara simbol dan fungsi, yakni simbol yang didasari rasionalitas dan pertimbangan yang tinggi untuk mewujudkan fungsi. Dalam Islam, esensi dan fungsi tidak boleh dikalahkan oleh segala bentuk simbolisme.

f. Keseimbangan antara *reward* dan *punishment* artinya dalam dunia pendidikan kedua hal tersebut memang ada, tetapi dalam penerapannya harus seimbang atau lebih banyak memberi hadiah daripada hukuman dan hukuman hendaknya lebih bersifat evaluatif. Penerapan hukuman yang berlebihan akan menimbulkan anak kurang kreatif dan bahkan ketakutan, sehingga anak akan sulit mengembangkan diri.

Istilah pendidikan humanis-religius mengandung dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan, yaitu pendidikan humanis dan pendidikan religius. Pengintegrasian dua kosep pendidikan ini dengan tujuan untuk dapat membangun sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan keduanya. Pendidikan humanis yang menekankan aspek kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius agar dapat

membangun kehidupan individu dan sosial yang memiliki kemerdekaan, tetapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan.

Pendidikan humanis-religius merupakan sebuah konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisme ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab atas ungkapan *Hablun Min Allah dan Hablun Min An-Nas*. Pendidikan humanis religius adalah proses memberi pelajaran kepada manusia bahwa sesuatu perbuatan yang jika harus menunggu Tuhan untuk bertindak untuk kita, itu merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Kita harus senantiasa berusaha untuk menghentikan perang-perang dan kriminalitas-kriminalitas dan kebrutalan yang ada sekarang serta masa yang akan datang. Sebagai manusia mempunyai sebuah kekuatan yangluar biasa.

Corak pendidikan humanis religius, umumnya terdapat pada pesantren yang ditunjukan dengan sikap cinta terhadap sesama manusia, baik kyai maupun santri yang mempunyai kesadaran bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara makhluk ciptaan-Nya yang lain, sehingga para santri mengemban amanat yakni sebagai *khalifah fi al-ardh.*

Secara etimologis humanisme berasal dari bahasa Latin "*Humanitas*" yang artinya pendidikan manusia. Istilah ini kemudian mengalami berbagai bentuk turunan. *Pertama,* kata *humanismus* yang digunakan untuk menunjuk sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada studi karya-karya klasik berbahasa Latin dan Yunani di sekolah menengah. *Kedua, humanista* yang digunakan untuk menunjuk para profesor humanisme Italia. *Ketiga, humanisties* yang digunakan untuk menunjuk pendidikan *liberal art* yang menggunakan karya-karya

penulis Romawi klasik. Sedangkan Secara terminologis, humanisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia (Sarnoto, n.d., 27)¨ Humanisme dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada manusia atau kebudayaan.

Beberapa pemahaman uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan humanis religius adalah 1) pendidikan yang mampu memberikan apresiasi yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan bebas, serta dalam batas-batas ekstensinya yang hakiki, termasuk sebagai *khalifatullah*. 2) Pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal. Pendidikan humanis religius bermaksud membentuk insan yang memiliki komitmen humaniter sejati, yaitu insan yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai individu, serta sebagai bagian dari masyarakat dalam dimensi sosiologisnya yang memiliki tanggung jawab moral kepada lingkungannya dalam wujud kesalehan individu dan sosial.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan proses aktivitas mental atau psikis yang terjadi dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang berlandaskan pada aspek illahiyah dan insaniyah sebagai wujud pengembangan fitrah manusia yang berdasarkan nilai- nilai luhur. Pendidikan humanisme religius menjadi solusi menanggapi generasi milenial yaitu keseimbangan pada potensi dalam diri manusia, baik sebagai abd Allah

maupun kholifah Allah, serta mampu menyeimbangkan hablum min Allah dan *hablum min al-nas*.

Pendidikan Islam memperhatikan pendidikan keagamaan, akhlak atau moral, keilmuan dan jasmani juga kebangsaan tanpa mengorbankan salah satu segi yang ada. Hal tersebut dapat dimulai dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keagamaan dan kebudayaan merupakan nilai inti bagi masyarakat yang dipandang sebagai dasar dalam mewujudkan cita- cita kehidupan yang bersatu, bertoleransi, berkeadilan, dan sejahtera.

Pendidikan humanis religius menekankan sikap respek pada siswa, memahami dan menghargai siswa apa adanya, serta mengenal siswa sebagai individu yang perlu diberikan keleluasaan untuk aktualisasi berbagai potensi kemanusiaan yang dimiliki- nya. Pendidik yang memiliki sikap respek kepada siswa, baik di kelas maupun di luar kelas, akan membentuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga akan lebih bermakna bagi siswanya. Serta, membentuk insan yang memiliki komitmen humaniter sejati, yaitu insan yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai individu, serta sebagai bagian dari masyarakat dalam dimensi sosiologisnya yang memiliki tanggung jawab moral kepada lingkungannya dalam wujud kesalehan individu dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (n.d.). Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Ta'dib*, Volume 19 Nomor 1

Armedyatama, F. 2021. Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 1 Nomor 1

Arsyad, A. 2016. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.

Baharun, H. 2016. Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal). *Jurnal At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3 Nomor 1

Barnadib, I. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djohar. 2002. *Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.

Fathurrohman, M. 2015. *Model-Model Pembelajaran Inovataif: Alternatif Desain Pembelajaran yang Menyenangkan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Knight., G. R. 1982. *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*. Michigan: Andrew University Press.

Knight, G. R. 2007. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Gama Media.

Mas'ud, A. 2002. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Munir, A. 2010. *Seni Mengelola Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat: Lekdi Nusantara.

Nasional, D. P. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putri, A. S. 2020. Sistem Pendidikan Nasional. Diambil dari kompas.com website: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/210000569/sistem-pendidikan- nasional?page=all

Rahim, H. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Sarnoto, A. Z. (n.d.). Pendidikan Humanis dalam Perspektif Al-Qur'an. *Alim: Journal of Islamic Education*.

Sutrisno. 2008. *Pendidikan Islam yang Menghidupkan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlurrahman)*. Yogyakarta: Kota Kembang.

Syaefudin, M. (n.d.). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). *Ilmu Dakwah*, Volume 34 Nomor 2.

Trianto. 2009. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif: Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.

Widodo. 2004. Menelusuri Akar Bungkamnya Daya Kritis. *Edukasi*, *2*(1).

Zuchdi, D. 2008. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

STRATEGI PEMBELAJARAN JARAK JAUH: A SYSTEMATIC REVIEW (Naskah Skripsi Prodi PAI UII Tahun Ajaran 2020/2021 hingga 2021/2022)

Siti Afifah Adawiyah

PENDAHULUAN

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 (Ellysa, 2020), seluruh perhatian masyarakat tertuju pada pencegahan atau penyelesaian masalah tersebut. Pada jenjang perguruan tinggi, para akademisi dari mahasiswa hingga dosen tertarik untuk mengangkat fenomena pandemi Covid-19 sebagai salah satu topik penelitian. Berbagai strategi dirancang sebagai upaya dalam mitigasi pandemi, salah satunya dalam dunia pendidikan. Nadiem Makarim menyampaikan bahwa generasi Indonesia mengalami *learning loss* dari pelaksanaan pembelajaran daring atau jarak jauh (GTK DIKDAS, 2021) yang dilakukan sekolah atau madrasah selama kurang lebih setahun. Kondisi yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pembelajaran daring, seperti ketimpangan sebaran teknologi informasi dan komunikasi pada daerah-daerah di Indonesia (Jamaludin, 2021) menjadi sebab utama hal ini. Oleh karena itu, dalam perjalanan pandemi Covid-19, Kemendikbud mengimbau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah atau madrasah agar mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh (Republika, 2021).

Keadaan tidak menentu yang dihadapi sekolah atau madrasah tersebut berdampak langsung pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (Prodi PAI). Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian lapangan,

mengalami beberapa hambatan karena pembatasan ruang gerak yang ditetapkan sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19. Mahasiswa yang telah mengambil data pada awal pandemi, mayoritas merubah fokus penelitiannya menjadi topik yang berkaitan pandemi. Begitu pula mahasiswa yang sedang menyusun proposal dan memilih skema penelitian lapangan, juga mengarahkan penelitian mereka pada topik tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis berusaha memanfaatkan hasil penelitian skripsi mahasiswa untuk (1) memetakan hasil penelitian skripsi Prodi PAI selama masa pandemi Covid-19, dan (2) menyusun *best practice* strategi pembelajaran daring dari hasil penelitian skripsi Prodi PAI tersebut. Harapannya hasil analisis ini dapat berkontribusi pada peta jalur penelitian Prodi PAI dan dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran daring atau jarak jauh secara luas di masa mendatang.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian sekunder dengan metode *systematic review*, dimana data utamanya merupakan kumpulan penelitian skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 hingga Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022. Selanjutnya naskah-naskah publikasi yang tersedia di internet menjadi data pendukung dari temuan penelitian ini. Hal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada strategi pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Peta Hasil Penelitian Skripsi Prodi PAI

Apabila mengacu pada jadwal pelaksanaan sidang, Prodi PAI melaksanakan sidang *munaqosyah* sebanyak 6 (enam) kali pada tiap tahun akademik,

dengan pembagian 3 periode disetiap semester. Namun saat tulisan ini dibuat, sidang periode terakhir pada TA 2021/2022 belum berlangsung. Sehingga total yang digunakan adalah 11 periode dengan rincian sebagai berikut yaitu 6 periode pada TA 2020/2021 dan 5 periode pada TA 2021/2022. Jumlah total mahasiswa yang mengikuti sidang munaqosyah dari periode tersebut 249 mahasiswa. Detail jumlah mahasiswa yang mengikuti sidang di tiap periode tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Peserta Sidang Munaqosyah Tahun Ajaran 2020/2021 hingga 2021/2022

Tahun Ajaran	Periode Sidang	Jumlah Peserta Sidang
2020/2021 Semester Ganjil	1	31
	2	32
	3	30
2020/2021 Semester Genap	4 Gel.1	10
	4 Gel.2	9
	5	28
2021/2022 Semester Ganjil	1	34
	2	14
	3	30
2021/2022 Semester Genap	4	19
	5	12
	6	0
Total		249

Data tersebut menunjukkan kecenderungan jenis penelitian yang dipilih oleh mahasiswa Prodi PAI. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif menjadi pilihan mayoritas mahasiswa dengan persentase 69% dari total mahasiswa. Selanjutnya diikuti sejumlah 18% mahasiswa yang melaksanakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan jumlah tersebut, kecenderungan mahasiswa Prodi PAI dalam melakukan penelitian lebih memilih penelitian primer (lapangan), dengan pengambilan data dilakukan secara langsung melalui teknik wawancara, penyebaran angket, maupun observasi sehingga data yang didapatkan adalah rekaman audio atau video, catatan observasi, dan data hasil angket yang dibagikan (Sugiyono, 2018). Penelitian sekunder seperti studi pustaka menjadi pilihan ketiga dengan jumlah 8% dari total mahasiswa. Data tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi PAI memiliki kecenderungan melakukan penelitian primer daripada sekunder, atau dengan kata lain lebih memilih penelitian lapangan daripada studi pustaka. Rincian data yang disebutkan tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kecenderungan Jenis Penelitian Mahasiswa Prodi PAI

Tahun Ajaran	Periode Sidang	Kuantitatif Lapangan	Kualitatif Lapangan	PTK	Studi Pustaka	Mix-method
2020/2021 Semester Ganjil	1	5	25	0	0	0
	2	10	22	0	0	0
	3	4	23	2	1	0

2020/2021 Semester Genap	4 Gel.1	2	6	0	2	0
	4 Gel.2	0	8	0	1	0
	5	6	16	3	2	1
2021/2022 Semester Ganjil	1	5	21	0	7	1
	2	2	11	0	1	0
	3	6	20	0	4	0
2021/2022 Semester Genap	4	4	12	1	1	0
	5	1	8	2	1	0
	6	0	0	0	0	0
Total		45	172	8	20	2

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan 249 mahasiswa tersebut, sejumlah 26 naskah menggunakan kata "Pandemi dan/atau Covid-19" dalam judul skripsi. Selanjutnya naskah yang mengandung kata "Pembelajaran Daring/Jarak Jauh/Online/e-Learning" secara eksplisit dalam judul sejumlah 36 naskah skripsi. Perkembangan selanjutnya, terdapat peningkatan penggunakan kata "Pandemi dan/atau Covid-19" dan "Pembelajaran Daring/Jarak Jauh/Online/e-Learning" dalam skripsi yang disidangkan pada TA 2021/2022 mulai semester ganjil hingga genap. Pada semester ganjil TA 2020/2021 sejumlah 5 naskah yang menggunakan kata "Pandemi dan/atau Covid-19" dan sejumlah 7 naskah menggunakan kata "Pembelajaran Daring/Jarak Jauh/Online/e-Learning" dalam judul. Pada semester genap di tahun ajaran yang sama, hanya terdapat peningkatan sejumlah 2 naskah yang memiliki kata "Pembelajaran Daring/Jarak Jauh/Online/e-

Learning" pada naskah. Kemudian peningkatan terjadi pada semester ganjil di TA 2021/2022. Jika ditelusuri pada kejadian pandemi Covid-19 yang bermula pada Maret 2020 hingga tulisan ini dibuat, maka peningkatan yang terjadi pada penulisan skripsi memiliki alasan yang rasional. Terlebih apabila umumnya naskah skripsi selesai dalam waktu 3 bulan, maka peningkatan penelitian yang berkaitan dengan pandemi ataupun pembelajaran daring terjadi seiring dengan berlangsungnya pandemi. Dilihat dari kecenderungan mahasiswa yang memilih penelitian lapangan daripada studi pustaka, maka sangat besar dimungkinkan penelitian terkait Pandemi ataupun PJJ dilakukan oleh para mahasiswa Prodi PAI. Rincian naskah yang mengandung kata Pandemi dan/atau PJJ pada judul skripsi dapat dilihat di tabel bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Penelitian Skripsi Mengandung Kata Pandemi dan/atau Pembelajaran Daring

Tahun Ajaran	Periode Sidang	Judul "Pandemi dan/atau Covid-19"	Judul "Pembelajaran Daring/Jarak Jauh/Online/e-Learning"
2020/2021 Semester Ganjil	1	2	2
	2	1	1
	3	2	4
2020/2021 Semester Genap	4 Gel.1	1	1
	4 Gel.2	1	3
	5	3	5
	1	7	5

2021/2022 Semester Ganjil	2	1	4
	3	2	7
2021/2022 Semester Genap	4	1	3
	5	5	1
	6	0	0
Total		26	36

Naskah yang tidak mengandung kata pandemi dan atau PJJ, bukan berarti tidak membahas hal-hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan naskah yang digunakan pada tulisan ini, penulis menelusuri setiap abstrak dan kesimpulan pada naskah skripsi yang memiliki keterkaitan dengan pandemi dan/atau PJJ. Setelah 294 total naskah yang ditelusuri, maka terdapat 31% naskah atau sejumlah 94 naskah yang memiliki keterkaitan dengan pandemi dan/atau PJJ. Jika dilihat dari total naskah yang berkaitan dengan pandemi dan/atau PJJ, pemilihan tema meningkat pada semester ganjil TA 2021/2022. Pemilihan naskah yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19 dan/atau PJJ dilakukan untuk merangkum strategi pembelajaran daring yang telah dilakukan sekolah/madrasah, dengan harapan kumpulan strategi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa mendatang, baik pada masa pandemi/endemi ataupun masa normal.

2. *Best Practice* Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

Pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 menjadi *benchmark* Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun

PJJ bukanlah hal baru di dunia pendidikan secara global, namun pelaksanaannya di Indonesia masih terbilang minim pengalaman. Sebelum adanya pandemi, terdapat lembaga yang sudah menyelenggarakan PJJ di Indonesia yaitu Universitas Terbuka (JawaPos, 2020). Dengan segala keterbatasan yang ada selama pandemi Covid-19, PJJ di Indonesia diselenggarakan sembari dievaluasi terkait hal yang perlu diperbaiki pada berbagai sektor.

Tulisan ini berusaha memberikan proyeksi pelaksanaan PJJ di masa depan berdasarkan hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi PAI selama pandemi Covid-19. Terdapat 3 bagian yang dibahas sesuai Standar Proses dalam Standar Nasional Pendidikan terbaru yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021). Ketiga bagian ini merupakan esensi dari sebuah proses pembelajaran, sehingga kendala yang dihadapi salah satu aspek akan berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran secara menyeluruh (Alawiyah, 2017). Tulisan ini tidak terbatas pada Standar Proses, namun juga menyinggung standar lain dalam SNP, karena satu sama lain antar standar saling berkaitan.

3. Perencanaan Pembelajaran

Terdapat 3 fokus bahasan pada bagian perencanaan pembelajaran, yaitu pemahaman guru terhadap kondisi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh, pemerataan pola belajar pada pembelajaran jarak jauh, dan pemenuhan capaian pembelajaran dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah ini, guru berperan dalam merancang PJJ dengan

segala kemungkinan yang dihadapi. Hal pertama yang harus dipahami guru adalah pembelajaran jarak jauh akan berbeda dengan proses pembelajaran konvensional di kelas. Pembelajaran jarak jauh bukan sekedar merubah media pembelajaran saja, namun dari pola interaksi juga akan berubah. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memahami kondisi yang dihadapi secara menyeluruh baik di kelas maupun tiap peserta didik, misalnya kondisi sinyal di sekitar rumah peserta didik, kepemilikan gawai, latar belakang pekerjaan orangtua yang berimbas pada penghasilan selama pandemi, hingga karakteristik peserta didik. Dengan basis pemahaman tersebut, maka guru akan mudah untuk merancang proses pembelajaran dengan pola pembelajaran jarak jauh.

Pola pembelajaran jarak jauh secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu belajar mandiri, belajar kelompok dan belajar dengan tutor (Warsita, 2014). Ketiga pola ini perlu diperhatikan porsinya oleh guru, karena saat pandemi berlangsung mayoritas guru menekankan pada belajar mandiri (Wahyudi, 2021). Hal tersebut dapat dimaklumi karena tidak hanya peserta didik yang perlu proses adaptasi dengan pola pembelajaran daring, namun hal serupa juga dialami oleh guru. Alhasil, pola pembelajaran yang disediakan guru hanya menekankan pada belajar mandiri atau pemberian tugas saja. Hal itu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peserta didik, seperti yang telah disampaikan oleh Kemendikbudristek sebagai *learning loss*.

Dalam merancang pembelajaran secara umum, capaian pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang harus diperhatikan oleh guru.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, selama pandemi Covid-19 guru melakukan penyesuaian capaian pembelajaran tersebut. Penyesuaian yang dilakukan berupa pengurangan capaian pembelajaran (Fitri, 2020; Irmawan, 2021) karena guru kesulitan melakukan penilaian pada beberapa capaian yang menyentuh ranah afeksi (Devi & Purnomo, 2021). Hal ini terjadi karena guru tetap menginginkan peserta didik belajar selama di rumah, dengan keterbatasan yang dimiliki baik dari pihak guru/sekolah ataupun peserta didik. Semestinya, dalam merancang pembelajaran jarak jauh guru tetap menyasar ketiga aspek capaian belajar kognitif, afektif, dan psikomotor tanpa dikurangi.

Pada dasarnya capaian pembelajaran pada tiap jenjang telah ditentukan dalam kurikulum yang sedang berlangsung, misalnya kurikulum 2013 yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah atau madrasah saat ini. Posisi sekolah atau madrasah dalam capaian tersebut adalah mengembangkannya sesuai dengan kondisi di lembaga masing-masing. Pada kurikulum terbaru yang masih dalam proses untuk penerapan secara nasional yaitu kurikulum merdeka, kurikulum ini lebih fleksibel karena dapat dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah (JawaPos, 2022). Dengan perkembangan kurikulum ini, akan lebih mempermudah penerapan pembelajaran jarak jauh.

Perkembangan kurikulum yang sedang terjadi di Indonesia ini bukan hal yang baru terjadi. Kurikulum sering berganti dan berkembang seiring berjalannya waktu dan pergantian pemerintah. Mendikbudristek saat ini terus menekankan bahwa pembelajaran harus merdeka dan perubahan kurikulum ini merupakan

opsi yang dapat dipilih sekolah (Kemendikbudristek, 2022). Tentu sekolah perlu melihat kesiapan dirinya dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini. Hal ini juga memberikan motivasi bagi dunia pendidikan untuk terus berkembang lebih baik.

4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Terdapat 4 fokus pembahasan pada bagian ini, yaitu penggunaan *flipped classroom* model sebagai basis pembelajaran, pemanfaatan media dan sumber belajar bagi peserta didik, pemberian *feedback* pada proses pembelajaran, dan pemenuhan fasilitas peserta didik dengan variasi kegiatan belajar.

Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh adalah penggunaan model *flipped classroom* dengan basis pembelajaran daring. Dalam Berkeley Center for Teaching and Learning dijelaskan bahwa *flipped classroom* adalah pembelajaran yang mengharuskan peserta didik mempelajari materi secara mandiri di luar kelas dan/atau melakukan beberapa hal yang telah diinstruksikan guru, kemudian saat di kelas guru tidak lagi menyampaikan materi dari nol namun peserta didik dapat langsung berdiskusi, praktikum, atau mengerjakan tugas (Berkeley Center for Teaching & Learning, n.d.). Penjelasan materi telah peserta didik dapatkan saat di luar kelas dalam bentuk video pembelajaran misalnya, sehingga guru di kelas tidak perlu mengulangi penyampaian materi. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam pemahaman materi, dapat ditanyakan dalam sesi di kelas bersama guru. Seluruh aktivitas dalam pembelajaran ini dilakukan secara daring.

Pada perkembangan saat ini, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Selain itu, pada era sekarang, peserta didik sangat dekat dengan perkembangan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengakses berbagai informasi melalui gawainya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran guru yang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Guru dan peserta didik perlu sama-sama menyadari hal ini sehingga proses pembelajaran yang berlangsung dapat dikelola secara efektif. Guru tidak perlu lagi kelelahan menyampaikan materi yang banyak dalam jangka waktu kelas yang pendek. Di sisi yang lain, peserta didik juga dapat mengeksplor dirinya dengan instruksi yang diberikan guru di luar kelas.

Materi yang ditugaskan kepada peserta didik untuk dipelajari di luar kelas tidak melulu berupa video pembelajaran. Guru dapat memberikan cerita, berita, hasil penelitian, film atau animasi, dan hal lain yang masih berkaitan dengan materi ajar. Hal ini tentu dibersamai dengan instruksi yang jelas dari guru, sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi tersebut. Selanjutnya dalam proses pembelajaran di kelas (daring menggunakan Zoom, misalnya), bukan berarti guru tidak diperkenankan menyampaikan materi, namun ditekankan peserta didik yang melakukan suatu atau beberapa kegiatan seperti tanya jawab atau berdiskusi langsung dengan guru. Guru diperbolehkan memberikan penguatan atas proses pembelajaran secara umum atau melengkapi dengan materi ajar secara khusus.

Berkaitan dengan bentuk materi ajar yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar mandiri

di luar kelas, hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PJJ adalah pemanfaatan media dan sumber belajar di lingkungan peserta didik. Dengan beragamnya kondisi lingkungan sekitar peserta didik, diharapkan guru dapat dengan kreatif merancang pembelajaran dengan penggunaan sumber belajar yang tidak mengharuskan jaringan internet dan gawai. Misalnya, pada jenjang sekolah dasar, guru dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengumpulkan berbagai macam daun di sekitar rumah dan mengelompokkannya sesuai dengan klasifikasi daun dalam bacaan yang diberikan guru sebelumnya. Artinya, peserta didik perlu membaca materi terlebih dahulu lalu mengerjakan hal sesuai dengan arahan guru. Peserta didik tetap mengumpulkan tugas melalui media yang disepakati bersama, misal melalui Google Classroom atau sejenisnya. Lalu ketika di kelas (daring) guru dapat memberikan tugas lanjutan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Memanfaatkan media dan sumber belajar yang telah tersedia di lingkungan peserta didik tentu akan mempermudah proses belajar itu sendiri. Peserta didik yang jauh dari guru, tetap dapat mengakses media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan pemenuhan tujuan pembelajaran. Tentu sebelum guru memberikan instruksi tersebut, guru sudah memastikan media dan sumber belajar tersebut tersedia di lingkungan tiap peserta didik. Jika tidak, maka guru perlu menyiapkan alternatif pengganti media dan sumber belajar yang dimaksud.

Selama pembelajaran jarak jauh, tidak hanya peserta didik yang mengalami *shocking culture*, tetapi juga guru (Setiawan, 2020). Hal tersebut nampak pada tidak maksimalnya peran guru dalam mendampingi seluruh tahapan pembelajaran. Idealnya, setelah

peserta didik mengumpulkan atau menyelesaikan penugasan, guru harus memberikan umpan balik pada tugas-tugas tersebut. Namun yang umumnya terjadi, guru hanya memberikan tugas kepada peserta didik tanpa memberikan umpan balik atau *feedback*. Hal itu tentunya mempengaruhi munculnya perasaan kurang dihargai pada diri peserta didik. Padahal, dengan memberikan umpan balik, peserta didik juga berkesempatan untuk memahami dari kegiatan belajar tersebut (Haenida, 2021). Di sisi lain, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, adanya umpan balik akan memberikan penguatan terhadap apa yang telah dilakukan peserta didik, sehingga mereka mengetahui bahwa yang dilakukannya sudah benar atau belum.

Pemberian umpan balik pada proses pembelajaran, tidak terbatas pada tugas yang dilakukan peserta didik. Secara umum, guru dianjurkan untuk memberikan umpan balik pada setiap aktivitas pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat dilakukan secara terbuka pada peserta didik. Selain itu, guru juga perlu memberikan umpan balik pada tiap progres yang dicapai oleh peserta didik. Tentunya model umpan balik yang seperti ini dilakukan secara lebih tertutup, artinya hanya peserta didik bersangkutan yang mengetahui umpan balik yang diberikan oleh guru. Sedangkan pemberian umpan balik dalam evaluasi pembelajaran, dapat dilakukan dalam pelaksanaan penilaian sumatif maupun formatif.

Hal yang perlu diperhatikan guru pada pembelajaran jarak jauh selanjutnya adalah variasi kegiatan belajar bagi peserta didik. Pembelajaran jarak jauh berpeluang memberikan kejenuhan dalam prosesnya. Oleh karena itu, guru dituntut kreatif

dalam menyediakan variasi kegiatan belajar bagi peserta didik selama tidak berada di kelas. Selama pandemi Covid-19, dari hasil penelitian skripsi ditemukan bahwa peserta didik mengalami kebosanan belajar (Layyinah, 2021; Oktaviani, 2020; Razief, 2020). Walaupun pada dasarnya faktor yang mempengaruhi kebosanan belajar peserta didik sangat banyak, namun salah satu yang dapat diantisipasi oleh guru adalah melalui variasi kegiatan belajar. Variasi kegiatan belajar dapat dilakukan dengan menonton video penjelasan materi, mencari jenis tanaman di sekitar rumah, mengamati kegiatan jual-beli di pasar, dan lain-lain. Penentuan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan jenjang pendidikan yang diikuti oleh peserta didik.

Pada pengembangan variasi kegiatan belajar, media dan sumber belajar menjadi salah satu unsur yang turut mempengaruhi. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, bertanggungjawab atas pemenuhan media dan sumber belajar tersebut, sehingga memudahkan proses belajar peserta didik. Jika media dan sumber belajar disiapkan secara mandiri oleh peserta didik, maka guru perlu memperhitungkan kemudahan peserta didik dalam mengakses media dan sumber tersebut. Kemudahan akses yang dimaksud adalah kemudahan didapatkan di sekitar peserta didik dan kemudahan dalam biaya untuk memperolehnya. Salah satu contoh media dan sumber belajar yang harus difasilitasi sekolah adalah buku utama pelajaran. Biasanya sekolah telah menyediakan buku tersebut pada perpustakaan sekolah dan dapat dipinjam oleh peserta didik. Sedangkan contoh pemenuhan fasilitas belajar di rumah bagi peserta didik adalah dengan memberikan

video penjelasan materi yang dapat diakses peserta didik melalui internet. Video tersebut dapat diakses peserta didik melalui Google Drive, Youtube, atau yang sejenisnya. Melalui video yang diunggah dalam internet, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Beberapa sekolah yang memiliki kemampuan finansial yang baik, bahkan dapat memberikan fasilitas pinjaman gawai yang dapat digunakan peserta didik dalam proses belajar.

5. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran idealnya dilakukan pada ketiga ranah yang dikembangkan dalam diri peserta didik, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Hal ini juga berlaku pada proses penilaian pembelajaran jarak jauh yang perlu memperhatikan tujuan belajar pada ketiga aspek. Umumnya, penilaian hasil belajar pada ranah kognitif dapat diukur menggunakan aplikasi seperti *Google Form, Quizizz, Geschool*, dan sejenisnya. Selanjutnya, penilaian ranah psikomotor dapat menggunakan video atau produk yang mencerminkan keberhasilan penguasaan keterampilan. Sedangkan penilaian pada ranah afektif dapat diukur dengan memanfaatkan orangtua sebagai observer.

Sedangkan implementasi penilaian pada PJJ dalam ranah kognitif tidak jauh berbeda dengan proses penilaian kognitif pada kelas (*offline*). Guru dapat menggunakan aplikasi penilaian yang dapat diakses peserta didik di rumah. Selama pandemi, guru menggunakan *Google Form, Quizizz, Geschool*, dan lainnya untuk melakukan proses penilaian ranah kognitif. Tentunya proses ini hanya mengukur pemahaman pada materi yang dibahas. Hal lain yang

perlu dipertimbangkan dalam penilaian kognitif adalah perlunya memperhitungkan level kognitif sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik.

Selanjutnya, penilaian pada ranah psikomotor dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik menguasai sebuah keterampilan. Penilaian ini juga relatif tetap mudah dilakukan dalam pola pembelajaran daring. Untuk menilai penguasaan sebuah keterampilan, guru dapat menilai dari produk yang dihasilkan atau dari proses pengerjaan tugas yang diberikan guru. Untuk penilaian proses ini, peserta didik dapat mengirimkan berupa video proses pengerjaan produk itu sendiri. Hal ini dapat disetarakan dengan pengamatan guru jika melakukan penilaian di kelas *offline* (luring), namun dengan cara pengamatan yang berbeda.

Ranah yang dianggap paling sulit dan memiliki *effort* lebih untuk dinilai adalah ranah afektif. Jika pada kelas *offline* guru dapat mengamati sikap dan perilaku peserta didik secara langsung, maka pada pembelajaran daring guru membutuhkan media untuk membantu proses penilaian. Pada dasarnya sama seperti penilaian di dua ranah yang lain, namun karena ranah afektif merupakan penilaian sikap yang hanya bisa diamati (Kusumawati, 2015) maka penilaian ini membutuhkan perhatian khusus daru guru. Penilaian yang dilakukan dapat melalui instrumen penilaian atau seseorang. Bentuk-bentuk instrumen tersebut misalnya: pertama, instrumen penilaian afektif seperti yang dilakukan pembelajaran luring, yaitu memberikan jurnal harian kepada peserta didik. Peserta didik akan mengisi jurnal tersebut dan guru dapat menilai berdasarkan apa yang diisikan oleh peserta didik dalam jurnal tersebut. Kedua,

memanfaatkan orang-orang di sekitar peserta didik, seperti orang tua. Pemilihan orangtua sebagai perantara penilai karena orangtua lebih memahami keseharian peserta didik, lebih dewasa, dan bertanggungjawab atas perkembangan diri peserta didik. Hal ini akan berbeda jika penilaian dilakukan oleh kakak atau adik. Proses penilaian ini dapat diwujudkan dengan pengisian lembar observasi oleh orang tua atau wawancara antara guru dengan orang tua. Dalam menyusun lembar penilaian bagi orang tua, guru perlu memperhatikan tingkat kesulitan yang mungkin akan ditemukan orang tua ketika memberikan penilaian.

6. Aspek Pendukung Keberhasilan Pembelajaran Jarak Jauh

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Secara umum faktor pendukung pembelajaran jarak jauh dapat dibagi menjadi 3, yaitu kesediaan fasilitas pembelajaran, keterlibatan orangtua, dan pemanfaatan sumber belajar.

Pernyataan bahwa pembelajaran jarak jauh membutuhkan fasilitas pembelajaran yang memadai telah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat. Dalam proses belajar, paling tidak peserta didik harus memiliki jarangan internet yang memadai dan gawai untuk mengakses pembelajaran secara *online*. Selain itu, hal penting selanjutnya adalah ketersediaan materi belajar yang disiapkan oleh guru dan dapat diakses peserta didik secara *online*. Hal ini menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, apakah sekolah dapat memfasilitasi hal tersebut atau mewajibkan peserta didik untuk

menyiapkan secara mandiri. Jika sekolah memfasilitasi kedua hal tersebut, maka biasanya akan ada penyesuaian dalam biaya sekolah.

Selanjutnya keberhasilan pembelajaran membutuhkan *support system* yang memadai, bukan hanya *ambience* di sekolah namun juga di rumah. Doni Kusuma dalam bukunya menyampaikan bahwa sekolah dan rumah menjadi hal yang harus diperhatikan untuk suksesnya proses pembelajaran (Koesoema, 2018). Selaras dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tiga agensi yang saling mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat (Sukarman, 2018). Karena itulah rumah sebagai tempat belajar perserta didik juga perlu dibangun suasana belajar yang tepat. Rumah merupakan tempat belajar pertama kali bagi peserta didik sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal dan menjadi tempat belajar seumur hidup. Nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam hidup harus ditanamkan baik di sekolah maupun di rumah. Dengan berpedoman pada prinsip nilai yang sama, peserta didik memahami bahwa nilai tersebut benar dan dapat dijadikan pegangan hidup. Tentu, orangtua dan guru memiliki peran yang sama besarnya dalam proses penerapan nilai ini.

Pada proses pembelajaran jarak jauh, orang tua harus memahami dan mendukung proses belajar peserta didik dan tidak diperkenankan lepas tanggungjawab dalam proses belajar peserta didik. Terlebih selama di rumah, peserta didik berada di bawah pantauan orang tua (Widiantoro, 2021). Oleh karena itu, orang tua harus memahami apa yang sedang dipelajari peserta didik dan harus mendukung proses belajar yang dilalui peserta didik tersebut

(Hariering, 2020). Sehingga peran orang tua juga sekaligus menjadi "guru" bagi peserta didik selama berada di rumah (Mahyadien, 2020). Dengan kata lain, keterlibatan orang tua sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran.

Aspek terakhir yang juga merupakan pendukung pembelajaran jarak jauh yang harus diperhatikan guru adalah pemanfaatan sumber belajar. Untuk menghindari *learning loss* yang terjadi dalam pembelajaran darurat selama pandemi, guru perlu memberikan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Variasi ini dapat ditunjang dengan pemanfaatan sumber dan media belajar. Guru dapat memanfaatkan sumber dan media belajar yang telah tersedia di lingkungan peserta didik atau guru menciptakan sumber dan media baru yang kemudian akan digunakan peserta didik dalam proses belajar. Kedua alternatif ini dapat dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pada prosesnya, guru didorong untuk dapat memanfaatkan sumber dan media belajar yang telah tersedia di lingkungan peserta didik. Hal ini disamping memudahkan beban kerja guru, juga memudahkan peserta didik dalam memahami lingkungannya dengan lebih baik. Sehingga proses belajar terlaksanan melalui keadaan yang senyatanya, bukan hanya belajar teori di kelas saja.

KESIMPULAN

Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal berikut 1) Perencanaan pembelajaran: yaitu pemahaman guru terhadap kondisi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh, pemerataan pola belajar pada pembelajaran jarak jauh, dan pemenuhan capaian

pembelajaran dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik; 2) Pelaksanaan pembelajaran: yaitu penggunaan *flipped classroom* model sebagai basis pembelajaran, pemanfaatan media dan sumber belajar di lingkungan peserta didik, pemberian *feedback* pada proses belajar peserta didik, dan pemenuhan fasilitas peserta didik dengan variasi kegiatan belajar; dan 3) Penilaian pembelajaran: yaitu hasil belajar ranah kognitif dapat diukur menggunakan aplikasi seperti *Google Form, Quizizz, Geschool*, dan sejenisnya, ranah psikomotor menggunakan video atau produk yang mencerminkan keberhasilan penguasaan keterampilan, dan ranah afektif dapat diukur dengan memanfaatkan orangtua sebagai observer. Pendukung pembelajaran jarak jauh yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu kesediaan fasilitas pembelajaran, keterlibatan orangtua, dan pemanfaatan sumber belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *8*(1), 81–92. Retrieved from https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1256

Berkeley Center for Teaching & Learning. (n.d.). Flipping Your Classroom. Retrieved May 14, 2022, from https://teaching.berkeley.edu/flipping-your-classroom

Devi, S. A. P., & Purnomo, H. (2021). Penyelesaian Permasalahan Penilaian Ranah Afektif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Jurnal Amal Pendidikan*, *2*(2), 118–129. https://doi.org/10.36709/JAPEND.V2I2.18721

Ellysa. (2020). Situasi Covid-19 di Indonesia. *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, *Semester I*.

Fitri. (2020). *Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (Daring) Bagi Mahasiswa di Masa Pendemi Covid-19* (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28586

GTKDIKDAS. (2021). Agar Terhindar Dari Learning Loss, Sekolah Wajib Berikan Opsi Belajar Tatap Muka Terbatas - PGDIKDAS 2020. Retrieved May 13, 2022, from https://gtkdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/agar-terhindar-dari-learning-loss-sekolah-wajib-berikan-opsi-belajar-tatap-muka-terbatas

Haenida, L. A. (2021). *IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELAJARAN DARING KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM RANAH PSIKOMOTORIK DENGAN PERAN ORANG TUA DI KELAS 4 SD ISLAM AL-AZHAR 31 YOGYAKARTA*. Universitas Islam Indonesia.

Hariering, I. E. (2020). *Peran Orangtua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Era Digital (Studi di Dusun Leles Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupataten Sleman Yogyakarta)* (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28523

Irmawan, A.-S. L. P. (2021). *Implementasi Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Microteaching Di Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun Akademik 2019/2020* (Universitas Islam Indonesia).

Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31005

Jamaludin, J. (2021). Pembelajaran Daring Dengan Keterbatasan Akses Internet di Pelosok Desa Era Covid-19 (Studi Kasus SMK Telkom Medan). *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 49–55. https://doi.org/10.54259/PAKMAS.V1I2.57

JawaPos. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Permanen, Sudah Dikembangkan Sejak 1984. Retrieved May 13, 2022, from https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/09/07/2020/pembelajaran-jarak-jauh-permanen-sudah-dikembangkan-sejak-1984/

JawaPos. (2022). Nadiem: Kurikulum Merdeka Lebih Fleksibel, Ada Kearifan Lokalnya. Retrieved May 14, 2022, from https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/03/2022/nadiem-kurikulum-merdeka-lebih-fleksibel-ada-kearifan-lokalnya/

Kemendikbudristek. (2022, February 11). Kurikulum Merdeka jadi Jawaban untuk Atasi Krisis Pembelajaran. Retrieved May 14, 2022, from https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kurikulum-merdeka-jadi-jawaban-untuk-atasi-krisis-pembelajaran

Koesoema, D. (2018). *Pendidikan Karakter Berbasis Komunitas: Memberdayakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Kusumawati, T. (2015). PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN RANAH AFEKTIF

MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, *1*(1). https://doi.org/10.18784/SMART.V1I1.233

Layyinah, R. (2021). *Implementasi Pembelajaran Blended Learning Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mts Mihadunal Ula Sukabumi*. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32129

Mahyadien, M. (2020). *Analisis Dampak Pembelajaran Daring Bagi Pelajar dalam Membentuk Keaktifan Belajar di Padukuhan Mlangi Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman* (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30761

Oktaviani, A. Y. (2020). *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada RA Masyithoh Kauman Wonosobo Jawa Tengah)*. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28602

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan. , Standar Nasional Pendidikan § (2021).

Razief, A. (2020). *Implementasi Pembelajaran E-Learning pada Saat Pandemi Covid-19 di MAN 2 Sleman Yogyakarta*. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30759

Republika. (2021). Nadiem Memohon: Selamatkan Anak Kita dari Learning Loss. Retrieved May 13, 2022, from https://www.republika.co.id/berita/qzib6f487/nadiem-memohon-selamatkan-anak-kita-dari-learning-

loss

Setiawan, D. (2020, October 9). Covid-19, Culture Shock di Sekolah dan Pesantren. Retrieved May 14, 2022, from Suyanto.id website: https://suyanto.id/covid-19-culture-shock-di-sekolah-dan-pesantren/

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukarman, S. (2018). REAKTUALISASI KONSEP TRI PUSAT PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, *5*(1), 1–24. https://doi.org/10.31942/PGRS.V5I1.1972

Wahyudi, Y. (2021). *Persepsi Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring Di Dusun Sapen Umbulmartani Ngemplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31001

Warsita, B. (2014). POLA KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN JARAK JAUH. *Jurnal Teknodik*, 73–83. https://doi.org/10.32550/TEKNODIK.V18I1.113

Widiantoro, B. T. (2021). *Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sma Plus Permata Insani Islamic School Kabupaten Tangerang* (Universitas Islam Indonesia). Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/35864

PENTINGNYA MOTIVASI DAN EFEKTIVITAS DALAM BEKERJA

Burhan Nudin

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi atau lembaga nirlaba di bawah yayasan, perguruan tinggi swasta menjadi wadah atau tempat sekumpulan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di dunia akademik. Untuk menjaga mutu, mengembangkan, dan meningkatkan daya saing, sebuah organisasi perlu melakukan langkah taktis dan jitu dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (*support staff*), *security*, *cleaning service*, dan seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya. Setiap pegawai tentu memiliki kemampuan dan kapasitas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur di tempat kerjanya. Perlu adanya dorongan sebagai upaya peningkatan *ghirah* dan gairah kerja melalui pelbagai pendekatan dengan muara akhirnya berupa penumbuhan motivasi guna peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja.

Dalam setiap institusi atau lembaga baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, pastinya berharap memiliki karyawan yanag mampu, cakap, terampil, mau bekerja giat, dan berkeinginan mencapai hasil kerja optimal. Para pimpinan dan pemangku kebijakan seyogyanya berusaha semaksimal mungkin agar karyawan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan amanah atau tugasnya. Motivasi menjadi faktor penting untuk mendorong karyawan agar memiliki totalitas, loyalitas, dan efektivitas kerja.

Produktivitas karyawan adalah komponen penting untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat didorong dengan memberikan motivasi melalui pendekatan yang tepat. Motivasi para pekerja tentu tidak sama jika melihat dari tingkat pendidikan dan kondisi ekonominya. Orang yang semakin terdidik dan semakin independen secara finansial, sumber motivasinya bukan lagi semata-mata ditentukan oleh sarana motivasi, namun juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan. Tiap karyawan memiliki kebutuhan dan keinginan yang beragam, sehingga hal tersebut memengaruhi pola perilaku kerja mereka.

Perilaku kerja seorang karyawan atau pegawai dalam suatu instansi pada dasarnya berorientasi pada tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada dalam instansi tersebut. Maka, setiap unsur pimpinan dalam suatu instansi harus bisa memahami, meramalkan, bahkan mengawasi dan mengubah perilaku bawahannya pada saat dan waktu tertentu. Perlunya pemimpin mempunyai *insight* tentang motif bekerja pada bawahannya yang bisa mendorong timbulnya tindakan teretentu pada waktu tertentu juga.

Kinerja setiap pegawai tentu tidak lepas dari motivasi pegawai itu sendiri. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia tidak hanya berupa material, tetapi juga bersifat nonmaterial, seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Tiap individu cenderung akan dihadapkan pada hal-hal yang mungkin tidak diduga sebelumnya di dalam proses mencapai kebutuhan yang diinginkan. Melalui bekerja dan pertumbuhan pengalaman, seseorang akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Seseorang dapat dilihat bagaimana kinerjanya adalah proses bekerja tersebut (Kurniasari, 2018, p. 34). Akan tetapi pimpinan juga perlu mengintervensi sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi. Hasibuan dalam Nasution mengatakan ada dua

macam motivasi yang diberikan kepada pegawai, yaitu motivasi langsung berupa material dan non material, serta motivasi tidak langsung yakni motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas pendukung dan penunjang gairah kerja serta kelancaran tugas para pegawai (Nasution, 2014a). Pemberian insentif, *reward*, dan remunerasi secara prosedural baik dalam bentuk material maupun non material menjadi strategi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Keselamatan kerja, jaminan kesehatan, lingkungan kerja yang kondusif, pemberian gaji, dan tunjangan lain secara adil juga menjadi indikator kunci. Jika pimpinan instansi telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai kebutuhan karyawan, maka peningkatan motivasi, semangat kerja, efektivitas kerja, dan produktivitas kerja secara berkelanjutan menjadi keniscayaan.

Beberapa penelitian terdahulu tentu telah banyak membahas, mengulas, mengulik, dan mengkaji tentang motivasi kerja. Diperlukan strategi pemberian motivasi, strategi peningkatan produktivitas kerja dan manajemen kepemimpinan handal dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai fakultas dakwah IAIN Ar-Raniry (Nasution, 2014b). Pimpinan (kepala sekolah) memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja dari para bawahannya (Praptiningsih, 2021a). Seorang pimpinan akan banyak memberikan andil dalam memotivasi kinerja para guru di sekolah. Teknik motivasi yang digunakan dalam industri konstruksi sesuai dengan teori Maslow, Herzberg, dan McGregor, terlepas dari kontribusi positif mereka, adopsi besar-besaran dari teori-teori ini tidak dimungkinkan karena kekhasan industri sehingga perlu pengembangan teori agar relevan sesuai perkembangan dan fakta di lapangan (Aina, 2014a). Lingkungan kerja merupakan kondisi instansi yang berpengaruh terhadap pekerjaan karyawan saat menjalankan tugasnya dalam kehidupan

sosial, psikologi, dan fisik (Hermawan & Rahadi, 2021a). Sedangkan faktor yang memengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja adalah proses *recruitment* dan pemberian motivasi kepada karyawan (Akbar, 2018). Proses rekrutmen karyawan membutuhkan perencanaan yang baik terkait kebutuhan organisasi akan tenaga kerja serta perlu analisa yang baik pula dalam menempatkan seorang pekerja pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, pemberian motivasi merupakan faktor penting lainnya dalam meningkatkan hasil kerja karyawan. Pemberian motivasi oleh sebuah organisasi merupakan suatu kewajiban dan tuntutan. Pemberian motivasi yang baik dan berkelanjutan dalam bentuk arahan atau penghargaan kepada karyawan dapat memberikan rangsangan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi terhadap efektivitas kerja karyawan (Desmaria et al., 2018). Ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap efektivitas kerja karyawan. Ada pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi dan motivasi kerja terhadap efektivitas kerja karyawan pada PT Home Credit Indonesia Cabang Lampung.

Tulisan ini tentu ada banyak irisan dengan kajian dan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, tulisan ini lebih berfokus pada reaktualisasi konsep motivasi dan efektivitas kerja di lembaga pendidikan dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan keislaman maupun teori-teori umum. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan tinjauan literatur sistematis. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran internet pada jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan dengan tema. Analisis dilakukan secara mendalam dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Manusia sebagai *khalifah* di bumi tentu memiliki suatu dorongan, kebutuhan, dan keinginan yang cukup variatif, salah satunya adalah kebutuhan untuk menjalani kehidupan. Dibekali *software* oleh Allah *Azza wa Jalla* berupa akal yang paling sempurna jika dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain, manusia melaksanakan misi hidupnya dengan bekerja tidak lain adalah sebagai bekal menuju akhirat. Kerja dimaknai dengan menjalani kegiatan untuk menghasilkan sebuah maha karya yang bernilai guna sehingga bermanfaat bagi manusia. Orang bekerja tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi. Setidaknya terdapat tiga faktor mengapa orang 'dewasa' itu bekerja.

Pertama, faktor individual seseorang. Sejak Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia fana, maka mulailah mereka menunaikan ibadah 'kerja' keras demi memeroleh hidup dan kehidupan sebagai wujud upaya pelestarian dan keberlanjutan hidupnya atau *sustainable living*. Mulai detik itulah, mereka wajib berfikir dan mengeksplorasi potensi serta tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti layaknya manusia biasa, mereka beserta anggota keluarganya ketika mengarungi bahtera rumah tangga, sudah barang tentu mengalami pelbagai tantangan serta rintangan lahiriah maupun batiniah. Fenomena demikian dialami juga oleh generasi penerus yaitu anak cucu Adam hingga detik ini.

Kembali pada konteks kerja di era modern ini, bahwa seseorang bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Davis berpendapat bahwa bekerja merupakan aktivitas pemenuhan *'a desirable and fullfilling activity'*, bekerja itu sebagai sentral perhatian hidup manusia (Newstrom, 2014, p. 27). Hidup adalah keinginan secara

alamiah yang didambakan setiap orang, bekerja adalah poin pendukung utama agar bisa makan dan minum demi keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya. Peterson dan Plowman dalam Hermawan (2021b, pp. 120–121) menyebutkan setidaknya ada beberapa alasan mengapa orang mau bekerja: (1) adanya keinginan untuk hidup (*the desire to live*), (2) keinginan memiliki sesuatu (*the desire for possession*), (3) keinginan akan kekuasaan (*the desire for power*), dan (4) keinginan akan pengakuan (*the desire for recognition*).

Kedua, faktor sosial seseorang. Apabila dikaji dari aspek sosial, Davis dalam buku *Organizational Behavior: Human Behavior at Work,* mempertegas makna bekerja. Bekerja merupakan sesuatu yang diagungkan sebagai ikhtiar memperbaiki taraf kehidupan. Orang bisa bertahan hidup apabila bekerja dan sekaligus sebagai wahana aktualisasi diri lainnya seperti merasa berguna, merasa dibutuhkan, dan demi terwujudnya status sosial yang dicita-citakan (Sulistyorini, 2009, p. 264). Senada dengan kalam ilahi bahwa manusia diperingatkan oleh Allah Swt. agar senantiasa berusaha demi mengubah nasibnya sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Ar Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ

> *"BSesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.".* (*Https://Tafsirq.Com/13-Ar-Rad/Ayat-11* , 2022)

Ketiga, latar belakang agama seseorang. Dalam syariat agama Islam, telah dijelaskan secara tegas yaitu tidak mengenal adanya perbedaan kelas sosial pada masyarakat yang membagi manusia berdasarkan tingkat kebangsawanan atau strata yang ditentukan atau dibentuk

oleh manusia. Islam juga tidak mengenal kelas bangsawan di satu sisi dan kelas kawula di sisi yang lain seperti pada masyarakat feodalistis. Islam hanya mengenal pembagian pekerjaan menurut kemampuan fisik, kemampuan ilmu, dan teknologi yang dimiliki setiap individu. Prinsip ini disebut persamaan diantara manusia, demikian menurut hasil riset Roger Garudy tentang hak bekerja dalam Islam (Sulistyorini, 2009, p. 265).

Setiap individu berhak untuk mendapatkan pekerjaan, memimpin atau menduduki jabatan apapun sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semua ini sesuai dengan prinsip persamaan (*musawah*) seperti yang diajarkan Allah Swt. dan Rasulullah. "Jika kamu diperintahkan oleh seorang yang berhidung pesek dan berkulit hitam tetapi dia memimpin kamu berdasarkan kitabullah yang maha tinggi, maka hendaklah kamu dengar dan taat". Rasulullah juga bersabda, "Aku pesankan (wasiatkan) kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah mendengarkan dan taat kepada yang memerintah kamu, sekalipun dia hamba shaya Habsyi" (Hr. Tirmidzi)

Melalui sabda Rasulullah tersebut, jelas kiranya bahwa hak dalam bekerja dan menduduki jabatan pemimpin sebagai pengurus umat, jabatan dalam pemerintahan, atau jabatan dalam badan usaha (manajer) adalah sama bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, bangsa, status sosial, asalkan mereka orang yang beriman, berilmu, mempunyai kemampuan, dan kecakapan memegang jabatan tersebut.

Agama Islam memandang bekerja merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan merupakan pernyataan rasa syukurnya kepada Allah *Azza wa Jalla* seperti tertera pada Surat Saba' ayat 13 yang berbunyi:

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًاۗ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

"Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang banyak bersyukur". (*Https://Tafsirq.Com/34-Saba/Ayat-17* , 2022)

Surat Al Jumu'ah ayat 10 berbunyi: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". *Sunnatullah* menentukan bahwa manusia wajib bekerja menurut kemampuan dan kecakapan masing-masing demi mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya, seperti yang difirmankan Allah Swt. dalam Surat At Taubah ayat 105: "Katakanlah (ya Muhammad), "bekerjalah kamu, kelak Allah serta orang-orang mukmin akan memerlihatkan hasil pekerjaanmu" (*Https://Tafsirq.Com/9-at-Taubah/Ayat-105* , 2022).

Ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Allah Swt. tersebut menunjukkan perintah Allah Swt. agar setiap orang bekerja untuk kepentingan kelanjutan hidupnya di dunia. Manusia dijadikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya serta dilengkapi pula dengan akal dan ilmu sebagai bekal alat dalam bekerja.

1. Definisi Motivasi

Motif adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggeraak kemauan bekerja seseorang; setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai (Hasibuan, 1989, p. 93). Berelson dan Steiner dalam Aina menjelaskan bahwa motif adalah "*A motive is an inner state that energizes, activates or moves (hence motivation) and that directs or channels behaviour towards goals*". Motif merupakan suatu pendorong dari dalam untuk

kreativitas atau bergerak secara langsung atau mengarah kepada sasaran akhir (Aina, 2014b).

Dalam kehidupan sehari-hari, dengan mudah kita temui orang-orang yang berhasil dalam usahanya selain juga orang-orang lain yang mengalami kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan itu tidak selamanya disebabkan oleh perbedaan kemampuan yang mereka miliki tetapi justru lebih sering disebabkan oleh perbedaan motivasi. Pekerjaan sejenis yang dikerjakan oleh dua orang yang memiliki kemampuan sama akan memberikan hsil yang berbeda jika masing-masing memiliki motivasi yang berbeda.

Motivasi berasal dari kata-kata '*movere*' yang berarti dorongan dalam istilah inggris disebut '*motivation*'. Motivasi bisa didefinisikan sebagai suatu usaha menimbulkan dorongan (motif) pada individu (kelompok) agar bertindak (Muhyadi, 1989, p. 157). Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Pendapat lain mengatakan bahwa motivasi adalah "kehendak atau dorongan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dirasakan". Dennis D. Umstot menyebut motivasi juga bisa diartikan sebagai proses yang menyebabkan tingkah laku seseorang menjadi bergairah, terarah, dan tidak mudah putus asa (Muhyadi, 1989, p. 248).

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan lembaga. Pada dasarnya lembaga pendidikan formal tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap, dan terampil. Namun lebih dari itu, yang terpenting

adalah mereka mau bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan karyawan atau pegawai tidak ada artinya bagi lembaga apabila mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan potensinya. Motivasi menjadi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.

2. Proses Dasar Motivasi

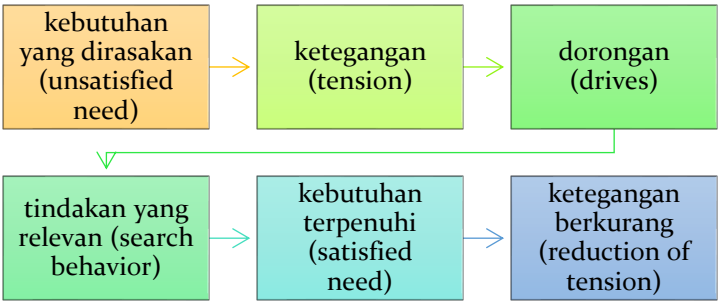

Gambar 1. Proses Motivasi
Sumber: Robbin dalam Marwansyah dan Mukaram (2000, p. 152).

Beberapa temuan menunjukkan bahwa motivasi kerja sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi atau manajemen. Bahwa kepuasan kerja yang menjadi sumber motivasi kerja merupakan salah satu indikator dimensi keefektifan organisasi. Motivasi kerja adalah dorongan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan bersemangat. Dengan cepat di sini berarti cepat yang penuh ketelitian dan kehati-hatian. Pentingnya

motivasi kerja ini bagi para karyawaan berimplikasi pada proses kinerja yang dilakukan dengan gairah, semangat juang yang tinggi hingga akan dicapai suatu hasil yang optimal (berprestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Untuk memotivasi bawahannya, seseorang manajer harus mengetahui lebih dahulu motif apa yang menyebabkan bawahannya berperilaku tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hackman & Ol-dham's menemukan bahwa isi suatu pekerjaan (*one's job*) merupakan salah satu hal penting dalam menentukan motivasi kerja internal (Sergiovanni & Carver, 1973). Motivasi kerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan keefektifan performa. Hasil penelitian di atas sejalan dengan temuan penelitian *The Effect of realistic preview* oleh Reily, Brown, Blod, dan Molatesta menyimpulkan bahwa pekerjaan yang diberi petunjuk pekerjaan yang realistis *(Realistic Job Previews)* dan memiliki informasi yang akurat tentang pekerjaan, maka angka *turnover intention* (niat keluar karyawan dari pekerjaannya secara sukarela untuk memeroleh pekerjaan di tempat lain) cenderung rendah dibandingkan dengan organisasi yang menggunakan petunjuk pekerjaan yang tidak realistis atau hanya menyajikan informasi pekerjaan secara terbatas (Robbins, 1990). Di sisi lain, pimpinan yang bertanggung jawab memiliki indikasi mampu memberikan dorongan serta mencurahkan perhatiannya terhadap bawahannya (Sulistyorini, 2009, p. 270).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan, kemauan, keadaan internal, *a force* pada diri seseorang

sehingga melahirkan kekuatan dan tindakan untuk meraih target yang telah ditetapkan. Sedangkan semangat kerja adalah sifat atau karakteristik tindakan yang dikendalikan oleh motivasi.

3. Semangat Kerja dengan Motivasi Kerja: Apa bedanya?

Orang yang bersemangat maka dia dianggap mempunyai tingkat motivasi yang tinggi. Sedangkan orang yang termotivasi dalam 'bekerja' dapat terlihat dari ekspresi semangat yang ditampilkan oleh individu tersebut. Dari kedua istilah itu ternyata memiliki arah dan makna yang cukup berbeda. Mc Farland menjelaskan bahwa semangat kerja (*morale*) dengan motivasi (*motivation*) seringkali dikaburkan dan dianggap sama, padahal sejatinya memiliki perbedaan. Semangat kerja itu mendeskripsikan masalah sikap, penilaian individu atau kelompok, dan perasaan merka tentang pekerjaan, tugas, organisasi, supervisi, dan sebagainya. Sedangkan motivasi mendeskripsikan kecenderungan bagi pola perilaku tertentu untuk mengurangi atau memuaskan tensi penyebab kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Motivasi merupakan fungsi yang mengarahkan dan mengestimasi konfirmasi terhadap berbagai pilihan kepuasan yang diharapkan. Semangat kerja adalah kebebasan yang dikendalikan dalam aksi pencapaian tujuan. Analoginya seperti halnya ada seseorang yang secara individu atau kelompok telah diberi motivasi secara masif, namun tidak mampu berbuat. Semangat kerja bisa mengambil peran sebagai wujud demonstrasi motivasi dalam tindakan nyata dalam pencapaian suatu tujuan. Motivasi memberi peluang potensi munculnya semangat kerja. Dengan

demikian, semangat kerja adalah kondisi yang merefleksikan sikap individu atau kelompok dan mengekspresikan level integrasi yang ada diantara konflik kepentingan. Sedangkan motivasi merupakan kekuatan aktif, karakter yang terarah hingga menimbulkan dampak pada individu tersebut mencari satu atau beberapa tujuan yang ada, selain juga mencari tujuan/motif tertentu yang tidak ada pada waktu itu.

Hubungan antara semangat kerja dan motivasi tentu sangat erat sekali. Lazarut menyatakan faktor utama yang memberikan pengaruh tinggi atau rendahnya semangat kerja pada setiap individu dalam organisasi adalah masalah kepuasan dan kesejahteraan baik yang bersifat material maupun spiritual terpenuhi. Ketika kepuasan diperoleh demi memenuhi ekspektasi serta cita-cita hidupnya, para pendidik akan bekerja secara efektif dengan penuh semangat. Para pemangku kebijakan, para pemegang otoritas, dan para pimpinan serta pejabat struktural seyogyanya harus berusaha memahami apa saja yang menjadi keinginan-keinginan dan cita-cita logis para pendidik atau bawahan dengan berusaha memenuhi ekspektasi itu (Praptiningsih, 2021b).

Setiap perilaku sadar tentu memiliki motif. Demi memenuhi tujuan dari suatu organisasi, maka prestasi dan semangat kerja jelas memerlukan motivasi. Tugas besar para manajer tentu mengidetifikasi serta menggerakkan motivasi pegawai sehingga bersemangat dan berprestasi baik saat mengemban amanah. Perlu dimengerti, dasar pembangunan semangat kerja merupakan proses pengakomodasian kepentingan-kepentingan sehingga berpengaruh pada tingkat keberhasilan seorang

pemimpin. Pemimpin yang baik tentu mampu menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan umat atau kelompok sebagai upaya pengembangan nilai-nilai dan sesuatu yang menarik bagi organisasi. Pimpinan yang baik harus bisa memotivasi bawahan demi mencapai '*goal*' yang telah ditargetkan. Oleh sebab itu, korelasi antara semangat kerja yang baik dan tinggi dengan motivasi sangatlah dekat dan erat. Daya motivasi yang besar yang diberikan oleh pimpinan sebagai faktor motivasi eksternal berbanding lurus dengan semangat kerja para pegawai yang tinggi, sekaligus juga sebagai parameter keberhasilan bagi seorang pemimpin.

4. Fungsi Motivasi dalam Kerja di Lembaga Pendidikan Islam

Pekerjaan merupakan suatu sumber penting bagi motivasi yang tinggi ataupun yang rendah. Untuk terus hidup dan berhasil baik, suatu organisasi memerlukan karyawan yang cakap dan termotivasi pada waktu yang tepat. Dalam kenyataan kerja sehari-hari, baik di sekolah maupun di kantor-kantor, dapat disaksikan hanya sebagian karyawan atau pegawai yang bekerja lebih bersemangat atau bergairah dari pada yang lain. Bergairah atau tidaknya seseorang dalam bekerja ditentukan oleh adanya dorongan atau motivasi pada orang tersebut. Seseorang yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan bekerja lebih semangat dari pada orang lain yang mempunyai motivasi kerja lebih rendah. Oleh karena itu, motivasi merupakan suatu masalah yang penting dalam menentukan bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Lebih lanjut, motivasi sangat penting dalam menentukan hasil atau keberhasilan kerja.

Seseorang bersedia melakukan suatu pekerjaan bila ia terdorong untuk melakukan fajktor yang menjadi pendorong pada dasarnya cukup kuat serta mungkin juga tidak mendapat saingan dari sebab lain berlawanan. Demikian sebaliknya, orang yang tidak memiliki faktor yang kuat, maka ia akan meninggalkan atau sekurang-kurangnya tidak bergairah dalam mengerjakan pekerjaannya. Faktor yang menjadi pendorong umum dinamakan faktor motivasi. Secara etimologi kata motivasi berasal dari "*motivation*" berarti dorongan yang baik dari dalam maupun luar, sehingga membuat seseorang melakukan suatu kegiatan (Echols, Hassan Shadily, 1995: 586).

Motivasi atau dorongan dalam melakukan suatu pekerjaan itu sangat besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja. Seseorang bersedia melakukan sesuatu pekerjaan bilamana motivasi yang mendorongnya cukup kuat dan tidak mendapat saingan atau tantangan dari motif lain yang berlawanan. Demikian pula sebaliknya orang lain yang tidak didorong oleh motif yang kuat akan meninggalkan atau sekurang-kurangnya tidak akan bergairah dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Semua faktor yang telah disebutkan di atas pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk motif yang mendorong seseorang melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh. Dalam hubungan itu Hadari Nawawi membedakan dua jenis motif, yakni motif intrinsik dan motif ekstronsik. Motif intrinsik adalah dorongan yang terdapat dalam pekerjaan yang dilakukan. Misalnya bekerja karena pekerjaan itu sesuai dengan bakat dan minat, dapat diselesaikan dengan baik, karena memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikannya, dan lain-lain.

Sedangkan motif ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya bekerja karena upah atau gaji yang tinggi, mempertahankan kedudukan yang baik, merasa mulia karena pengabdian, dan sebagainya (Sulistyorini, 2009, p. 274).

Motivasi terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu mengarahkan tingkah laku dan mempertahankan tingkah laku (Hoy, Wayne & Miskel, 1987a). Dengan demikian motivasi memegang peranan penting dalam efektifitas kerja. Sering dijumpai orang yang mempunyai motivasi tinggi akan berusaha semaksimal mungkin sehingga pekerjaan yang dikerjaan dapat berhasil dengan baik. Selanjutnya model motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku, oleh Hoy dan Miskel diilustrasikan seperti tertera dibawah ini:

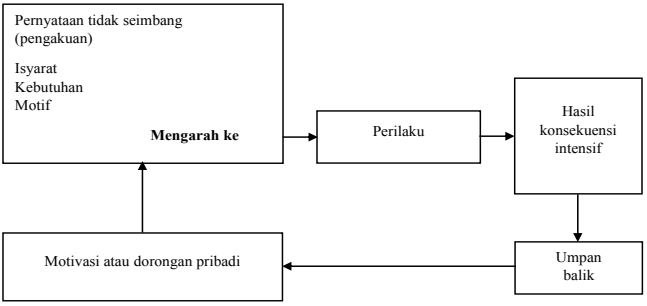

Gambar: Hubungan motivasi dengan tingkah laku (Hoy, Wayne & Miskel, 1987b)

Dalam skema tersebut dijelaskan bahwa isyarat, kebutuhan, keinginan, motif, dan harapan sebagai pengaruh tingkah laku. Jika hal ini tidak dipenuhi akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam diri seseorang, sehingga yang bersangkutan akan mencari

jalan untuk mereduksi ketidakseimbangan melalui tingkah laku atau tindakan tertentu. Sebaliknya jika kebutuhan, keinginan, motif, dan harapan itu terpenuhi maka akan menyempurnakan keseimbangan kembali. Dengan demikian dapat disimpulkam bahwa kebutuhan, keinginan, motif, dan harapan merupakan variabel yang mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku atau meningkatkan motivasi kerja.

Motivasi kerja dianggap sebagi sarana demonstrasi dalam tindakan nyata pencapaian tujuan. Motivasi selanjutnya dapat memberikan potensi bagi semangat kerja. Dalam hal ini Lazaruth mengatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya semangat kerja seseorang dalam organisasi adalah perasaan puas, karena merasa kesejahteraan material dan spiritualnya terpenuhi. Dengan diperolehnya kepuasan dalam memenuhi keinginan dan cita-cita hidupnya, maka seseorang akan bekerja dengan efektif dan penuh semangat. Hal inilah yang perlu diperhatikan seseorang manager sehingga harus memahami keinginan dan cita-cita bawahan, kemudian berusaha memenuhinya.

Semangat kerja sangat diperlukan dalam tujuan organisasi. Sebagai upaya membangun semangat kerja, perlu dilakukan proses pengakomodasian kepentingan-kepentingan karena hal ini mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin. Pemimpin yang baik harus dapat menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan kelompok tertentu guna mengembangkan nilai-nilai dan sesuatu yang menarik dalam organisasi. Dia juga harus dapat memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian, semangat kerja yang baik dan tinggi disebabkan oleh adanya motivasi yang diberikan pimpinan serta merupakan keberhasilan seorang pemimpin.

Adanya keanekaragaman keinginan dan kebutuhan dari setiap individu dalam suatu organisasi, maka motivator harus menselaraskan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi (Siagan, 1980, p. 92). Pemberian motivasi harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan individu tersebut, atau dengan kata lain setiap anggota staf sangat perlu diperhatikan motif-motifnya, harapan-harapannya, dan insentif yang dibutuhkan sehingga akan dilihat peningkatan semangat kerja para pekerja atau para anggota staf, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap efektifitas kerja.

5. Motivasi dan Efektivitas Kerja

Pada dasarnya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dinyatakan dengan seberapa jauh target (kualitas dan kuantitas) tercapai. Efektivitas senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduannya. Efektivitas menekankan pada hasil yang akan dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil itu dengan membandingkan antara input dan output (Valianti, 2012, p. 18).

1. Motivasi dan Performansi

Dalam teori Harapannya, Vroom menegaskan bahwa tingkat performansi sangat bergantung pada peningkatan motivasinya. Hal ini dilukiskan dengan rumus:

Performansi = f (kemampuan x motivasi) (Hoy, Wayne & Miskel, 1987b, p. 116)

Sterling menyatakan, "jika motivasi rendah maka performansi seseorang akan menurun" (Sahertian, 1984). Suster-meister menyatakan bahwa "prestasi kerja untuk 80-90% bergantung pada motivasinya untuk bekerja, dan 10-20% bergantung pada kemampuannya" (Aroef, n.d.). Ravianto dalam makalahnya menyebutkan, bahwa di samping motivasi masih ada dua faktor lagi yang mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya. Dua faktor itu ialah kemampuan dan persepsinya mengenai peranan yang ia lakukan.

Dengan demikian ada tiga faktor yang menentukan bagaimana performansi seseorang dalam melakukan kerja, yaitu motivasi, kemampuan, dan persepsi peranan. Hal ini dirumuskan oleh Stoner sebagai berikut:

Performansi = F (motivasi, kemampuan, persepsi peranan).

Rumus di atas bisa juga dilukiskan sebagai berikut:

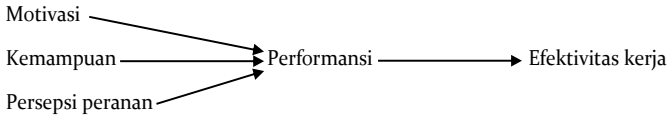

Performansi lebih lanjut akan menentukan efektivitas kerja. Dengan demikian, maka efektivitas kerja sangat

bergantung atau ditentukan oleh motivasi, kemampuan, dan persepsi peranan.

2. Motivasi dan disiplin kerja

Hal lain yang ikut menentukan apakah suatu kerja akan efektif atau tidak ialah faktor kedisiplinan. Yang dimaksud kedisiplinan disini adalah kedisiplinan yang berhubungan dengan ditaatinya dan dilaksanakannya peraturan-peraturan dengan baik, khususnya kedisiplinan yang berhubungan dengan penggunaan waktu. Misalnya apakah waktu atau jam kerja telah dimanfaatkan secara semestinya.

Sehubungan dengan masalah kedisiplinan ini Soeharsono Sagir menyatakan sebagai berikut: bahwa motivasi tergantung pada motifatornya, sedangkan disiplin akan ditentukan oleh ada tidaknya motivasi, dan ada tidaknya motivasi dan disiplin akan menentukan tingkat produktivitas karyawan (Sagir, n.d.) .

Dengan demikian maka disiplin kerja dapat menentukan produktivitas karyawan atau dapat pula dikatakan menentukan keefektifan kerja. Kedisiplinan sendiri ditentukan oleh motivasi. Sehingga kesimpulannya ada korelasi antara motivasi yang tinggi dan adanya disiplin kerja yang tinggi.

3. Hasil kerja

Suatu usaha kerja meskipun telah dilaksanakan dengan baik (performansi) dan disiplin yang tinggi, belum bisa dikatakan efektif apabila tidak dilengkapi dengan hasil kerja yang

memadai. Dengan demikian faktor hasil kerja juga merupakan salah satu faktor yang harus ikut diperhitungkan dalam penentuan efektif tidaknya suatu kerja. Hingga kini, keberhasilan perguruan tinggi selalu diukur berdasarkan jumlah lulusannya dan IPK lulusan itu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut:

a) Motivasi menentukan tingkat performansi (Sterling). Motivasi menentukan tingkat disiplin kerja (Sagir). Motivasi menentukan tingkat prestasi (Sutermeister).

b) Tingkat performansi, tingkat kedisiplinan, dan tingkat prestasi menentukan efektif tidaknya suatu pekerjaan dilaksanakan (efektifitas kerja).

Dua hal diatas dapat dilukiskan seperti di bawah ini

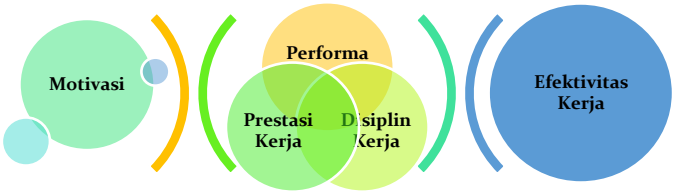

Dari bagan tersebut dapat digambarkan besarnya peran motivasi dalam menentukan efektivitas kerja.

Sebagai gambaran, pada jenjang perguruan tinggi khususnya pada institusi berciri khas keislaman, masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pekerjaan

rumah bagi para pemangku kebijakan. Hal ini berkaitan dengan motivasi dan efektivitas kerja khususnya bagi para dosen. Secara umum, terdapat tiga macam dosen ketika melakukan aktivitas akademik, terutama penelitian. Kelompok pertama adalah mereka melakukan penelitian dan publikasi atau sejenisnya karena iming-iming hadiah finansial. Mereka adalah dosen pemburu uang perangsang, *incentive-minded*. Kelompok kedua adalah para pengejar karier, baik dalam bentuk akademik maupun struktural. Kegiatan meneliti dan melakukan publikasi semata sebagai pelengkap syarat mendaki karier yang lebih tinggi. Mereka masuk kelompok *career-minded* atau para pengejar karier. Tidak ada yang haram dari kedua kelompok ini, namun apabila berharap adanya pergerakan peradaban, hal ini ibarat menggantang asap. Lalu, kepada siapa harapan perubahan peradaban digantungkan? Kelompok ketiga yang menjadi kunci dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Mereka adalah para pengembang ilmu, peran tulen dari dosen, dan utamanya para penggenggam gelar doktor.

Kisah Nabi Sulaiman dapat menjadi cermin atas pilihan ini. Nabi Sulaiman adalah pembangun peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada masa pemerintahannya. Anak termuda dari Nabi Dawud ini jatuh hati kepada ilmu ketika diminta oleh Allah Swt. memilih antara ilmu, harta, dan karier. Tetapi karena pilihannya tersebut, Nabi Sulaiman mendapat kedua yang lain: menjadi kaya raya dan raja. Rasulullah saw. pernah bersabda, "Nabi

> Sulaiman disuruh memilih antara harta benda, kerajaan, dan ilmu; maka beliau memilih ilmu. Maka diberikanlah kepada beliau kerajaan dan harta benda karena beliau memilih ilmu". Kerajaan adalah metafora karier dan harta adalah insentif finansial.

KESIMPULAN

Meluruskan niat dengan terus belajar, berkembang dengan meningkatkan kompetensi diri serta melayani dengan setulus hati '*rilo*, *ridlo*, dan *legowo*' menjadi kunci dalam membangkitkan motivasi internal diri. Berusaha agar selalu adaptif, responsif dan solutif baik sebagai pegawai ataupun pimpinan organisasi akan berdampak positif pada arah dan masa depan sebuah intitusi. Pimpinan yang tanggap, transparan, dan mau mendengarkan suara dari akar rumput akan mengahasilkan kebijakan yang tepat dan adil demi kemaslahatan umat. Terlebih pada lembaga pendidikan tinggi bernafas nilai-nilai keislaman, maka *civitas academica*-nya harus satu frekuensi, satu frame, dan satu perspektif dalam memaknai Islam *rahmatan lil'alamin* serta implikasinya dalam meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Aina, O. O. (2014a). Application of Motivation Theories in the Construction Industry. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, *16*(7), 1–6.

Aina, O. O. (2014b). Application of Motivation Theories in the Construction Industry. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, *16*(7), 1–6.

Akbar, S. (2018). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja. *JIAGANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Bisnis*, *3*(2), 1–17.

Aroef, M. (n.d.). *Motivasi dan Produktivitas: suatu Pembahasan*. Naskah tidak diterbitkan, Dewan Produktivitas Nasional Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Desmaria, A., Alam, I. A., & Oktaviannur, M. (2018). Visionist. *Manajemen Visionist*, *7*(1).

Hasibuan, M. A. P. (1989). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Haji Masagung.

Hermawan, R., & Rahadi, D. R. (2021a). Analisa Lingkungan Kerja dan Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Motivasi : Studi Literatur. *Tirtayasa Ekonomika*, *16*(1), 118–124. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v16i1.10090

Hermawan, R., & Rahadi, D. R. (2021b). Analisa Lingkungan Kerja dan Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Motivasi : Studi Literatur. *Tirtayasa Ekonomika*, *16*(1), 118–124. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v16i1.10090

Hoy, Wayne, K., & Miskel, C. G. (1987a). *Educational Administration: theory research and Practice, Third edition, (New York:* Random House.

Hoy, Wayne, K., & Miskel, C. G. (1987b). *Educational Administration: theory research and Practice, Third edition, (New York:* Random House.

https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105 . (2022).

https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-11 . (2022).

https://tafsirq.com/34-saba/ayat-17 . (2022).

Kurniasari, R. (2018). Pemberian Motivasi serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Telekomunikasi Jakarta. *Widya Cipta*, *2*(1), 32–39.

Marwansyah, & Mukaram. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Politeknik Bandung Press.

Muhyadi. (1989). *Organisasi, Teori, Struktur dan Proses*. Depdikbud PPLPTK.

Nasution, E. (2014a). Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry. *All-Bayan*, *20*(29), 1–14.

Nasution, E. (2014b). Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry. *All-Bayan*, *20*(29), 1–14.

Newstrom, J. (2014). *Human Behavior at Work: Organizational Behavior, 14th edition* (14th ed.). McGraw-Hill.

Praptiningsih. (2021a). Sikap Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kedisiplinan Guru SMK PGRI III Salatiga. *JURNALWAWASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN* , *7*(1).

Praptiningsih. (2021b). Sikap Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kedisiplinan Guru SMK PGRI III Salatiga. *JURNALWAWASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN* , *7*(1).

Robbins, S. P. (1990). *Organization Theory Structure, Designs and Applications. 3rd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River. - References - Scientific Research Publishing* (3rd ed.). Prentice Hall. https://www.scirp.org/%28S%28vtj3fa45qm1ean45vvffcz55%29%29/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2537055

Sagir, S. (n.d.). Motivasi dan Disiplin Kerja Karyawan. *Jurnal Sumber Daya Manusia*, *7*.

Sahertian, P. A. (1984). *Model tingkah laku kepemimpinan dalam proses administrasi / Piet A. Sahertian*. IKIP Malang.

Sergiovanni, T. J., & Carver, F. D. (1973). *The new school executive: a theory of administration* . DODD, MEAD & COMPANY. http://uilis.unsyiah.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=63421&keywords=sergiovanni

Siagan. (1980). *Filsafat Administrasi,*. Gunung Agung.

Sulistyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Teras.

Valianti, R. M. (2012). Motivasi dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Kerja Karyawan pada PT. Sigma Utama Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *9*(3), 17–24. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31851/jmwe.v9i3.4194

LEARNING EXPERIENCE DESIGN DALAM PEMBELAJARAN PAI

Mir'atun Nur Arifah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk dapat beradaptasi dalam perkembangan tersebut. Terkait hal tersebut, kondisi yang terjadi saat ini, mulai banyak generasi Y dan Z yang telah memiliki peran sebagai orang tua. Di sisi lain, para generasi sebelumnya, yaitu generasi X maupun *baby boomers* juga masih berperan aktif dalam keluarga. Kolaborasi antar generasi tersebut sebenarnya dapat menjadi modal utama dalam mendidik para generasi *alpha*. Para generasi Y dan Z dapat berperan sebagai pengambil keputusan, sedangkan generasi-generasi sebelumnya dapat berperan sebagai konselor dan pendamping sehingga menghasilkan *new brainstorming* terhadap generasi *alpha* (Fadlurrohim et al., 2019). Hal ini tidak hanya terjadi dalam keluarga saja, tetapi juga di lembaga pendidikan formal. Di sekolah-sekolah banyak ditemui orang-orang dari lintas generasi, misalnya guru-guru yang berasal dari generasi *baby boomers* dan generasi X berinteraksi dengan peserta didik yang berasal dari generasi Y dan generasi Z. Sehingga yang terjadi adalah para guru dengan karakteristik *digital immigrat* berbaur dengan peserta didik dengan karakteristik *digital native* (Sumardinata & Kris, 2018). Terkait dengan hal tersebut, guru sudah seharusnya mampu memahami dan mengenali karakteristik peserta didiknya agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang dikembangkan dalam pembelajaran adalah pembelajaran berbasis

pengalaman atau yang dikenal dengan desain pengalaman belajar.

Desain pengalaman belajar atau yang dikenal dengan *learning experience design* adalah proses menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil belajar yang diharapkan dengan cara yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada tujuan (*What Is Learning Experience Design? - Learning Experience Design*, n.d.-a). Pengalaman belajar tersebut dirancang dengan menganalisis kebutuhan dari peserta didik dan kendala-kendala mereka dalam proses pembelajaran, misalnya kurangnya keterampilan atau penguasaan aspek psikomotorik, permasalahan komunikasi, kesulitan belajar, permasalahan dalam interaksi dalam proses pembelajaran, dan berbagai permasalahan lainnya. Melalui analisis tersebut kemudian dirancanglah pembelajaran yang fokusnya memberikan pengalaman pembelajaran pada peserta didik dengan mengembangkan berbagai metode dan strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun sumber dan media pembelajaran. Tujuannya adalah terlaksananya proses pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, sehingga apa yang dipelajari menjadi berkesan dan mampu mengembangkan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor.

PEMBAHASAN

Pada prosesnya, pengembangan desain pengalaman belajar melibatkan berbagai bidang keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu desain dan bidang ilmu pendidikan. Prinsip-prinsip desain dikombinasikan dengan unsur-unsur pendidikan, pelatihan dan pengembangan, psikologi kognitif, pembelajaran pengalaman, ilmu pendidikan dan ilmu saraf (*What Is Learning Experience Design? - Learning*

Experience Design, n.d.-b). Tahapan-tahapan dalam perancangan desain pengalaman belajar, serupa dengan komponen yang ada dalam perancangan proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan merancang desain pengalaman belajar sejatinya adalah merancang proses pembelajaran itu sendiri. Pada pelaksanaannya hal pertama yang perlu dilakukan adalah mempelajari kondisi di lapangan, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, membuat garis besar pembelajaran, mengembangkan skrip, memilih antarmuka pengguna dan lingkungan, memetakan kerangka waktu, mengembangkan kemajuan kursus, dan merancang metode penilaian (*Learning Experience Design: Guide and Examples | ELM Learning*, n.d.). Tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam mewujudkan proses belajar yang berkesan bagi peserta didik. Kelima komponen tersebut meliputi:

1. Observasi

Proses pembelajaran sejatinya adalah bagaimana mengembangkan seluruh aspek peserta didik, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sehingga pada proses pembelajaran, peserta didik merupakan aktor utama yang hendak dikembangkan kemampuannya, bukan pada menilai kemampuan guru atau kompetisi antar guru. Sehingga fokus inilah yang digunakan dalam merancang proses pembelajaran, termasuk dalam merancang pengalaman pembelajaran. Fokus dalam perancangan desain pengalaman belajar adalah bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pendekatan holistik yang mengkom-binasikan berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu kognitif, desain pengalaman pengguna (UX), lingkungan belajar, dan desain instruksional. (*Learning Experience Design: Guide*

and Examples | ELM Learning, n.d.). Melalui pendekatan berbagai bidang keilmuan ini, memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar berpusat pada peserta didik sebagai pembelajar dan seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan bersama antara guru dan peserta didik, fungsinya adalah untuk memberikan pengalaman belajar pada peserta didik.

Terkait dengan hal tersebut, guru sebagai desainer pembelajaran perlu mengenal dan memahami peserta didiknya dengan baik. Masing-masing peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, meskipun memiliki kecenderungan yang sama apabila dikelompokkan dalam kriteria tertentu, misalnya usia, latar belakang pendidikan, dan keluarga. Adanya karakteristik peserta didik yang beragam ini juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan arahan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (pasal 36 ayat 2 UU sisdiknas) (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*, 2003). Contoh dari penerapan hal ini adalah peserta didik pada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi rata-rata merupakan bagian dari generasi Z. Karakteristik generasi tersebut adalah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dengan baik atau dengan kata lain "melek teknologi". Kemampuan ini kemudian menjadikan mereka juga aktif dalam menggunakan media sosial. Hal ini dapat menjadi

acuan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terbukti relevan untuk mendidik generasi Z (Zazin & Zaim, 2019).

Melalui pemahaman akan hal ini, guru dapat mengetahui apa saja yang memotivasi peserta didik dalam belajar dan bagaimana memunculkan motivasi tersebut. Proses ini serupa dengan proses riset, yaitu membangun pemahaman yang komprehensif pada peserta didik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada peserta didik. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru misalnya motivasi peserta didik akan muncul apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif (Maryana, 2021). Pada pembelajaran PAI, telah dibuktikan bahwa minimnya variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru cenderung hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, sehingga peserta didik hanya paham tentang agama tapi belum mampu mengimplemtasikannya secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari (Mulasi & Saputra, 2019). Melalui pengamatan dan pemahaman yang mendalam pada peserta didik, guru juga mampu mengidentifikasi kendala-kendala peserta didik dalam belajar. Misalnya kurangnya kepercayaan diri dapat menjadi motivasi peserta didik untuk mencontek (Kushartanti, 2009). Contoh lainnya adalah kesulitan peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab, disebabkan oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari sikap terhadap belajar, minat dan motivasi (Batubara, 2021). Selain itu juga adanya kesulitan peserta didik pada kemampuan baca tulis

dan menghafalkan Al-Qur'an sehingga berdampak pada sulitnya menerapkan perilaku *akhlakul karimah* dalam kehidupan sehari-hari (Ernawati et al., 2023).

Selain itu, hubungan yang terjalin dengan baik antara guru dan peserta didik, secara langsung juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Semakin tinggi perilaku interpersonal guru, misalnya pada sikap yang bersahabat dan membantu peserta didik dapat berpengaruh pada tingginya minat belajar peserta didik (Suryaratri, 2018). Motivasi belajar peserta didik yang berupa motivasi ekstrinsik juga muncul melalui peran guru (Emda, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran penting sebagai desainer pembelajaran yang diharapkan mampu merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan disisi lain juga menjadi eksekutor yang menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembelajaran melalui interaksi yang dibangun dengan peserta didik.

2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran

Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. yaitu permasalahan yang bersifat mikro dan permasalahan yang bersifat makro. Permasalahan mikro merupakan masalah yang timbul dalam komponen-komponen pendidikan sebagai sistem, sedangkan permasalahan makro merupakan permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan yang berkaitan dengan sistem lainnya yang lebih luas (Kurniawan, 2016). Pada proses pembelajaran, permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani adalah masalah pendidikan secara mikro. Meskipun baik dalam masalah mikro maupun makro, guru memiliki peran yang sama besar untuk meminimalisir

munculnya permasalahan tersebut. Salah satu contoh permasalahan mikro yang banyak terjadi di Indonesia adalah terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, secara umum dapat diklasifikasikan dalam 4 bentuk sesuai dengan ranah yang akan dikembangkan, misalnya tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, tujuan pembelajaran dalam ranah afektif yang diklasifikasikan lagi dalam 2 bentuk yaitu sikap sosial dan sikap spiritual, serta tujuan pembelajaran dalam ranah psikomotorik.

Pada realisasinya, keempat ranah tersebut belum sepenuhnya dapat dikembangkan dengan baik dalam proses pembelajaran. Secara umum dalam sistem pendidikan dan pembelajaran di Indonesia masih lebih dominan mengembangkan kognitif dan dalam perkembangannya, porsi aspek afektif mulai banyak ditingkatkan. Namun aspek psikomotor belum banyak dikembangkan pada berbagai mata pelajaran selain pendidikan jasmani dan kesehatan. Padahal, aktivitas fisik memiliki pengaruh baik pada fungsi kognitif karena dapat meningkatkan kadar faktor pertumbuhan syaraf (*nerve growth factor*) yang menyokong daya survival dan pertumbuhan jumlah sel-sel syaraf sehingga pemiliknya semakin cerdas (Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan, 2020). Penelitian lainnya juga menemukan adanya hubungan antara kemampuan kognitif dan psikomotor peserta didik dengan nilai korelasi sebesar 0,58, yang masuk dalam kategori cukup (Arpan et al., n.d.).

Oleh karena itu, implementasi kurikulum yang sesuai standar yang telah ditetapkan harus benar-benar dilakukan. Implementasi ini minimal meliputi proses merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi

proses pembelajaran. Materi pelajaran sebagai salah satu acuan dalam merumuskan rancangan pembelajaran perlu diidentifikasi sehingga relevan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pada pembelajaran PAI, materi PAI di berbagai jenjang dan jenis pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari isi materi, bobot materi dan pendalaman materi, serta aspek psikologis, filosofis, sosiologis, dan teknologis (Zubaidillah & Nuruddaroini, 2019). Karakteristik materi pada masing-masing jenjang inilah yang menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pembelajarannya.

Terkait dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari berbagai pengembangan pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran sejatinya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi keempat aspek. Hal ini pula yang menjadi acuan dalam pengembangan desain pengalaman belajar. Proses perancangannya memiliki tujuan utama, yaitu bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan, mampu membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatannya adalah dengan memberikan pengalaman pembelajaran bagi peserta didik sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Merancang pengalaman belajar memiliki tantangan tersendiri, terlebih apabila dihadapkan pada skala dan kompleksitas pembelajaran. Dengan skala yang lebih luas dan kompleksitas yang lebih tinggi, maka akan lebih banyak pula faktor yang menjadi pertimbangan dalam mewujudkan pengalaman belajar yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang

menyeluruh dan inovatif dapat merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, menentukan tujuan pembelajaran merupakan langkah awal yang akan memandu proses perancangan pengalaman belajar.

3. Mendesain Rancangan Pembelajaran

Pada perancangan desain pengalaman belajar, fokus utamanya adalah peserta didik. Sehingga setiap ide dan gagasan yang dikembangkan adalah yang berhubungan dengan pengalaman belajar peserta didik, hal-hal yang memotivasi mereka dalam belajar, dan mendorong peserta didik untuk berani mengambil resiko, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka temui selama proses pembelajaran. Berbagai upaya dapat dilakukan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalnya pelaksanaan pembelajaran PAI dengan berbagai variasi media dan metode pembelajaran, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan materi yang telah dipahami, serta merancang pembelajaran berbasis pada hasil observasi atau riset yang telah lebih dulu dilakukan guru terkait kendala peserta didiknya dalam belajar (Ibn & Bogor, 2021).

Salah astu aspek penting dalam desain pengalaman belajar adalah menentukan bentuk atau model pembelajaran, media pembelajaran, dan teknologi yang mampu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai model pembelajaran terus dikembangkan untuk merespon kebutuhan dan preferensi peserta didik dalam belajar, serta agar tetap relevan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya dengan mengembangkan pembelajaran berbasis website, LMS atau *learning management system*, *gamification*, dan *mobile learning* atau mLearning. Pengembangan model pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai jenis media pembelajaran, misalnya tidak hanya menggunakan media pembelajaran berbasis visual saja, tetapi juga dengan membuat animasi, audio, grafik, bagan, dan bentuk media pembelajaran lain yang memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. Sehingga ketika proses belajar berlangsung, peserta didik tidak hanya belajar melalui teks-teks atau tulisan penjelasan saja, tapi dengan beragam bentuk penyalur informasi.

Salah satu model pembelajaran yang banyak digemari oleh peserta didik adalah *gamifikasi*, yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis permainan. Elemen-elemen yang dimunculkan dalam model pembelajaran tersebut serupa dengan ketika bermain *game*, misalnya dengan menyediakan lencana, poin, alur cerita, dan level-level yang dapat dicapai oleh peserta didik. *Gamifikasi* juga mendukung terciptanya pengalaman belajar, karena melalui model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik dapat menentukan sendiri bagaimana proses belajar yang akan mereka ikuti dan memilih materi yang akan lebih dulu dipelajari. Selain itu, kata kunci lainnya dalam merancang pembelajaran yang menerapkan desain pengalaman belajar adalah memastikan proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar langsung melalui simulasi dalam kehidupan nyata. Sehingga desain pengalaman belajar dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik dimanapun mereka berada, melibatkan

dan memotivasi berbagai jenis peserta didik melalui pendekatan pembelajaran campuran yang mengakomodasi peserta didik yang lebih menyukai interaksi tatap muka serta peserta didik yang menginginkan kebebasan untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. (*Learning Experience Design: Guide and Examples | ELM Learning*, n.d.)

4. Melaksanakan Proses Pembelajaran

Desain pengalaman belajar berfokus pada proses pembelajaran, bukan tentang pengajaran, instruksi guru, atau pelatihan yang didapatkan oleh peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran berdasarkan pengalaman merupakan dasar dalam pengembangan desain pengalaman belajar, sehingga desain pembelajarannya berpusat pada manusia atau dalam konteks ini adalah pada peserta didik dan pada tujuan pembelajaran. Melalui desain pembelajaran yang demikian, pembelajaran akan dinilai lebih efektif dan memungkinkan peserta didik dalam mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Pengalaman menjadi guru terbaik dalam proses belajar karena dapat mengajarkan sesuatu secara langsung. Pengalaman yang dialami oleh peserta didik, merupakan proses pembelajaran yang tidak singkat dan mampu meninggalkan kesan. Kesan inilah yang merupakan bagian dari "pengetahuan" yang dipelajari oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan kesan, mampu mendorong peserta didik untuk mengembangkan dirinya baik secara sosial, emosi, intelektual, bahasa, moral, dan kepribadian kearah positif yang diinginkan semua orang (Tanjung & Amelia, 2017).

Belajar dari pengalaman sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan di kelas saja, tetapi juga pembelajaran

di luar kelas. Di Indonesia, dikenal istilah tri pusat pendidikan untuk menyebut lingkungan yang mendukung dan berpengaruh dalam proses belajar peserta didik. Tri pusat pendidikan yang terdiri dari kolaborasi antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat menjadi komponen utama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang holistik. Ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sangat berpengaruh pada pendidikan peserta didik, karena apabila dipandang dari berbagai sudut, ketiga pusat pendidikan memiliki dampak positif bagi perkembangan peserta didik (Saleh, 2020). Kaitan lainnya pada proses pembelajaran, prestasi belajar peserta didik daat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologi, faktor psikologi, dan faktor kematangan fisik maupun psikis, sedangkan sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan (Syafi'i et al., 2018). Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa peran ketiga lingkungan perlu dioptimalkan untuk memberikan pengalaman belajar yang saling berkaitan pada peserta didik.

Pengalaman sebagai salah satu bentuk proses belajar, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan proses belajar pada umumnya. Antar pengalaman yang dialami oleh peserta didik, akan meninggalkan proses pembelajaran yang beragam sesuai dengan kondisi peserta didik saat itu. Bahkan pengalaman yang sama, kemudian dialami oleh 2 orang dengan karakter yang berbeda, akan meninggalkan kesan yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan pengalaman belajar yang baik adalah yang mampu terhubung dengan peserta didik secara personal, karena proses belajar yang dilalui oleh

peserta didik juga akan membentuk peserta didik sesuai dengan individu masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu mampu merancang pembelajaran yang mampu mengakomodir perbedaan antar peserta didik. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis inklusif. Melalui pendidikan inklusif, berbagai perbedaan yang ada pada peserta didik justru dijadikan acuan dalam pengembangan pembelajaran yang benar-benar mewakili kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Pada pembelajaran PAI, implementasi pendidikan agama yang inklusif mampu membentuk sikap moderat peserta didik dan menjadi salah satu solusi dalam penguatan sikap penerimaan terhadap kelompok lain di luar kelompok sendiri, serta sebagai bekal dalam pengelolaan keragaman di Indonesia (Rumahuru, 2019).

Pengalaman yang menjadi bahan dalam pembelajaran dapat berupa pengalaman yang baik atau menyenangkan dan juga pengalaman tidak menyenangkan. Namun, fokus dalam desain pengalaman belajar adalah bagaimana memberikan pengalaman yang kuat pada peserta didik. Oleh karena itu diperlukan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan terbangunnya pengalaman yang mereka miliki. Hal ini relevan dengan makna pendidikan, yang dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 4 ayat 4) (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*, 2003). Pada proses pembelajaran, penting untuk melaksanakan

pembelajaran yang menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran aktif, sehingga juga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Misalnya dengan metode pembelajaran berbasis masalah yang telah terbukti mampu meningkatkan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik (Widodo & Widayanti, 2014).

Implementasinya pada pembelajaran PAI, pelaksanaannya tidak boleh hanya sekedar penyampaian materi oleh guru saja, tapi perlu dibangun suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyerap, menganalisis, dan menginterpretasikan materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran agama sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan juga penting untuk diintegrasikan dengan berbagai materi yang peserta didik pelajari selama di sekolah dan fenomena-fenomena yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengkontekstualkan materi PAI dengan materi yang lain, dapat membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh (Zaman, 2020) dan memudahkan peserta didik untuk memahami agama sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu contoh model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI adalah model pembelajaran *contextual teaching and learning*. Model pembelajaran lebih banyak memberikan porsi dalam pengembangan ranah afeksi peserta didik dan memberikan motivasi dalam menerapkan materi yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena orientasi keilmuan PAI lebih menitikberatkan pada aspek moral spiritual memiliki

peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik (Abdi, 2011).

5. Mengevaluasi Pembelajaran

Untuk mengidentifikasi apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, maka pada perancangan desain pengalaman belajar juga memiliki tahap penilaian atau evaluasi. Pada tahap ini dikembangkan metode maupun instrumen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada perancangan desain pengalaman belajar, instrumen dan metode yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembelajaran menjadi satu kesatuan bagian yang disiapkan dalam rancangan pembelajaran. Evaluasi dari proses pembelajaran akan dianalisis dan hasilnya akan menjadi acuan atau pedoman dalam merumuskan tindak lanjut, perbaikan, maupun pengembangan program. Setelah itu, program dirancang ulang untuk diterapkan dan kemudian dievaluasi kembali. Hal ini menunjukkan proses dalam perancangan desain pengalaman belajar, bukan merupakan proses yang linier, namun merupakan proses berulang yang terus dilakukan untuk menemukan model yang paling ideal.

Meskipun evaluasi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, namun pada realisasinya masih banyak guru yang belum memiliki pengetahuan yang menyeluruh terkait konsep dan pelaksanaan evaluasi (Huljannah, 2021). Hal ini menyebabkan proses evaluasi masih terbatas pada ranah-ranah tertentu saja, misalnya pada ranah kognitif. Padahal dalam proses pembelajaran, ketika pengembangan ketiga ranah kemampuan peserta didik menjadi tujuan pembelajaran, maka sudah seharusnya evaluasi juga dilaksanakan pada ketiga ranah tersebut. Pada ranah

afektif dan psikomotor, meskipun dalam perkembangannya sudah mulai menjadi fokus dalam pengembangan instrumen evaluasi, namun terkadang masih belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, ketika guru akan mengevaluasi hasil belajar peserta didik, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbagai motivasi yang mendorong peserta didik dalam belajar juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan proses evaluasi, misalnya terkait faktor ekonomi, keterserapan alumni pada lapangan kerja yang rendah dan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jurusan yang diambil (Sahib, 2020).

Proses pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang kuat pada peserta didik, akan mengembangkan ketiga ranah kemampuan peserta didik secara stimultan. Peserta didik tidak hanya dibekali dengan pengetahuan saja, namun juga mampu menampilkan sikap yang sesuai ketika dihadapkan pada suatu peristiwa, dan bahkan memiliki keterampilan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik ini hanya sebatas teori saja apabila tidak diberi kesempatan untuk menunjukkannya atau mempraktikannya dalam kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, melalui desain pengalaman belajar, peserta didik akan mendapatkan proses belajar yang mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

PENUTUP

Perancangan desain pengalaman belajar dilakukan melalui proses kreatif yang menggabungkan ide kreatif, konsep yang jelas, kemampuan intelektual, dan analisis

dalam merumuskan solusi dalam permasalahan pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam perancangan ini secara umum sama dengan proses pengembangan produk, yaitu melalui tahap penelitian, eksperimen, ide, konseptualisasi, pembuatan prototipe, iterasi, dan pengujian. Pada prosesnya, tahapan-tahapan yang dilakukan tidak selalu linier, namun tahapannya bisa berubah-ubah sesuai dengan proses yang diperlukan. Meskipun memiliki kesamaan dengan proses desain pada umumnya, namun dalam desain pengalaman belajar, proses desain yang dilakukan memiliki tujuan untuk dipelajari.

Seluruh tahapan dalam desain pengalaman belajar dirancang dengan matang dan berfokus pada peserta didik, misalnya dengan mencari tahu kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, motivasi peserta didik dalam belajar, dan preferensi peserta didik terhadap berbagai metode, strategi, serta media pembelajaran. Sehingga secara tidak langsung pendekatan yang dilakukan dalam merancang pengalaman pembelajaran adalah dengan *bottom-up*, yaitu dimulai dengan mempelajari dan menganalisis permasalahan di lapangan untuk kemudian digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, M. I. (2011). Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran PAI. *Dinamika Ilmu*. https://doi.org/10.21093/DI.V11I1.49

Arpan, M., Bibi, S., Sulistiyarini, D., Pendidikan, P., Informasi, T., Komputer, D., Pontianak, P., Ampera, J., & 88 Pontianak, N. (n.d.). *HUBUNGAN KEMAMPUAN KOGNITIF DENGAN*

KEMAMPUAN PSIKOMOTOR MAHASISWA DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK WORKSHOP KOMPUTER PRODI PTIK.

Batubara, A. G. H. (2021). *Analisis kesulitan mahasiswa Mahad Al-Jamiah mempelajari Bahasa Arab bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan - Electronic Theses of IAIN Padangsidimpuan* [IAIN Padangsidimpuan]. http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/6707/

Emda, A. (2018). KEDUDUKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN. *Lantanida Journal*, *5*(2), 172–182. https://doi.org/10.22373/LJ.V5I2.2838

Ernawati, Laelasari, E., & Karomah, S. (2023). Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Akidah Akhlak dan Upaya Mengatasinya di MI Al-Hidayah Cibadak Sukajaya Bogor. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, *3*(1), 64–72. https://doi.org/10.47467/EDUI.V3I1.1409

Fadlurrohim, I., Husein, A., Yulia, L., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). MEMAHAMI PERKEMBANGAN ANAK GENERASI ALFA DI ERA INDUSTRI 4.0. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, *2*(2), 178–186. https://doi.org/10.24198/FOCUS.V2I2.26235

Huljannah, M. (2021). PENTINGNYA PROSES EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR. *EDUCATOR (DIRECTORY OF ELEMENTARY EDUCATION JOURNAL)*,

2(2), 49–63. https://doi.org/10.54045/EDUCATOR.V2I2.416

Ibn, U., & Bogor, K. (2021). Upaya Guru Pai Dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *3*(4), 1437–1445. https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V3I4.596

Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi Permasalahan Pendidikan di Indonesia untuk Meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Guru. In A. Premono, I. W. Sugita, R. Sukarno, & M. A. Akbar (Eds.), *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI)* (pp. 1415–1420). Universitas Negeri Jakarta.

Kushartanti, A. (2009). PERILAKU MENYONTEK DITINJAU DARI KEPERCAYAAN DIRI. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, *11*(2). https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/1451

Learning Experience Design: Guide and Examples | ELM Learning. (n.d.). Retrieved April 28, 2022, from https://elmlearning.com/blog/learning-experience-design-everything-you-need-to-know/

Maryana, Z. (2021). Efektifitas Penerapan Metode Pemberian Tugas Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI di MTSs Al-Zahrah Kabupaten Bireuen | Maryana | Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0. *TTS 4.0: Jurnal Teknologi Terapan & Sains 4.0*, *2*(2). https://ojs.unimal.ac.id/tts/article/view/4699

Mulasi, S., & Saputra, F. (2019). PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN PAI PADA MADRASAH TSNAWIYAH DI WILAYAH BARAT SELATAN ACEH. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, *18*(2), 269–281. https://doi.org/10.22373/JIIF.V18I2.3367

Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan. (2020). *PENGUATAN RANAH PSIKOMOTORIK SISWA SEKOLAH DASAR*. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id

Rumahuru, Y. Z. (2019). Mengembangkan Pendidikan Agama Inklusif sebagai Solusi Pengelolaan Keragaman di Indonesia. *JURNAL TERUNA BHAKTI*, *1*(1), 59–68. https://doi.org/10.47131/JTB.V1I1.13

Sahib, A. (2020). Analisis Faktor Rendahnya Motivasi Belajar Mahasiswa. *JOEAI:Journal of Education and Instruction*, *3*(1), 21–35. https://doi.org/10.31539/JOEAI.V3I1.1265

Saleh, R. F. (2020). Reinterpretasi Tri Pusat Pendidikan. *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)*, *3*(2). https://www.journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/collase/article/view/3655

Sumardinata, J., & Kris, W. (2018). *Mendidik Generasi Z dan A: Marwah Era Milenial Tuah Generasi Digital* (C. K. Untari, Ed.). Grasindo. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eHyDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=generasi+z+adalah&ots=ypk1o1O0PH&sig=GI5PNkO22E60egnOwzjHiSv08_Q&redir_esc=y#v=onepage&q=generasi%20z%20adalah&f=false

Suryaratri, R. D. (2018). PENGARUH PERILAKU INTERPERSONAL GURU TERHADAP MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X SMA ANGKASA 1 JAKARTA. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, *7*(1), 1–9. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jppp/article/view/7063/5099

Syafi'i, A., Marfiyanto, T., Rodiyah, S. K., Surabaya, S. G., Sarjana, P., Sunan, U., & Surabaya, G. (2018). STUDI TENTANG PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM BERBAGAI ASPEK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, *2*(2), 115–123. https://doi.org/10.32585/JKP.V2I2.114

Tanjung, Z., & Amelia, S. (2017). Menumbuhkan Kepercayaan Diri Siswa. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *2*(2), 1–4. https://doi.org/10.29210/3003205000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. (2003).

What is learning experience design? - Learning Experience Design. (n.d.-a). Retrieved April 25, 2022, from https://lxd.org/fundamentals-of-learning-experience-design/what-is-learning-experience-design/

What is learning experience design? - Learning Experience Design. (n.d.-b). Retrieved April 25, 2022, from https://lxd.org/fundamentals-of-learning-experience-design/what-is-learning-experience-design/

Widodo, & Widayanti, L. (2014). Peningkatan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa dengan Metode Problem Based Learning pada Siswa Kelas VIIA MTs Negeri Donomulyo Kulon Progo Tahun Pelajaran 2012/2013. *Jurnal Fisika Indonesia*, *17*(49). https://doi.org/10.22146/JFI.24410

Zaman, B. (2020). PENERAPAN ACTIVE LEARNING DALAM PEMBELAJARAN PAI. *Jurnal As-Salam*, *4*(1), 13–27. https://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/148/123

Zazin, N., & Zaim, M. (2019). MEDIA PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM BERBASIS MEDIA SOSIAL PADA GENERASI-Z | Zazin | Proceeding Antasari International Conference. *PROCEEDING ANTASARI INTERNATIONA CONFERENCE: Local and Global in The Fourth Industrial Revolution*. http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/proceeding/article/view/3744

Zubaidillah, M. H., & Nuruddaroini, M. A. S. (2019). ANALISIS KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI JENJANG SD, SMP DAN SMA . *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(1), 1–11. http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/addabana/article/view/95

MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI ISLAM INDONESIA

M Nurul Ikhsan Saleh

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di Indonesia masih mengancam keamanan masyarakat (Mulyana, Akbar, Zainal, Yusriadi, & Tahir, 2021). Kejadian tersebut terus berulang dan seolah menjadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan (Ilyasa, 2021). Bahkan lebih miris lagi, kekerasan seksual mulai merambah ke banyak tempat, dari mulai tempat hiburan malam, transportasi umum, pasar, sampai ke lembaga pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun perguruan tinggi. Pada kasus tersebut, kaum perempuan merupakan pihak yang cukup rentan mengalami kekerasan seksual. Berbagai usaha untuk melawan dan menanggulangi kekerasan seksual telah banyak dilakukan, mulai dari pembuatan Undang-Undang, workshop, seminar, *Focus Group Discussion*, dan lain-lain. Tulisan ini secara khusus menganalisis penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia dan peran perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam mencengah dan menangani kekerasan seksual.

Salah satu penelitian menemukan bahwa kebanyakan para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dari kalangan perempuan (Gómez, 2022; Jacobsen, 2021), yang sedang menempuh tahun-tahun awal dan pertengahan masa studi di kampus. Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang dialami mayoritas adalah pelecehan verbal dan non-verbal atau kekerasan fisik. Ironisnya, para korban dalam penelitian ini mengaku merasa tidak puas dengan institusinya dalam menangani kasusnya.

Penanganan yang dilakukan cenderung menguntungkan pelaku, dengan alasan demi menjaga nama baik instansi. Selain itu, budaya dan agama dianggap menjadi salah satu penghalang dalam menemukan keadilan bagi para korban kekerasan seksual (Indah & Rosdiana, 2020). Pada tahun 2019 ketika diadakan pendataan pada 16 pergguruan tinggi terhadap mahasiswa yang ada di Indonesia, terdapat seribu kasus lebih terkait kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ini melingkupi pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, prostitusi paksa, dan pelecehan secara tertulis, isyarat, verbal, maupun fisik. Berdasarkan kasus-kasus yang terangkum, mayoritas pelaku adalah mahasiswa, kemudian dosen, dan diikuti karyawan. Dari semua kasus yang ada, penangannanya yang dilakukan dinilai masih sangat minim (Ditjen Pendis, 2019).

Di satu sisi, perempuan telah banyak berkontribusi dalam kemajuan republik Indonesia dengan peran-peran yang dimainkan di segala lini baik dari mulai sektor pendidikan, pemerintah, pengak hukum, sampai pada menjadi menjadi pimpinan tertinggi negara, yaitu presiden. Namun, di sisi lain perempuan masih sangat rentan dengan kasus kekerasan seksual. Dalam catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 dengan beragam bentuk kekerasan, mulai dari ranah privat yang meliputi pekerja rumah tangga, kekerasan oleh mantan pacar dan mantan suami, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap istri, dan semacamnya. Sedangkan dalam ranah publik, kekerasan yang tercatat terjadi dalam beragam bentuk, yaitu percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, perkosaan, dan pencabulan. Bahkan pada beberapa kasus yang juga melibatkan pelaku negara dapat berwujud tindakan

diskriminasi misalnya pada konteks tahanan dan penggusuran. Namun jumlah tersebut terbatas pada kasus yang berhasil dilaporkan saja, karena ada pula kasus yang tidak dilaporkan disebabkan korban cenderung memilih diam, tidak melek teknologi, dan korban dekat dengan pelaku di tengah pembatasan sosial di masa pandemi Covid-19 (Perempuan, 2021).

PEMBAHASAN

1. Melawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Di tengah-tengah perhatian dunia yang meningkat terhadap tindakan kekerasan berbasis agama (Saleh & Astiana, 2021), khususnya pada kekerasan seksual (Bennett et al., 2021), lingkungan perguruan tinggi seharusnya men-*support* para korban kekerasan seksual. Kesalahan penanganan seperti menyebarkan informasi yang tidak semestinya, dapat menimbulkan efek negatif pada korban, seperti depresi, rasa takut, hingga memicu tindakan bunuh diri. Para korban tindakan kekerasan sudah sepatutnya mendapat pendampingan dari perguruan tinggi. Melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 30 Tahun 202, menjadi angin segar dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingungan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Lebih dari itu, Mendikbudristek juga menginisiasi terbentuknya satgas atau satuan petugas dalam menangani dan mencengah kekerasan seksual di peruguruan tinggi, khususnya pada kalangan perempuan yang sering kali menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual (Mendikbudristek, 2021b). Peraturan ini dapat menjadi pedoman untuk menangani kekerasan seksual dan pencegahannya di

perguruan tinggi. Dalam peraturan ini telah dirumuskan definisi dan ruang lingkup kekerasan seksual, prinsip-prinsip pananganan dan pencegahan kekerasan seksual, langkah-langkah pencegahan yang butuh dilakukan perguruan tinggi baik dari mulai tatak kelola sampai pada proses pembelajaran, langkah-langkah pendampingan dan perlindungan, serta hak korban dan saksi. Secara keseluruhan terdapat sembilan bab yang terdiri dari 58 pasal (Mendikbudristek, 2021a).

Peraturan menteri tersebut mempertegas tugas negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amanah Pancasila untuk menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan ini memastikan bahwa lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki payung hukum dalam memastikan secara hukum dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan ini menjaga agar praktik kekerasan seksual tidak merajalela diperguruan tinggi dengan adanya payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, para perempuan di perguruan tinggi, khususnya para dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa perempuan terlindungi dengan ancaman tindak pidana kekerasan seksual. Bukan waktunya lagi tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditutup-tutupi, terlebih ketika para pelakunya adalah seorang dosen ataupun pemegang kebijakan. Sehingga hukum dapat diberlakukankan secara adil dengan adanya transparansi dalam penanganan kasus yang terjadi.

Peraturan menteri tersebut juga berkesuaian dengan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women disingkat CEDAW, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR (the Office of the High Commissioner for Human Rights). Konvensi ini menjadi hukum tingkat internasional yang mendorong setiap negara, termasuk Indonesia, untuk melawan diskriminasi terhadap anak perempuan dan perempuan secara umum di semua sektor. Selain itu, setiap negara dituntut untuk mempromosikan persamaan hak anak perempuan dan perempuan di berbagai lini. Konvensi ini disetujui untuk pertama kalinya pada 18 Desember 1979 dan diratifikasi di lebih dari 180 negara di dunia. Konvensi ini terdiri dari enam bab dan tiga puluh pasal (Assembly, 1979). Indonesia kemudian meratifikasi CEDAW tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 (Indonesia, 1984). Tentu saja peraturan-peraturan lain yang ada di Indonesia juga bisa disenergikan untuk mendukung undang-undang tersebut, seperti halnya peraturan yang mengakomodir kepentingan perempuan, netral gender dan tidak bias gender.

CEDAW sendiri merangkum tiga prinsip penting. *Pertama*, kewajiban dan tanggung jawab negara, dimana negara menjamin hak perempuan baik dalam ranah kebijakan dan hukum, serta tanggung jawab negara dalam membuat peraturan dalam sektor publik untuk menjamin hak perempuan. Negara juga dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan yang sama secara adil dalam pelaksanaan hak dan praktis lewat aturan yang ada.

Kedua, prinsip non-diskriminasi, dimana perempuan tidak diberikan batasan, pengecualian atau pembedaan yang berbasis pada jenis kelamin yang kemudian berdampak pada penghapusan atau mengurangi hak perempuan dalam hal budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sejenisnya. *Ketiga*, prinsip kesetaraan substantif, dimana perempuan diperlakukan setara di depan hukum sehingg tidak ada ketimpangan dalam menerima manfaat, akses dan kesempatan dalam penegakan hukum (Maryam, 2018).

Kemudian Deklarasi Wina pada tahun 1993 semakin mempertegas bahwa tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap pada perempuan menjadi bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (Declaration, 1993). Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha melawan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi bagian pula dari langkah menegakkan HAM pada level internasional. Usaha ini juga menandakan bahwa penegakan HAM menjadi prioritas masyarakat internasional untuk ditegakkan secara bersama-sama. Deklarasi Wina tersebut mempertegas prinsip dan dan komitmen dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap negara bertanggung jawab untuk mendorong ditegakkannya HAM dan menjunjung kebebasan bagi setiap manusia tanpa diskriminasi dan tidak membeda-bedakan seseorang berdasar agama, bahasa, kelamin dan ras. Membangun negara yang berbasiskan nilai-nilai toleransi, berkeadilan, perdamaian, demokrasi, pluralisme, solidaritas, dan kesetaraan. Negara memastikan terhapusnya tindakan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan berbasis gender, dan segala bentuk pelacuran anak khususnya anak perempuan.

Usaha dalam melawan kekerasan seksual di perguruan tinggi tentu harus melibatkan semua *civitas academica* dan instansi-instansi terkait. Sehingga dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, bisa berjalan sesuai yang diharapkan baik dari kementerian sendiri maupun pihak kampus. Permendikbudristek ini bisa menjadi media bagi pemegang kebijakan di perguruan tinggi dalam mengambil sikap tegas dalam menanggulangi terulangnya kasus kekerasan seksual baik yang menimpa mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (Oslami, 2021). Namun sebelum lebih lanjut membahas upaya perguruan tinggi dalam melawan kekerasan seksual, penting untuk memahami terlebih dahulu makna dari kekerasan seksual yang digambarkan dalam Permendikbudristek tersebut.

> Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. (Mendikbudristek, 2021a)

Pengertian ini menyiratkan bahwa kekerasan seksual memiliki cakupan sangat luas, bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk psikis seperti menghina, melecehkan, atau merendahkan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan atau proses pencegahan atau pemeriksaan bukan

hanya fokus pada kekerasan dalam bentuk fisik yang mudah terdeteksi, namun juga psikis yang bisa saja lebih sering terjadi namun luput dari pelaporan. Dalam Peraturan ini juga dijelaskan bahwa tindakan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan dalam bentuk fisik, nonfisik, verbal, atau pun dalam bentuk sarana teknologi informasi dan komunikasi. Apabila dilihat dari tujuannya, Permendikbudristek ini berupaya untuk menciptakan kehidupan di perguruan tinggi yang nir-kekerasan, kolaboratif, terbuka, egaliter, bermartabat, dan manusiawi. Sedangkan realisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat berbentuk tiga upaya, meliputi: *pertama*, pencegahan melalui proses pembelajaran. Langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan pehamanan kepada *civitas academica* untuk memahami materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Kedua*, pencegahan dengan peguatan tata kelola perguruan tinggi. Cara yang dapat ditempuh diantaranya membuat kebijakan, memproduksi pedoman, menyusun satuan petugas, dan menyiapkan fasilitas serta akomodasi untuk penanganan dan pencegahan kekeran seksual. *Ketiga*, pencegahan melalui pemberdayaan budaya komunitas antara pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan disini dapat berbentuk edukasi dan komunikasi yang memadai terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual kepada organisasi kemahasiswaan, komunikasi internal kepada *civitas academica,* dan sosialisasi pada mahasiswa baru. Penanganan oleh perguruan tinggi meliputi proses pendampingan terhadap korban dan saksi, perlindungan terhadap korban dan saksi, pengenaan sanksi bagi pelaku, serta pemulihan terhadap korban dan saksi (Mendikbudristek, 2021a).

Amanat Permendikbudristek yang mendesak untuk ditindaklanjuti adalah bagaimana perguruan tinggi membuat satuan petugas yang meliputi unsur mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. Bahkan apabila memungkinkan, dapat dibuat pusat studi atau unit tersendiri yang fokus menangani hal tersebut. Salah satu tugas utama dari satuan petugas diantaranya adalah membuat survei terkait kekerasan seksual kepada *civitas academica* minimal satu semester sekali atau enam bulan. Hasil survei tersebut digunakan sebagai laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemegang kebijakan di kampus. Satuan petugas menfasilitasi penerimaan laporan terkait kekerasan seksual dan sistem pelaporannya sendiri harus bisa dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti layanan nomor telpon untuk menelpon dan untuk mengirim pesan singkat atau alamat email atau laman web khusus untuk berkirim pesan panjang (Mendikbudristek, 2021a). Apabila diperlukan, satuan petugas juga dapat mekakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung implementasi hasil laporan tersebut. Satuan petugas yang ditunjuk tentu harus melalui proses pemilihan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan minimal sepuluh orang calon anggota panitia seleksi.

2. Perguruan Tinggi Islam Indonesia dalam Melawan Kekerasan Seksual

Ajaran Islam sangat tegas memerintahkan umatnya untuk melawan pelecehan seksual. Posisi perempuan juga sangat dilindungi dan dimuliakan sehingga segala bentuk intimidasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan dilarang. Allah Swt. memerintahkan manusia, terutama laki-laki, untuk

menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33:

> … Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk memandang segala sesuatu yang terlarang dari seorang perempuan yang bukan muhrim, terutama aurat perempuan. Pandangan terhadap aurat perempuan memungkinkan membuat lengah laki-laki. Etika yang dapat diterapkan di tempat umum misalnya berusaha untuk mengalihkan pandangan dan tidak memandang atau menatap dalam waktu lama kepada sesuatu yang kurang baik atau terlarang (menatap aurat perempuan). Selain itu, seorang laki-laki harus memelihara kemaluannya dengan tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, semisal pada istrinya yang sah. Tidak memperlihatkan kemaluannya kecuali pada orang yang boleh atau halal melihatnya, bahkan lebih terhormat dengan tidak memperlihatnya meskipun kepada istrinya sendiri. Langkah ini adalah bagian dari untuk terus mawas diri untuk terjauh dari kemaksiatan karena Allah Swt. Maha Mengetahui (Shihab, 2002).

Selanjutnya, Allah Swt. juga mendesak kepada orang beriman, khususnya perempuan, untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menutup auratnya seperti juga larangan terhadap laki-laki. Perempuan juga dilarang untuk menunjukkan keindahan tubuhnya kecuali pada suaminya. Salah satu penelitian menemukan bahwa salah satu penyebab kekerasan seksual adalah dari gaya berpakaian yang

kurang pas (Wardani, Arum, & Pandin, 2021). Demikian juga, perempuan dilarang menunjukkan bagian badan tertentu yang bisa merangsang kaum laki-laki, kecuali tanpa maksud menampak-nampakkannya seperti halnya telapak tangan dan wajah (Shihab, 2002). Berikut firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31:

> Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan agar para perempuan menutup dadanya dengan kerudung untuk menghindari birahi bagi kaum laki-laki yang melihatnya apabila tidak ditutup. Ayat ini pula

mewanti-wanti agar seorang perempuan menjaga kehormatannya. Namun begitu, ayat ini ditutup dengan seruan untuk bertaubat dengan pemahaman bahwa mungkin saja seorang manusia sulit menghindar dari pandangan aurat lawan jenis tertutama pada zaman seperti saat ini dan di tempat umum. Oleh karena itu manusia harus selalu memohon ampunan kepada Allah Swt. setiap waktu dan selalu berusaha untuk selalu berada dalam petunjuk-Nya (Shihab, 2002).

Allah Swt. dalam firman-Nya yang lain juga mengancam orang yang melalukan perzinaan, seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nur 2:

> Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dalam ayat ini orang yang melakukan perzinaan baik laki-laki ataupun perempuan yang keduanya belum menenikah, maka mereka mendapatkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali perorang. Hukuman tersebut berlaku apabila keduanya melakukan perzinaan dengan terbukti memenuhi ketentuan-ketentuannya. Sedangkan bagi pezina baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah dan terbukti melakukannya, maka hukumannya adalah dengan rajam (melempar pezina hingga mati, semisal dilempar menggunakan batu). Hal tersebut menunjukkan betapa ajaran Islam sangat membenci

perbuatan zina karena akan berdampak negatif dan sangat berbahaya (Shihab, 2002).

Pada intinya, Islam melarang kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan pemerintah Indonesia juga melarangnya. Sebelum Mendikbudristek mengeluarkan peraturan nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) pada Kementerian Agama telah lebih dulu mengeluarkan keputusan nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pedoman ini bertujuan untuk melindungi, menjaga bartabat, kehormatan, dan keamanan bagi warga di perguruan tinggi Islam dari segala bentuk praktik dan ancaman kekerasan seksual. Pedoman ini menjadi acuan penanggulangan dan pencegahan praktik kekerasan seksual baik di perguruan tinggi swasta dan negeri. Pedoman ini melingkupi penanganan dan pencegakan kekerasan seksual yang melibatkan *civitas* perguruan tinggi, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pemegang kebijakan kampus, baik pada kasus yang terjadi di dalam kampus atau di luar kampus. Melalui pedoman ini, perguruan tinggi Islam sudah memahami bagaimana prosedur penanganan bagi korban kekerasan seksual dan korban sendiri dapat mengetahui prosedur atau langkah perlindungan yang seharusnya didapat oleh perguruan tinggi Islam. Harapannya adalah para korban kekerasan seksual dapat tertangani dengan baik (Ditjen Pendis, 2019).

Secara garis besar peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendis pada tahun 2019 terbagi ke dalam empat

bagian. Bagian pertama mendeskripsikan pengertian atau ruang lingkup kekerasan seksual dan kerentanan perempuan sebagai korban. Bagian kedua melingkupi daftar kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, standar dan prinsip penanganan, dan pertanggungan jawab dari pelaku kekerasan seksual. Bagian ketiga mencakup langkah-langkah pananganan dan pencegahan, seperti bagaimana melayani korban, memulihkan nama baiknya, proses rujukan, dan langkah-langkah evaluasi penanganan terhadap korban. Bagian keempat menjelaskan upaya pembangunan pemahaman anti-kekerasan seksual pada masyarakat kampus agar lebih tangguh dalam melawan dan mengantisipasi kekerasan seksual. Secara garis besar, peraturan ini mirip dengan peraturan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang pada bagian awalnya menjelaskan ketentuan umum dengan penjelasan arti dari kekerasan seksual, pencegahan, korban, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, pemulihan korban, satuan petugas, mekanisme penanganan, hak korban dan saksi, serta pemantauan dan evaluasi.

Beberapa poin penting dalam penanganan kasus korban kekerasan seksual dalam peraturan Ditjen Pendis diantaranya adalah terkait prinsip-prinsinya yang meliputi berkeadilan gender, berlandaskan teologis, empati, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan korban, dan partisipasi korban. Sedangkan prinsip untuk pencegahan kekerasan seksual mencakup tidak diskriminatif, berkeadilan, melibatkan semua pihak, dan mengintegrasikan antara fisik serta non-fisik. Tidak kalah penting lagi dalam

peraturan Ditjen Pendis diuraikan upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam, meliputi: *pertama*, mengoptimalkan pendidikan anti kekerasan baik dalam kegiatan kampus atau di media yang dimiliki. Seperti halnya promosi anti kekerasan lewat media sosial baik tertulis maupun non tertulis. Misalnya dalam bentuk kegiatan pembekalan KKN dan PPL serta diskusi atau pembinaan keilmuan *civitas academica*. *Kedua,* mengadakan kegiatan konferensi, seminar, dan workshop terkait pencegahan kekerasan seksual untuk meningkatkan pengetahuan *civitas academica* dan masyarakat umum. *Ketiga*, kebutuhan untuk mencetak kurikulum perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender. Dari kurikulum inilah harapannya dapat lahir mata kuliah, RPS (Rencana Pembelajaran Semester), dan tugas akhir yang mengupas pencegahan kekerasan seksual berbasis gender dan HAM. *Keempat*, dilaksanakannya penelitian atau kajian terkait pencegahan kekerasan seksual di tiap perguruan tinggi sehingga dapat melahirkan kebijakan atau aktivitas yang relevan dan membumi.

PENUTUP

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia masih belum sepenuhnya aman dari ancaman kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai, atau bahkan pemegang kebijakan. Padahal Islam sendiri membawa nilai dan prinsip yang sudah jelas, yaitu membawa berkah bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Hal tersebut menunjukkan Islam menolak segala bentuk kekerasan, kekejaman, ketidak adilan, termasuk kekerasan seksual yang sering menjadikan perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, perguruan tinggi selain harus

menjunjung nilai keislaman dari Al-Qur'an dan hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Koversi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, juga perlu mengimplementasikan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang pedoman pencengahan dan penanggulanan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Kajian keislaman yang berbasis anti kekerasan seksual dapat menjadi fokus utama di perguruan tinggi Islam, baik dalam penelitian, pendidikan, dan pengabdian atau dalam dakwah Islamiyah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengintegrasikan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara menyeluruh. Kajian kekerasan seksual seharusnya bukan lagi menjadi pembicaraan yang dianggap tabu, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama dan terbuka. Maka ceramah-ceramah keagamaan di perguruan tinggi Islam tidak hanya berkutat pada bahasan seputar rukun Islam dan rukun Iman, atau apabila di bulan Ramadhan hanya terkait puasa. Namun lebih dari itu, ceramah juga perlu diisi dengan tema pencegahan kekerasan seksual. Harapannya, kajian keislaman dapat menjawab masalah keseharian yang terjadi di kampus, salah satunya adalah bagaimana membangun kesalehan pribadi dan sosial yang berbasis anti kekerasan seksual. Kajian-kajian keislaman yang bebasis teologi juga perlu semakin dikuatkan, misalnya dengan cara menerbitkan artikel atau buku tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist anti kekerasan seksual.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual perlu diwujudkan melalui basis nilai aktif partisipatoris dimana perguruan tinggi Islam harus dengan cepat merespon segala bentuk tindakan kekerasan dan menjamin para korban serta saksi. Selain itu, upaya yang ada perlu melibatkan banyak pihak dengan proses yang berkelanjutan. Seluruh *civitas* kampus perlu ditingkatkan pemahamannya dan dirangkul untuk bersama-sama melawan kekerasan seksual untuk menyadarkan bahwa hal ini merupakan tugas bersama. Harapannya nantinya dapat tumbuh komunitas kampus yang tangguh dalam melawan kekerasan seksual. Meskipun dalam prosesnya tidak dengan cara paksaan, akan tetapi apabila ada yang menjadi pelaku maka diperlakukan setara dan tidak pandang bulu, apakah itu pemegang kebijakan atau rektor sekalipun.

Untuk mengefektifkan kebijakan penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual sebagai pengejawantahan dari Permendikbudristek dan Keputusan Ditjen Pendis, setiap perguruan tinggi Islam wajib secara mendesak membuat peraturan lebih terperinci dalam bentuk peraturan yang disahkan rektor. Peraturan tersebut kemudian disosialisasikan, dipublikasikan, dan sebarluaskan pada media sosial yang ada disetiap unit yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Apabila memungkinkan, pada website kampus dimunculkan notifikasi terkait kebijakan anti kekerasan seksual yang mudah diakses dan dibaca. Selanjutnya, dari peraturan yang ada harapannya dapat meningkatkan pemahaman semua *civitas academica* tentang pentingnya melawan kekerasan seksual secara berjamaah. Misalnya perlu diatur bagaimana seorang dosen tidak boleh bertemu dengan mahasiswa lawan jenis secara berduaan di luar jam kerja. Apabila ada keperluan mendesak, pertemuan tersebut harus dengan pengetahuan ketua program studi. Peningkatan

pemahaman terhadap *civitas academica* dapat pula dikuatkan melalui aktivitas-aktivitas turunan dari peraturan tersebut, misalnya dalam bentuk konferensi, seminar, dan kuliah umum pengenalan kampus.

Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan perguruan tinggi Islam dalam melawan kekerasan seksual adalah dengan melengkapi fasilitas pendukung untuk menanggulangi kekerasan seksual. Misalnya dengan menyediakan penerangan yang cukup di setiap sudut kampus, CCTV di semua tempat, fasilitas tempat tinggal bagi korban apabila dibutuhkan suatu waktu, dan tentu fasilitas sistem informasi yang mendukung, mulai dari *platform* untuk pengaduan yang mudah diakes semua *civitas academica* termasuk kaum difabel sampai pada nomor kontak *fast response* selama 24 jam. Sehingga laporan dari korban dapat langsung ditindak lanjuti di hari yang sama, tanpa penundaan di waktu lain yang tidak menentu. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan petugas ini harus dialokasikan secara cermat.

Gugus depan atau satuan petugas di tiap perguruan tinggi Islam harus dibentuk dengan proses sesuai dengan aturan dengan melibatkan panitia pemilihan dari semua unsur. Ada unsur yang merepresentasikan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pemegang kebijakan, dan *stakeholders*. Dengan dibentuknya satu tugas ini, diharapkan lahir aktivitas-aktivitas yang mendukung penciptaan kampus bebas dari kekerasan seksual. Satuan petugas dapat meneliti, mengumpulkan pengaduan, laporan, dan membuat catatan tahunan sebagai panduan rekomendasi untuk membuat kebijakan tindak lanjut. Tentu saja satuan petugas harus bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak luar dan terbebas dari semua kepentingan yang merugikan rasa keadilan, HAM, dan kesetaraan gender.

Satuan petugas ini juga bisa membangun kerjasama dengan pihak terkait misalnya LSM atau penegak hukum untuk menjamin ketersediaan layanan seperti halnya advokasi dan bantuan hukum bagi korban. Terlebih korban juga perlu diberikan pelayanan dalam penguatan spiritual, layanan secara psikologis, bantuan hukum, dan layanan medis.

Terakhir, sukesnya pencegahan dan dan penanganan kekerasan seksual pastinya tidak lepas dari komitmen semua pihak, baik rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, dosen, tenaga kependidikan, karyawan, unit kemahasiswaan, mahasiswa, dewan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, lembaga pers mahasiswa, dewan mahasiwa, himpunan mahasiswa jurusan, dan organisasi intra kampus lainnya, alumni, masyarakat di lingkungan kampus, serta pihak terkait lain. Seluruh unsur ini harus bersatu dan bersama-sama berkomitmen untuk melawan segala tindak kekerasan seksual. Dengan bersatunya semua *civitas academica* kampus, akan menjadi kekuatan tersendiri dalam membentuk pembiasaan dan membangun lingkungan yang nyaman serta aman untuk semua orang, khususnya untuk kaum perempuan yang rentang terhadap kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Assembly, U. N. G. (1979). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. *Retrieved April*, *20*, 2006.

Bennett, E. R., Snyder, S., Cusano, J., Mcmahon, S., Zijdel, M., Camerer, K., & Howley, C. (2021). Supporting survivors of campus dating and sexual violence during COVID-19: A social work perspective. *Social Work in Health Care*, *60*(1), 106–116.

Declaration, V. The Vienna Declaration and Programme of Action, URL: http://www. ohchr. org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_English. pdf (accessed 9 April 2022) § (1993).

Ditjen Pendis. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islsam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (2019).

Gómez, J. M. (2022). Gender, campus sexual violence, cultural betrayal, institutional betrayal, and institutional support in US ethnic minority college students: A descriptive study. *Violence against Women*, *28*(1), 93–106.

Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, *3*(3), 281–300.

Indah, R. N., & Rosdiana, A. M. (2020). Cultural Religious Challenges in Handling Sexual Violence Cases in Indonesian Islamic Institutions. *KnE Social Sciences*, 132–142.

Indonesia, D. P. R. R. (1984). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jacobsen, S. K. (2021). "More of a Girl Thing?" Examining the Role of Gender and Campus Context in Perceptions of Risk and the Shadow of

Sexual Assault. *Journal of Interpersonal Violence*, 08862605211005142.

Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konversi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *9*(1), 99–118.

Mendikbudristek. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (2021). Indonesia.

Mendikbudristek. (2021b). Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual. Retrieved March 25, 2022, from https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual

Mulyana, Y., Akbar, Z., Zainal, H., Yusriadi, Y., & Tahir, S. Z. Bin. (2021). High Domestic Violence during the Pandemic COVID-19. In *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (pp. 6283–6290). Universitas Iqra Buru.

Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, *1*(2), 101–119.

Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Catatan Tahunan*.

Saleh, M. N. I., & Astiana, Y. (2021). The Perspectives of Islamic Scholars On Religious Deradicalization And Social Media Roles. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, *26*(2), 241–260.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, *8*.

Wardani, T. I., Arum, S. S., & Pandin, M. (2021). The Analysis of Sexual Violence Response Among University Students: Study Case In Universitas Airlangga, Indonesia. *INDONESIA (September 3, 2021)*.

PENDIDIKAN HOLISTIK UNTUK MENANGGULANGI MASALAH KETERASINGAN DALAM PEMBELAJARAN DARING

Kurniawan Dwi Saputra

PENDAHULUAN

Apabila kita membahas pendidikan di era digital, fokus perbincangan biasanya mengarah kepada bagaimana integrasi teknologi digital ke dalam proses pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Hal ini memang merupakan jawaban atas tantangan era digital. Mau tidak mau, pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terdapat ungkapan menarik yang menguatkan posisi ini, "teknologi tidak dapat menggantikan guru, tetapi guru yang mampu menggunakan teknologi akan menggantikan guru yang tidak" (Gloria & Benjamin, 2020). Adagium di atas tidak hanya berlaku untuk guru, tapi juga untuk unsur-unsur pendidikan lain, seperti kelas, pembelajaran, evaluasi, hingga kurikulum dan institusi pendidikan. Contoh dari kebutuhan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi adalah dengan naiknya pamor universitas terbuka dan munculnya institusi-institusi pendidikan daring yang semakin menarik minat peserta didik.

Ihwal di atas bertambah eksterm dengan merebaknya wabah Covid-19. Covid-19 merevolusi banyak pola kehidupan manusia menjadi modus daring, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Sekolah-sekolah dari jenjang paling rendah hingga pendidikan tinggi mau tidak mau harus mengembangkan pembelajaran daring karena tuntutan keadaan. Kebijakan pemerintah yang membatasi

aktivitas tatap muka massal menjadi penyebabnya. Institusi pendidikan dihadapkan pada pilihan adalah antara mengadakan pembelajaran daring atau tidak sama sekali.

Fenomena "daringisasi" di atas sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai salah satu penerapan esensi pendidikan, yaitu upaya homininasi atau membudayakan manusia (Soegeng, 2018). Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya membuat manusia berbudaya atau bertingkah laku sesuai dengan skema-skema tertentu. Skema-skema itu adalah ijtihad pikiran manusia untuk mempermudah kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, terciptalah kebudayaan sebagai hasil abstraksi generasi terdahulu terhadap hal-ihwal yang seharusnya dijalankan dalam pemenuhan kebutuhan manusiawi dalam hidup. Selanjutnya, generasi tua mengajari generasi muda pola-pola kehidupan tertentu terkait makanan, pakaian, papan, sopan-santun, dan lain-lain agar generasi muda dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih sejahtera dan berkualitas serta dapat berkontribusi pada pengembangan kebudayaan yang lebih produktif.

Akan tetapi, penting bagi kita untuk mengingat kembali bahwa pendidikan memiliki nilai esensial lainnya yang sejajar dengan hominisasi, yaitu humanisasi. Jika hominisasi berorientasi keluar, humanisasi menuju ke arah sebaliknya, yaitu dimensi internal manusia itu sendiri. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan telah banyak mempermudah kehidupan manusia, akan tetapi kebudayaan dapat membeku menjadi kultus yang kehilangan makna dan konteks. Hal itu bisa terjadi karena dua hal yang saling berkait kelindan. Pertama, perubahan zaman dan kondisi yang menuntut perubahan skema-skema kebudayaan yang telah dirumuskan oleh para tetua.

Kedua, kreativitas generasi muda yang telah mengembangkan sistem kebudayaan terdahulu. Kebudayaan bisa sampai pada suatu titik dimana ia bukan saja tidak lagi relevan, tetapi juga menjadi satu bentuk sistem hegemoni terhadap individu yang mengekang, absurd, dan kontraproduktif terhadap tujuan purba kebudayaan itu sendiri, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pada titik inilah, kebudayaan menjadi musuh dari individu. Kritik ini digaungkan oleh Jean Jacques Rousseau dengan gerakan romantisismenya. Karena budaya telah korup, mari kembali kepada daya-daya pribadi yang lebih sensitif dan akomodatif terhadap kebutuhan individu. Daya-daya tersebut secara substansial bukan saja yang berciri impulsif seperti citra kaum romantis pada umumnya, tetapi juga mencakup kemampuan nalar manusia. Karena alasan inilah, Rousseau memiliki peranan penting dalam historiografi pemikiran filsafat Barat. Daya internal tersebut sebenarnya mewadahi pula potensi spiritualitas yang tak dapat dinafikan dari manusia.

Korupsi tersebut dapat terjadi juga dalam budaya digital. Sebagai produk pikiran manusia, budaya digital dapat efektif dalam memudahkan dan mengembangkan kualitas hidup manusia. Namun di sisi yang lain, dapat juga mengekang dan merugikan manusia. Misalnya, era digital menyebabkan banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, timbulnya budaya instan dan menurunnya moralitas (Setiawan, 2017).

PEMBAHASAN

Dalam konteks yang lebih sempit, pembelajaran daring juga ibarat dua sisi mata uang. Ia dapat memberikan dampak positif atau negatif. Pembelajaran daring tentu saja memiliki banyak kelebihan, misalnya fleksibilitas waktu

dan efisiensi tenaga serta ruang. Ia menghemat waktu dan tenaga karena dengan pembelajaran daring, kita tidak membutuhkan perjalanan menuju lokasi kelas. Untuk institusi-institusi dengan modal infrastruktur fisik yang terbatas, pembelajaran daring sangat membantu pelaksanaan proses belajar mengajar tanpa memerlukan banyak ruangan fisik. Semua itu dimungkinkan lewat pembelajaran daring yang dapat menghubungkan manusia dari pelbagai tempat terpisah dan melalui skema-skema tertentu juga menghubungkan orang di waktu yang berbeda.

Kesalingterhubungan ini tentu menjadi preseden yang baik bagi kemanusiaan karena membuka ruang yang lebih luas bagi kolaborasi. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam dunia digital, muncul pertanyaan mendasar mengenai pola kehidupan yang saling terhubung berbasis teknologi ini. Misalnya keraguan yang muncul "apakah betul teknologi digital membuat umat manusia semakin bersatu padu? Ataukah justru membuat manusia semakin terasing dari sesamanya?" (Hassan, 2020)
.

Konteks purba pertanyaan tentang keterasingan ini sebenarnya dilontarkan Karl Marx dalam masyarakat industri ketika mula-mula teknologi modern menyingsing. Teori alienasi Marx menjelaskan paradoks dalam masyarakat kapitalis di mana perasaan kesepian dan ketidakberdayaan semakin marak justru ketika manusia semakin terhubung dan mampu merekayasa alam (Øversveen, 2021). Seperti dijelaskan oleh Schroeder, alienasi Karl Marx terdapat lima jenis, alienasi dari hasil kerja, alienasi dari proses pekerjaan, alienasi dari kemanusiaan, alienasi dari orang lain, dan alienasi dari diri sendiri (Hendrawan, 2017). Sementara itu, terdapat lima bentuk alienasi yang dialami manusia, yaitu

ketidakberdayaan, kekosongan makna, ketidaknormalan, keterasingan diri, dan keterpencilan (Seeman, 1959).

Dalam konteks pendidikan, isu mengenai pentingnya perhatian kepada dimensi kemanusiaan di tengah merebaknya pengaruh teknologi digital juga disadari banyak pihak. Dalam buku yang diterbitkan UNESCO, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan di abad ke 21 ini adalah bagaimana menjaga dan mengembangkan martabat, kapasitas dan kesejahteraan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia yang lain maupun dengan alam di tengah tantangan dunia digital (UNESCO, 2015, p. 38). Digitalisasi perlu diawasi agar tidak mengalienasi peserta didik dan memperlakukan mereka tak ubahnya komoditas semata.

1. Keterasingan dalam Pembelajaran Daring

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dalam bentuk pembelajaran asinkron memanfaatkan komputer pada mulanya merupakan cara untuk mengatasi permasalahan keterasingan dalam lingkungan pembelajaran tatap muka (Mann, 2006, p. 44). Akan tetapi, pada praktiknya, meski berhasil mengatasi beberapa permasalahan pembelajaran tatap muka, misalnya masalah perundungan fisik, pembelajaran daring ternyata melahirkan permasalahan lainnya. Dalam artikel ini, permasalahan tersebut akan disorot dengan kerangka teori alienasi atau keterasingan.

Keterasingan dalam pembelajaran adalah berjaraknya peserta didik dari subjek dan proses pembelajaran (Mann, 2001). Ini merupakan hal yang miris karena pada hakikatnya pembelajaran bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dari subjek dan proses pembelajaran. Akan tetapi, tidak dapat

dipungkiri bahwa pembelajaran daring menyebabkan timbulnya keterasingan tersebut. Salah satu contoh yang mudah disebutkan adalah terjadinya *learning loss* akibat pemberlakukan pembelajaran daring. Lebih detailnya, penulis menyimpulkan adanya beberapa bentuk keterasingan yang muncul dari pembelajaran daring.

a. Keterasingan dari Subjek Pembelajaran

Tujuan dari pembelajaran adalah adanya perubahan dalam diri peserta didik, baik dalam ranah perilaku maupun kognitif. Perubahan itu terjadi karena adanya respon peserta didik terhadap subjek pelajaran sebagai stimulus yang dirancang oleh guru seperti dalam behaviorisme, maupun karena adanya tangkapan kognitif dari peserta didik terhadap subjek pembelajaran seperti dalam kognitivisme.

Berdasarkan riset, pemberlakuan pembelajaran daring ternyata membawa dampak negatif dalam konteks hubungan peserta didik dengan subjek pembelajaran, yaitu terjadinya *learning loss*. *Learning loss* adalah kondisi dimana para peserta didik kehilangan pengetahuan atau keterampilan umum dan khusus yang terjadi karena adanya jeda yang lama atau ketidakberlangsungan proses pembelajaran (Wahyudi, 2021, p. 20). *Learning loss* yang cukup signifikan juga terjadi di Belanda meskipun di sana penutupan sekolah relatif singkat dan fasilitas pembelajaran daring sudah relatif merata (Engzell et al., 2021). Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang lebih besar di negara-negara dengan infrastruktur daring yang

lebih buruk atau mengalami periode pembelajaran jarak jauh yang lebih lama. Penelitian lain dari McKinsey & Company menemukan bahwa dampak *learning loss* dari pembelajaran daring ini mengglobal dan rata-rata para peserta didik tertinggal dua bulan pembelajaran dari seharusnya yang mereka dapatkan sebelum pandemi (Chen et al., 2021).

Di tanah air sendiri, penelitian dari Bank Dunia menyebutkan bahwa pembelajaran daring hingga Juni 2021 telah menyebabkan *learning loss* yang hampir setara dengan satu tahun pembelajaran (Afkar & Yarrow, 2021). Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian dari Asian Development Bank yang menyebutkan bahwa penutupan sekolah menyebabkan banyak peserta didik di Indonesia mengalami *learning loss* (Wahyudi, 2021).

Femonena ini tentu menjadi *alarm* bahaya bagi pendidikan di tanah air karena *learning loss* ini memiliki dampak yang tidak bisa dianggap remeh. Penelitian dari Bank Dunia bahkan mengestimasikan *learning loss* yang terjadi hingga Desember 2021 menyebabkan hilangnya total kemungkinan pendapatan para peserta didik hingga 306 milyar dolar. Selain dampak ekonomi, mengutip keterangan Menteri Pendidikan Nadim Makarim yang menyatakan bahwa *learning loss* dapat berdampak pada defisiensi kognitif dan karakter dari peserta didik (Wahyudi, 2021).

b. Keterasingan dari Proses Pembelajaran

Keterasingan peserta didik dari proses pembelajaran adalah situasi dimana mereka tidak dapat terlibat (*engage*) atau berkontribusi secara positif dan produktif untuk mengembangkan potensi dalam proses pembelajaran (Mann, 2006, p. 43). Hal itu sering terjadi dalam pembelajaran daring diantaranya dalam bentuk terhambatnya peserta didik dari proses pembelajaran. Sebenarnya ini merupakan ironi dari pembelajaran daring. Salah satu tujuan inisiasi pembelajaran berbantuan komputer (*computer assisted learning*) yang menjadi leluhur dari pembelajaran berbasis jaringan adalah upaya untuk menanggulangi keterasingan dalam pembelajaran (Mann, 2006, p. 44). Ihwal yang dimaksud adalah masalah perundungan fisik dan verbal di kalangan peserta didik yang menjadi penghalang dari proses belajar mengajar yang ideal. Alih-alih fokus pada pembelajaran, peserta didik terganggu oleh himpitan psikis dan tekanan sosial akibat perundungan.

Jika dalam pembelajaran tatap muka keterasingan lebih disebabkan patologi sosial, keterasingan dalam pembelajaran daring lebih deterministik karena lahir dari kondisi pembelajaran daring itu sendiri. Salah satu bentuk pembelajaran daring yang marak digalakkan adalah MOOC *(massive open online course)* di mana pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Guru menyiapkan materi dalam bentuk video, baik ceramah maupun tutorial,

dan peserta didik belajar dengan menyaksikan video tersebut.

Dalam skema tersebut, meskipun peserta didik dimungkinkan untuk bertanya atau menanggapi melalui kolom chat, tetapi interaksi tidak terjadi secara langsung. Seringkali karena jeda waktu interaksi, peserta didik dan guru sudah tidak fokus pada pembahasan materi karena telah terganggu hal lain. Seringkali juga pertanyaan yang diajukan hanya formalitas untuk mengisi presensi kehadiran.

Masalah di atas terjadi dalam kondisi jaringan internet yang baik. Apabila kita memasukkan variabel buruknya jaringan internet, maka permasalahan menjadi sangat kompleks. Banyak pembelajaran daring yang dilaksanakan secara sinkron tidak berjalan dengan baik karena hambatan sinyal.

Fenomena ini, menunjukkan adanya keterasingan peserta didik dalam bentuk *meaninglessness*, yaitu kondisi di mana proses pembelajaran kehilangan maknanya karena peserta didik kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan diri (Situmorang, 2021, p. 5). Masalah ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa pendidikan memuat proses kreativitas yang terfasilitasi melalui interaksi (Mann, 2001, p. 12). Dalam pembelajaran daring, banyak kejadian di mana kreativitas peserta didik tidak dapat terwujud karena ketidaksempurnaan skema interaksi. Misalnya kondisi yang dijelaskan oleh Jackson dalam pelaksanaan pembelajaran daring, seperti angkat tangan (peserta didik) kadang diabaikan,

pertanyaan kepada guru sering tidak dipedulikan, dan permohonan izin juga sering ditolak (Mann, 2001).

Fenomena tersebut juga menunjukkan bentuk keterasingan lain, yaitu *powerlessness* atau ketidakberdayaan (Saputra et al., 2020, p. 149). Berdasarkan dari pengalaman mahasiswa PAI UII yang pertanyaannya tidak ditanggapi oleh dosen karena dianggap tidak berbobot, Kurniawan menyimpulkan mahasiswa mengalami kondisi ketidakberdayaan karena tindakannya semata tidak dapat menentukan proses pembelajaran yang ia alami, tetapi membutuhkan afirmasi dari pihak lain (Saputra et al., 2020, p. 150).

Jika pembahasan di atas menjelaskan keterasingan peserta didik, sebenarnya dalam pembelajaran daring, bukan hanya peserta didik yang mengalami keterasingan, guru atau dosen juga mengalami hal yang sama. Para dosen juga mengalami keterasingan karena tidak dapat mewujudkan sepenuhnya aktualitas pembelajaran dalam pembelajaran daring (Sutikna, 2021). Kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh peserta didik sebenarnya juga ditemukan oleh guru dalam bentuk yang berbeda. Misalnya bentuk keterasingan *powerlessness* (ketikdaberdayaan) guru ketika peserta didik banyak yang mencontek dalam ujian daring. Para guru tidak bisa berbuat banyak karena sulitnya pengawasan ujian daring. Para guru memang dapat meminimalisir kecurangan dengan desain ujian yang lebih variatif, akan tetapi hal itu membutuhkan waktu,

upaya, dan sumber daya yang lebih banyak dalam mempersiapkan ujian.

c. Keterasingan dari Orang Lain

Selain alienasi dari subjek dan proses pembelajaran, dalam pembelajaran daring juga terdapat alienasisasi/pengasingan diri manusia dari manusia yang lain. Alienasisasi tersebut muncul karena adanya masalah dalam komunikasi. Pembelajaran daring memang memiliki hambatan-hambatan dalam komunikasi dengan sebab yang berbeda-beda, dari dimensi psikologis emosional, pola komunikasi, teknis, media, hingga soal literasi teknologi (Fadhal, 2020). Di antara dampak pembelajaran daring adalah menyebabkan keterasingan antara peserta didik. Interaksi yang minim dalam pembelajaran daring menyebabkan para peserta didik tidak saling mengenal dan memahami satu sama lain (Situmorang, 2021). Hal yang sama juga terjadi dalam relasi peserta didik dengan gurunya di mana perhatian para guru relatif berkurang dibandingkan dengan pembelajaran luring (Situmorang, 2021, p. 7). Minimnya interaksi tersebut menyebabkan para peserta didik merasa menjadi subjek yang terisolir dan mempengaruhi motivasi internal untuk belajar (Kazakova et al., 2021). Keterasingan peserta didik dari rekan-rekannya dapat menyebabkan permasalahan sosial di sekolah, sementara itu keterasingan peserta didik dari gurunya dapat menyebabkan perilaku negatif terhadap sekolah (Morinaj & Hascher, 2019).

Jika paragraf di atas menunjukkan keterasingan dengan orang lain dalam ranah pembelajaran, masalah lain dari pembelajaran daring adalah terasingnya peserta didik dari lingkaran kehidupan pribadinya. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang fleksibel terkait waktu dan tempat pelaksanaannya. Akan tetapi, justru karena fleksibilitas itu, pembelajaran daring mendisrupsi pola kehidupan tradisional yang membedakan tempat berdasarkan fungsinya. Belajar pada mulanya dilaksanakan di sekolah yang merupakan ruang publik, sementara rumah adalah ranah privat.

Adanya pembelajaran daring, pembedaan itu menjadi tak berlaku lagi. Ketika pembelajaran daring dilaksanakan, rumah kehilangan privasinya dan karena itu rumah dituntut memiliki standar-standar ruang publik. Misalnya selain ketersediaan sinyal, rumah peserta didik juga harus memiliki pencahayaan yang bagus, dan desain yang layak untuk tampil dalam layar. Isu terkait privasi dalam pembelajaran daring merupakan permasalahan yang banyak digaungkan oleh peneliti pendidikan.

Selain masalah fasilitas, pola kekeluargaan juga bergeser karena pembelajaran daring. Sebelumnya, rumah adalah ranah privat untuk kehidupan domestik keluarga. Dengan adanya pembelajaran daring, rumah bertambah fungsinya menjadi tempat belajar. Hal ini menyebabkan munculnya keterasingan anak-

anak dari orang tuanya karena keharusan bekerja (Sukatin et al., 2022).

d. Keterasingan dari Nilai Kemanusiaan

Menurut Marx, dalam kerja kapitalisme, manusia teralienasi dari nilai kemanusiaan karena bekerja tidak lagi untuk mengaktualitasasikan diri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan kebinatangan yaitu makan, minum, dan reproduksi semata (Hendrawan, 2017, p. 28). Demikian juga halnya pada pembelajaran daring, manusia teralienasi dari nilai kemanusiaan dalam pembelajaran.

Pada hakikatnya, belajar adalah esensi dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam mengemban amanah sebagai khalifah, manusia memerlukan pengetahuan yang luas karena bumi memiliki materi dan struktur yang sangat kaya (Haromaini, 2020, p. 24). Untuk memiliki pengetahuan luas tersebut manusia harus belajar, karena pada dasarnya manusia tidak tahu, namun memiliki potensi untuk mengetahui dalam bentuk indra maupun akal. Demikian yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ
وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya:

"Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa mengetahui sesuatu, dan Dia menciptakan untuk kalian pendengaran,

dan penglihatan serta hati agar kalian bersyukur." (QS. An-Nahl 78).

Dalam pembelajaran daring, banyak permasalahan yang menyebabkan adanya formalitas kegiatan belajar mengajar tanpa proses belajar. Misalnya, dalam pembelajaran daring, guru hanya menyediakan materi untuk dipelajari secara mandiri oleh para peserta didik. Masalahnya, banyak peserta didik yang tidak memahami materi. Hal ini misalnya dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan ada banyak peserta didik yang menelpon gurunya untuk menjelaskan lebih lanjut materi yang sudah diberikan secara daring (Efriana, 2021, p. 42). Ketiadaan proses belajar itu juga dapat terjadi pada sesi sinkron maya, baik karena adanya gangguan jaringan internet maupun sebab-sebab yang lain. Selain itu juga terjadi dalam kegiatan ujian yang sejatinya merupakan bagian dari proses belajar. Karena banyaknya kecurangan dalam ujian daring, menunjukkan proses belajar tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, pembelajaran daring hingga taraf tertentu telah membuat peserta didik terasing dari hakikat kemanusiaan sebagai hewan yang berpikir, yaitu proses belajar itu sendiri. Maka, tidak mengherankan apabila sebagai dampaknya, banyak terjadi *learning loss* (Chen et al., 2021) (Engzell et al., 2021).

2. Pendidikan Holistik untuk Mengatasi Masalah Keterasingan

Untuk mengatasi permasalahan keterasingan dengan pelbagai bentuknya sebagaimana dijabarkan di

atas, penulis mengusulkan perlunya kerangka pendidikan yang holistik. Yang penulis maksud dengan pendidikan holistik adalah pendidikan yang memperhatikan, mengakomodir, dan memfasilitasi dimensi-dimensi pendidikan yang beragam. Dalam naskah ini, penulis menyoroti tema modus pembelajaran, pengalaman pembelajaran, aktor pendidikan, dan paradigma pembelajaran sepanjang hayat.

a. Variasi Modus Pembelajaran

Jika teknologi mampu mengubah lanskap banyak aspek kehidupan, misalnya dalam dunia transportasi, maka teknologi tidak dapat sepenuhnya mengubah dunia pendidikan. Betul bahwa di era digital, pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi sebagai sarana yang efektif bagi pengembangan pembelajaran. Akan tetapi, pendidikan tidak dapat hanya dilaksanakan sepenuhnya dengan teknologi. Klaim tersebut didasarkan atas pembelajaran daring di Indonesia yang dilaksanakan sebagai efek pandemi Covid-19. Dari pengalaman selama pandemi, Nadim Makarim mengatakan bahwa teknologi apapun tidak dapat menggantikan peran guru (Makdori, 2020).

Berdasarkan riset, banyak kritikan terhadap tidak efektifnya pembelajaran murni daring. Di antaranya menyatakan bahwa teknologi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran memiliki budaya tersendiri yang tidak selamanya dapat diadaptasi oleh guru dan peserta didik (Sutikna, 2021). Para guru dan peserta didik menemukan kecanggungan teknik

dan fenomenologis ketika berhadapan dengan modus baru pembelajaran daring yang sama sekali berbeda dengan pengalaman belajar luring (Sutikna, 2021, p. 113). Hal tersebut yang mendasari munculnya usulan penerapan pembelajaran campuran (*blended/hybrid learning*) sebagai alternatif solusi bagi pemanfaatan teknologi sekaligus cara menanggulangi dampak negatifnya (Sutikna, 2021).

Sementara itu, riset lain menemukan kekurangan pembelajaran daring model MOOC yang merupakan pembelajaran model bank, seperti dalam pemikiran Freire, dimana terdapat struktur opresif dan hierarkis di ruang kelas (Hernandez, 2018). MOOC juga dikritisi karena banyak berisi narasi tentang keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja sehingga mencederai semangat pembelajaran yang otentik (Hernandez, 2018). Oleh karena itu, Hernandez juga mengusulkan pembelajaran campuran sebagai opsi lain dalam pemanfaatan teknologi (Hernandez, 2018, p. 36). Dalam pembelajaran campuran, peserta didik dapat mempelajari materi melalui media online, kemudian berinteraksi secara luring di dalam kelas.

b. Komprehensi Pengalaman Pembelajaran

Konsep kehadiran sosial (*social presence*) sangat positif dalam mengembangkan pembelajaran daring (Tantri, 2018). Konsep kehadiran sosial sendiri merupakan bagian penting dari skema *Community of Inquiry* (COI) yang dikembangkan oleh D. Randy Garrison. Asumsi dasar dari skema ini adalah bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam

pengalaman pembelajaran seseorang, oleh karena itu pembelajaran harus dibangun berdasarkan pengalaman kolaboratif (Garrison, 2011).

Sederhananya, skema COI ini mengubah paradigma pembelajaran dari yang hanya berorientasi kepada teks, menjadi suatu peristiwa kompleks yang melibatkan banyak aspek dari pengalaman. Terdapat tiga bentuk pengalaman dalam COI, yaitu yang disebut sebagai kehadiran pembelajaran, kehadiran pengajaran dan kehadiran sosial (Garrison, 2011). Dari tiga bentuk pengalaman tersebut, nampaknya yang membedakan ide Garrison dari pembelajaran lain adalah konsep kehadiran sosial.

Menurut Garrison, kehadiran sosial adalah kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi diri dengan komunitas, berkomunikasi dengan penuh makna dalam suatu lingkungan yang terpercaya dan mengembangkan keterampilan inter-personal melalui proyeksi kepribadian individual (Garrison, 2011). Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari definisi itu, yaitu bahwa kehadiran sosial menekankan pentingnya individu untuk merasa nyaman mengekspresikan diri dan juga pentingnya individu untuk dapat bergabung dan berkontribusi dalam suatu komunitas pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran haruslah didesain dengan skema yang kreatif dan tidak melulu dalam bentuk ceramah dan *text-oriented*. Guru atau dosen berperan sebagai

fasilitator yang mendesain agar ketika proses pembelajaran di dalam kelas, para peserta didik memiliki kesempatan untuk menjadi nyaman dalam mengekspresikan diri secara positif dan dapat berkolaborasi bersama teman-temannya. Untuk mewujudkan itu, strategi pembelajaran yang terbaik adalah dengan melalui kelompok-kelompok kecil disamping kelompok kelas besar (Garrison, 2011, p. 353).

Dalam konteks pembelajaran daring, hal ini memungkinkan untuk difasilitasi melalui *grouping*. Contohnya dalam aplikasi Zoom, melalui fitur *breakoutrooms* para peserta didik dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. *Breakoutrooms* ini dapat digunakan untuk banyak tujuan, misalnya untuk berdiskusi memahami teori, mencari referensi, *brainstorming* ide, memecahkan masalah, menyiapkan presentasi, dan aktivitas lainnya. Guru atau dosen bertindak sebagai instruktur dan fasilitator dapat beralih dari satu ruang kecil ke ruang kecil yang lain untuk memantau berlangsungnya pembelajaran oleh peserta didik.

Apa yang ingin penulis sampaikan dari penjabaran di atas adalah bahwa dalam pembelajaran daring diperlukan diversifikasi pengalaman pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu beranjak dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (*teacher-centered learning*) dan mendesain pembelajaran yang lebih memfasilitasi ragam pengalaman pembelajaran yang dimungkinkan. Ini selaras dengan teori dari Garrison bahwa pembelajaran mencakup

tiga aspek pengalaman, yaitu pengalaman pembelajaran-kognitif itu sendiri, pengalaman pengajaran instruksional dan pengalaman sosial-interaksional (Garrison, 2011).

c. Sinergi Tripusat Pendidikan

Pada pembelajaran konvensional, guru disebut sebagai aktor utama pendidikan. Realitanya, guru memang memegang peranan paling besar dalam proses pembelajaran peserta didik. Akan tetapi dalam pembelajaran daring, seperti sudah dibahas sebelumnya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara aktor-aktor yang berada dalam lingkup tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan keterasingan dalam pembelajaran daring. Sinergi antar aktor dalam tripusat pendidikan tersebut berwujud koordinasi dalam memahami tugas dan fungsi, integrasi peran masing-masing aktor, sinkronisasi untuk menyelaraskan tujuan bersama, serta simplifikasi yaitu penyederhanaan program kerja dalam pembelajaran daring (Sukarman, 2020, pp. 125–126).

Pengejawantahan poin-poin dari sinergi di atas diperlukan karena permasalahan dalam pembelajaran daring di antaranya disebabkan oleh tidak adanya sinergi antar aktor dalam tripusat pendidikan. Misalnya adalah tindakan saling melempartanggungjawab antara orang tua dan guru dalam proses pembelajaran. Orang tua tidak boleh menyerahkan pendidikan

sepenuhnya kepada guru tanpa perhatian dan kontrol (Sukarman, 2020, p. 123). Begitu juga sebaliknya, guru tidak bisa melepaskan beban pengajaran daring kepada orang tua saja.

Untuk itu, setiap aktor memiliki peran penting dalam kelancaran proses pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, orang tua memiliki peran besar dalam membantu proses pembelajaran peserta didik agar terlaksana dengan baik. Selain itu lembaga pendidikan dan tenaga pendidik perlu lebih aktif dalam berkoordinasi dengan peserta didik dan orang tua, sedangkan masyarakat perlu mendukung para orang tua dalam membimbing dan memotivasi proses belajar peserta didik (Ulfiaturrohmah et al., 2021).

d. *Lifelong Learning*

Konsekuensi dari karakter disruptif teknologi digital adalah adanya perubahan yang bukan saja terjadi terus menerus dalam kehidupan manusia, tetapi juga terjadi dalam tempo yang cepat. Melihat karakter tersebut, hal ini menunjukkan pendidikan sebagai upaya adaptasi budaya perlu untuk bergerak dengan sangat dinamis pula. Pada hakikatnya, perubahan adalah hal yang lumrah dalam dunia pendidikan, akan tetapi dengan adanya perubahan konstan yang terjadi dengan cepat, pendidikan perlu dilihat dengan horizon yang lebih luas.

Horizon yang lebih utuh dalam melihat pendidikan itu adalah paradigma pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). *Lifelong learning*

melihat bahwa pendidikan tidak terbatas kepada kegiatan belajar mengajar di sekolah formal, tetapi juga usaha dan kesempatan belajar selepas sekolah formal (Aspin & Chapman, 2007, p. 19). *Lifelong learning* dapat berbentuk pembelajaran orang dewasa, pelatihan keterampilan profesional tertentu, dan masih banyak yang lainnya.

Disrupsi teknologi digital yang menyebabkan perubahan besar dalam kebudayaan membuat manusia perlu belajar banyak hal dengan cepat pula. Dalam konteks pendidikan formal, sekolah/universitas kini perlu melengkapi pembelajaran dengan pengalaman berkarir serta melengkapi kurikulum dengan keterampilan vokasi dan keterampilan informal yang dibutuhkan (Braun et al., 2020). Sementara itu untuk menjawab kebutuhan *lifelong learning* dalam masyarakat yang semakin terhubung, desain pembelajaran *lifelong learning* dengan sistem pembelajaran campuran (*hybrid*) dapat dirancang sebagai berikut:

1) Menyediakan fasilitas dan lingkungan pembelajaran *hybrid* untuk publik, misalnya membangun media pembelajaran yang tersedia untuk umum.
2) Menyediakan fasilitas dan lingkungan pembelajaran *hybrid* bersama publik, misalnya melibatkan pelbagai pihak dalam proses pembelajaran.
3) Menyediakan fasilitas dan lingkungan pembelajaran hybrid dalam ruang publik, misalnya memindahkan tempat pembelajaran ke ruang publik dengan

> penyesuaian-penyesuaian tertentu. (Nørgård, 2021)
>
> Secara lebih mendasar, karakter disruptif dari era digital mengembalikan cakupan pendidikan ke lingkup yang sebenarnya, yaitu kepada jangkauan yang tidak terbatas pada batasan pendidikan formal. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan pada peserta didik bahwa dalam konteks zaman digital ini, pendidikan tidak tergantung kepada sekolah/universitas dan tidak terbatas pada jam belajar. Semua orang harus menyadari bahwa setiap saat ia menghadapi hal-hal baru yang perlu ia pelajari dengan segala cara yang bisa ia pelajari.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang memaksa pemberlakuan pembelajaran daring secara masif membawa hal penting bagi tren digitalisasi pembelajaran. Tanpa menafikan manfaatnya, pembelajaran daring ternyata membawa banyak permasalahan bukan saja bagi peserta didik dengan fasilitas daring yang tidak memadai. Dari aspek psikososial, pembelajaran daring membawa meningkatkan timbulnya keterasingan manusia dari subjek dan proses pembelajaran, juga dari orang lain serta nilai kemanusiaan.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, penyelenggaraan pendidikan dengan modus pembelajaran daring perlu dibangun dengan paradigma pendidikan yang utuh, menyeluruh, dan sinergis. Dalam naskah ini, ejawantah hipotesis dari paradigma pendidikan holistik tersebut dibangun dalam bentuk variasi modus pembelajaran, komprehensi pengalaman pembelajaran,

sinergi seluruh aktor dalam tripusat pendidikan, dan paradigma pendidikan sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

Afkar, R., & Yarrow, N. (2021). *Rewrite the Future : How Indonesia's Education System can Overcome the Losses From the COVID-19 Pandemic and Raise Learning Outcomes for All*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/589551630680730676/rewrite-the-future-how-indonesias-education-system-can-overcome-the-losses-from-the-covid-19-pandemic-and-raise-learning-outcomes-for-all

Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2007). Lifelong Learning: Concepts and Conceptions. *Philosophical Perspectives on Lifelong Learning*, 19–38. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6193-6_1

Braun, A., Marz, A., Mertens, F., & Nisser, A. (2020). *Rethinking Education in the Digital Age*. https://doi.org/10.2861/84330

Chen, L.-K., Dorn, E., Sarakatnannis, J., & Wiesinger, A. (2021). *Learning loss is global--and significant*. https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/teacher-survey-learning-loss-is-global-and-significant

Efriana, L. (2021). Problems of Online Learning during Covid-19 Pandemic in EFL Classroom and the Solution | JELITA. *Jelita: Journal of English Language Teaching and Literature*, *2*(1), 38–47. https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/jelita/article

/view/74

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning Loss Due to School Closures During the COVID-19 Pandemic. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *118*(17). https://doi.org/10.1073/PNAS.2022376118/SUPPL_FILE/PNAS.2022376118.SAPP.PDF

Fadhal, S. (2020). Hambatan Komunikasi dan Budaya dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19. In N. Kurnia, N. Lestari, & S. I. Astuti (Eds.), *Kolaborasi Lawan (Hoaks) Covid-19: Kampanye, Riset dan Pengalaman Jepelidi di Tengah Pandemi* (1st ed., pp. 273–290). Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM.

Garrison, D. R. (2011). Communities of Inquiry in Online Learning. *Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition*, 352–355. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-198-8.CH052

Gloria, R., & Benjamin, A. E. (2020). Attitude of Teachers Towards Techno-pedagogy. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, *5*(4), 87–89. https://doi.org/10.29121/IJETMR.V5.I4.2018.212

Haromaini, A. (2020). Manusia Makhluk Pembelajar (Studi Tafsir Tarbawi). *ISLAMIKA*, *12*(1). https://doi.org/10.33592/ISLAMIKA.V12I1.405

Hassan, R. (2020). *The Condition of Digitality : A Post-Modern Marxism for The Practice of Digital Life*. University of Westminster Press.

Hendrawan, D. (2017). Alienasi Pekerja Pada Masyarakat

Kapitalis Menurut Karl Marx | Hendrawan | Arete. *Jurnal FIlsafat Arete*, *6*(1), 13–33. http://journal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/view/1640

Hernandez, S. M. V. (2018). *Pedagogy of The Digitally Oppressed: An Analysis of E-Learning from a Philosophy of Technology Perspective* [University of Twente]. https://essay.utwente.nl/76035/

Kazakova, E. I., Kondrakova, I. E., & Proekt, Y. L. (2021). Transition to emergency distance learning amid COVID-19 pandemic through the lens of students' subjective experience of the transforming university learning environment. *Obrazovanie i Nauka*, *23*(8), 111–146. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2021-8-111-146

Makdori, Y. (2020, November 6). *Mendikbud: Teknologi Tak Mungkin Gantikan Guru | merdeka.com*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/mendikbud-teknologi-tak-mungkin-gantikan-guru.html

Mann, S. J. (2001). Alternative Perspectives on the Student Experience: Alienation and engagement. *Studies in Higher Education*, *26*(1), 7–19. https://doi.org/10.1080/03075070020030689

Mann, S. J. (2006). Alienation in The Learning Environment: A Failure of Community? *Studies in Higher Education*, *30*(1), 43–55. https://doi.org/10.1080/0307507052000307786

Morinaj, J., & Hascher, T. (2019). School Alienation and Student Well-being: A Cross-lagged Longitudinal

Analysis. *European Journal of Psychology of Education*, *34*(2), 273–294. https://doi.org/10.1007/S10212-018-0381-1

Nørgård, R. T. (2021). Theorising Hybrid Lifelong Learning. *British Journal of Educational Technology*, *52*(4), 1709–1723. https://doi.org/10.1111/BJET.13121

Øversveen, E. (2021). Capitalism and alienation: Towards a Marxist Theory of Alienation for The 21st Century: *Https://Doi.Org/10.1177/13684310211021579*. https://doi.org/10.1177/13684310211021579

Saputra, K. D., Sadewa, M. S. D., & Iqmal, M. K. (2020). Pengalaman Alienasi Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring di Prodi PAI UII. In M. N. I. Saleh & A. Zubaidi (Eds.), *Eksistensi Pendidikan Islam: Basis Nilai, Perspektif dan Inovasi Pengembangannya* (1st ed., p. 175). Istana Agency.

Seeman, M. (1959). On The Meaning of Alienation. *American Sociological Review*, *24*(6), 791. https://doi.org/10.2307/2088565

Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2017: Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Isu-Isu Strategis Terkini Di Era Digital*. https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf

Situmorang, B. A. H. (2021). Alienasi dalam Fenomena pembelajaran daring di SMAK St. Albertus Malang (Tinjauan Filsafat Relasionalitas). *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *27*(2), 1–8. https://doi.org/10.33503/PARADIGMA.V27I2.16

Soegeng. (2018). *Filsafat Pendidikan* (iii). Magnum Pustaka Utama.

Sukarman, S. (2020). Sinergitas Peran Tri Pusat Pendidikan dalam Pembelajaran Berbasis Daring di Masa Pandemi Covid-19. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, *11*(2). https://doi.org/10.31942/MGS.V11I2.3940

Sukatin, Annafi'ah, R., Choirunisa, E., Rohim, A., & Sukri, I. (2022). Problematika Orang Tua dalam Membimbing Anak Belajar di Rumah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, *4*(1), 26–46. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/12253

Sutikna, N. (2021). Membincang Pembelajaran Daring dari Sudut Pandang Filsafat Teknologi dan Keterasingan Manusia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, *17*(2), 105–117. https://doi.org/10.20884/1.ACTADIURNA.2021.17.2.4896

Tantri, N. R. (2018). KEHADIRAN SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN DARING BERDASARKAN SUDUT PANDANG PEMBELAJAR PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, *19*(1), 19–30. https://doi.org/10.33830/PTJJ.V19I1.310.2018

Ulfiaturrohmah, N., Hargianti, N. 'Alimatul, & Diantoro, F. (2021). Peran Tri Pusat Pendidikan dalam Menghadapi Problematika Pembelajaran Daring di Daerah 3T. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, *4*(2), 115–131.

https://doi.org/10.33853/ISTIGHNA.V4I2.111

UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* UNESCO. https://books.google.com/books/about/Rethinking_education_towards_a_global_co.html?id=7E79CQAAQBAJ

Wahyudi, A. (2021). Learning Loss during Covid-19 Pandemic in Indonesia and the Strategies to Minimize It | Journal of English Education and Linguistics. *Journal of English Education and Linguistics*, *2*(2), 18–25. https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/je2l/article/view/579

URGENSI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Nanang Nuryanta

PENDAHULUAN

Diskursus kepemimpinan pendidikan merupakan topik menarik dan tidak pernah lekang oleh perjalanan waktu selama praktik pendidikan masih berlangsung. Kepemimpinan pendidikan bukan hanya mengkaji tentang urgensi kepemimpinan dalam konteks institusi pendidikan, melainkan juga mengkaji upaya kualitas pendidikan itu sendiri. Kepemimpinan pendidikan menjadi satu diantara '*key success*' yang mampu menghatarkan proses pencapaian tujuan pendidikan baik pada level institusional maupun level nasional. *Leader* dalam institusi pendidikan akan mampu memainkan peran dalam membangkitkan potensi pendidikan yang ada dalam institusi pendidikannya. Paparan ini akan membahas tentang urgensi kepemimpinan pendidikan, prinsip dan syarat kepemimpinan pendidikan, dan beberapa teori kepemimpinan yang sangat penting bagi seorang *leader* sebagai bekal dalam mengelola institusi pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan merupakan proses menggali dan mengembangkan potensi dari para pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam meraih tujuan pendidikan secara umum. Bahkan ada yang menguatkan definisi di atas, bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan proses kolaborasi dengan

unsur-unsur lain, seperti kepala sekolah, administrator sekolah, dan *stakeholder* lain yang konsen dengan kemajuan sekolah. Kepemimpinan pendidikan melibatkan pekerjaan atau tugas guru dan membimbing para guru dalam memperbaiki proses pendidikan pada lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Peran kepemimpinan pendidikan tidak hanya menyangkut tugas-tugas manajemen dan administrasi, namun lebih dari itu, yaitu melatih para guru agar menguasai dan memperbaiki sistem pendidikan, menciptakan, serta membuat kebijakan pendidikan. Pemimpin pendidikan biasanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau para administrator sekolah, dan bahkan pada jenjang yang lebih tinggi menjadi peran dari ketua departemen atau dekan akademik. Istilah kepemimpinan pendidikan, popular disebut kepemimpinan sekolah (*school leadership*) di Amerika Serikat, sementara di Inggris dikenal dengan istilah manajemen pendidikan (*educational management*). Pada perspektif bisnis pendidikan, kepemimpinan pendidikan merupakan sebuah bentuk dari manajemen akademik dan penjaminan mutu pendidikan.

Seorang *leader* pendidikan berperan sebagai pembimbing atau pengarah dan mempengaruhi para guru pada sebuah setting administratif. Pada beberapa kasus, peran pemimpin menjadi pelaksana eksekutif yang bertanggung jawab menemukan berbagai cara untuk memperbaiki proses mendidik para peserta didik dan proses pendidikan secara lebih luas. Tujuan utama kepemimpinan pendidikan adalah menjamin kesuksesan akademik melalui proses, materi, dan perbaikan pelatihan. Tujuan ini biasanya diraih melalui keterlibatan dan kerjasama dengan pihak lain, seperti

para guru, orang tua, peserta didik, pengambil kebijakan publik, dan masyarakat. Selain itu, tujuan dari kepemimpinan pendidikan adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan juga sistem pendidikan itu sendiri. Tujuan kepemimpinan pendidikan juga menjadi medium yang efektif dalam membentuk kultur akademik (*academic culture*) yang di dalamnya berisi nilai-nilai dan keyakinan dari institusi yang sekaligus menjadi modal dalam membentuk keunikan dan meraih keunggulan dibanding institusi lainnya.

Terkait dengan tujuan pendidikan maka ada dua konteks yang harus dikaji, yaitu konteks keindonesian berupa tujuan pendidikan nasional dan konteks pendidikan Islam. Pada konteks pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, tujuan yang hendak diraih melalui kepemimpinan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dapat dicermati dari paparan para pakar pendidikan Islam, seperti Al Ghazali, Ahmad D. Marimba dan Athiyah Al Abrasy.

Menurut al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ahmad D.

Marimba, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian muslim (*insan kamil*). Menurut M Athiyah al-Abrasy, tujuan utama pendidikan Islam adalah terbentuknya "*Akhlakul Karimah*" yang dijabarkan dalam bentuk tujuan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut: (a) untuk membantu pembentukan akhlak mulia, (b) pendidikan dan pengajaran bukanlah sekedar memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa *fadhilah* (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi (adab), mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas, dan jujur; (3) persiapan untuk dunia dan akhirat; (4) pendidikan Islam mempunyai dua orientasi yang seimbang, yaitu memberi persiapan bagi anak didik untuk dapat menjalani kehidupan di dunia dan juga kehidupannya di akhirat; (5) persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan; (6) pendidikan agama Islam tidak bersifat spiritual saja, ia juga memperhatikan kemanfaatan duniawi yang dapat diambil oleh peserta didik dari pendidikannya; (7) menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada peserta didik dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui (*curiosity*) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sebagai sekedar ilmu. Dengan demikian pendidikan agama Islam tidak hanya memperhatikan pendidikan agama dan akhlak, tapi juga memupuk perhatian kepada sains, sastra, seni, dan lain sebagainya, meskipun tanpa unsur-unsur keagamaan didalamnya; dan (8) menyiapkan peserta didik dari segi profesinal, teknis, dan dunia kerja supaya ia dapat menguasai profesi tertentu.

Sementara itu, mengenai kualitas dalam sistem pendidikan, untuk menilai sistem pendidikan negara,

maka kita dapat membandingkannya dengan pencapaian negara-negara lain di sekitar kita. Berikut sajian tentang ranking sistem pendidikan nasional jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

a. Singapura, pada tahun 20220 menempati nomor 19 dari 73 negara. Tahun 2021, menduduki ranking 21 seluruh dunia.
b. Malaysia, pada tahun 2020 menempati ranking 39 dari 73 negara. Tahun 2021, menduduki ranking 38 seluruh dunia.
c. Thailand, pada tahun 2021 menduduki peringkat 46 dari 73 negara.
d. Indonesia, pada tahun 2020 berada pada peringkat 56 dari 73 negara, dan tahun 2021 pada peringkat 55 dari 73 negara.
e. Filipina, pada tahun 2020 menduduki peringkat 52 dari 73, sedangkan tahun 2021 menduduki peringkat 56 dari 73 negara. (*Indonesia Urutan 55, Sistem Pendidikan Di Asia Tahun 2021 – Madista.Id*, n.d.)

Capaian kualitas sistem pendidikan nasional Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan perolehan ranking Indonesia jika ditinjau dari *Human Development Index (HDI).* Indonesia hanya menempati posisi 101 dibanding 189 negara di dunia. Posisi Indonesia tidak terlepas dari kriteria yang digunakan, yaitu *Gross National Product*, kesehatan, dan pendidikan. Namun jika dibandingkan dengan ranking negara-negara Asean, Indonesia berada pada peringkat kelima di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Mencermati kualitas negara dan sistem pendidikan negara kita, maka sudah menjadi keniscayaan jika kajian tentang kepemimpinan pendidikan perlu digalakkan agar menggugah

semangat masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam perbaikan kualitas pendidikan.

2. Hubungan antara Kepemimpinan Pendidikan dengan *Edupreneurship*

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa orientasi dari kepemimpinan pendidikan adalah membekali para praktisi pendidikan, khususnya kepala sekolah, para administrator, para guru, orang tua, dan peserta didik dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Oleh karena itu, untuk menopang usaha tersebut memerlukan kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang berkompeten agar tujuan dapat diraih secara optimal. Pada istilah yang sederhana, *edupreneurship* adalah menciptakan atau membangun kapasitas pembelajaran dengan menggerakkan perubahan dan reformasi pembelajaran. *Edupreneurship* dapat dimaknai sebagai upaya membagun program pembalajaran yang unik, pengembangan *software e-learning* dan aplikasi, atau bahkan membuat *gamification* pembelajaran yang berisi konten pembelajaran.

Edupreneurship merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *education* dan *entrepreneurship*. Dua kata ini dijadikan satu dengan maksud untuk menciptakan makna baru. Adapun secara harfiah, dalam English –Indonesia Dictionary karya John M. Echols dan Hassan Shadily, makna dari *education* adalah pendidikan. Sedangkan *entrepreneurship* secara harfiah memiliki makna kewirausahaan. Pada kata *entrepreneurship* di sini terdapat beberapa hal penting yang dapat kita ketahui, yaitu *creativity, innovation (*pembaharuan daya cipta), *opportunity creation* (kesempatan berkreasi), dan *calculated risk talking* (perhitungan resiko yang diambil).

Edupreneurship merupakan program pelatihan bagaimana mengenalkan konsep-konsep *entrepeneurship* yang dilengkapi dengan berbagai contoh aplikasinya melalui proses pendidikan. *Edupreneurship* berhubungan dengan upaya membangkitkan potensi peserta didik terutama terkait dengan daya cipta (kreativitas dan inovasi), kesempatan berkreasi, dan keberanian dalam mengambil resiko yang didukung oleh pemanfaatan teknologi.

Dengan memahami konsep *edupreneurship*, maka dalam konteks kepemimpinan pendidikan, paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tujuan pendidikan dapat diwujudkan oleh seorang leader, yaitu:

a. *Desire for responsibility*; bertanggung jawab secara pribadi atas hasil usaha yang dilakukan.
b. *Tolerance for ambiguity*; mampu menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan *stakeholder*.
c. *Vision*; memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas kedepan yang harus dicapai secara terukur.
d. *Tolerance for failurer*; pekerja keras meskpiun harus mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga.
e. *Internal locus of control*; memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari dalam dirinya sendiri.
f. *Continuous improvement*; bersikap positif, menganggap pengalaman merupakan faktor yang penting untuk perbaikan berkelanjutan.

Pekerja profesional bidang kepemimpinan pendidikan fokus pada perbaikan program pendidikan. Mereka mengelola para guru dan staf, menyiapkan anggaran, merancang standar kurikulum, serta merancang kebijakan sekolah secara lebih luas.

Selain itu, para pekerja profesional juga harus bekerja pada upaya membangun tim atau merestrukturisasi organisasi untuk mempengaruhi perubahan yang dibutuhkan. Beberapa pemimpin pendidikan dilibatkan dalam pengembangan kebijakan atau mereformasi isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dengan demikian kajian kepemimpinan pendidikan dipusatkan pada beberapa prinsip kunci pokok, yaitu:

Pertama, kepemimpinan pendidikan menciptakan sebuah visi kesuksesan akademik bagi semua peserta didik. Visi ini sangat penting karena selalu memiliki kesenjangan historis diantara peserta didik pada tingkat sosio-ekonomi yang berbeda dan tinggi rendahnya capaian/prestasi peserta didik.

Kedua, kepemimpinan pendidikan berusaha untuk memelihara kenyamanan dan keamanan lingkungan pembelajaran. Karena itu, sebuah lingkungan sekolah yang sehat menjadi kunci untuk menyiapkan situasi yang nyaman, rapi, dan ruang kelas yang tertata.

Ketiga, kepemimpinan pendidikan mendelegasikan tanggung jawab kepada yang lain. Hal ini mengandung makna bahwa para guru, orang tua, dan bahkan peserta didik diusahakan mengambil tanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya di sekolah.

Keempat, metode-metode pengajaran dan isi kurikulum harus diperbaiki secara terus menerus.

Kelima, lapangan pendidikan harus meminjam dan menyesuaikan dengan peralatan, proses, dan teknik-teknik manajemen modern.

3. Tinjauan tentang Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebuah topik yang banyak didiskusikan dan dibahas dalam ilmu-ilmu sosial. Pada literatur yang lain, kepemimpinan diartikan sebagai *"Leadership is one of the most discussed and debated topics in the social sciences"*. Sementara itu definisi kepemimpinan dari beberapa pakar dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kepemimpinan adalah proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan dan khususnya perilaku orang lain. (*Steven J. Ott*)
b. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. (*Koontz & O'Donnel*)
c. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. (*Davis, 1977*)
d. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. (*George R. Terry*).
e. Kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. (*John Pfiffner*). (Nuryanta, 2017)

Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kepemimpinan memiliki beberapa kata kunci, yaitu berupa konsep relasi, ada upaya mempengaruhi orang lain, sebagai proses, dan ada tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Selain itu kepempimpinan juga diartikan sebagai "*leadership is an*

influence relationship among leaders and followers who intend real changes that reflect their shared purpose".

Menurut Kouzes dalam bukunya "*The Leadership Challange*", kepemimpinan adalah dari keahlian dan praktik yang dapat dikenali, yang terdapat pada diri setiap orang, bukan hanya pada sedikit pria dan wanita yang karismatik. Pada buku tersebut juga menyebutkan bahwa *leadership is an major way in which people change the minds of others and move organizations forward to accomplish identified goals* (Kouzes & Posner, 2007). Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam konsep kepemimpinan terdapat perubahan *mind* dan *paradigm* yang mampu menggerakkan orang dan organisasi pada suatu tujuan yang diharapkan.

Sejak dulu sampai sekarang sudah banyak teori kepemimpinan yang membahas kepemimpinan dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi yang paling banyak membahasanya adalah disiplin ilmu psikologi. Beberapa teori yang lazim digunakan untuk membahas kepemimpinan, yaitu:

1. Great Man Theory
2. Trait Theory
3. Behavioral Theories, meliputi: The Managerial Grid dan Theory X and Y
4. Participative Leadership: Lewin's Leadership Style
5. Situational Leadership
6. Contingency Theory
7. Transactional Leadership
8. Transformational Leadership
9. Servant Leadership
10. Five Stars Leadership
11. Prophetic Leadership
12. Authentic Leadership

1. *Great Man Theory*

Teori Sifat/*Great Man Theory* mengasumsikan bahwa *leader* berbeda dari rata-rata person dalam hal sifat kepribadian seperti kecerdasan, ketabahan/ketetapan hati, dan ambisi. Setiap orang dilahirkan membawa sifat keturunan, beberapa sifat secara khusus sesuai untuk kepemimpinan, sehingga orang akan menjadi pemimpin yang baik atau sebaliknya berhubungan dengan sifat yang dimilikinya. Teori ini dapat menumbuhkan pemimpin besar (*Great Man*). Stodgill's sebagaimana dikutip IAAP dapat menggambarkan hubungan antara sifat dengan *skills* seperti tabel berikut:

Tabel 1. Stodgill's *descriptions* (*Leadership Theories*, n.d.)

Traits	***Skills***
Adaptable to situations	*Clever (intelligent)*
Alert to social environment	*Conceptually skilled*
Ambitious and achievement-orientated	*Creative*
Assertive	*Diplomatic and tactful*
Cooperative	*Fluent in speaking*
Decisive	*Knowledgeable about group tasks*

Dependable	*Organized (administrative ability)*
Dominant (desire influent others)	*Persuasive*
Energetic (high activity level)	*Socially skilled*
Persistent	
Self-confident	
Tolerant of stress	
Willing to assume responsibility	

2. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Teori perilaku mengasumsikan bahwa pemimpin dibentuk, bukan hanya dilahirkan. Kepemimpinan yang sukses didasarkan pada perilaku yang ditandai dan dapat dipelajari. Teori perilaku tidak melihat sifat bawaan lahir, tetapi melihat apa yang pemimpin lakukan. Kesuksesan dapat ditemukan dalam bentuk tindakan yang dapat digambarkan. Implikasinya kemampuan kepemimpinan dapat dipelajari. Menurut teori ini dua tipe umum perilaku yang dapat ditunjukkan pemimpin, yaitu konsen pada orang dan konsen pada produksi. Penelitian awal pada perilaku pemimpin mengindikasikan bahwa karena pandangan pemimpin terjadi peningkatan perpindahan pekerja dan penurunan ketidakhadiran, selain itu karena

orientasi tugas pemimpin akan meningkatkan lahirnya performa pekerja.

3. Teori *Managerial Grid*

Ada hubungan yang signifikan antara perhatian pada orang dan hasil (tugas) oleh pemimpin dalam manajemen. Rendah, sedang, dan tingginya hasil sangat tergantung dari perhatian pemimpin.

Tabel 2. Teori X dan teori Y dari McGregor

Theory X Leaders Assume:	***Theory Y Leaders Assume:***
1. Employees inherently dislike work and whenever possible, will attempt to avoid it	1) *Employees can view work as being as natural as rest or play*
2) *Because employee dislike work, they must be coerced, controlled, and threatened with punishment to achieve desired goals*	*2. Man and women will exercise self-direction and self control if they are committed to the objectives.*
3) *Employee will shirk responsibilities and seek formal direction whenever possible*	*3. The average persons can learn to accept, even seek, responsibility*
4. Most workers place security above all other factors associated with work	*4. The ability to make good decisions is widely dispersed throughout the population and is not*

and will display little ambition	*necessarily the sole province of managers*

4) *Participative Leadership*

Teori ini mengasumsikan bahwa: (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan meningkatkan pemahaman isu-isu dalam mengatasi masalah; (2) orang akan lebih komitmen berbuat dimana mereka punya keterlibatan dalam pengambilan keputusan; (3) orang akan sedikit kompetitif dan lebih kolaboratif ketika mereka akan bekerja pada tujuan yang sama; (4) ketika orang membuat keputusan bersama, komitmen sosial pada orang lain lebih besar dan kemudian meningkatkan komitmen mereka pada keputusan; (5) beberapa orang berbagi bersama membuat keputusan yang lebih baik daripada hanya sendirian. Seorang pemimpin partisipatif, lebih baik dari keputusan otoriter. Pemimpin partisipatif akan mencari untuk melibatkan orang lain dalam proses, memungkinkan melibatkan staff/bawahan, kelompok, superior, dan stakeholder lainnya. Kebanyakan aktivitas partistipatif adalah dengan membentuk *team*.

Tabel 3. Kontinum gaya partisipatori

< Not participate				***Highly participative >***
Autocratic decision by leader	*Leaders propose decision, listen to feedback,*	*Team proposed decision, leader has*	*Joint decision with team as equal*	*Full delegation of decision to team*

	than decides	*final decision*		

Pendekatan pada teori ini sering disebut dengan konsultasi, penguatan, bergabung membuat keputusan, kepemimpinan demokratik, *Management by Objectives (MBO),* dan *sharing* kekuatan. Kepemimpinan partisipatif dapat menjadi sesuatu yang pura-pura ketika meminta pendapat, namun kemudian seolah tidak mengetahui terkait hal tersebut. Situasi ini seperti membawa sinisme dan perasaan berdusta. Salah satu tokoh yang membahas terkait kepemimpinan partisipatif adalah Lewin. Ia mencetuskan tiga gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu:

a. Otokratis. Pada gaya otokratis, pemimpin membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Seorang yang bekerja dengan gaya otokratis tidak membutuhkan masukan pada keputusan. Keputusan tidak dapat berubah sebagai hasil masukan, sehingga motivasi orang untuk mengatasi tindakan selanjutnya tidak terpengaruh walaupun mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

b. Demokratis. Pada gaya demokratik, pemimpin melibatkan orang dalam pengambilan keputusan. Meskipun proses final keputusan ada pada pemimpin, namun mereka memfasilitasi konsensus dalam kelompok. Gaya demokratis mendapat masalah ketika ada pandangan yang sangat luas dan tidak ada

cara yang jelas untuk menentukan keputusan akhir.

c. Laissez Faire. Teori ini meminimasir keterlibatan pemimpin dalam pengambilan keputusan. Laissez Faire berjalan dengan baik ketika orang kapabel dan termotivasi dalam membuat keputusan. Selain itu dalam organisasi atau lembaga terkait tidak ada persyaratan untuk sebuah pusat koordinasi.

Akhirnya Lewin menyimpulkan bahwa yang paling efektif adalah gaya demokratis, gaya eksesif otokratis mendorong revolusi, gaya Laissez Faire menghasilkan pola kerja yang kurang koheren dan berusaha mengurangi energi.

5) Kepemimpinan Situasional

Teori ini mengasumsikan bahwa tindakan yang paling baik dari pemimpin tergantung pada lingkup faktor situasi. Ketika sebuah keputusan dibutuhkan, seorang pemimpin yang efektif tidak hanya terfokus pada satu gaya saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan situasional ada tiga kekuatan, yaitu kekuatan situasi, kekuatan pengikut dan kekuatan pemimpin (Kouzes & Posner, 2007).

6) Kontingensi Versus Teori Situasional

Kedua teori ini mengasumsikan tidak ada yang memiliki cara yang paling sederhana. Teori situasional cenderung lebih memfokuskan pada perilaku seorang pemimpin harus mengadopsi faktor situasi yang diterima (tentang perilaku pengikut). Sementara teori kontingensi

mengambil pandangan yang lebih luas bahwa termasuk faktor kontingen tentang kemampuan pemimpin dan variabel lain di dalam situasi. Pemimpin yang sangat efektif pada satu tempat dan waktu mungkin menjadi tidak sukses juga.

7) Kepemimpinan Transaksional.

Teori berasumsi bahwa (1) seseorang termotivasi oleh *reward* dan *punishment*; (2) sistem sosial berjalan dengan baik dengan rantai komando yang jelas; (3) ketika orang telah menyetujui akan melakukan pekerjaan, bagian dari kesepakatannya adalah mereka menyerahkan semua kewenangan kepada manajernya; (4) tujuan utama seorang bawahan adalah mengerjakan apa yang dikatakan manajernya. Gaya kepemimpinan transaksional bekerja melalui penciptaan strktur yang jelas (persyaratan kerja jelas, struktur *reward* jelas, *punishment* tidak hanya disebutkan tetapi harus juga dipahami, dan sistem formal kedisiplinan dengan biasa dijalankan); (5) negosiasi kontrak dimana pegawai diberikan gaji dan keuntungan lain dan perusahaan mendapat kewenangan di atas pegawai.

Pertimbangan-pertimbangan transaksional menyarankan pemimpin transaksi-onal sering menggunakan *management by expectation*, bekerja dengan prinsip bahwa sesuatu dijalankan sebagai harapan. Benar-benar menguatkan prinsip "*rational man*" dan reaksi pada *reward* dan *punishment*. Transaksional dan transformasional menyatakan bahwa pemimpin transaksional mengikutsertakan orang lain pada aktifitas timbal balik bergantian

satu dengan yang lain (partisipatoris/dinamis), sementara itu pemimpin transformasional meneliti dan mencari kebutuhan dan motivasi orang lain selama mencari sebuah agenda kebutuhan yang tinggi.

8) Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional mengasumsikan bahwa orang akan mengikuti seseorang yang menginspirasi mereka. Seseorang dengan visi dan gairahnya akan meraih sesuatu yang besar. Cara untuk mendapatkan sesuatu yang akan dikerjakan, disuntikkan oleh antusias dan energi. Komponen-komponen kepemimpinan transformasional adalah: (1) mengembangkan visi; (2) menemukan cara; dan (3) menguasai biaya. Satu metode yang pemimpin transformasional gunakan untuk melanjutkan motivasi adalah menggunakan upacara, ritual, dan simbol budaya yang lain. Perubahan kecil mendapat keuntungan besar dengan menciptakan budaya. Secara keseluruhan, pemimpin tarnsformasional membuat keseimbangan perhatian antara tindakan yang menciptakan kemajuan dan kondisi mental pengikutnya. Kepemimpinan Meta mendorong bekerja meliputi organisasi.

Kouzes dan Posner menginventarisir karakteristik umum seorang pemimpin dan menjadi atribut kepemimpinan yaitu: (a) kejujuran; (b) berpandangan ke depan; (c) kompeten; (d) inspiratif; (e) kecerdasan; (f) tanpa prasangka (*fair-minded*); (g) berpandangan luas; (h) suportif; (i) terus terang/terbuka; (j)

teguh pendirian; (k) kooperatif; (l) menentukan; (m) imajinatif; (n) ambisius; (o) berani; (p) mengemong; (q) dewasa/matang; (r) loyal; (s) kontrol diri; dan (t) independen/bebas (Kouzes & Posner, 2007). Adapun kunci kesuksesan kepemimpinan adalah (a) memiliki model cara; (b) menginspirasi berbagi visi; (c) tantangan proses; (d) meyakinkan orang lain bertindak; dan (e) besar hati.

9) *Servant Leadership*

Servant leadership is considered some to be more of a life-style than a leadership style. Sementara itu Laub menyebutkan bahwa: "*Servant leadership is more than a style of leadership. It is different way of thinking about the purpose of leadership, the true role of a leader, and the potential of those being led* (Laub, 1999). Dengan demikian *servant leadership* merupakan sebuah pemahaman dan praktik kepemimpinan yang menempatkan memimpin melebihi kepentingan diri dari pemimpin.

Kalau kita melihat ke belakang sesungguhnya *servant leadership* ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. bersama para sahabat. Bahkan dalam satu hadis beliau pernah menyampaikan bahwa "*pemimpin adalah melayani*". Rasulullah Saw. sama sekali tidak mementingkan dirinya, namun beliau lebih mementingkan umatnya. Beliau mencontohkan banyak hal termasuk dalam konteks rumah tangga, di masyarakat, bahkan sampai pada level pemerintahan. Dalam praktik kepemimpinan, beliau sering meminta pertimbangan dan bermusyawarah dengan para sahabat sebelum memutuskan suatu perkara. Padahal apabila

dilihat dari kapasitas beliau, Nabi memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan terbaik karena senatiasa dibimbing oleh Allah Swt. Bahkan Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah menyampaikan dalam suatu *atsar* bahwa "tidak *pernah aku lihat orang yang paling banyak bermusyawarah kecuali Rasulullah Saw.*". Kunci kepemimpinan Rasulullah Saw. adalah kebersihan hati dan memiliki prinsip melayani bukan hanya pekerjaan fisik-lahiriah tetapi lebih pada pekerjaan hati.

Kembali pada pembicaraan sebelumnya, *servant leadership* memiliki 7 (tujuh) ciri antara lain: *(a) empowering and developing others; (b) vulnerability/humility; (c) serving others; (d) open, participatory leadership; (e) visionary leadership; (f) courageous leadership (integrity/authenticity); and inspiring leadership.*

10) *Five Star Leadership*

Kepemimpinan Bintang 5 adalah sebuah konsep kepemimpinan yang dipopulerkan oleh Aan Komariah. Kepemimpinan ini memadukan beberapa konsep kepemimpinan antara lain: *servant leadership, transformational leadership*, *constructivistic leadership*, didukung dengan *value,* moral, *spiritual based, vision* dan *heart*. Kembali kepada telaah sebelumnya, sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Aan Komariah adalah bentuk kepemimpinan dari Rasulullah Saw.

11) *Prophetic Leadership*

Prophetic leadership sesungguhnya merupakan model kepemimpinan Rasulullah Saw. yang paling holistik dibanding dengan

konsep kepemimpinan lainnya. Hanya saja konsep ini masih sangat terbatas di kalangan muslim. Padahal kepemimpinan model Rasulullah Saw telah diakui oleh Michael H. Hart yang mengarang buku "100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah", yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh rangking satu (Hart, 2016). Dalam kurun waktu yang hanya 11 tahun, beliau mampu melakukan perubahan peradaban secara spektakuler.

Mursidi menegaskan bahwa berdasarkan implementasi kepempimpinan profetik di Universitas Muhammadiyah Malang bahwa gaya kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Malang berisikan pemahaman ideologi Muhammadiyah dan pola Rasulullah dengan semua nilainya, yaitu: *sidiq, tabligh, amanah,* dan *fatonah* (Mursidi et al., 2017). Ideologi Muhammadiyah mengarah pada sistem keyakinan dan kehidupan ideal Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam dalam merealisasikan masyarakat Islam yang nyata. Bahkan M. Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa kepemimpinan profetik yang didasari oleh sifat kenabian Rasulullah (*siddiq, amanah, tabligh, fathanah*) sangat relevan dan harus menjadi prinsip dalam kepemimpinan pendidikan Islam sebagai pengemban misi sosial profetik (Dewantoro, 2020). Ia menyebut terdapat tiga muatan utama yang mendasari kepemimpinan profetik, hal tersebut didasarkan pada QS Ali Imran [3]: 110.

Pertama, humanisasi, yang mewujud dalam visi sekolah dalam pencerdasan profetik peserta didiknya yang langsung diawasi kepala sekolah dan wali murid dalam mengemansipasi peserta didik dengan tujuan untuk mencerdaskan mereka. Sehingga peserta didik dapat memahami dan melaksanakan pendidikan profetik dan memahami tujuan hidup yang sejati sesuai fitrah kemanusiaan dalam sehari-harinya. Upaya humanisasi dalam bentuk pembiasaan hidup sehari-hari, sebagai misi pencerdasan, dengan melibatkan peserta didik untuk memahami sifat profetik, sehingga merasa sifat-sifat wajib Nabi itu menjadi miliknya dan tertanam dalam diri peserta didik

Kedua, liberasi yang mewujud dalam upaya pendidikan profetik membebaskan peserta didik dari membentenginya dari sifat-sifat mustahil Nabi (*kizib, kitman, khiayanat, dan jahil*) melalui program pendidikan profetik. Liberasi dari membebaskan sifat-sifat mustahil Nabi dengan cara mengurangi dan menghapus sifat-sifat itu sedikit demi sedikit. Visi ini menjadi menjadi sumber energi bagi lembaga pendidikan Muhammmadiyah, khususnya dalam perjuangan kepemimpinan kepala sekolah transformatif profetik dalam mendidik peserta didik melalui pengembangan program kurikulum di lembaga atau sekolah Muhammadiyah

Ketiga, transendensi yang menjadi fondasi bagi humanisasi dan liberasi. Mewujud dalam semangat meningkatkan amal salih, rajin mengerjakan perintah agama dan semangat

dalam belajar bagi peserta, prestasi yang meningkat sebagaimana yang tercermin dalam visi misi kepemimpinannya. Selain dibalut dalam semangat kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meniatkan pengabdian mereka di sekolah sebagai ibadah untuk mencari rida Allah, bukan sebagai mata pencarian atau sumber penghasilan karena "rezeki sudah diatur oleh Allah" dan "tugas manusia hanya mengabdi kepada-Nya".

12) *Authentic Leadership*

Kepemimpinan autentik adalah sebuah konsep kepemimpinan yang dikembangkan oleh Avolio dan Gardner. Secara umum *authentic leadersip* adalah "*Authentic leadership is one of several recent leadership theories related to positive psychology. It has been related to theories such as ethical leadership and transformational leadership". Within this frame*, *authentic leadership* "*focuses on the formation of authentic relationships between the leader and followers that are characterized by trust and integrity. Authentic leadership is a growing field and will continue to receive more attention as society continues to call for more ethical and inspirational leaders".*

Authentic leadership is defined "as a process that draws from both positive psychological capacities and a highly developed organizational context to foster greater self-awareness and self-regulated positive behaviors on the part of leaders and associates, producing positive self-development in each". Characteristics of these leaders are that they know what they believe in, display transparency and consistency with their values, employ ethical reasoning and actions, focus on developing positive

psychological states, and are widely known for and respected for their integrity.

Avolio dan Gardner mendefinisikan kepemimpinan autentik sebagai berikut: *We agree that authentic leadership development involves complex processes, and that it is unlikely to be achieved simply through a training program. As noted above, we do not view authentic leadership development as a program, unless we were to broadly label it as blife's program. To the contrary, authentic leadership development involves ongoing processes whereby leaders and followers gain self-awareness and establish open, transparent, trusting and genuine relationships, which in part may be shaped and impacted by planned interventions such as training.*

Sementara itu menurut Bill George "*Authentic leaders genuinely desire to serve others through their leadership. They are more interested in empowering the people they lead to make a difference than they are in power, money, or prestige for themselves. They are as guided by qualities of the heart, by passion and compassion, as they are by qualities of the mind*" (Pemimpin autentik adalah yang benar-benar ingin melayani dengan kepemimpinannya. Pemimpin ini lebih tertarik memberdayakan manusia daripada kekuasaan, uang dan prestasi untuk dirinya sendiri. Pemimpin autentik senantiasa dipandu oleh kualitas hati, kegemaran dan kasih sayang serta kualitas fikiran) (George, 2003).

Kepemimpinan autentik memiliki 5 (lima) karakter, yaitu: *(a) a higher ethical capacity; (b) honesty and integrity; (c) humility and modesty; and (d)*

the ability to judge ethical dilemmas and other issues from multiple perspectives.

4. Kepemimpinan menurut Perspektif Islam

Menurut pandangan Islam, kepemimpinan menjadi bagian fitrah manusia, karena manusia lahir telah membawa potensi sebagai pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses berupa aktivitas atau kegiatan menuntun, membimbing, memandu, mengajak, dan mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan yang diridai oleh Allah Swt (Nuryanta, 2017). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak menghalalkan segala cara, akan tetapi harus dalam koridor yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kepemimpinan mengacu pada dua fungsi ganda, yaitu *khalifah* (wakil Allah) dan '*abdullah* (hamba Allah).

Islam menggunakan beberapa istilah dalam menyebut kepemimpinan, yaitu: (1) Khalifah, sebagaimana tersebut dalam QS. 2:30 dan 6:165; (2) *Auliya* (jamak dari kata wali), sebagaimana termaktub dalam QS. 4:144; 5:51 dan 55-57; 9:23; (3) *Ulil Amri*, sebagaimana terdapat dalam QS. 4:59; (4) *Amir*, sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari; (5) *Ra'in*, sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari; dan (6) *Imam*. Menurut Ulama Sunni, yaitu Syeikh Abu Zahra, khalifah dan *imamah* disamakan artinya. Alasan ini didasarkan pada argumen yang menyatakan bahwa *khalifah* adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan Rasulullah Saw. Khalifah merupakan imam yang patut ditaati. Ulama Syiah membedakan pengertian khalifah dan *imamah*. Berdasarkan fakta sejarah pasca Rasulullah Saw. meninggal, kelompok Syiah sepakat bahwa imam dan

khalifah sama pengertiannya ketika Ali Ibn Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin. Namun sebelum Ali menjadi pemimpin, mereka membedakan pengertian imam dan khalifah. Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah *khalifah*, tetapi bukan *imam*. Kaum Sunni berpendapat untuk mengangkat seorang khalifah haruslah dilakukan dengan musyawarah. Sedang Kaun Syiah memandang pengangkatan pemimpin setelah Rasulullah Saw. wafat adalah melalui ketetapan atau penunjukan Allah melalui Rasul-Nya, yaitu Ali ibn Abi Thalib beserta keturunan Fatimah Az-Zahra.

Dengan demikian sangat jelas bahwa kepemimpinan mendapat perhatian yang khusus dalam Islam. Kepemimpinan menjadi penentu bagi keberlangsungan risalah Islam. Oleh karena itu, pemimpin memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam membawa keselamatan umat, terutama generasi berikutnya. Pun dalam konteks pendidikan, keberadaan kepemimpinan pendidikan yang harus sesuai dengan prinsip ajaran Islam menjadi masalah yang substansial dan krusial bagi setiap muslim dimanapun berada dan sampai kapanpun.

5. Kepemimpinan Perguruan Tinggi

Bentuk kepemimpinan perguruan tinggi yang banyak digunakan adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menunjuk pada proses membangun komitmen terhadap sasaran organisasi dan memberi kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut (Gumilar Eka Prihatin & Abstrak, 2013). Teori transformasional mempelajari juga bagaimana para pemimpin mengubah budaya dan struktur organisasi agar lebih konsisten dengan strategi-strategi manajemen untuk mencapai sasaran organisasional.

Bahkan James MacGregor Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimimpin transformasional harus mampu mengartikulasikan visi organisasi dan bawahan harus mengakui hal tersebut.

Lebih lanjut, Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya the Four I's (Gumilar Eka Prihatin & Abstrak, 2013). Empat dimensi tersebut yaitu:

1) Dimensi yang pertama disebut *idealized influence* (pengaruh ideal). Dimensi pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, dan sekaligus mempercayainya.

2) Dimensi yang kedua yaitu sebagai *inspirational motivation* (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui pertumbuhan antusiasme dan optimisme.

3) Dimensi yang ketiga disebut *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual). Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberi solusi kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahannya, dan

memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

4) Dimensi yang terakhir dalam menguraikan karakteristik pemimpin disebut *individualized consideration* (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan dan secara khusus.

Demikian beberapa teori kepemimpinan pendidikan yang sering menjadi rujukan bagi praktisi pendidikan, khususnya pemimpin pendidikan dalam mengimplementasikan model atau gaya kepemimpinan yang akan dipilih sebagai alternatif dalam mengemban amanah di institusi pendidikan. Meskipun harus disadari bahwa tidak ada satu model tunggal yang terbaik untuk semua situasi, tetapi dengan adanya penjelasan teori-teori ini, diharapkan para pemimpin pendidikan dapat memilih satu model atau gaya kepemimpinan utama yang kemudian dikombinasikan dengan model atau gaya lainnya. Misalnya, seorang *leader* berorientasi pada penegakan aturan atau prinsip tertentu maka dapat memilih model kepemimpinan otoriter untuk kurun waktu tertentu. Setelah orientasinya mampu diwujudkan maka pemimpin tersebut menerapkan model kepemimpinan partisipatif dan *servant leadership* agar pengikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan mengimplementasikan nilai-nilai organisasi kepada pengikut secara sekaligus.

Hubungan antara Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan, dan Kepemimpinan Pendidikan

Terdapat hubungan yang sangat erat antara manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan. Antara manajemen dengan kepemimpinan, hubungannya sangat jelas bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan dan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Dengan demikian, sesungguhnya inti dari keduanya berujung pada fokus yang sama yaitu proses pengambilan keputusan. Adapun keduanya sangat memerlukan administrasi pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan secara efektif.

Manajemen pendidikan adalah sebuah bidang yang digunakan untuk mengaplikasikan manajemen. Manajemen pendidikan menunjuk pada penerapan teori dan praktik manajemen pada bidang pendidikan dan institusi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses memperoleh dan mengalokasikan berbagai sumber untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Ibrahim dan Mazim yang mengutip pendapat Giovanni menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan sebagai tindakan seseorang dalam mengambil inisiatif untuk memfasilitasi kondisi yang menyertai penerapan perubahan pada pengajaran dan pembelajaran. Lebih jelasnya bahwa manejemen menyiapkan struktur atau sistemnya, kepemimpinan menyiapkan orang, dan administrasi menyediakan fasilitas pendukung bagi keduanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi manajemen pendidikan mengarah pada lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi. Manajemen pendidikan memiliki tiga bidang area studi pokok, yaitu (1) sumber daya manusia, (2) sumber pembelajaran, dan (3) sarana prasarana dan sumber finansial. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan berhubungan dengan (1) pengembangan yang dihubungkan dengan tujuan, (2) perencanaan dan implementasi program, (3) administrasi, (4) pemecahan masalah, (5) pengembangan profesional, dan (6) evaluasi dan konsekuensinya.

Administrasi pendidikan sebagai proses yang melibatkan orang lain merupakan seni dan pengetahuan untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan secara efisien. Administrasi pendidikan merupakan pelayanan terhadap system, struktur, orang dan nilai keorganisasian. Tanggung jawab administrator pendidikan meliputi: (1) area tanggung jawab administrtatif kritis berupa pencapaian tujuan dan pemeliharaan budaya sekolah, (2) proses administrasi kritis berupa perencanaan dan pengorganisasian, dan (3) keahlian administratif kritis berupa teknis. Ada tujuh faktor yang dapat dikonseptualisasi dalam sintesis pengetahuan administrasi pendidikan, yaitu: fungsi, *skill*, etika, struktur, area operasional, konteks, dan isu-isu pendidikan.

6. Prinsip Kepemimpinan

Prinsip merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang *leader*. Prinsip sering didefinisikan sebagai kebenaran yang mendasar atau dalil yang berfungsi sebagai landasan sebuah sistem keyakinan atau perilaku atau sebagai rantai berfikir. Prinsip adalah ide

dasar atau aturan yang menjelaskan atau mengendalikan bagaimana sesuatu terjadi dan berjalan. Prinsip merupakan sebuah aturan moral atau keyakinan yang membantu seseorang mengetahui yang benar dan salah dan yang mempengaruhi tindakan seseorang. Prinsip adalah basis kebenaran atau teori dan sebuah ide yang menjadi basis sesuatu. Menurut KBBI, prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Sedangkan menurut bahasa Arab, prinsip adalah مبدأ; قاعدة; أصل; جوهر; مصدر; قاعدة مبدأ; معتقد رئيسي; قاعدة عمل yang berarti: *percept, base, origin, essence, source, or fundament*. Dengan demikian, prinsip merupakan dasar atau landasan yang dimiliki seseorang yang menjadi pedoman dan acuan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.

Dengan demikian prinsip memiliki fungsi yang sangat jelas yaitu sebagai pegangan dan landasan bagi seseorang, khususnya pemimpin dalam menjalani hidup dan kehidupan. Seseorang yang tidak memiliki prinsip akan mudah terombang-ambing, tidak punya pegangan yang pasti, dan sangat mudah dipengaruhi orang lain. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, seorang *leader* harus memiliki prinsip yang jelas dan kuat karena pemimpin berupaya mempengaruhi orang lain. Jika seorang pemimpin tidak memiliki prinsip, maka akan sangat mudah dipengaruhi orang lain, sangat mungkin hanya sekedar menjadi simbol, bahkan hanya menjadi boneka yang keberadaannya hanya diatur oleh orang lain, atau dalam bahasa politik dikenal sebagai 'petugas partai'.

Prinsip berisi nilai-nilai dan berasal dari sumber yang diyakini. Sumber prinsip seorang muslim harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al Qur'an dan

sunah. Pada konteks ke-Indonesiaan, maka selain prinsip utama yang bersumber Al Qur'an dan sunah juga bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kepemimpinan pendidikan, yaitu:

1) Pemimpin harus mengacu pada *prinsip al-'adalah, al-muswah, al-ta'adudiyah, as-syura,* dan *al-huriyah*.
2) Tidak mengambil orang kafir (non muslim: Yahudi dan Nasrani termasuk atheis) sebagai pemimpin dan meninggalkan muslim.
3) Setiap kelompok orang harus mengangkat pemimpin.
4) Pemimpin harus diterima dan dicintai. Pemimpin bukan orang membenci dan pembenci.
5) Pemimpin harus ahli pada bidangnya.
6) Pemimpin harus mengutamakan dan membela kepentingan umat.
7) Pemimpin tidak otoriter, arogan dan sewenang-wenang serta fanatik terhadap golongan.
8) Pemimpin harus sehat dan kuat.
9) Pemimpin harus memiliki 4 (empat) sifat Rasul, yaitu: *sidiq, amanah, fatonah,* dan *tabligh*. (Nuryanta, 2017)

Prinsip kepemimpinan yang kuat dapat mempengaruhi seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinan yang efektif. Menurut Steven Covey karakter kepemimpinan yang efektif ada 8 (delapan), yaitu: (1) Terus belajar; (2) Berorientasi pada pelayanan; (3) Memancarkan energi positif; (4) Mempercayai orang lain; (5) Hidup seimbang; (6) Melihat hidup sebagai petualangan; (7) Sinergik, dan (8) Berlatih terus untuk memperbaiki diri (Nuryanta, 2017).

Lebih lanjut menurut Ari Ginanjar Agustian pemimpin yang berprinsip akan mampu mengantarkan seorang pemimpin menjadi pemimpin sejati. Pemimpin sejati adalah seseorang yang selalu mencintai dan memberi perhatian pada orang lain, sehingga ia dicintai. Memiliki integritas yang kuat, sehingga ia dipercaya oleh pengikutnya. Selalu mengajari dan membimbing pengikutnya. Memiliki kepribadian yang kuat dan konsisten, serta yang terpenting adalah memimpin berlandaskan suara hati yang fitrah.

Seorang pemimpin yang memimpin dengan suara hati yang fitrah (*God spot*) dapat menjadi energi yang akan membantu tugas kepemimpinan seseorang. Menurut Musthofa Masyhur ada 9 (sembilan) unsur pemimpin yang memimpin dengan suara hati, yaitu:

1) Ikhlas karena Allah Swt.
2) Memiliki kepekaan terhadap pengawasan Allah Swt.
3) Selalu memohon pertolongan Allah Swt. dalam setiap keadaan dan aktivitasnya.
4) Memiliki tanggung jawab selalu menjaga diri dan amanah.
5) Memberi porsi besar untuk pendidikan anggota dan menyiapkan generasi
6) Menjalin kasih sayang kepada seluruh anggota (*ukhuwah insaniyah*).
7) Mampu merencanakan program dengan tepat, merencanakan strategi dan sumber dananya serta mampu mengelolanya.
8) Mampu membangun iklim saling percaya dan *positif thinking (husnudzon*).
9) Bersungguh-sungguh menyalakan cita-cita, mengukuhkan tekad dan membangkitkan

harapan ke anggota atau jamaah atau pengikut. (Nuryanta, 2017)

7. Syarat Pemimpin dalam Kepemimpinan Pendidikan

Selain prinsip, aspek yang yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam kontek kepemimpinan pendidikan adalah syarat sebagai seorang pemimpin. Karena diskursus kepemimpinan pendidikan ini bukan hanya dalam konteks keindonesiaan akan tetapi juga dalam konteks keislaman, maka kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Untuk menjadi pemimpin dalam Islam, bukanlah hal sederhana dan mudah tetapi harus memiliki syarat sesuai ajaran Islam. Karena pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, pribadinya tetapi lebih dari itu yaitu bertanggung jawab terhadap Allah Swt. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kapasitas pribadi (fisik dan jasmani yang sehat serta intelek), tetapi juga harus memiliki integritas keIslaman yang kuat, saleh secara pribadi, dan saleh secara sosial.

Al-Ghazali dan Al Maududi mengemukan syarat seorang pemimpin secara umum dan dapat juga digunakan dalam konteks kepemimpinan pendidikan (Nuryanta, 2004), sebagai berikut:

Tabel 4. Pandangan Al-Ghazali dan Al Maududi terkait syarat seorang pemimpin

Pandangan Al-Ghazali	Pandangan Al Maududi
Merdeka	Beragama Islam

Laki-laki (*adz-dzukurah*)	Laki-laki
Mujtahid	Dewasa
Berwawasan luas (*mu'allim*)	Sehat jasmani dan rohani
Adil	Warga negara yang baik
Dewasa	Saleh
Bukan perempuan, orang buta, anak-anak, orang fasik dan pembeo	Kuat komitmennya dalam Islam

Kedua aspek, yaitu prinsip dan syarat tersebut seringkali diperdebatkan oleh para mahasiswa dan pemerhati pendidikan. Kedua aspek cenderung dianggap sentimental dan primordial karena kepemimpinan pendidikan merupakan kajian umum bukan hanya milik orang Islam. Menurut penulis, tema kepemimpinan pendidikan memang benar merupakan *public discursus* akan tetapi sebagai muslim tentu harus memiliki pemikiran dan sikap yang jelas ketika harus membahas tema kepemimpinan pendidikan, terutama jika dihubungkan dengan dua konteks sekaligus, yaitu konteks keislaman dan keindonesiaan. Pada konteks ini, pemimpin muslim harus memiliki pilihan sesuai ajaran agamanya. Pilihan yang tegas sesuai agama yang dianutnya merupakan bentuk toleransi yang sebenarnya dengan tetap menghormati prinsip dan ketentuan pihak lain. Toleransi bukan berarti harus menerima prinsip dan pandangan pihak lain ke dalam keyakinan muslim, tetapi cukup bagi muslim mengerti dan memahami prinsip dan pandangan pihak lain serta tidak pula harus menerima prinsip atau pandangan lain ke dalam ajaran Islam. Namun cukup menerima dan

menghargai saja. Prinsip adalah landasan yang menjadi pilihan. Taat dan tetap berpegang teguh pada sebuah pilihan yang diyakini benar adalah keputusan yang harus dihargai dan tidak boleh dipaksa untuk menerima prinsip orang lain atau kepunyaan pihak lain.

Sebagai ilustrasi dalam praksis pendidikan, seringkali kita dapati dalam penetapan pimpinan, misal kepala sekolah. Sering terjadi bahwa pihak dinas sudah menetapkan kepala sekolah adalah *non*-muslim. Pada konteks ini, muslim harus menerima karena sifatnya '*given*', tidak ada proses memilih tetapi langsung ditetapkan. Sedangkan untuk konteks menentukan pilihan, dimana seorang muslim harus memilih pemimpin maka ia harus memiliki prinsip sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tidak memilih *non*-muslim sebagai pemimpin. Jika pilihan tidak ada yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tidak ada yang muslim maka ia harus tegas yaitu tidak memberikan pilihan.

Sementara untuk syarat pemimpin, dua tokoh muslim mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Seolah-olah ada *bias gender* dalam konteks ini. Akan tetapi tidak demikian. Penulis setuju dengan kedua tokoh, yaitu Al Ghazali dan Al Maududi, dalam hal penentuan pemimpin dalam konteks tertinggi yaitu negara. Adapun untuk pemimpin pada level yang bukan kepala negara (presiden) maka hal itu tidak masalah. Wanita menjadi dekan, ketua jurusan, kaprodi dan lainnya tidak perlu dipermasalahkan asal rektornya adalah laki-laki. Perempuan menjadi kepala sekolah atau kepala dinas bahkan sampai level menteri tidak ada masalah, yang penting pimpinan tertinggi

yang bertanggung jawab pada bidang itu adalah tetap seorang laki-laki.

Dengan demikian cukup jelas bahwa dalam konteks kepemimpinan pendidikan, berpegang teguh pada prinsip sesuai ajaran yang diyakini merupakan keniscayaan dan harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pemimpin pendidikan dapat memilih model atau gaya kepemimpinan yang paling baik yang merupakan kolaborasi dari berbagai teori kepemimpinan yang ada dan selalu berkembang akan tetapi tetap memiliki prinsip yang jelas dan tegas. Penulis berkeyakinan penuh apabila beberapa kajian dalam kepemimpinan pendidikan ini diterapkan dengan baik, maka pendidikan di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik karena orientasinya adalah tanggung jawab kepada Allah Swt. dan berorientasi pada optimalisasi pelayanan yang terbaik kepada *stakeholder* melalui institusi pendidikan yang ada.

PENUTUP

Setelah mengkaji dan menelaah kepemimpinan pendidikan di Indonesia, maka penulis dapat menarik benang merah bahwa diskursus kepemimpinan pendidikan merupakan kajian yang sangat penting terutama bagi pemimpin pendidikan, para guru dan mahasiswa dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Kajian tentang kualitas pendidikan melalui bangku pembelajaran di institusi pendidikan perlu lebih digiatkan kembali. Dampak kebijakan pendidikan dari pihak yang berkompeten yang terkesan kurang memahami kultur pendidikan di Indonesia perlu mendapat respon dari berbagai kalangan pemerhati pendidikan, khususnya mahasiswa dan para guru. Pergantian kurikulum

secara masif namun kurang didasarkan pada kajian komprehensif tentang hasil evaluasi kurikulum, secara langsung maupun tidak langsung menjadi beban bagi para guru dalam implementasinya. Ketidakjelasan dan keterlambatan proses sosialisasi, besarnya beban administrasi kurikulum baru, lama kelamaan akan menjadi 'momok' bagi para guru dalam merealisasikan isi kurikulum. Padahal tidak dipungkiri, salah satu faktor penting yang menjadi penopang kualitas pendidikan adalah para guru atau pendidik. Kalau para guru mengalami kejenuhan dalam mendidik dan melaksanakan proses pembelajaran maka sudah pasti kualitas pendidikan akan mengalami penurunan. Pendidikan yang sukses tolok ukurnya adalah keberhasilan pembelajaran dan prestasi dari para peserta didik. Peserta didik adalah *human capital* bagi keberlangsungan suatu bangsa. Ketika prestasi peserta didik ini menurun maka kualitas pendidikan mengalami kegagalan, apalagi jika dalam praksisnya banyak penyimpangan dalam penyelenggaran kebijakan dan praktik pendidikan dari para pelaku pendidikan Indonesia. Pendidikan akan semakin 'runyam' dan bangsa ini akan semakin tertinggal dengan negara lain.

Mencermati fenomena semua itu, menurut hemat penulis, kajian tentang kepemimpinan pendidikan harus diberikan dengan sungguh-sungguh agar para mahasiswa, para guru, pemimpin pendidikan dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan menyadari betapa pentingnya arti sebuah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan akan menjadi baik, apabila proses pendidikan berjalan dengan baik. Proses pendidikan akan baik apabila dikendalikan oleh pemimpin yang baik dan kompeten. Pemimpin yang kompeten akan mampu menggali, mengembangkan, dan menggerakkan potensi para guru, para orang tua, peserta didik, dan unsur pendidikan lainnya untuk meraih tujuan, baik secara institusioanl, kurikuler maupun nasional. Para

pemimpin pendidikanlah yang harus bertanggung jawab menjamin proses pendidikan tersebut. Oleh karena itu, para pemimpin pendidikan harus memiliki bekal pengetahuan dan *skill* yang handal dan manajemen yang bagus, agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, inovatif, dan berkeunggulan.

Semoga tulisan dan kajian sederhana ini dapat menggugah kembali semangat mengabdikan diri pada bidang pendidikan. Karena hanya dengan niat yang tulus ikhlas dan *ghirah* yang tinggi maka pendidikan akan tumbuh dan berkembang menghantarkan generasi penerus yang kelak akan menerima estafeta kepemimpinan di negara Indonesia tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantoro, M. H. (2020). *TRANSFORMASI MISI KEPEMIMPINAN PROFETIK DALAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH - Repository UMY* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2413/

George, B. (William W.). (2003). *Authentic leadership : rediscovering the secrets to creating lasting value*. Jossey-Bass.

Gumilar Eka Prihatin, R., & Abstrak, Mp. (2013). PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, PELATIHAN, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SE-KOTA BANDUNG. *Jurnal Administrasi*

Pendidikan, *17*(1). https://doi.org/10.17509/JAP.V17I1.6438

Hart, M. H. (2016). *100 Tokoh Paling Berpengaruh: Dalam Sejarah - Michael H. Hart - Google Books*. Banana Books. https://books.google.co.id/books?id=w6lxCwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Indonesia Urutan 55, Sistem Pendidikan Di Asia Tahun 2021 – Madista.id. (n.d.). Retrieved July 7, 2022, from https://madista.id/peringkat-sistem-pendidikan-di-asia-tenggara-tahun-2021/

Kouzes, J. M., & Posner, B. z. (2007). *The Leadership Challenge* (Fourth Edition). Jossey-Bass. https://www.academia.edu/25739907/James_M_Kouzes_Barry_Z_Posner_The_Leadership

Laub, J. A. (1999). *Assessing the Servant Organization Development of the Servant Organizational Leadership Assessment (SOLA) Instrument* [Florida Atlantic University]. https://olagroup.com/Images/mmDocument/Laub%20Dissertation%20Complete%2099.pdf

Leadership theories. (n.d.). Retrieved May 14, 2022, from http://changingminds.org/disciplines/leadership/theories/leadership_theories.htm

Mursidi, Armanu, Setiawan, M., & Aisjah, S. (2017). Prophetic, Associative, Activist, Straight and Dynamic Leadership, A Phenomenology Study at University of Muhammadiyah Malang Indonesia . *Journal of Resources Development and Management*, *29*, 53–57. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JRDM/article/view/35647/36664

Nuryanta, N. (2004). *Perencanaan Strategik dan Implementasinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Studi Kasus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Nuryanta, N. (2017). *Diktat Kuliah Kepemimpinan Pendidikan*. Universitas Islam Indonesia.

KRITIK NALAR ARAB MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI (Membedah Epistemologi Bangsa Arab)

Ahmad Zubaidi

PENDAHULUAN

Imperialisme Barat secara nyata telah menghegemoni negara-negara Timur, termasuk Arab. Hal tersebut pada satu sisi menunjukkan kemajuan dan modernitas Barat dan di sisi lain menunjukkan keterbelakangan Arab. Kesadaran atas keterbelakangan semakin menguat di Arab ketika Arab mengalami kekalahan melawan Zionis Israel tahun 1967. Peristiwa tersebut membawa konsekuensi di dunia Arab dengan meningkatnya intensitas diskursus tradisi dan *turats* Arab *vis a vis* modernitas Barat sebagai wacana kebangkitan *(nahdhah)* bagi bangsa Arab. *Turats* yang dimaksud adalah *turats* dalam pengertian kontemporer Arab-Islam yang sifatnya tidak materiil, bersifat *forward looking,* terbuka, kritis, dan rasional. Berdasarkan hal tersebut, maka kata *turats* dalam tulisan ini tetap digunakan dan tidak diubah dengan padanan kata yang lain (al-Jabiri, 2000, p. 5; Ro'uf, 2018, p. 23). Muhammad 'Abid al-Jabiri merupakan salah satu intelektual yang memberi perhatian terhadap tradisi dan *turats* Arab. Berbeda dengan pendahulunya yang berbicara modernitas namun terputus dengan tradisi atau berbicara tradisi dari aspek pengagungan *turats*, al-Jabiri berbicara *turats* dalam rangka kebangkitan Islam.

Al-Jabiri berkeyakinan bahwa mekanisme untuk kebangkitan harus dimulai dari *turats* sebagai dasar melakukan kritik terhadap masa kini dan masa lampau yang lebih dekat untuk melakukan lompatan di masa depan. *Turâts* disini tidak dimaknai dari aspek materi (harta waris), namun *turats* yang dimaksud al-Jabiri adalah

"warisan budaya intelektual baik yang jauh maupun dekat yang menyertai kekinian kita". Budaya intelektual tersebut meliputi pemikiran, filsafat, doktrinal, pemahaman keagamaan, syariat, kalam, budaya, seni, bahasa, dan sastra (al-Jabiri, 1991, p. 15; Ro'uf, 2018, p. 27). Prinsip-prinsip dasar dari masa lalu tersebut harus dilakukan pemaknaan dalam bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai baru (al-Jabiri, 2014, p. 7), bukan sebagai romantisme dan apologi. *Turats* tidak sekedar "diagung-agungkan" hingga menjadikan bangsa Arab terbuai, namun *turats* harus dijadikan objek untuk dikaji dan dianalisis secara obyektif serta bukan menjadi makhluk yang mengekang jati diri orang Arab baik di tingkat kesadaran maupun ketidaksadaran (al-Jabiri, 2000, p. 8). *Turats* yang diposisikan sebagai 'yang agung' dan 'serba magis' justru menjadikan dimensi kognitif, ideologis, dan emosional terhadap *turats* sulit dibedakan. Hal ini berimbas pada terjadinya stagnasi nalar Arab. Masa *tadwin*, era kodifikasi, yang produknya -terutama *turats*- masih dominan menjadi rujukan Arab-Islam dari masa pertengahan kedua hijriyah sampai sekarang, bagi al-Jabiri menjadi sumber awal untuk proyek kritiknya. Reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap pemahaman atas *turats* dan kritik terhadap sistem berpikir Arab menurutnya penting untuk mengubah dinamika kultural Arab dalam rangka *nahdhah* (al-Jabiri, 2003, p. 1).

Turats sebagai unsur budaya *(tsaqafah)* bagaimanapun telah melestarikan identitas bangsa Arab dan memberi andil besar dalam pembentukan budaya. Proyek kritik nalar Arab Jabiri berupaya untuk membebaskan bangsa Arab dari hegemoni *turats* yang telah menubuh dalam kesejarahan bangsa Arab. Dari realitas budaya Arab dengan *turats* yang telah menghegemoni tersebut, harus dimulai rekonstruksi kembali dengan menganalisis nalar Arab baik secara formatif *(al-tahlili al-takwin)* maupun secara struktural *(al-tahlili al-binyawi)* (al-Jabiri, 2001b, p. 5).

Atas dasar inilah Muhammad 'Abid al-Jabiri menggagas proyek kritik nalar Arab sebagai bentuk kegelisahan al-Jabiri terhadap keterpurukan bangsa Arab dan gagalnya upaya kebangkitan Islam pada umumnya. Kritik nalar Arab selanjutnya lahir sebagai refleksi terhadap keadaan bangsa Arab tersebut sekaligus sebagai upaya awal untuk merealisasikan kebangkitan. Kebangkitan yang harus melepaskan diri dari otoritas *turats*, melakukan kritik, dan rasionalisme serta memperhatikan prinsip-prinsip epistemologis (al-Jabiri, 2000, p. 232). Berbeda dengan pemikir Arab kontemporer lainnya, al-Jabiri lebih memilih fokus merekonstruksi pemahaman atas *turats* dan kritik terhadap nalar atau sistem berpikir Arab. Proyek tersebut tertuang dalam tetralogi Muhammad 'Abid al-Jabiri dengan judul *Naqd al-Aql al-'Arabi* (kritik nalar Arab). Perbedaan juga terjadi antara pemikiran Arab kontemporer dengan pemikir Arab abad 19 dan awal abad 20, seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan pemikir lainnya yang masih terpengaruh kolonialisme Barat juga ide-ide Barat. Hal ini memunculkan pembaharuan Islam yang bersifat lebih apresiatif terhadap intelektualisme Barat. Pembahasan al-Jabiri terkait *turats* dari aspek epistemologi memiliki kesamaan dengan Naquib al-Attas, hanya saja *turats* bagi al-Attas diterima sepenuhnya (Ro'uf, 2018, p. 6).

PEMBAHASAN

Topik penting yang menjadi kajian al-Jabiri adalah mengenai nalar Arab dari aspek historis dan epistemologisnya. Al-Jabiri bermaksud membongkar nalar berpikir Arab yang selanjutnya direkonstruksi dari aspek epistemologinya sekaligus melakukan kajian historis terhadap tradisi *turats* Arab sebagai pijakan kajiannya. Historisitas Islam dengan pembabakan era jahili, Islam, dan kebangkitan, "diubah" oleh al-Jabiri karena

menurutnya yang paling mempengaruhi nalar Arab, yaitu era kodifikasi, belum masuk dalam pembabakan sejarah tersebut.

Menurut al-Jabiri, era kodifikasi menjadi penting karena pada era tersebut terjadi produksi wacana Arab-Islam. Tradisi teks selanjutnya mengakar kuat dan mengiringi perjalanan epistemologi nalar Arab selama ratusan tahun dari masa tersebut sampai saat ini. Sehingga menurutnya, nalar Arab dari masa lalu (masa kodifikasi, abad ke-2 H) sampai dengan saat ini tidak ada perubahan. Bahkan persoalan masa lalu dinilai masih terbawa sampai saat ini. Persoalan yang dalam kajian al-Jabiri tidak hanya persoalan ideologis namun juga terkait dengan perseteruan politik di masanya. Hal ini berpengaruh pada ketetapan hukum yang bersifat ideologis, yang termuat dalam teks, dan menubuh dalam *turats* pada kebudayaan Arab. Hal tersebut yang menjadikan epistemologi nalar Arab mengalami stagnasi dan keterjebakan dengan masa lalu. Sedangkan masa lalu masih menjadi romantisme-apologisme, bahkan produk masa lalu (masa *tadwin*) dianggap sakral. Padahal seharusnya juga perlu untuk dikritisi dari aspek metode dan syarat (metodologi) diperbolehkannya mengkodifikasi pemikiran para intelektual di masa *tadwin* tersebut. Al-Jabiri selanjutnya mengkritisi masa *tadwin* bukan hanya sekedar konflik ideologi-politik sebagaimana konflik Sunni dan Syiah, namun terkait apa yang tersisa dari konflik tersebut terkait nalar Arab (al-Jabiri, 2001b, p. 70).

Al-Jabiri selain melakukan pendekatan sejarah dan epistemologis, juga menggunakan literatur yang sangat banyak dalam proyek *naqd al-Arab*-nya. Teori-teori dari tokoh postmodernisme Perancis banyak yang mempengaruhi pemikirannya. Teori *mukawin* dan *mukawwan* al-Jabiri diadopsi dari Andre Lalande, juga

pengertian akal dengan struktur-struktur ketidaksadaran dari antropolog struktural Claude Levi Strauss. Jacques Lacan, Althusser, Jacques Derrida, dan Rolland Barthes juga memberi kontribusi terhadap pemaknaan akal al-Jabiri. Selain itu *hafriyyah* (arkeologi; dari *the archeology of knowledge?),* juga *episteme* Michael Foucault (atau *unconciousness* Sigmund Freud dan Kesadaran Kognitif Piaget?), dan proyek kritik nalar Arab al-Jabiri pun mirip dengan kritik nalar murni Immanuel Kant. Al-Jabiri juga mengkaji literatur Arab klasik, antara lain literatur milik Syafi'i, Ghazali, Asy'ari, Ibn Sina, al-Kindi, Ibn Rusyd, al-Hazm, asy-Syatibi, dan sebagainya. Adapun pendekatan yang digunakan al-Jabiri adalah pendekatan historis dan pendekatan epistemologis. Pendekatan historis digunakannya untuk mengkaji unsur pembentuk nalar Arab sedangkan pendekatan epistemologis dengan analisis struktural terhadap dasar-dasar pengetahuan dalam kebudayaan Arab dengan membongkar dan merekonstruksi nalar Arab (struktur nalar Arab) (al-Jabiri, 2001b, p. 71).

1. Konten Utama Naqd al-Aql al-Arabi

a. *Turats,* Budaya, dan Nalar Arab

Muhammad 'Abid al-Jabiri dalam membahas nalar Arab melakukan berbagai pembahasan diantaranya melakukan perbandingan antara nalar Arab dan nalar Barat dalam hal ini Yunani-Eropa. Menurutnya manusia-alam-dan Tuhan disikapi secara berbeda di antara keduanya. Dalam nalar Arab alam berperan sebagai petunjuk bagi akal manusia untuk menyingkap Tuhan dan hakekatnya. Sedangkan Barat, bertitik tolak dari gagasan tentang Tuhan yang berperan sebagai indikator dalam akal manusia untuk menyingkap sistem

alam (upaya memahami sebab, yakni pengetahuan) (al-Jabiri, 2014, p. 49). Menurut al-Jabiri, nalar Arab bersifat normatif dalam memandang, sesuatu sedangkan Barat bersifat objektif, berusaha membongkar substansi. Senada dengan apa yang dikatakan al-Jahid meskipun dengan maksud memuji orang Arab, namun justru menunjukkan minim obyektifitas pada orang Arab:

> "…perkataan orang Persia dan orang non-Arab berasal dari hasil pemikiran panjang, meditasi, diskusi, dan kajian terhadap buku hingga hasilnya terakumulasi di bagian akhir. Sedangkan masyarakat Arab, segala sesuatu bersifat spontan semacam intuisi dan tidak saling partisipatif maupun tanpa perenungan." (al-Jabiri, 2014, p. 54).

Kecenderungan normatif yang 'menguasai' nalar Arab tersebut -juga pendapat orang Arab mengenai akal Arab- secara nyata termuat dalam berbagai teks yang ditulis baik oleh ulama klasik Arab maupun non-Arab. Diantara unsur yang membentuk nalar Arab seperti bahasa yang dilestarikan oleh kamus merupakan bahasa Arab Jahili. Begitu pula kitab klasik Arab -juga- menggunakan bahasa Arab Jahili, sehingga menurut al-Jabiri, "kita (Arab-Islam) belum keluar dari era Jahiliyah baik dari aspek lingkungan (ekonomi-sosial-geografi) maupun aspek budaya" (al-Jabiri, 2014, p. 56). Ini disampaikan al-Jabiri dengan maksud untuk menganalisis dasar-dasar epistemologi yang ada dalam kebudayaan Arab yang dihasilkan oleh nalar Arab (al-Jabiri, 2014, p. 56).

Intelektual Arab-Islam menurut al-Jabiri secara sadar dan tidak sadar dominan bergerak dari rasional menuju irrasional, dari masa lampau sampai masa kontemporer ini. Dampaknya adalah semakin ke sini, semakin kehilangan pendirian epistemologis dan kritisisme bangsa Arab. Bagi al-Jabiri, ini merupakan bentuk nomadisme kultural dalam pemikiran Arab kontemporer. Ketumpangtindihan dan nomadisme kultural tersebut menunjukkan bahwa sejarah kultural Arab sejatinya hanya daur ulang dari masa klasik, sehingga konsep dan metode klasik secara tidak sadar masih masa lalu. Bahkan dengan segala problematika masa lalu, terbawa di masa kontemporer Arab kini. Atas dasar hal tersebut maka menurut al-Jabiri sejarah kultural Arab yang berlaku saat ini -dan sejak masa ulama klasik- merupakan sejarah perpecahan dan terpotong-potong, sejarah ilmu dan disiplin yang terpisah dan tersekat-sekat, sejarah kultural Arab bersifat statis dan terjadi ketumpang tindihan ruang dan waktu, serta sejarah kultural Arab mengalami keterputusan dengan sejarah kultural dunia (al-Jabiri, 2014, p. 71), sehingga harus direkonstruksi secara kritis untuk mewujudkan kemajuan (al-Jabiri, 2014, p. 69). Meskipun demikian, bagi al-Jabiri hal tersebut bukan kemudian mencerabut budaya dan tradisi bangsa Arab. Budaya dan tradisi justru dijadikan titik tolak kritik nalar sehingga proyek kebangkitan Arab tidak mengalami diskontinuitas sejarah. Adapun ketertinggalan-kemunduran bangsa Arab sejatinya berkutat pada cara bangsa Arab dalam memahami dan memperlakukan *turats*nya yang cenderung sirkular *(al-fahm al-turâtsi*

li al- turâts) dan bukan bergerak ke arah pembaharuan *(al-fahm al-hadâtsi li al-turâts)* (al-Jabiri, 1991, p. 15).

Naqd al-Aql al-'Arabi (kritik nalar Arab) merupakan proyek pembaharuan al-Jabiri untuk melakukan kritik epistemologi terhadap bangunan tradisi keilmuan Arab-Islam, dengan mengkaji ulang sejarah budaya Arab-Islam, sekaligus menelusur dan menganalisis nalar *('aql)* Arab (al-Jabiri, 2014, p. 22). *Al-'Aql al-'Arabi*' (nalar Arab) bagi al-Jabiri merupakan pemikiran dalam posisinya sebagai perangkat untuk menghasilkan produk-produk teoritis yang dibentuk oleh suatu kebudayaan dengan kekhasan tersendiri, dalam hal ini kebudayaan yang mencakup sejarah peradaban Arab. Kebudayaan tersebut mencerminkan realitas, ambisi masa depan, dan juga mencerminkan rintangan serta hambatan terhadap kemajuan yang menjadi sebab-sebab kemunduran (bangsa Arab) (al-Jabiri, 2014, p. 26). Kekhasan menjadi penting menurut Jabiri karena kekhasan merupakan produk historis yang membawa berbagai konsep, pandangan, doktrin, cara berpikir, dan menalar.

Berpikir disini meliputi dua hal, yaitu berpikir melalui kebudayaan tertentu dan berpikir tentang masalah-masalah yang terdapat dalam kebudayaan tertentu. Berpikir melalui suatu kebudayaan tertentu tersebut berarti bahwa ia berpikir melalui sistem referensial (منظومة مرجعية) yang membentuk koordinat-koordinat, yang didasarkan pada faktor penentu, dan pembentuk kebudayaan terutama warisan kultural,

lingkungan sosial, cara pandang terhadap manusia, alam, dunia, dan masa depan. Pembahasan tersebut sebagai batasan mengenai konsep nalar Arab yang diusung Jabiri, yakni pemikiran sebagai "perangkat" untuk menghasilkan produk teoritis yang dibentuk oleh kebudayaan dengan kekhasannya. Pada titik ini (perangkat), Jabiri mencoba menjelaskan adanya dua nalar untuk mempermudah pemahaman, yang meliputi nalar pembentuk (aktif), *al-'aql al-mukawwin,* dan nalar terbentuk (dominan), *al 'aql al-mukawwan. Al-'aql al-mukawwin* merupakan bakat intelektual *(al-malakah)* yang ada pada diri setiap orang untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar dan universal berdasarkan pemahamannya terhadap keterkaitan segala sesuatu. Sedangkan nalar *mukawwan* (nalar dominan) merupakan bentukan *al-'aql al-mukawwin* karena merupakan akumulasi dari berbagai prinsip atau teori atau kaidah sistematis yang diterima, ditetapkan, dan dianggap bernilai mutlak pada periode sejarah tertentu sehingga menjadi rujukan dalam berargumentasi (al-Jabiri, 2001b, p. 15, 2014, p. 27; Faisol, 2010). Pembedaan nalar yang diadopsi Jabiri dari teori Lalande tersebut selajutnya dikaitkan dengan nalar Arab. Al-Jabiri memaknai nalar *mukawwan* sebagai kumpulan prinsip atau kaidah dari para ulama Arab-Islam yang berada pada kultur-budaya intelektual Arab dan sebagai alat produksi pengetahuan. Nalar *mukawwan* inilah yang membentuk nalar Arab. Nalar *mukawwan* ini semacam gagasan *episteme* Foucault. Menurut Foucault, *episteme* merupakan sesuatu yang tersembunyi disebaliknya dan bukan merupakan sesuatu yang nampak dipermukaan

peradaban. *Episteme* adalah suatu "sistem tersembunyi" dari suatu dominasi pengetahuan pada periode masa tertentu. Hal serupa, yaitu teori Sigmund Freud tentang alam bawah sadar (ketidaksadaran) yang mengendalikan perilaku manusia. Ketidaksadaran tersebut berguna untuk mengetahui problema kepribadian dengan mengkaji makna tersembunyi dan tekanan jiwa terdalam. Sedangkan Piaget memiliki konsep serupa yaitu ketidaksadaran kognitif untuk mengkaji unsur pembentuk nalar individu. Setidaknya ketiga konsep tersebut mempengaruhi konsep al-Jabiri terkait dengan nalar *mukawwan* pada nalar Arab (al-Jabiri, 2000) untuk mengetahui sistem pengetahuan dengan mencari makna dibalik pengetahuan tersebut (al-Jabiri, 2014, p. 59). Nalar *mukawwin* (pembentuk) mengandaikan nalar terbentuk *(mukawwan)*, dalam artian bahwa aktifitas nalar (nalar aktif-nalar pembentuk) bisa berlangsung hanya berpijak dari berbagai kaidah dan asas (yaitu nalar dominan).

Dari sini al-Jabiri menyampaikan bahwa "kritik nalar Arab"-nya menempatkan nalar Arab sebagai nalar dominan yang titik tolaknya adalah berbagai prinsip dan kaidah yang mendasari pengetahuan dalam kebudayaan Arab. Selain itu, nalar Arab juga dipandang sebagai nalar aktif yang menumbuhkan dan membentuk nalar dominan pada periode sejarah tertentu. Dengan nalar aktif tersebut selajutnya bisa menumbuhkan nalar dominan baru sebagai pengganti nalar dominan sebelumnya (nalar klasik), sebagai wujud pembaharuan dan modernitas nalar dominan sebelumnya tersebut. Suatu kerangka

rekonstruksi bangunan epistemologi nalar Arab yang digagas al-Jabiri dengan berupaya mengkritik dan menganalisis kinerja *al-aql al-mukawwin,* dengan "menelanjangi" *al-aql al-mukawwan* (lama) untuk pembaharuan bagi kebaikan *al-'aql al-mukawwin* yang baru. Kritik terhadap nalar Arab berarti melakukan penelusuran dan pembongkaran terhadap kerangka bangunan pemikiran Arab untuk menguak kecacatan epistemologinya dan selanjutnya melakukan pembenahan.

b. Epistemologi Bayani, Burhani, Irfani

Concern utama al-Jabiri pada wilayah epistemologi bukan pada wilayah produk (teori, mazhab, dan sebagainya). Adapun fokus kajian al-Jabiri *core*-nya adalah kritik nalar Arab yang menubuh pada *turats* yang berada dalam kebudayaan Arab. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, *turats* bagi al-Jabiri ditempatkan sebagai akar kesadaran, kebudayaan, dan identitas autentik peradaban Arab, sehingga hal ini yang menjadi titik tolaknya dalam kritik nalar Arab. Untuk kebutuhan itu, *turats* perlu ditinjau ulang khususnya dalam hal yang terkait dengan sistem nalar Arab. Elaborasi secara komprehensif terhadap sistem berpikir Arab sejak era kodifikasi (abad 2 H, sekitar tahun 8 M) merupakan kebutuhan mendesak bagi sistem peradaban Arab. Dua ratus tahun setelah nabi wafat, menjadi titik pijak al-Jabiri dalam mengkritisi nalar Arab dengan asumsi bahwa: 1) nalar dan proyeksi pada kebudayaan Arab, 2) era kultural sebagai era ketidaksadaran kognitif bangsa Arab, dan 3) era kodifikasi merupakan rujukan dan

frame referensial kritik nalar Arab. Pada era kodifikasi, ilmu-ilmu keislaman *(ulumuddin: tafsir, fiqih, hadis, lughah)* mulai dibakukan dan dibukukan, sehingga hal ini menjadi kegelisahan terhadap 'syarat dan mekanisme'nya al-Jabiri. Berdasarkan asumsi di atas, selanjutnya al-Jabiri mengkaji "produk" era kodifikasi dan menemukan struktur (sistem). Kajian dilakukan dengan analisis formatif *(at-tahlil at-takwin)* maupun analisis struktural *(at-tahlili bunyawi)*. *At-tahlil at-takwin* dipakai sebagai upaya melacak orisinalitas dan alur kesejarahanya dari masa kodifikasi sampai saat ini, baik secara aspek epistemologis maupun aspek ideologis. Analisis tersebut memungkinkan terbentuknya nalar *bayani, irfani,* dan *burhani* serta interaksi ketiganya dan krisis yang menyertainya. *At-tahlil bunyawi* untuk mengurai pengertian dan mekanisme kerja nalar tersebut (Struktur Nalar Arab) (Ro'uf, 2018, p. 82).

1) Nalar Bayani *(Tekstual)*

   Nalar *bayani* secara epistemologis merupakan metode pemikiran Arab yang menjadikan teks *(nash)* sebagai ukuran untuk menentukan kebenaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kamus *Lisan al-'Arab,* Ibn Manzur, mengungkapkan bahwa term *al-bayan* memiliki empat pengertian, yaitu pembeda, berbeda, jelas, dan penjelasan. Dari pengertian tersebut oleh al-Jabiri *al-bayan* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *al-bayan* sebagai *manhaj* (metodologi) dan *ru'yah* (visi-pandangan dunia). *Bayani* secara etimologis berarti *al-*

wasl (kesinambungan); *al-fasl* (keterpisahan); *az-zuhur-al-wuduh* (jelas-terang), secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh yang terbuka (al-Jabiri, 2001a, p. 8; Arif, 2002). Secara langsung berarti dalam menentukan kebenaran maka teks tidak perlu ditafsirkan namun langsung diterapkan. Adapun secara tidak langsung maka teks perlu ditafsirkan dengan teks dan bukan rasio (al-Jabiri, 2001a, p. 251). Dengan demikian, penggunaan rasio tidak memiliki kekuatan yang signifikan pada nalar *bayani*. Dalam perspektif keagamaan, metode ini merupakan aspek syariat.

Latar belakang *bayani* dalam tradisi Arab-Islam berawal dari kebutuhan untuk menyingkap maksud dari teks Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu Arab. Intelektual melakukan pemaknaan Al-Qur'an dan bahasa Arab Al-Qur'an dengan "senantiasa mengikuti warisan kebahasaan klasik atau apa yang disebut dengan metode orang Badui". Pandangan orang Badui yang kental terhadap alam dan bersifat inderawi (al-Jabiri, 2014, p. 139) dan menjadi rujukan intelektual Arab dalam memaknai Al-Qur'an menjadi sebab awal nalar Arab bersifat tekstual *(bayani)*. Dari sini kemudian lahir ilmu-ilmu bahasa sehingga kemudian pendekatan *bayani* dominan dengan pendekatan linguistik. Ilmu *balaghah* dengan *tasybih, majaz,* dan *isti'arah*-nya, yang meliputi adanya *ashl* dan *far',* yang digunakan pada syair Arab dan juga Al-Qur'an, serta yang tumbuh dalam lingkungan syair Arab,

selanjutnya mengimitasi lahirnya penetapan hukum dalam Islam (aturan syari'at, *fiqh)* dengan menggunakan metode *qiyas* (al-Jabiri, 2014, p. 195) atau dalam istilah mutakallimin *istidlal bi al-syahid 'ala al-ghaib* (penalaran analog antara dunia inderawi dengan dunia transenden). Pada titik tersebut terdapat kaidah, asas, atau prinsip dasar epistemologis yang dikatakan al-Jabiri sebagai satu-satunya sistem epistemologi yang mendasari produk teoritis dalam ilmu-ilmu Arab Islam (al-Jabiri, 2014, p. 196). Akibatnya, pendekatan *bayani* dominan dengan pendekatan linguistik, sedangkan metode yang digunakan adalah metode *qiyas, istinbath,* atau *istidlal* dan sumber pengetahuan bermuara pada teks *(nash)*. Jika dikaitkan dengan *ushul fiqh, nash* tersebut merupakan Al-Qur'an dan hadis, sehingga menurut al-Jabiri epistemologi *bayani* menaruh perhatian besar terhadap proses transmisi teks dari generasi ke generasi (al-Jabiri, 2001a, p. 116). Adapun produksi wacana terkait tradisi *bayani*, terjadi seiring munculnya faksi-faksi politik dan aliran teologis terutama setelah peristiwa "majelis tahkim", terkait perdebatan dan wacana teologis yang kemudian menjadi instrumen menebarkan pengaruh kepada yang lain (Faisol, 2010).

Selain itu, penyebaran model nalar *bayani* menurut al-Jabiri juga dipengaruhi oleh tokoh kunci yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. As-Syafi'i dengan sumber ketetapan hukumnya (Al-Qur'an, sunah, *qiyas*, dan *ijma'*) yang banyak

diikuti kebanyakan orang Arab-Islam, semakin meluaskan epistemologi *bayani* pada bangsa Arab (al-Jabiri, 2001a, p. 23). Dengan demikian secara sosio-historis, perkembangan nalar *bayani* selanjutnya menjadi salah satu struktur nalar Arab yang menguasai gerak budaya bangsa Arab-Islam, yang didasarkan pada keyakinan keagamaan yang dibangun berdasarkan empat asas tersebut. Ketetapan hukum sebagaimana tersebut secara jelas menunjukkan bahwa nalar *bayani* berkaitan dengan teks dan realitas. Dalam artian bahwa pemaknaan *nash* dalam menghadapi realitas sangat tekstual dengan pemaknaan: *pertama,* konsep *lafadz*-makna. *Lafadz* secara teoritis berarti terkait dengan aspek kebahasaan dan ilmu bahasa menjadi bagian untuk menjaga makna suatu kata dari teks *(nash)*. Adapun secara praksis, penafsiran teks terkait perintah *syara'*. *Kedua,* konsep *ashl* dan *far'*. *Ashl* dalam konteks *syara'* adalah *nash* (teks) untuk mencari ketetapan hukum dan ketika tidak ditemukan pada *nash* maka selanjutnya berpijak pada *riwayah* sebagai *far',* yang juga teks. *Ketiga, al-Jauhar* (substansi) dan *al-'Ard* (aksidensi). Masalah terkait persoalan perdebatan dengan premis-premis Aristoteles yang dilakukan oleh kalangan *mutakallimin*, hanya sebagai alat bantu dan bukan untuk menemukan pengetahuan baru sebagaimana yang dilakukan filosof Yunani. Dengan demikian, bangunan logika Aristoteles hanya untuk memperjelas teks dan bisa dikatakan bahwa akal mengikuti teks meskipun

melakukan penalaran (logika) (al-Jabiri, 2001a, p. 108). Dari ketiga hal di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi dan *turats* Arab, epistemologinya lebih pada *bayani,* karena nalar menjadikan *nash* sebagai sumber pengetahuan.

Nalar *bayani* tersebut menurut al-Jabiri membawa konsekuensi timbulnya tiga otoritas *(sulthah)*, yaitu*:* 1) Otoritas teks *(sulthah al-lafdz*-kekuatan kata, kosakata*)* dalam berbagai bentuk dan kedudukannya, nalar Arab terlalu berkutat pada kata-kosa kata; 2) Otoritas asal/pokok *(sulthah al-ashl*-kekuatan asal) baik sebagai pengetahuan, melalui kekuatan *salaf* dengan berbagai riwayat dan ijma'-nya, maupun sebagai *mitsal al-sabiq* (misal atau perumpamaan yang sudah ada). Otoritas ini termanifestasikan dalam sistem transmisi, konsensus, otoritas imam, dan otoritas analogis; dan 3) Otoritas keserbabolehan *(sulthah at-Tajwiz);* semaunya. Otoritas yang ketiganya menjadikan nalar Arab tidak realistis selama berabad-abad. Otoritas yang menjadikan bangsa Arab hanya 'berkutat' pada kata daripada berbicara tentang konsep karena ketiadaan hukum kausalitas dan hanya tergantung pada rujukan dari sejarah masa silam.

Turats, sebagai bagian dari tradisi dan sejarah masa silam yang menjadi rujukan, menurut al-Jabiri merupakan jalan keluar untuk ditinjau ulang secara kritis. Bukan untuk diagungkan, namun digali potensinya sebagaimana yang telah ada pada peradaban

Maghrib, Andalusia dengan tokoh intelektualnya seperti Ibn Hazm, Ibn Rusyd, dan sebagainya yang berinteraksi dengan *turats* sesuai dengan konteks masa saat itu (al-Jabiri, 2001a).

2) Nalar Irfani *(Gnostik)*

'Irfani dari kata dasar *'arafa* semakna dengan *makrifat,* yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman dan ini berbeda dengan ilmu yang diperoleh melalui rasionalitas. *Irfan* secara etimologis diartikan sebagai pengungkapan pengetahuan yang diperoleh melalui penyinaran hakikat Tuhan kepada hamba-Nya *(kasyaf)*. Jika nalar *bayani* bersifat tersurat maka nalar *irfani* bersifat tersirat. Al-Jabiri membagi *irfani* menjadi dua kategori, yaitu sebagai sikap hidup dan sebagai teori. Sebagai sikap hidup, *irfani* merupakan pandangan hidup seseorang terhadap dunia yang cenderung memprioritaskan diri individu dengan menyerah pada hukum positif manusia dan lari dari realitas dunia menuju *al-'aql al-mustaqil* (akal yang bebas). Sikap yang disebut al-Jabiri sebagai ideologi *ukhrawi* (al-Jabiri, 2001a, p. 251; Ro'uf, 2018, p. 106).

Akidah yang disebarkan oleh Al-Qur'an merupakan akidah tauhid yang menggantikan keyakinan-keyakinan kuno di seluruh jazirah Arab. Dengan epistemologi *bayani* yang dipakai masyarakat Arab kuno, Islam bisa menggeser keyakinan-keyakinan pagan tersebut. Keyakinan pagan dengan

mistisisme dan penyembahan yang tidak rasionalistis selanjutnya mengalami rasionalisasi keyakinan (agama) melalui Islam dan Al-Qur'an. Rasionalitas agama dengan *bayan* Arab digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip tentang Allah melalui *istidlal,* penafian sekutu Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam, serta pernyataan tentang kenabian. Adapun irrasionalitas terhadap rasionalitas agama berarti dihadapkan pada hal yang berlawanan dengan ketiganya. Justifikasi untuk memasukkan ketiganya pada kategori irrasional yang rasional (sepertinya irrasional namun sejatinya rasional) tersebut sebagai penegasan akan kelemahan akal manusia yang untuk mengetahuinya dengan perenungan terhadap alam, yang harus terhubung dengan hakekat tertinggi, yaitu Allah. Hal ini yang mendasari nalar Arab-Islam dan menempatkan nalar *irfani* sebagai epistemologi Arab (al-Jabiri, 2014, p. 241).

Kalangan dengan nalar *irfani* ini oleh al-Jabiri dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, pemikiran yang melebihkan sikap *irfani* karena untuk pertahanan diri seperti para sufi; *Kedua, irfaniyyun* yang mengembangkan tasawuf falsafi seperti Ibn Sina dengan teori filsafat Timurnya dan Ibn 'Arabi dengan konsep kebahagiaannya; dan *Ketiga, irfaniyyun* yang mengedepankan dimensi mistis seperti kalangan filosof Ismailiyah dan kalangan *mutasawifah batiniyyah* (al-Jabiri, 2001a, p. 269). Pola pikir kalangan ini berangkat dari

yang batin menuju *dzahir,* dari makna menuju *lafadz,* sehingga sumber pengetahuannya adalah batin karena dianggap sebagai hakekat, sedangkan yang *dzahir* (teks) merupakan penyinaran dari yang batin (al-Jabiri, 2001a, p. 271).

Pengungkapan makna batin menurut al-Jabiri ada dua cara, yaitu: 1) Menggunakan *i'tibar* atau *qiyas irfani*, yaitu menganalogikan makna batin yang ditangkap dalam *kasyf* pada makna *dzahir* yang terdapat pada teks. Sebagai contoh dapat dilihat pada terjemah Q.S. ar-Rahman: 19-22, yang mana Ali dan Fatimah dinisbatkan pada *al-bahrain,* Nabi Muhammad dinisbatkan pada *barzah* (batas), sedangkan Hasan dan Husein dengan *lu'lu'u wa al-marjan.* Tafsir demikian secara tidak langsung menunjukkan bahwa terjadi perbedaan antara kalangan Sunni dan Syi'ah. Yaitu Sunni yang memaknai secara *bayani*, sedangkan Syiah secara *irfani*. Jika dikaitkan dengan aspek politik, hal demikian menurut suatu pendapat dikarenakan adanya konflik Arab yang dominan *bayani* dan Persi yang dominan *irfani* atau konflik Sunni-Syi'ah. *Ta'wil* demikian menurut al-Jabiri sarat dengan motif politis yang mana Syi'ah mencari justifikasi teologis bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dengan Fatimah bin Muhammad yang berhak menjadi pewaris kekhalifahan Muhammad sebagaimana ayat tersebut (al-Jabiri, 2001a, p. 281; Ro'uf, 2018, p. 112). 2) Pengetahuan *kasyf* diungkap melalui *syataha* yang mana pengungkapannya berbeda dengan *qiyas*

irfani karena tanpa aturan. Hal tersebut bisa dilihat pada apa yang dilakukan Abu Yazid al-Busthami dengan "Maha Besar Aku" atau al-Hallaj dengan "*Ana al-Haqq*". Ungkapan yang keluar ketika mengalami *syatahat* dan ini berbeda dengan metode *ta'wil* milik *bayani* yang tekstual. Hal ini berarti pada *bayani* sangat ketat berpegang pada normatifitas bahasa Arab, sedangkan *irfani* "keluar" dari batas-batas bahasa (al-Jabiri, 2001a). Nalar *bayani* menjadikan terbelenggu pada teks, sehingga tidak sesuai konteks dan realita serta nalar *irfani* yang menghanyutkan pikiran pada alam imajinasi. Jika keduanya mendominasi, maka Arab tidak mampu menerima modernitas dan kemajuan. Sehingga diperlukan nalar baru untuk pembaruan bagi tradisi Arab sudah semakin mendesak jika melihat kenyataan (nalar) di atas.

3) Nalar *Burhani (Rasional)*

Al-Jabiri mendefinisikan *al-burhan* dengan *al-hujjah al-fasilah al-bayaniyyah,* suatu argumentasi yang jelas dan terang. Istilah tersebut menunjukkan pada penggunaan metode berpikir berdasarkan pada pandangan dunia tertentu yang sumbernya berasal dari kalangan intelektual, yaitu meliputi indera, eksperimen, dan aturan logika, sehingga bisa dikatakan bahwa nalar *burhani* berkenaan dengan penggunaan akal, rasio, atau logika berpikir. Pengertian lain terkait *burhani,* yaitu suatu aktifitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi

melalui pendekatan deduktif, dengan mengaitkan antara proposisi yang satu dengan yang lain, yang sudah terbukti kebenarannya secara aksiomatik. Nalar *burhani* secara historis tidak terlepas dari pengaruh logika Aristoteles yang merasuk dalam pemikiran Islam melalui para filsuf Islam. Pada proses masuknya nalar ini ke dalam budaya Arab, menghadapi tantangan berat karena struktur pemikiran Arab yang sudah ada sebelumnya mengakar sangat kuat (al-Jabiri, 2001a, p. 383).

Metode *qiyas* yang terdapat dalam nalar *irfani* dan terutama nalar *bayani,* juga terdapat dalam nalar *burhani*. Meskipun demikian ada perbedaan mendasar, *qiyas* dalam nalar *burhani* bukan dalam konteks teks sebagaimana pada nalar *bayani,* melainkan terkait dengan rasio dan eksperimen dengan berbagai tahapannya. Tahapan tersebut meliputi: 1) *ma'qulat* (pengertian); 2) *ibarat* (pernyataan); dan 3) *tahlilat* (penalaran). Nalar *burhani* ini menurut al-Jabiri akarnya dapat ditelusur dari Aristoteles sampai pada Ibn Rusyd dan al-Jabiri memberi penguatan dengan mengelaborasi kerangka pemikiran as-Syatibi (Ro'uf, 2018, p. 120). Syafi'i yang memperkenalkan *qiyas* dan *ijma',* maka as-Syatibi melangkah dari tujuan dan *maqashid syari'ah* sebagai upaya pemberian dasar-dasar rasionalitas terhadap berbagai hukum dengan berprinsip pada kemaslahatan manusia. As-Syatibi membagi *maslahat* menjadi

tiga: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsinat* (tersier). *Maqashid dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia dengan melindungi *(hifdz)*; agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). *Maqashid hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqashid tahsinat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut (al-Jabiri, 2001a, p. 179; al-Syatibi, n.d., p. 5).

Dominasi *bayani* dan *irfani* dalam kebudayaan Arab menjadikan Arab mengalami stagnasi pemikiran, sehingga menurut al-Jabiri diperlukan menggalakkan kembali logika Aristoteles. Al-Jabiri berasumsi bahwa masa *khalifah* al-Makmun merupakan embrio masa kebangkitan, karena secara historis pada masa ini rasionalitas Arab-Islam bertemu rasionalitas Yunani Aristoteles (al-Jabiri, 2001b, p. 180). Dengan kata lain, epistemologi *burhani* Arab bersinggungan dengan epistemologi *burhani* Yunani. Adalah Barat *(Maghrib)* dan Timur *(Masyriq)* merupakan pemetaan kawasan Arab yang digunakan al-Jabiri untuk pemetaan pemikiran berdasarkan kawasan. Filsafat peripetik yang digagas al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Sina dengan logika menurun, sebagai representasi perkembangan ilmu di

kawasan *Masyriq,* dibandingkan dengan filsafat peripetik yang dilakukan Ibn Rusyd yang menggunakan logika menanjak, sebagai representasi *Maghrib*. Logika menurun sebagaimana pembahasan tentang Tuhan dan manusia, dimulai dari Tuhan *(wujud)* menuju manusia *(maujud)*. Sedangkan logika menanjak sebagaimana pembahasan Ibn Rusyd dimulai dari alam *(maujud)* menuju Tuhan *(wujud),* yaitu merenungi segala yang ada *(maujud)* sehingga pengetahuan tentang *maujud* tersebut mengantarkan pada pengetahuan tentang *wujud* (Wijaya, 2009, p. 93) Selain itu, menurut al-Jabiri, nalar *burhani* di wilayah *Masyriq* masih tercampur dengan nalar *irfani* dan ini berbeda dengan yang terjadi di *Maghrib.* Untuk itu, menurut al-Jabiri, *Maghrib* abad pertengahan dengan pusatnya, Cordova Spanyol, sebagai jalan keluar untuk dijadikan rujukan bagi kebangkitan Arab masa kini dan ke depan. Hal ini dikarenakan *Maghrib* pada masa tersebut telah melahirkan filsuf besar seperti Ibn Rusyd, yang mana pendekatan rasionalis Ibn Rusyd menurut al-Jabiri lebih menggunakan pendekatan matematis dan logis dalam mempertimbangkan permasalahan polemik para teolog dan fuqaha dengan penalaran analogi (*qiyas*) mereka terhindarkan (Saeed, 2004, p. 194). Ibn Bajjah, Ibn Arabi, as-Syatibi, Ibn Khaldun, dan lain-lain, para tokoh tersebut yang kemudian membangun tradisi nalar kritis *burhani,* epistemologi *burhani,* di

kawasan Maghrib sehingga menjadikan Islam berjaya.

c. Nalar Politik Arab

Al-'Aql Siyasi al-Arabi, buku ketiga dari tetralogi *naqd al-'Arab,* menjelaskan prosedur pelaksanaan (praktek) pemerintahan. Pada buku pertama-kedua (*Takwin* dan *Bunyah)* al-Jabiri menekankan nalar abstrak dan sistem berpikir -nalar- Arab untuk rekonstruksi atas rasionalitas kebudayaan Arab. Adapun pada *al-'Aql as-Siyasi* menekankan nalar politik dengan menekankan pada kultur demokrasi dan meninggalkan kultur politik model klasik-tradisional (al-Jabiri, 2000, p. ii).

Secara garis besar, *al-'Aql as-Siyasi* memuat tentang sejarah nalar politik dalam kebudayaan Arab yang oleh al-Jabiri dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase dakwah, fase *riddah*, dan fase fitnah. Fase dakwah fokus pembahasannya tentang dimensi politik dari dakwah Nabi Saw. Pada fase *riddah* dipaparkan mengenai pengadilan terhadap para pelaku *riddah* serta upaya memperkuat kembali dasar-dasar pemerintahan pasca wafat Nabi. Selain itu, juga dipaparkan tentang konflik internal bangsa Arab yang sifatnya politis. Pada fase fitnah, diungkapkan tentang persoalan baru yang tidak terdapat pada fase sebelumnya sebagaimana tentang pemerintahan Usman bin Affan pada tahun-tahun terakhir serta kemenangan Mu'awiyah memperoleh tampuk kepemimpinan setelah pertikaian dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Masa setelah ini merupakan persoalan politis baru dalam dunia Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya yang

dikenal dengan periode *kalam* (al-Jabiri, 1991a, p. 364) .

Pembabakan (fase) nalar politik di atas dibuat al-Jabiri sebagaimana perspektif Hegel dalam membagi fenomenologi akal (kesadaran manusia) yang meliputi fase kesadaran subyektif, obyektif, dan mutlak. Al-Jabiri juga membagi tiga fase pembabakan: *pertama,* dakwah dimulai turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad merupakan fase kesadaran subyektif dengan munculnya kesadaran akan ego keislaman. *Kedua,* berdirinya masyarakat Islam yang berdaulat ditandai dengan pidato Abu Bakar setelah terpilih menjadi khalifah merupakan fase kesadaran obyektif. *Ketiga,* fase kesadaran mutlak yaitu dimulainya peletakan dasar politik Islam untuk eksistensi Islam ditandai pidato Abû Ja'far al-Manshûr. Adapun nalar politik yang berkembang setelah tiga masa tersebut menurut al-Jabiri hanya merupakan pengulangan dari fase sebelumnya meskipun terdapat perbedaan namun tidak signifikan dikarenakan dominasi tiga hal yang tidak -juga- berubah, yaitu *qabilah, ghanimah,* dan *aqidah. Qabîlah* merupakan representasi dari nalar politik yang nepotis dan sektarian, *ghanîmah* adalah manifestasi dari sistem keuangan negara yang tidak sehat (karena cenderung konsumtif), sedangkan *'aqîdah* adalah representasi dari paham ataupun ideologi politik yang doktriner. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan mengubah ketiga pola pikir itu menjadi sistem partai yang egaliter dan professional, sistem fiskal yang produktif, serta pola pikir yang rasional dan objektif (Aziz, 2015).

2. *Contribution of Knowledge* Muhammad 'Abid al-Jabiri

Terlepas dari segala kritik yang ditimpakan pada (karya) al-Jabiri, namun al-Jabiri secara nyata memberi 'warna baru' dalam khazanah filsafat, tidak sekedar Barat namun tentang Timur, dengan tipologi epistemologi yang ditawarkannya, *bayani, burhani,* dan *irfani*. Model epistemologi tersebut dianggap relevan untuk memahami perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang biasanya ditinjau dengan kacamata filsafat Barat dengan rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme yang bangunan keimuannya berdasarkan pada kebudayaan Barat (Ro'uf, 2018). Model epistemologi al-Jabiri tersebut menurut Amin Abdullah berguna bagi pengembangan studi Islam di era kontemporer dengan melakukan sintesa antara ketiganya, yang disebutnya *at-Ta'wil al-'Ilm*. *At-Ta'wil al-'Ilm* sebagai model tafsir alternatif terhadap teks, dengan mendialogkan antara paradigma *bayani, burhani,* dan *irfani* dalam satu gerak putar yang tidak terpisahkan untuk saling mengontrol, mengkritisi, memperbaiki, dan menyempurnakan kekurangan masing-masing (Abdullah, 2008).

PENUTUP

Naqd al-'Aql al-'Arabi mengungkapkan berbagai kegelisahan al-Jabiri tentang keterbelakangan Arab *vis a vis* kemajuan Barat terutama dari aspek epistemologis, nalar Arab, yang masih sama sejak masa *tadwin* sampai saat ini. *Turats* yang dikodifikasi pada masa tersebut menjadikan stagnasi pemikiran bangsa Arab-Islam akibat tidak ada kritisisme, melainkan hanya romantisme dan apologisme terhadap *turats*. Hal ini menyebabkan nalar Arab

secara kontekstual tidak berubah-tidak selama ratusan tahun. Berdasarkan hal tersebut, al-Jabiri mengkaji nalar Arab dan menemukan tiga macam epistemologi dalam nalar Arab, yaitu *bayani, irfani,* dan *burhani.*

Al-Jabiri juga menemukan bahwa Arab mengalami kegagalan mentransformasi aspek epistemologinya karena masih terikat kuat pada teks yang terkodifikasi pada masa *tadwin*. Keterbelakangan Arab dalam ilmu pengetahuan dan epistemologi merupakan dampak dari masa *tadwin* yang memuncak pada abad pertengahan yang didominasi *fiqih* Syafi'i dengan kuatnya nalar *bayani*, kalam Asy'ari meskipun menggunakan logika Aristoteles namun nyatanya kembali ke teks *(bayani)*, dan tasawuf Ghazali yang dipandang memberi kekuatan lebih pada nalar *irfani.* Akibatnya pemikiran Arab dominan bercorak teks *(bayani)-irfani* dan jauh dari *burhani.* Nalar *bayani* dan *irfani* tersebut mempengaruhi peradaban Arab-Islam sehingga peradaban Arab dikenal sebagai peradaban *fiqih*. Meskipun demikian, kawasan *Maghrib* masih bisa dijadikan rujukan bagi kebangkitan Arab karena kawasan tersebut lebih dominan *burhani* dibanding kawasan *Masyriq.* Kemajuan Barat-Eropa disebabkan adanya kontribusi model epistemologi *burhani* dari kawasan *Maghrib.* Epistemologi *burhani* menjadi tawaran epistemologi yang ditekankan al-Jabiri untuk proyek kebangkitan nalar Arab-nya.

Epistemologi, nalar berpikir, menjadi fokus awal proyek rekonstruksi rasionalitas terhadap kebudayaan Arab. Pada aspek politik, al-Jabiri menguraikan nalar politik Arab sebagai proyek untuk menyebarluaskan pentingnya kultur demokrasi dan bukan kultur politik model klasik-tradisional. Nalar politik dipaparkan al-Jabiri dalam tiga fase, yaitu fase

dakwah, fase *riddah*, dan fase fitnah. Sedangkan setelah itu, menurut al-Jabiri, hanya merupakan pengulangan dari fase sebelumnya. Meskipun terdapat perbedaan, namun tidak signifikan dikarenakan dominasi tiga hal yang tidak -juga- berubah, yaitu *qabilah, ghanimah,* dan *aqidah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (2008). al-Ta'wil al-'Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *39*(2), 124–156.

al-Jabiri, M. A. (1991a). *al-'Aql al-Siyâsî al-'Arabî: Muhaddidâtuh wa Tajalliyâtuh* (2nd ed., Vol. 2). al-Markaz al-Tsaqafy al-Arabiy.

al-Jabiri, M. A. (1991b). *Al-Turâts wa Al-Hadâtsah* (1st ed., Vol. 1). Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyah.

al-Jabiri, M. A. (2000). *Post-Tradisionalisme Islam* (A. Baso, Trans.). IRCiSoD.

al-Jabiri, M. A. (2001a). *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Naqdhiyyah Linnidzomi al-Ma'rifah Fi ats-Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyah.

al-Jabiri, M. A. (2001b). *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyah.

al-Jabiri, M. A. (2003). *Kritik Kontemporer atas Filsfat Arab-Islam* (M. N. Ichwan, Trans.). Penerbit Islamika.

al-Jabiri, M. A. (2014). *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Dan Wacana Agama* (I. Khoiri, Trans.). IRCiSoD.

al-Syatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Vol. 2). Mustafa Muhammad.

Arif, M. (2002). Pertautan Epistemologi Bayani dan Pendidikan Islam Masa Keemasan. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *40*(1), 126–154. https://doi.org/10.14421/ajis.2002.11.126-154

Aziz, J. A. (2015). Pemikiran Politik Islam Muhammad 'Abid Al-Jabiri: Telaah terhadap Buku al-'Aql al-Siyâsi al-'Arabî: Muhaddidâtuh wa Tajalliyâtuh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *39*(1), 110–127. https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.42

Faisol, M. (2010). Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri. *TSAQAFAH : Jurnal Peradaban Islam*, *6*(2), 335–359. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.124

Ro'uf, A. M. (2018). *Kritik Nalar Arab Muhammad Abid al-Jabiri*. LKiS.

Saeed, A. (2004). *Pemikiran Islam*. Baitul Hikmah.

Wijaya, A. (2009). *Teori Interpretasi Al-Qur'an Ibnu Rusyd:Kritik Ideologis-Hermeneutis*. LKiS. http://repository.iainponorogo.ac.id/156/

PONDOK PESANTREN MAHASISWI

Al-Hidayah

SLEMAN – YOGYAKARTA

https://ppalhidayah.org

DIREKTORAT PENDIDIKAN & PEMBINAAN AGAMA ISLAM

UNISIA radio media umat

Sharing KEISLAMAN

Tema:

Strategi Menjadi Insan Ulil Albab di Era Digital

Jum'at
31
Oktober
2025

Pukul 10.00-11.00 WIB

Bersama

Dr. Dra. Sri Haningsih, M.Ag.

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam FIAI
Universitas Islam Indonesia

ON AIR
Radio UNISIA
AM 1179 KHZ

LIVE
DPPAI UII

Live streaming melalui channel atau website radio UNISIA dengan scan QR code
radiounisia.com

dppai@uii.ac.id @dppai.uii DPPAI UII dppai.uii.ac.id

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Pendidikan Islam sudah semestinya adaptif dan responsif terhadap perkembangan wacana dan perubahan cara hidup masa kini. Karena hakikat pendidikan adalah media transformasi individu maupun masyarakat secara kolektif. Pengelolaan pendidikan Islam yang berhasil keluar dari status quo akan berdampak pada penguasan kompetensi pembelajarnya.

Saat ini, wacana yang masif dibincangkan dan diterapkan dalam praktik pendidikan Islam cenderung bermuara pada pengembangan perspektif dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa isu kemerdekaan belajar dan gegap gempitanya pembelajaran dalam jaringan (daring) menjadi titik tolak progresivitas cara pandang. Di sisi lain, manusia, pada umumnya, dan masyarakat pendidikan Islam, pada khususnya, juga dihadapkan pada gaya hidup yang serba dinamis. Oleh karenanya, relevan jika proses refleksi kritis atas pengalaman praktik pendidikan Islam yang sudah lampau dan imajinasi terhadap pengembangannya terus menjadi perhatian.

Buku ini hadir dalam rangka menyusun ikhtiar sederhana dengan mengurai pemikiran, konsep, dan pengalaman baik, yang selanjutnya dikontekstualisasikan untuk pengembangan pendidikan Islam. Ragam perspektif dielaborasikan sesuai dengan fokus kajian disiplin bidang ilmu masing-masing penulis. Setidaknya, karya ilmiah ini menjadi wujud eksistensi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dalam memberikan perhatian yang mendalam atas dialektika dan isu aktual yang berkembang di dalam masyarakat global.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
www.indonesiaimaji.com
indonesiaimaji indonesiaimaji

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-623-88022-3-4
9 786238 802234